



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017-2022**

MENUNGBING



TAHUN ANGGARAN 2017



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
10. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun.
17. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

18. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Sasaran pokok adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian arah kebijakan pembangunan pada setiap tahapan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
23. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur untuk pencapaian kinerja suatu sasaran dalam bentuk dampak (*impact*).
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana struktur tata ruang provinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rincian Visi, Misi, tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program pembangunan selama kurun waktu 2017-2022.
- b. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di Provinsi.
- c. Dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pasal 4

RPJMD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
- e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. BAB IX Penutup

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan;
- c. evaluasi terhadap hasil.

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW Provinsi, serta memperhatikan RTRW provinsi lainnya.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD Provinsi.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dalam hal RPJMD Tahun 2017-2022 telah berakhir dan RPJMD Tahun 2022-2027 belum ditetapkan maka penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 November 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

IRZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SETDA
YAN MECAWANDI

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor
10 Seri E
Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14/292/2017

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan RidhoNya jumlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus ditetapkan melalui Perda paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik.

Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, aspiratif, atas bawah dan bawah atas melalui uji publik, Musrenbang, pembahasan dengan OPD dan DPRD; disamping penyelarasan internal antar bab serta eksternal dengan RPJMN, RPJPD dan RPJMD Provinsi Tetangga, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Dengan demikian RPJMD 2017-2022 ini telah disusun secara komprehensif, terstruktur dan sistematis, tematik, holistik, integratif dan spasial sehingga dapat digunakan menjadi dokumen perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun demikian dalam perjalanannya nanti, apabila ada ketidaktepatan, disertai antisipasi perubahan perkembangan keadaan yang terjadi, maka RPJMD ini dapat direvisi dengan tetap mempedomani aturan yang berlaku.

Kepada Tim Penyusun RPJMD dan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan RPJMD ini, sampai ditetapkan menjadi Perda bersama DPRD, pada kesempatan ini kami sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya.

Demikian, semoga RPJMD ini dapat dipedomani, dan menjadi rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung, dan menjadi Provinsi yang maju, unggul dalam inovasi agropolitan dan bahari melalui pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi.

Pangkalpinang, 10 November 2017

Gubernur

Kepulauan Bangka Belitung

Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017- 2022	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-3
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-4
1.5. Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.5.1. Maksud.....	I-5
1.5.2. Tujuan.....	I-6
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1. Letak dan Kondisi Geografis.....	II-1
2.1.2. Luas dan Daerah Administratif.....	II-3
2.1.3. Penduduk.....	II-5
2.1.4. Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi.....	II-7
2.1.5. Iklim.....	II-9
2.1.6. Kondisi Lahan.....	II-9
2.1.7. Potensi Ekonomi Wilayah.....	II-10
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana.....	II-17
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-19
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi.....	II-19
2.2.2. Kesejahteraan Sosial.....	II-34
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-60
2.3.1. Pelayanan Urusan Wajib.....	II-60
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-99
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-106
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-106
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-109
2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-120

BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016.....	III-1
	3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	III-2
	3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah.....	III-2
	3.1.1.2. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah.....	III-12
	3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah.....	III-20
	3.1.2. Neraca Daerah.....	III-22
	3.1.2.1. Pertumbuhan Neraca Daerah.....	III-22
	3.1.2.2. Rasio Neraca.....	III-28
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016.....	III-29
	3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-29
	3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah.....	III-29
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
	4.1. Permasalahan Pembangunan.....	Iv-1
	4.2. Isu Strategis.....	Iv-10
	4.3. Kajian Lingkungan Hidup	IV-12
BAB V	VISI,MISI,TUJUAN,DANSASARAN.....	V-1
	5.1. Visi.....	V-4
	5.2. Misi	V-4
	5.3. Tujuan dan Sasaran	V-6
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	V-1
	6.1. Prioritas RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Tahap Ketiga).....	VI-1
	6.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	VI-3
	6.3. Unggulan Pembangunan Daerah.....	VI-13
	6.4. Tema Prioritas Pembangunan Daerah	VI-17
	6.5. Program Pembangunan Daerah.....	VI-43
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
	7.1. Kerangka Pendanaan.....	VII-1
	7.1.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.....	VII-3
	7.1.2. Proyeksi Data Masa Lalu.....	VII-9
	7.1.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	VII-11
	7.1.4. Proyeksi Data Masa Lalu.....	VII-9

7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas.....	VII-23
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VIII-1
8.1.	Penetapan Indikator Kinerja	VIII-1
BAB IX	PENUTUP.....	IX-1
9.1.	Pedoman Transisi.....	IX-1
9.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	IX-1

DAFTAR TABEL

TabelII.1	Luas Wilayah Laut Administrasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-3
TabelII.2	Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten/Kota dan Kecamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016	II-4
TabelII.3	Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten/Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	II-4
TabelII.4	Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten/Kota dan Kelurahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	II-4
TabelII.5	Proyeksi Penduduk per Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	II-5
TabelII.6	Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016....	II-6
TabelII.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten Kota Tahun 2012-2016.....	II-6
TabelII.8	Kondisi Iklim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-9
TabelII.9	Jenis Luas Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2016.....	II-10
TabelII.10	Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014.....	II-18
TabelII.11	Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang Terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014.....	II-18
TabelII.12	Perkembangan PDRB Tahun 2012-2016 Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar).....	II-20
TabelII.13	Perkembangan PDRB Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) Tahun 2012-2016Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)	II-22
TabelII.14	Perkembangan PDRB Atas Dasar harga Konstan(ADHK) Tahun 2012-2016Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)	II-22
TabelII.15	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2016 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen).....	II-24
TabelII.16	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2016 Atas Dasar Harga KonstanProvinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen).....	II-25
TabelII.17	Perkembangan PDRB kabupaten/Kota tahun 2012 s.d 2016 Atas harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar).....	II-26

TabelII.18	Perkembangan PDRB kabupaten/Kota tahun 2011 s.d 2016 kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar).....	II-27
TabelII.19	Laju Inflasi Tahun 2012 s.d 2016 Kota Pangkalpinang menurut Kelompok Pengeluaran.....	II-30
TabelII.20	Laju Inflasi Tanjung Pandan menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014 s.d 2016.....	II-30
TabelII.21	PerkembanganAngkaMelekHurufUsia 15+ Menurut Kabupaten Kota, ProvinsiKepulauan Bangka BelitungTahun 2011 s.d 2016.....	II-35
TabelII.22	Rata-rata Lama Sekolahtahun 2012 s.d 2016 ProvinsiKepulauan Bangka Belitung (tahun).....	II-36
TabelII.23	AngkaPutusSekolahKabupaten/Kota tahun 2012-2016.....	II-39
TabelII.24	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-41
TabelII.25	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014/2015 Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-42
TabelII.26	Perkembangan APM Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-44
TabelII.27	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015 Menurut Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-45
TabelII.28	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013-2016.....	II-47
TabelII.29	Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	II-48
TabelII.30	Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-48
TabelII.30a	PerkembanganPersentase Balita dengan Gizi Buruk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-49
TabelII.31	Jumlah Kasus HIV/AIDS/IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Menurut kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.	II-50
TabelII.32	Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d 2016.....	II-50
TabelII.33	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d 2016.....	II-51
TabelII.34	Data Kemiskinan Menurut kabupaten/Kota (persen) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d 2016.....	II-51
TabelII.35	Data Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (Ribuan Jiwa).....	II-52
TabelII.36	Persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera Tahun 2012-2016.	II-52

TabelII.37	Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-54
TabelII.38	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d 2016.....	II-54
TabelII.39	Penduduk 15 Tahun ke Atas Tahun 2012 s.d 2016 menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung....	II-55
TabelII.40	Jumlah Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja Lapangan Usaha Non Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.....	II-56
TabelII.41	Jumlah Tenaga Kerja Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha Non Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.....	II-57
TabelII.42	Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2016.....	II-58
TabelII.43	Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-59
TabelII.44	Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-59
TabelII.45	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-60
TabelII.46	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-60
TabelII.48	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-62
TabelII.49	Ketersediaan Sekolah dan penduduk usia Sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-64
TabelII.50	Ketersediaan Sekolah dan penduduk usia Sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-65
TabelII.51	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-66
TabelII.52	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-66
TabelII.53	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-67
TabelII.54	Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-67
TabelII.55	Perkembangan Prevelensi HIV (Persentase Kasus Penduduk Berisiko) Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-68

TabelII.56	Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-69
TabelII.57	Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-70
TabelII.58	Perkembangan Jumlah Dokter Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-70
TabelII.59	Analisis Total Kelas Tingkat Lahan Kritis Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-71
TabelII.60	Gambaran Pencapaian kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang Tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-73
TabelII.61	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Km), 2016.....	II-74
TabelII.62	Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksi dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Km), 2016.....	II-74
TabelII.63	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-75
TabelII.64	Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa Tahun 2011- s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-75
TabelII.65	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-76
TabelII.66	Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2011s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-77
TabelII.67	Perkembangan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut pendidikan tertinggi Tahun 2011s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-77
TabelII.68	Data Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-79
TabelII.69	Data TPAK Tahun 2011 s.d 2016 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-79
TabelII.70	Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2011 s.d 2016 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-80
TabelII.71	Data Tingkat Pengangguran Tahun 2011 s.d 2016 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-81
TabelII.72	Data Pengangguran Tahun 2011 s.d 2016 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-81
TabelII.73	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-82
TabelII.74	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-82

Tabel II.75	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-83
Tabel II.76	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-84
Tabel II.77	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-85
TabelII.78	Data Ketersediaan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2016.....	II-86
TabelII.79	Pengelompokan Pangan Berdasarkan Pola Pangan Harapan.....	II-87
TabelII.80	Direktori Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2016	II-87
TabelII.81	Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2016	II-88
TabelII.82	Data Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012- 2016	II-89
TabelII.83	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-90
TabelII.84	Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2010 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-90
TabelII.85	Perkembangan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-91
TabelII.86	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-92
TabelII.87	Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-92
TabelII.88	Rasio Akseptor KB Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-93
Tabel II.89	Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-95
Tabel II.90	Jumlah Terminal Bus, Terminal Udara dan Pelabuhan Laut Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-96
Tabel II.91	Jumlah ijin trayek Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-96
Tabel II.92	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-97
Tabel II.93	Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-97
Tabel II.94	Jumlah Investasi dan Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-98
Tabel II.95	Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-98

Tabel II.96	Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014.....	II-99
Tabel II.97	Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-101
Tabel II.98	Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-102
Tabel II.99	Luas Kawasan Hutan Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-103
Tabel II.100	Produksi Biji Timah (Tin Ore) dan Logam Timah (Tin Mental) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-104
Tabel II.101	Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U\$)	II-104
Tabel II.102	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-106
Tabel II.103	Angka Rata-Rata Pengeluaran per Kapita se Bulan, Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-106
Tabel II.104	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-107
Tabel II.105	Persentase Konsumsi RTN Non-Pangan Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-108
Tabel II.106	Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2014 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-108
Tabel II.107	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-109
Tabel II.108	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-109
Tabel II.109	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-110
Tabel II.110	Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-111
Tabel II.111	Infrastruktur Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-111
Tabel II.112	Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2016	II-112
Tabel II.113	Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016	II-113
Tabel II.114	Jumlah Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2016	II-114
Tabel II.115	Komponen Penghitungan IDI 2009-2016.....	II-116
Tabel II.116	Perkembangan IDI Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2014-2015	II-117

Tabel II.117	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Juta)	II-119
Tabel II.118	Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Mendukung Iklim Investasi	II-120
Tabel II.119	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-121
Tabel II.120	Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-122
Tabel III.1	Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-2
Tabel III.2	Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016.....	III-2
Tabel III.3	Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan Tahun 2012-2016.....	III-3
Tabel III.4	Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 2016 menurut jenis PAD.....	III-4
Tabel III.5	Realisasi Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-5
Tabel III.6	Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-5
Tabel III.7	Realisasi Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-6
Tabel III.8	Realisasi Lain-Lain PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-7
Tabel III.9	realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung...	III-7
Tabel III.10	Realisasi Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-8
Tabel III.11	Dana Alokasi Umum/ Penyeimbang DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-9
Tabel III.12	Realisasi Pos Dana Alokasi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-9
Tabel III.13	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	III-10
Tabel III.14	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 s/d Tahun 2016.....	III-11
Tabel III.15	Kinerja Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-13
Tabel III.16	Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-13
Tabel III.17	Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-14

Tabel III.18	Realisasi Subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016..	III-14
Tabel III.19	Realisasi Belanja Hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-15
Tabel III.20	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-16
Tabel III.21	Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2012-2016.....	III-16
Tabel III.22	Realisasi Belanja Bantuan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2012-2016.....	III-17
Tabel III.23	Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-17
Tabel III.24	Realisasi Belanja Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-18
Tabel III.25	Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-18
Tabel III.26	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-19
Tabel III.27	Realisasi Belanja Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-19
Tabel III.28	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-20
Tabel III.29	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-21
Tabel III.30	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017.....	III-21
Tabel III.31	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-22
Tabel III.32	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	III-25
Tabel III.33	Rasio Likuiditas Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-28
Tabel III.34	Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-28
Tabel III.35	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	III-29
Tabel III.36	Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-30
Tabel III.37	Komposisi Penutup Defisit Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-30

Tabel III.38	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-31
Tabel V.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	V-10
Tabel V.2	Target Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	V-13
Tabel V.3	Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	V-14
Tabel VI.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis.....	VI-18
Tabel VI.2	Arah Kebijakan Pembangunan.....	VI-23
Tabel VI.3	Program Pembangunan Daerah Yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022.....	VI-44
Tabel VII.1	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	VII-7
Tabel VII.2	Prediksi Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-9
Tabel VII.3	Prediksi PAD dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022	VII-10
Tabel VII.4	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-10
Tabel VII.5	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Lalu (SILPA) pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-11
Tabel VII.6	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-13
Tabel VII.7	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-15
Tabel VII.8	Proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-16
Tabel VII.9	Tabel Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	VII-22
Tabel VII.10	Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	VII-24
Tabel VIII.1	Target Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	VIII-2
Tabel VIII.2	Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	VIII-3
Tabel VIII.3	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	VIII-5

Tabel VIII.4	Sasaran Pokok Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022.....	VIII-16
--------------	--	---------

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Pembagian dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II.7
Grafik II.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen).....	II.21
Grafik II.3	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Wilayah Sumatera dan Indonesia Tahun 2012-2016.....	II.28
Grafik II.4	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Wilayah Sumatera dan Indonesia Tahun 2016.....	II.28
Grafik II.5	Laju Inflasi Kota Pangkalpinang, Tanjung Pndan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahunan 2012-2016.....	II.29
Grafik II.6	Perbandingan Angka Inflasi Tahun 2012-2016 Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional.....	II.31
Grafik II.7	PDRB per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II.32
Grafik II.8	Indeks Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II.33
Grafik II.9	Indeks Gini Wilayah Sumatera dan Nasional Tahun 2012-2016.....	II.33
Grafik II.10	Indeks Williamson Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.34
Grafik II.11	Rata-rata lama Sekolah tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-36
Grafik II.12	Rata-rata lama Sekolah dan Harapan lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-37
Grafik II.13	Presentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2012-2016.....	II-38
Grafik II.14	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-40
Grafik II.15	Angka Partisipasi Kasar (APK) 2014/2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-42
Grafik II.16	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2012-2016.....	II-43
Grafik II.17	Perkembangan APM tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-45
Grafik II.18	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-46
Grafik II.19	Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nasional Tahun 2016.....	II-53

Grafik II.20	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-61
Grafik II.21	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-63
Grafik II.22	Presentase Lahan Kritis Tahun 2014Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-72
Grafik II.24	Penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-78
Grafik II.25	Grafik Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-84
Grafik II.26	Grafik Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-93
Grafik II.27	Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera ITahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-94
Grafik II.29	Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandann Tahun 2015.....	II-95
Grafik II.30	Perkembangan IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2009-2015.....	II-115
Grafik II.31	Rasio lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-121

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-1
Gambar II.2	Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).....	II-2
Gambar II.3	Peta Admiistrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-2
Gambar II.4	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-4
Gambar II.5	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-17
Gambar II.6	Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-19
Gambar II.7	Ketersediaan Sekolah Tahun 2011 s.d 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-64
Gambar II.8	Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung..	II-101



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR 14 TAHUN 2017
TANGGAL 10 NOVEMBER 2017**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022**



BAB I

PENDAHULUAN



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa RPJM Daerah selain merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJM Daerah wajib disusun oleh Gubernur/Wakil Gubernur terpilih sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah setelah dibahas dengan DPRD paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik pada tanggal 12 Mei 2017. Artinya RPJMD sudah harus ditetapkan dengan Perda sebelum tanggal 12 November 2017.

RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (periode ketiga) dan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional, RPJMD juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disamping menelaah RPJMD dan RTRW Provinsi lain yang berdekatan, agar terdapat keselarasan pembangunan antar wilayah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain mempedomani RPJMN dan RPJP Daerah, juga dilakukan penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Penyusunan RPJM Daerah ini dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dari Visi, Misi dan Program Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dengan memperhatikan

kebutuhan masyarakat/pemangku kepentingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun RPJM Daerah terdiri dari pendekatan politik, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif serta pendekatan atas bawah dan bawah atas, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil dalam penyusunan RPJM Daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu meliputi:

- 1.) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 2.) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
- 3.) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5.) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 6.) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 7.) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 8.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9.) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- 10.) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

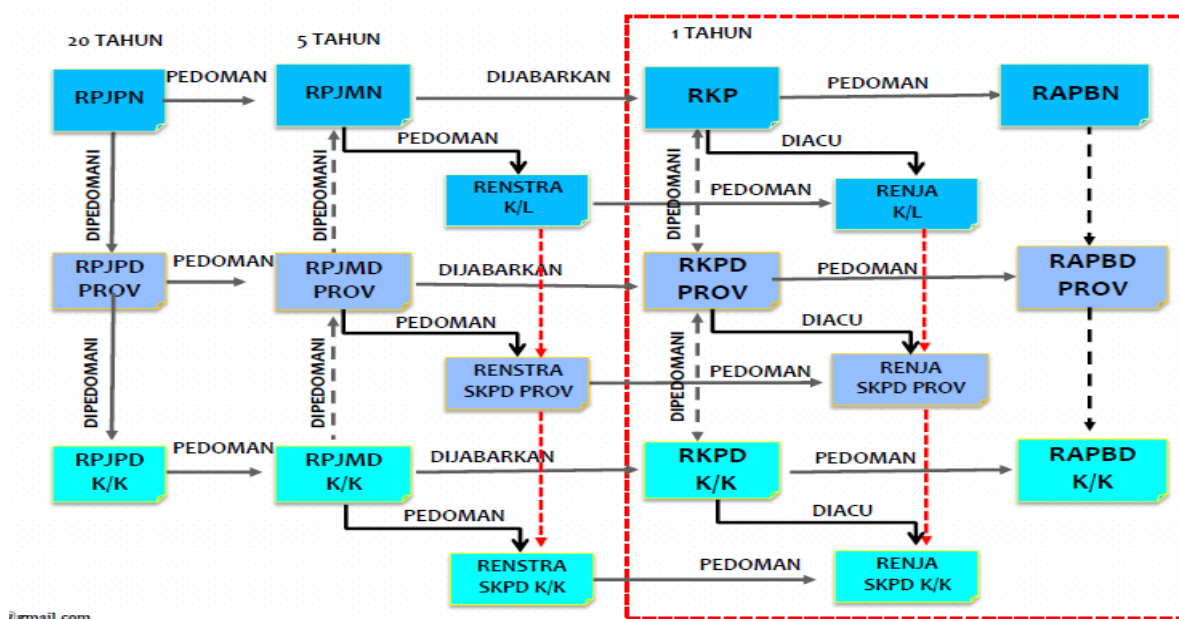
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sekaligus menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sedangkan Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan dalam menyusun Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. RKA-PD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.

RPJM Daerah kemudian dijabarkan dalam RKPD setiap tahunnya yang berisikan Renja-PD dan menjadi pedoman kepala daerah menyusun KUA serta PPAS yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan RAPBD setiap tahunnya bersama-sama dengan DPRD. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar I.1.

Gambar I.1

Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Sistematika Penulisan

RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara singkat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan dilakukannya penyusunan RPJM Daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisikan gambaran umum kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah berdasarkan kondisi capaian pada tahun 2017-2022. Bab ini juga memuat hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebelumnya.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berisikan gambaran tentang realisasi kinerja keuangan daerah sampai dengan tahun 2017, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta kerangka pendanaan 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Berisi permasalahan pembangunan daerah terkait dengan isu strategis internasional, isu strategis nasional, serta isu strategis daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Berisikan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih serta penjelasan tujuan, sasaran dan indikator pencapaiannya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berisikan berbagai strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk menguatkan pencapaian tujuan dan sasaran melalui program-program pembangunan yang ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berisi kebijakan pendanaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan, yang disusun atas dasar program dan kegiatan PD selama 5 (lima) Tahun yang selanjutnya akan diuraikan kedalam rencana strategis PD.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisikan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

BAB IX PENUTUP

Berisikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Penyusunan Dokumen RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan maksud menyiapkan dokumen pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan sekaligus menjadi arahan serta pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5.2. Tujuan

RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan tujuan:

1. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga diperoleh tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun sebagai dasar penyusunan APBD;
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar PD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha, serta dengan masyarakat dan dengan Provinsi yang berbatasan/berdekatan;
5. Memampukan Pemerintah Daerah mengukur dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan;
6. Menjaga pemerataan pembangunan yang berkelanjutan antar sektor dan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara efisien dan efektif;
7. Menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah dan perencanaan penganggaran kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Menyediakan instrumen penilaian kinerja pemerintah daerah pada setiap tahun dan akhir periode pemerintahan 5 (lima) tahunan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022**

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

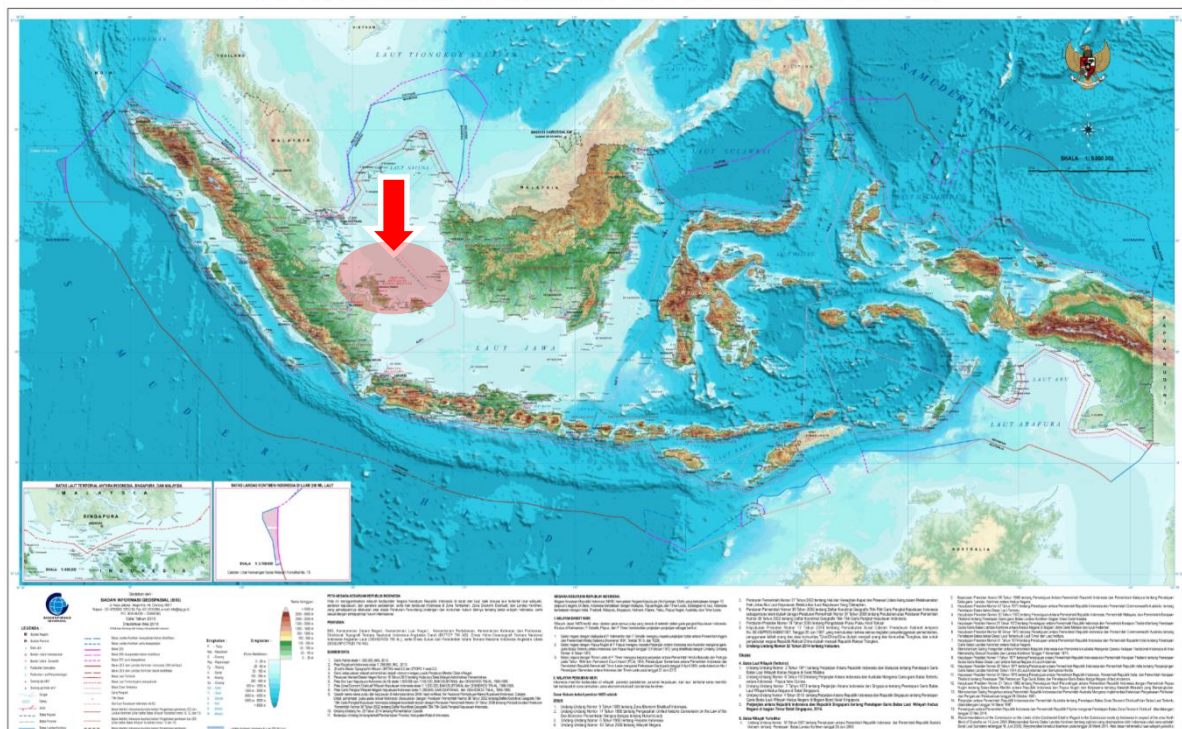
2.1.1. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara astronomis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut ini

Gambar II.1

Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2017

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada wilayah Indonesia sebelah Barat, dengan posisi geografis yang sangat strategis. Berada pada pertemuan arus Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sehingga menjadi wilayah yang kaya akan sumberdaya kelautan dan perikanan. Disamping itu dekat dan berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, seperti tergambar pada peta Alur Laut Kepulauan Indonesia pada Gambar II.2. Jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina

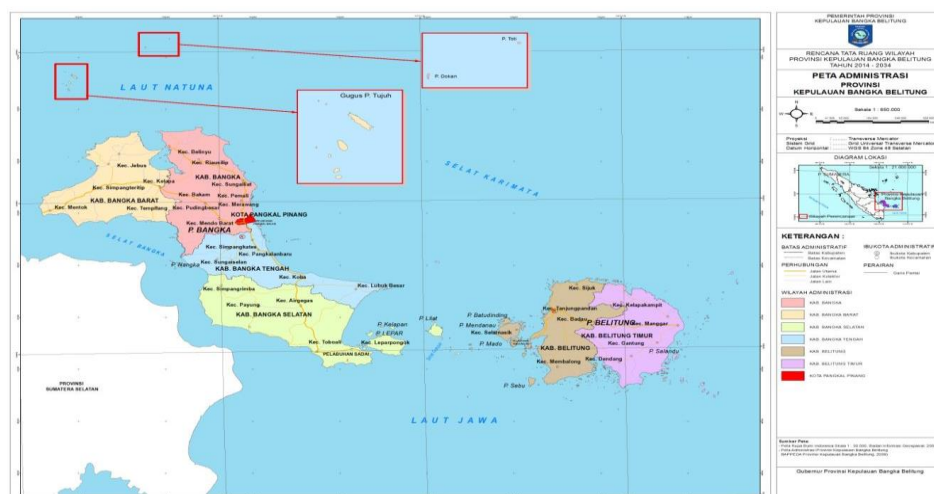
Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A), berada pada posisi silang antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan dengan Semenanjung Malaysia dan Singapura. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi berkembangnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dan dimasa-masa yang akan datang.

Gambar II.2.
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



Walaupun demikian juga terdapat potensi ancaman di ALKI I, terutama terkait apabila ada konflik klaim wilayah di Laut Cina Selatan, digunakannya wilayah ALKI I untuk kegiatan manuver angkatan perang negara yang terlibat konflik di Laut Cina Selatan. Padatnya lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, juga mempunyai potensi kerawanan dalam keamanan kawasan.

Gambar II.3.
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Posisi Provinsi ini berbatasan sebelah Barat dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata, sebelah Utara dengan Laut Natuna, dan sebelah Selatan dengan Laut Jawa, sebagaimana terlihat pada peta Gambar II.3. Dikelilingi oleh laut dan merupakan daerah kepulauan dan dinamai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.2. Luas dan Daerah Administratif

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,23 km². Terdiri dari daratan seluas 16.424,23 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan wilayah laut seluas 65.301,00 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara terperinci dapat dilihat pada data tabel II.1.

Tabel II.1
Luas Wilayah Laut Administrasi Kabupaten/Kota dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Nama Kabupaten/ Kota	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²) Lautan				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	Sungailiat	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69
Bangka Barat	Muntok	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61
Bangka Tengah	Koba	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36
Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08
Belitung	Tanjungpandan	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69
Belitung Timur	Manggar	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80
Luas Daratan		16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23
Luas Laut		65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00
Provinsi Kep. Babel		81.725,23	81.725,23	81.725,23	81.725,23	81.725,23

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Kemudian melakukan pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, yang membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), dengan 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Pembagian wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terperinci dapat dilihat pada tabel II.2, II.3, dan II.4

Tabel II.2

Pembagian Wilayah Perbatasan Kabupaten/Kota dan Kecamatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Nama Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	Sungailiat	8	8	8	8	8
Bangka Barat	Muntok	6	6	6	6	6
Bangka Tengah	Koba	6	6	6	6	6
Bangka Selatan	Toboali	8	8	8	8	8
Belitung	Tanjungpandan	5	5	5	5	5
Belitung Timur	Manggar	7	7	7	7	7
Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	7	7	7	7
Provinsi Kep. Babel		47	47	47	47	47

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Tabel II.3

Pembagian Wilayah Perbatasan Kabupaten/Kota dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Nama Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Jumlah Desa				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	Sungailiat	62	62	62	62	62
Bangka Barat	Muntok	60	60	60	60	60
Bangka Tengah	Koba	56	56	56	56	56
Bangka Selatan	Toboali	50	50	50	50	50
Belitung	Tanjungpandan	46	42	42	42	42
Belitung Timur	Manggar	39	39	39	39	39
Pangkalpinang	Pangkalpinang	0	0	0	0	0
Provinsi Kep. Babel		313	309	309	309	309

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Tabel II.4

Pembagian Wilayah Perbatasan Kabupaten/Kota dan Kelurahan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Nama Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Jumlah Kelurahan				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	Sungailiat	9	9	15	15	19
Bangka Barat	Muntok	4	4	4	4	4
Bangka Tengah	Koba	7	7	7	7	7
Bangka Selatan	Toboali	3	3	3	3	3

Nama Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Jumlah Kelurahan				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belitung	Tanjungpandan	2	7	7	7	7
Belitung Timur	Manggar	0	0	0	0	0
Pangkalpinang	Pangkalpinang	42	42	42	42	42
Provinsi Kep. Babel		67	72	78	78	82

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

2.1.3. Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Tahun 2016 sebesar 1.401.827 orang, dengan laju pertumbuhan 2015-2016 sebesar 2,11 persen sementara laju pertumbuhan penduduk secara nasional 2010-2015 sebesar 1,38 persen. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi. Faktor migrasi cukup besar karena berkembangnya daerah Kepulauan Bangka Belitung dari berbagai sektor ekonomi, sehingga menjadi daya tarik untuk datang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebaran penduduk per Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Tabel II.5 berikut ini.

Tabel II.5

Proyeksi Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Kelamin
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (jiwa)										
Kabupaten/Kota	2012		2013		2014		2015		2016	
	Laki Laki	Perempuan	Laki Laki	Perempuan	Laki Laki	Perempuan	Laki Laki	Perempuan	Laki Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bangka	151.878	139.707	155.193	142.820	158.623	145.862	162.198	148.887	165.529	152.206
Belitung	84.770	79.207	86.686	80.916	88.682	82.589	90.600	84.448	92.629	86.092
Bangka Barat	95.907	88.321	98.064	90.207	100.183	92.212	102.477	94.121	104.689	95.995
Bangka Tengah	88.713	80.855	90.719	82.627	92.882	84.336	94.680	86.223	96.781	87.939
Bangka Selatan	94.017	87.419	96.229	89.285	98.304	91.188	100.517	93.066	102.654	95.016
Belitung Timur	58.076	53.887	59.517	54.952	60.903	56.123	62.134	57.260	63.503	58.468
Pangkalpinang	94.133	89.661	96.245	91.663	98.320	93.674	100.617	95.585	102.795	97.531
Kepulauan Bangka Belitung	667.494	619.057	682.653	632.470	697.897	645.984	713.223	659.590	728.580	673.247

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Jumlah penduduk per Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012-2016, dapat dilihat pada Tabel II.6 berikut ini.

Tabel II.6.
Jumlah Penduduk
Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012–2016

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	291.585	298.013	304.485	311.085	317.735
Belitung	163.977	167.602	171.271	175.048	178.721
Bangka Barat	184.228	188.271	192.395	196.598	200.684
Bangka Tengah	169.568	173.346	177.218	180.903	184.720
Bangka Selatan	181.436	185.514	189.492	193.583	197.670
Belitung Timur	111.963	114.469	117.026	119.394	121.971
Pangkalpinang	183.794	187.908	191.994	196.202	200.326
Kepulauan Bangka Belitung	1.286.551	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1.401.827

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Sedangkan laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk dari tahun 2012-2016, dapat dilihat pada Tabel II.7 berikut ini.

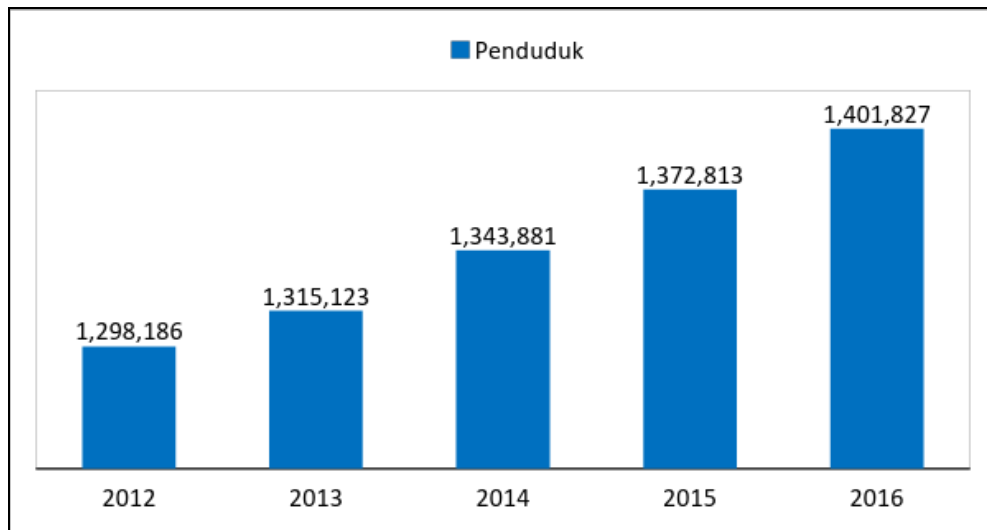
Tabel II.7.
Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk
Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012–2016

Kabupaten /Kota	Laju Pertumbuhan (%)					Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bangka	2,02	2,21	2,17	2,22	2,14	100	101	103	105	108
Belitung	2,21	2,21	2,19	2,23	2,10	71	73	75	76	78
Bangka Barat	2,19	2,19	2,19	2,22	2,08	67	67	68	70	72
Bangka Tengah	2,23	2,23	2,23	2,21	2,11	80	82	83	85	87
Bangka Selatan	2,25	2,25	2,14	2,22	2,11	51	51	53	54	55
Belitung Timur	2,24	2,24	2,23	2,21	2,16	45	46	47	48	49
Pangkalpinang	2,24	2,24	2,17	2,22	2,10	1.564	1.582	1.616	1.652	1687
Kepulauan Bangka Belitung	2,25	2,22	2,19	2,15	2,11	79	80	82	84	86

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Grafik II.1 berikut ini.

Grafik II.1.
Pembagian dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2012-2016



Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Adapun tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 mencapai 85 orang per km². Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, kota Pangkalpinang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 1.686 orang per Km² sedangkan Kabupaten Belitung Timur dengan tingkat kepadatan terendah yaitu 49 orang per Km². Berdasarkan distribusi penduduk pada tahun 2016, sebagian besar penduduk terkonsentrasi 78,55persen di Pulau Bangka dan 21,45 persen di Pulau Belitung. Persentase penduduk tertinggi mendiami Kabupaten Bangka yaitu sebesar 22,66 persen. Sedangkan sebaran penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebesar 8,70 persen sebagaimana telah ditampilkan dalam Tabel II.6 dan Tabel II.7.

2.1.4. Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten Bangka dengan ketinggian 699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten Belitung dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebagian kecil di Kabupaten Bangka Selatan.

Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari "*Tin Major South East Asian Tin Belt*" dengan tipe granit main range yang mempunyai ciri-ciri megakristal (terutama K-Feldspar) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Granit ini umumnya terdiri atas granit biotit dan granit muskovit yang semuanya merupakan tipe sedimen tipe S yang diperkirakan umurnya Trias (sumber: Arsip PT.Koba Tin: Survey dan Geology Department, 2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula mineral-ikutan timah seperti Zircon (ZrSiO_4), Monazite ($(\text{Ce, La, Dy})\text{PO}_4$ (ThSiO_2)), Hematite (Fe_2O_3), Pyrite (FeS_2), Ilmenite (FeTiO_3), dan Xenotime (YPO_4).

Sedangkan secara geologis mineral timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (granitebelt) Asia Tenggara yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep dan Pulau Karimun.

Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada pula produk rombakan lain seperti pasir kuarsa (SiO_2), material Kaolin, dan bilitonite (dikenal dengan nama "satam"). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

Dari kajian hidrologi, daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti : Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cecuruk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

2.1.5. Iklim

Kepulauan Bangka Belitung memiliki Iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Kondisi iklim tahunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diamati pada tabel berikut. Selama tahun 2012-2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahunan antara 27-31 °C dan curah hujan rata-rata tahunan antara 397-580 mm. Curah hujan maximum tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 577,3 mm di Belitung dan tahun 2012 sebesar 466,2 mm di Pangkalpinang. Sementara kelembabannya relatif tinggi dengan fluktuasi yang kecil.

Tabel II.8

Kondisi Iklim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

IKLIM	2012	2013	2014	2015		2016	
				Stasiun Pangkalpinang	Stasiun Tanjung Pandan	Stasiun Pangkalpinang	Stasiun Tanjung Pandan*
Suhu (°C)							
Maximum	24	32	-	32,2	35,8	32,4	
Minimum	31,2	30	-	23,6	20,4	23,8	
Rata-rata	27,1	30,95	-	27,9	28,1	28,1	
Kelembaban Udara (%)							
Maximum	97,6	97	-	97	100	97	
Minimum	47	69	-	51	33	61	
Rata-rata	82,1	87	-	74	66,5	79	
Curah Hujan(mm)							
Maximum	466,2	406,2	312,5	397,6	577,3	183,9	
Minimum	4	84,2	0	0	0	-	
Rata-rata	168,1	236,61	134,58	198,8	288,65	-	

Sumber: BMKG Pangkalpinang,

* BMKG Tanjungpandan tidak tersedia

Di bulan Desember dan Januari biasanya musim penghujan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angin kencang dan ombak laut cenderung meninggi.

2.1.6. Kondisi Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan kering yang tidak termanfaatkan juga cukup luas (lahan bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih detailnya dapat diperhatikan Tabel II.9. Dari seluruh luas lahan, 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan

sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Tabel II.9.
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung
Tahun 2011-2016

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)					2016
	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian Sawah	21.662	23.042	13.262	15.719	15.719	22.771
Tegalan	138.246	112.777	109.820	113.105	113.105	117.376
Ladang	45.984	48.960	44.085	30.348	30.348	28.147
Perkebunan	331.662	332.179	334.698	441.152	441.152	367.848
Hutan Rakyat	72.517	85.738	71.323	47.753	47.753	42.637
Pengembalaan	8.037	6.086	4.235	1.815	1.815	2.263
Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)	122.309	121.407	126.272	76.588	76.588	67.415
Lain-Lain (pekarangan)	435.971	387.443	388.068	397.806	397.806	538.195
Permukiman	476.857	526.303	550.651	517.741	517.741	517.741
JUMLAH	1.642.414	1.642.414	1.642.414	1.642.027	1.642.027	1.642.414

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan untuk permukiman sebesar 517.741 Ha kemudian kedua digunakan sebagai lain-lain (pekarangan) sebesar 441.152 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 2.263 Ha.

2.1.7. Potensi Ekonomi Wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.

(1) Kawasan hutan produksi

Pengembangan kawasan hutan produksi dilakukan melalui penataan batas kawasan hutan produksi, identifikasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (deforestasi), peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, peningkatan pengelolaan kawasan hutan

produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai peraturan perundangan, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan produksi (kayu dan bukan kayu), pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan hutan produksi baik pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan.

Penetapan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 436.647,89 Ha, dengan perincian :

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 78.368,92 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan dua) Ha;
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 67.083,52 (enam puluh tujuh ribu delapan puluh tiga koma lima dua) Ha;
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 85.497,75 (delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) Ha;
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 106.451,10 (seratus enam ribu empat ratus lima puluh satu koma satu nol) Ha;
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 43.595,77 (empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh tujuh) Ha; dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 55.650,83 (lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh koma delapan tiga) Ha.

(2) Kawasan peruntukan pertanian

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional, pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta kekhususan dari wilayah, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lainnya, meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultura, mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan/atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala, penetapan kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagai usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya, penetapan kawasan peruntukan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultura dan atau perkebunan, penetapan kawasan peruntukan budidaya peternakan ternak besar, kecil dan

unggulan melalui komoditas ternak unggulan nasional, daerah dan atau komoditas ternak strategis dengan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dan dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya dan didukung oleh ketersediaan sumber air, pangan, teknologi, kelembagaan serta pasar, pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penetapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, dan membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian seluas 903.450 (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh) Ha terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha, meliputi:
 - a.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha;
 - a.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha;
 - a.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha;
 - a.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha;
 - a.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha;
 - a.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473; dan
 - a.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 60 Ha.
- b. Kawasan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha, meliputi:
 - b.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha;
 - b.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha;
 - b.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha;
 - b.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha;
 - b.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha;
 - b.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha; dan
 - b.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 70 Ha.
- c. Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha, meliputi:
 - c.1 Perkebunan Besar meliputi :
 - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808Ha;
 - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590Ha;
 - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908Ha;
 - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329Ha;
 - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047Ha; dan
 - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188Ha.
 - c.2 Perkebunan rakyat meliputi :
 - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120Ha;

- (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660Ha;
- (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687Ha;
- (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326Ha;
- (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264Ha; dan
- (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456Ha.

- d. Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha, meliputi:
 - d.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha;
 - d.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha;
 - d.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha;
 - d.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha;
 - d.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha;
 - d.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha; dan
 - d.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha.

(3) Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan melalui penetapan kawasan sentra perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap dengan pendekatan minapolitan, menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap, pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan tawar, pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut, payau dan tawar, penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap (pelabuhan), pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan, budidaya laut, payau, tawar dan perikanan tangkap, dan pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan balai budidaya dan laboratorium.

Penetapan kawasan peruntukan perikanan yang memiliki potensi untuk pengembangan, meliputi :

- a. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
- b. perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan kawasan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan, dan perikanan tangkap yang telah didukung pelabuhan perikanan (2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan 18 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)).

Dilain pihak pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan Balai

Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha, Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha; dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha.

(4) Kawasan pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi, peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan rician:

- a. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
- b. Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

(5) Kawasan industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung, membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri, membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri, penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi baru terbarukan dan energi terbarukan, dan mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.

Kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan adalah:

- a. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
- c. Kawasan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. Kawasan industri Ketapang di Pangkalpinang;
- e. Kawasan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- f. Kawasan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
- g. Kawasan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

(6) Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan, identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh, penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan

Bangka Berlitan, revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada, pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi, dan peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata.

Penetapan kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:

- a. Wisata alam, meliputi seluruh wilayah pantai Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil yaitu:
 - a.1 Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur;
 - a.2 Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
 - a.3 Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan;
 - a.4 Taman wisata laut;
 - a.5 Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
 - a.6 Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
- b. Wisata budaya, wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - b.1 Kawasan Kota Tua Muntok di kabupaten Bangka Barat;
 - b.2 Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka;
 - b.3 Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;
 - b.4 Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya *tangible* maupun *intangible* yang ada di kabupaten/kota;
 - b.5 Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
 - b.6 Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota.
- c. Wisata buatan adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema, resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

(7) Kawasan peruntukan permukiman

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan cara penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan, penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota, penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan, identifikasi dan perbaikan

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan luas kurang lebih 59.188 (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) Ha, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan di seluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

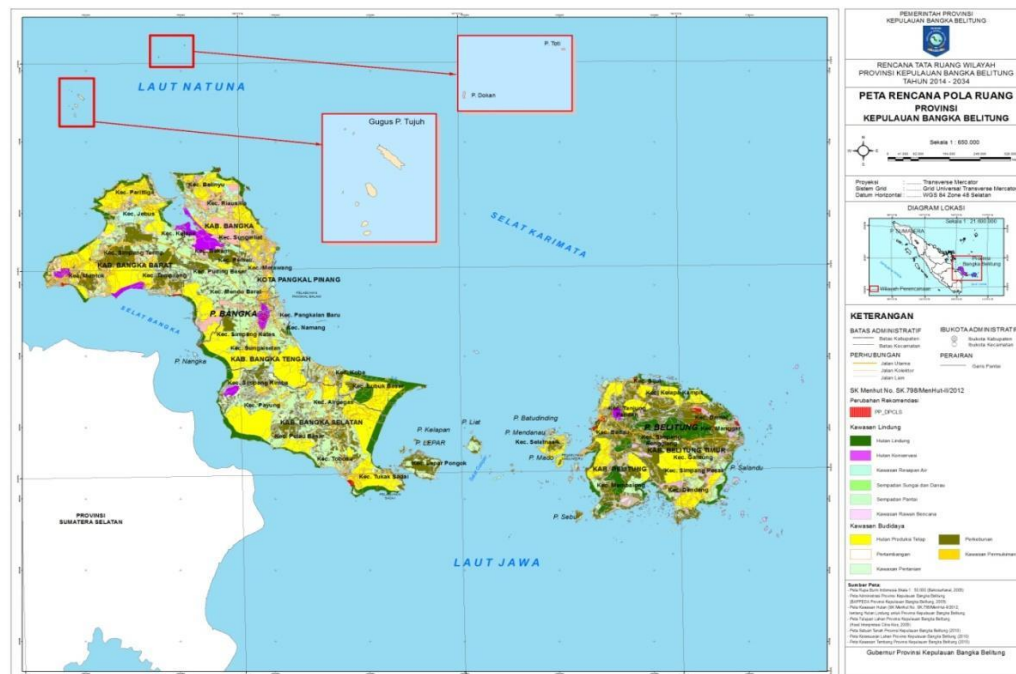
(8) Kawasan peruntukan lainnya

Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi:

- Kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
- Kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;
- Kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
- Kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

Kesemua peruntukan ini telah dipetakan kedalam pola ruang Gambar II.4 dan Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gambar II.5.

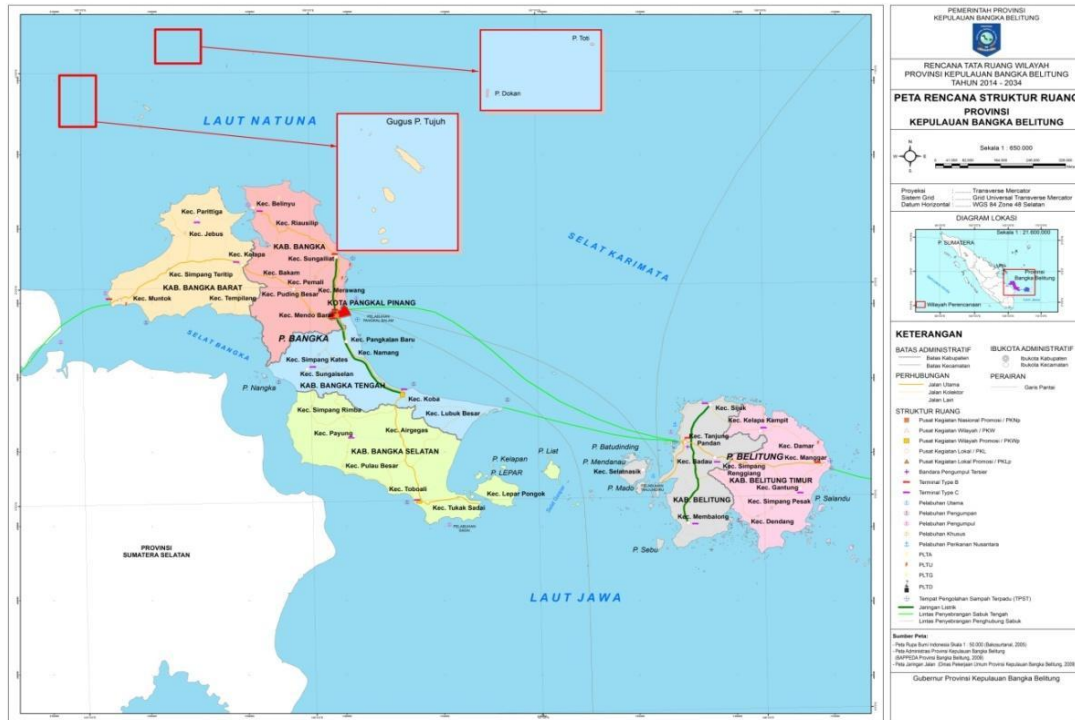
Gambar II.4.
Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Gambar II.5.

Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

2.1.8. Wilayah rawan bencana

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Ancaman bencana alam tersebut antara lain adalah banjir dan cuaca ekstrim (puting beliung). Di samping itu bencana non alam seperti gagal teknologi (kecelakaan transportasi) juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel II.10.

Tabel II.10.
Data Bencana Alam
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Kejadian	Jumlah Titik Lokasi Kejadian	Meninggal	Korban	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan
(1)	(2)	(3)	(6)	(10)	(11)	(12)
Banjir Bandang/Rob/Bah	143 (67,77%)	3	19.019 KK/22 Jiwa	0	2	9.984
Angin Puting Beliung/Angin Kencang	11 (5,21%)	4	111 KK	7	8	95
Di Laut/Pantai	6 (2,84%)	7	18 jiwa	0	0	0
Di sungai	0	0	0	0	0	0
Longsoran Tanah/Batu/Pasir	8 (3,79%)	10	20 jiwa	0	0	0
Kebakaran Hutan/Lahan	1 (0,47%)	0	0	0	0	0
Kebakaran Rumah/Perumahan	11 (5,21%)	0	8 KK/13 jiwa	9	2	2
Kebakaran Gedung Pemerintahan	0	0	0	0	0	0
Kebakaran Pasar/Ruko, Gedung, Kantor/Sekolah swasta, warung/toko dan lainnya	7 (3,32%)	1	10 jiwa	4	0	2
Kabut Asap	0	0	0	0	0	0
Gempa Bumi (3 Kec)	15 (7,11%)	0	0	0	0	0
Bencana Sosial	2 (0,95%)	0	2 jiwa	0	0	0
Tersambar Petir	7 (3,32%)	2	24 jiwa	0	4	0

Sumber: Data dan Informasi Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel II.11.
Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

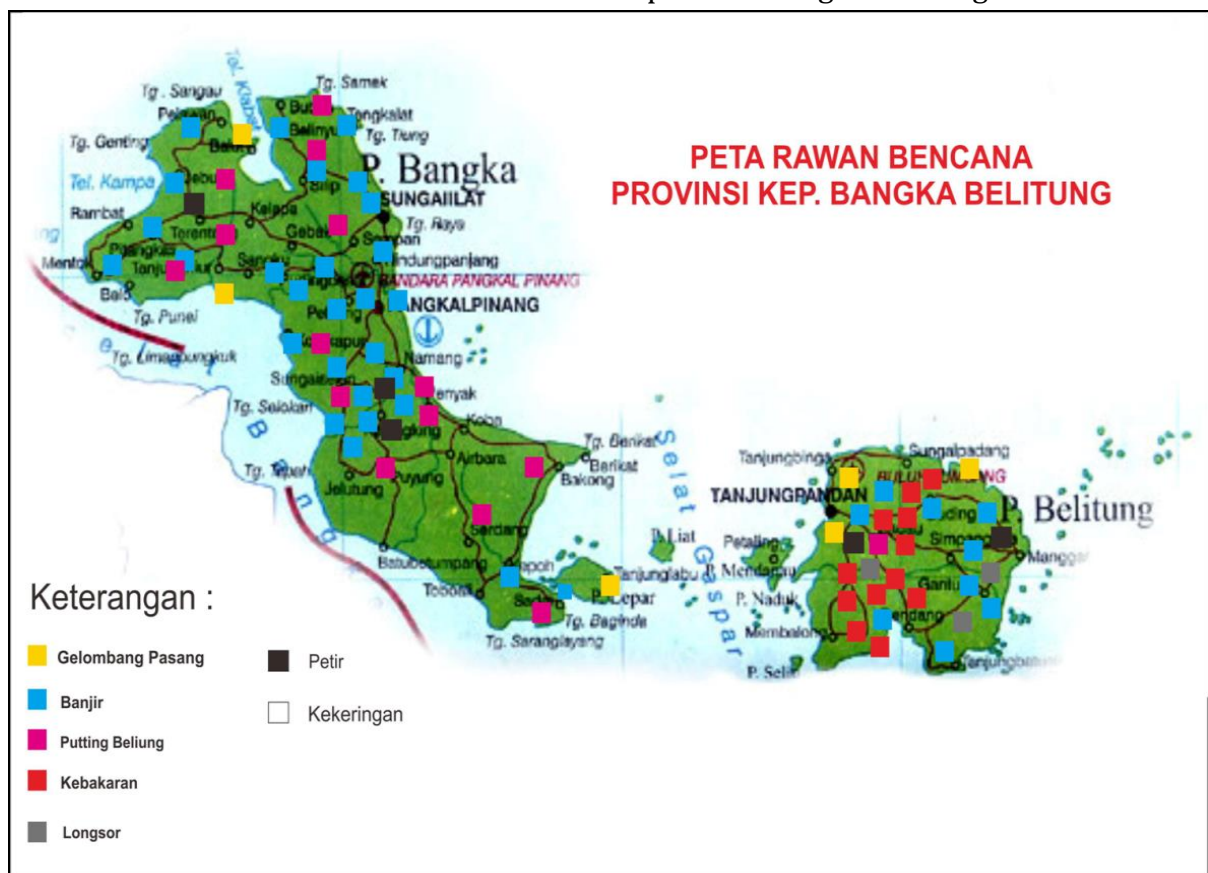
NO	Lokasi Bencana	Jenis Bencana	Intensitas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bangka	Banjir dan Puting beliung	Sedang
2	Bangka Tengah	Banjir, pergerakan tanah	Rendah

NO	Lokasi Bencana	Jenis Bencana	Intensitas
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Bangka Selatan	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang, tinggi
4	Bangka Barat	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang
5	Belitung	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang
6	Belitung Timur	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Rendah, sedang
7	Pangkalpinang	Banjir, puting beliung	Rendah, sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2014

Gambar II.6.

Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Ukuran ekonomi makro, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan.

(1) Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita dan sebagai indikator disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada kemampuan mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

Gambaran perkembangan PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2012–2016, terlihat pada Tabel II.12. berikut ini

Tabel II.12.

Perkembangan PDRB Tahun 2012–2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

PDRB	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	45.400,2	50.388,4	56.373,6	60.992,1	65.125,3
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	40.104,9	42.190,9	44.159,4	45.961,5	47.852,7

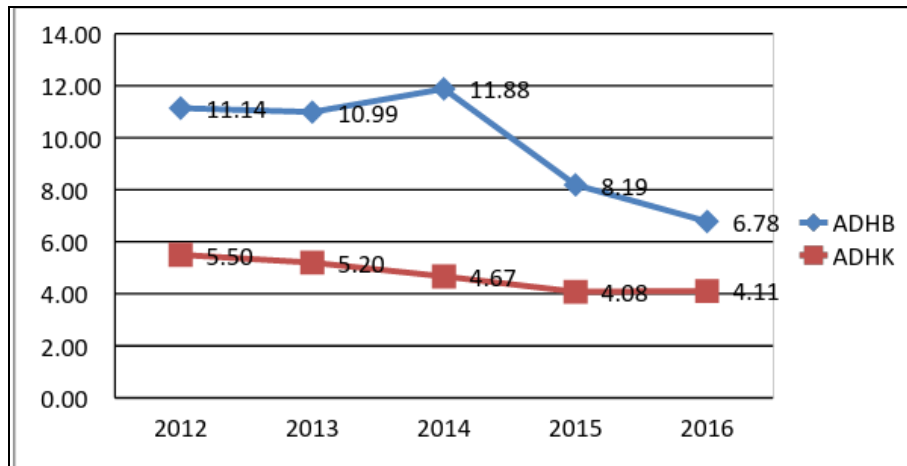
Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Secara nominal nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) relatif lebih besar dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, yaitu sebesar Rp. 45.400,2 Triliun pada tahun 2012 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 65.125,3 Triliun pada tahun 2016 atau rata-rata tumbuh sebesar 10,64 persen. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 hanya sebesar Rp. 40.104,9 Triliun pada tahun 2012 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 47.852,7 Triliun pada tahun 2016 atau rata-rata tumbuh sebesar 4,29 persen.

Pada Tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan ADHB masih mengalami perlambatan dimana pertumbuhannya hanya sebesar 6,78 persen, namun berdasarkan ADHK menunjukkan peningkatan pertumbuhan yaitu sebesar 4,11 persen sebagaimana dapat terlihat pada grafik II.2 berikut ini.

Grafik II.2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 – 2016
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang dimulai pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 merupakan dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan di dalam negeri. Pada periode tahun 2015-2016 lebih dari setengah 17 lapangan usaha ekonomi penyumbang PDRB telah mengalami pertumbuhan, dan laju pertumbuhannya relatif memberikan andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ditahun 2016 sehingga tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

(2) Perkembangan Struktur Perekonomian

Perkembangan sektor-sektor pembentuk PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode 2012 – 2016 dapat dilihat pada Tabel II.13 dan Tabel II.14. Dari kedua tabel tersebut memperlihatkan bahwa pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, serta sektor industri pengolahan merupakan 4 (empat) sektor utama yang relatif dominan menggerakkan perekonomian daerah. Dilihat dari nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK, lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang paling dominan, diikuti oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori pertambangan dan penggalian.

Tabel II.13

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2012 –2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.111,9	9.269,6	10.748,3	11.974,7	13.026,3
Pertambangan dan Penggalian	6.975,3	7.097,6	7.622,8	7.742,6	7.740,6
Industri Pengolahan	11.043,8	12.088,2	12.877,3	12.888,4	13.086,6
Pengadaan Listrik dan Gas	27,1	27,3	42,0	51,7	70
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,2	9,1	10,4	12,1	13,2
Konstruksi	3.523,1	4.139,3	4.712,4	5.356,4	5.843,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.193,5	6.671,7	7.702,4	8.634,1	9.647,8
Transportasi dan Pergudangan	1.577,2	1.864,6	2.125,6	2.455,2	2.637,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	992,6	1.152,1	1.321,4	1.459,8	1.607,3
Informasi dan Komunikasi	708,6	770,2	849,1	941,7	1.033,2
Jasa Keuangan dan Asuransi	728,8	902,4	998,5	1.086,3	1.198,6
Real Estat	1.388,3	1.602,9	1.823,4	1.96,7	2.106,2
Jasa Perusahaan	116,1	134,4	154,0	169,6	176,2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.243,5	2.618,0	3.025,6	3.471,6	3.804,7
Jasa Pendidikan	998,0	1.172,2	1.362,8	1.645,8	1.894,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	487,6	552,7	629,9	710,7	760,8
Jasa lainnya	276,7	315,9	371,7	426,6	498,9
Produk Domestik Regional Bruto	45.400,2	50.388,4	56.373,6	60.992,1	65.125,3

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel II.14.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 – 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.072,9	7.557,7	8.254,3	8.747,3	9.119,9
Pertambangan dan Penggalian	6.270,1	6.230,2	6.354,1	6.464,4	6.495,5
Industri Pengolahan	9.804,9	10.143,3	10.270,4	10.400,6	10.668,7

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pengadaan Listrik dan Gas	30,1	31,5	34,4	37,9	44,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,0	7,3	7,7	8,1	8,6
Konstruksi	3.133,8	3.414,7	3.552,4	3.760,8	4.018,9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.528,1	5.846,6	6.140,7	6.402,1	6.731,1
Transportasi dan Pergudangan	1.384,8	1.484,8	1.570,8	1.658,3	1.749,6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	871,0	931,0	1.000,6	1.034,8	1.084,6
Informasi dan Komunikasi	679,2	740,2	790,9	849,0	926,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	624,2	728,3	766,6	800,0	858,9
Real Estat	1.215,7	1.312,6	1.403,9	1.442	1.494,8
Jasa Perusahaan	101,2	108,1	115,7	120,3	120,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.873,0	2.014,4	2.149,8	2.337,1	2.490,2
Jasa Pendidikan	821,7	903,7	964,9	1.060,3	1.144,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	442,9	475,3	500,6	533,8	559,6
Jasa lainnya	244,3	261,0	281,7	304,6	338,5
Produk Domestik Regional Bruto	40.104,9	42.190,9	44.159,4	45.961,5	47.852,7

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Dengan demikian, kontribusi keempat kategori terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat dominan. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.13, menunjukkan bahwa berdasarkan nilai PDRB ADHB, rata-rata kontribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 68,77 persen. Dari total persentase tersebut rata-rata sekitar 22,47 persen merupakan kontribusi dari kategori industri pengolahan sebagai sektor tersier dan sebesar 32,40 persen merupakan kontribusi dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian sebagai sektor primer. Kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebagai sektor sekunder berkontribusi 13,90 persen.

Artinya selama kurun waktu 2012-2016 telah terjadi pergeseran struktur perekonomian pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kurun waktu tersebut, sektor industri pengolahan menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Bangka Belitung, diikuti oleh sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, dan jasa perdagangan besar dan eceran motor.

Khusus pada tahun 2016 struktur perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi tertinggi sebesar 20,06 persen. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada berada pada peringkat kedua dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 20,00 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran motor yang memberikan kontribusi sebesar 14,80 persen. Sebagai catatan, kontribusi lapangan usaha industri pengolahan turun signifikan rata-rata -4,09 persen pertahun selama periode 2012-2016, tetapi disisi lain kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh signifikan rata-rata 2,60 persen pertahun, dan diprediksi akan terus menguat dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB. Untuk lebih rincinya data tersebut dapat dilihat pada Tabel. II.15.

Tabel II.15.

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012–2016
Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,87	18,39	19,07	19,63	20,00
Pertambangan dan Penggalian	15,36	14,08	13,52	12,69	11,39
Industri Pengolahan	24,33	23,99	22,84	21,13	20,06
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,07	0,08	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	7,76	8,21	8,36	8,78	8,97
Perdagangan Besar dan Eceran Motor	13,64	13,24	13,66	14,16	14,81
Transportasi dan Pergudangan	3,47	3,70	3,77	4,03	4,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,19	2,29	2,34	2,39	2,47
Informasi dan Komunikasi	1,56	1,53	1,51	1,54	1,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,60	1,79	1,77	1,78	1,84
Real Estate	3,06	3,18	3,23	3,22	3,23
Jasa Perusahaan	0,26	0,27	0,27	0,28	0,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,94	5,20	5,37	5,69	5,84
Jasa Pendidikan	2,20	2,33	2,42	2,70	2,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,10	1,11	1,17	1,17

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jasa Lainnya	0,61	0,63	0,66	0,70	0,77
PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Sementara, berdasarkan nilai PDRB ADHK sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.16, bahwa kontribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 70,19 persen. Dari total persentase tersebut, sekitar 23,33 persen merupakan kontribusi dari sektor industri pengolahan sebagai sektor tersier dan sebesar 32,95 persen merupakan kontribusi dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta kategori pertambangan dan penggalian (sebagai sektor primer). Sedangkan untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai sektor sekunder memiliki kontribusi sekitar 13,91 persen. Secara rincinya data tersebut dapat dilihat pada Tabel. II.16.

Tabel II.16.

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2016
Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,64	17,91	18,69	19,03	19,05
Pertambangan dan Penggalian	15,63	14,77	14,39	14,06	13,57
Industri Pengolahan	24,45	24,04	23,26	22,63	22,29
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	7,81	8,09	8,04	8,18	8,40
Perdagangan Besar dan Eceran Motor	13,78	13,86	13,91	13,93	14,07
Transportasi dan Pergudangan	3,45	3,52	3,56	3,61	3,66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,17	2,21	2,27	2,25	2,27
Informasi dan Komunikasi	1,69	1,75	1,79	1,85	1,94
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,56	1,73	1,74	1,74	1,79
Real Estate	3,03	3,11	3,18	3,108	3,12
Jasa Perusahaan	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,67	4,77	4,89	5,16	5,20

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jasa Pendidikan	2,05	2,14	2,19	2,31	2,39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,13	1,13	1,16	1,17
Jasa Lainnya	0,61	0,62	0,64	0,66	0,71
PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Secara teoritis nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan akumulasi dari nilai PDRB Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan PDRB ADHB sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.17, menunjukkan bahwa sepanjang periode tahun 2012–2016 nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata hanya 0,54 persen dari nilai PDB. Artinya kontribusi perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap perekonomian nasional relatif kecil.

Tabel II.17.

Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2012 s.d 2016 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	8.321,7	9.139,7	10.174,8	11.022,3	11.790,7
Kabupaten Bangka Barat	8.525,0	9.538,5	10.686,7	11.472,7	12.259,6
Kabupaten Bangka Tengah	5.692,5	6.198,2	6.690,3	7.056,1	7.470,0
Kabupaten Bangka Selatan	5.277,0	5.820,0	6.435,9	6.939,3	7.531,0
Kabupaten Belitung	5.333,9	6.000,3	6.731,1	7.328,4	8.003,0
Kabupaten Belitung Timur	4.541,3	5.082,8	5.666,8	6.125,7	6.606,3
Kota Pangkalpinang	7.462,0	8.414,6	9.359,7	10.234,7	11.131,6
Provinsi Kep. Babel	45 400,2	50 388,4	56 373,6	60 992,1	65.125,3
Nasional	8.615.704,5	9.546.134,0	10.569.705,3	11.531.716,9	12.406.809,8

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Demikian juga berdasarkan PDRB ADHK sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.18, juga menunjukkan bahwa besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih kecil dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional, yaitu hanya sebesar 0,52 persen dari PDB. Dari besaran PDRB Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Bangka Barat diikuti oleh Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Tabel II.18.

Perkembangan PDRB Tahun 2011 s.d 2016
Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

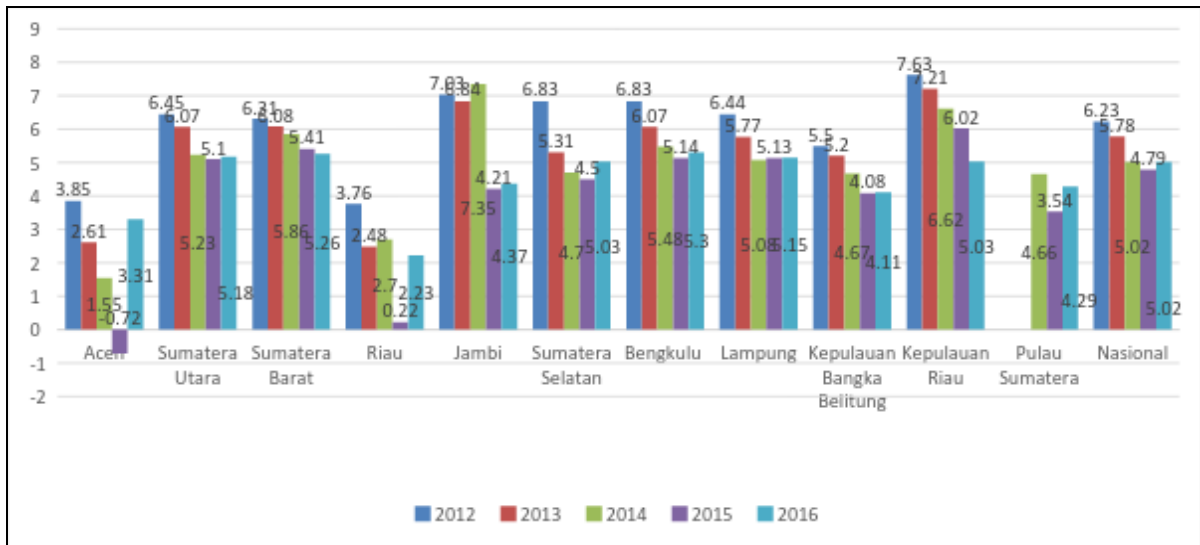
Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	7.378,2	7.769,1	8.143,1	8.513,2	8.906,8
Kabupaten Bangka Barat	7.586,5	7.972,8	8.349,3	8.749,3	9.152,5
Kabupaten Bangka Tengah	5.012,9	5.178,3	5.255,8	5.271,8	5.428,2
Kabupaten Bangka Selatan	4.646,0	4.853,0	5.068,3	5.274,4	5.495,6
Kabupaten Belitung	4.656,4	4.934,0	5.167,1	5.400,9	5.660,7
Kabupaten Belitung Timur	4.028,4	4.258,0	4.478,3	4.675,0	4.870,7
Kota Pangkalpinang	6.571,3	6.951,2	7.247,5	7.554,9	7.945,8
Provinsi Kep. Babel	40.104,9	42.190,9	44.159,4	45.961,5	47.852,7
Nasional	7.727.083,4	8.156.497,8	8.564.866,6	8.982.511,3	9.433.034,4

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Dari grafik II.3, laju pertumbuhan ekonomi regional sumatera selama periode 2012-2016 terlihat bahwa menunjukkan trend perlambatan ekonomi hampir diseluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Selama periode tersebut, laju pertumbuhan ekonomi regional Sumatera selalu berada dibawah rata-rata nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2016 berada pada urutan ke delapan.

Grafik II.3.

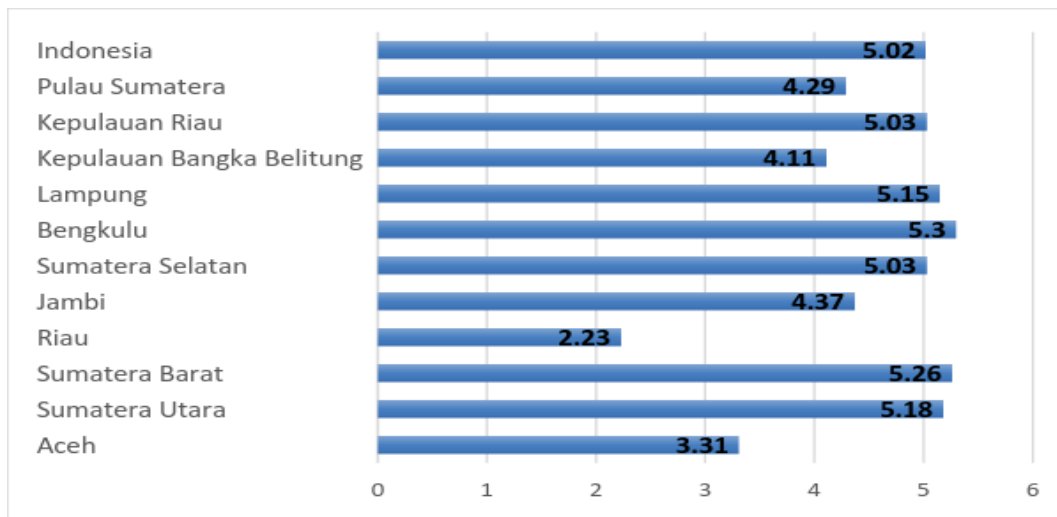
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Wilayah Sumatera dan Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Grafik II.4.

Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Wilayah Sumatera dan Indonesia Tahun 2016



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Grafik II.4 menjelaskan bahwa di tahun 2016, tiga besar provinsi dengan tingkat Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera adalah Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara masing-masing 5,30 persen, 5,26 persen, dan 5,18 persen diatas pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan Nasional yaitu 4,29 persen dan 5,02 persen. Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di urutan ke delapan dan masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau

Sumatera dan Nasional, walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dibanding tahun 2015.

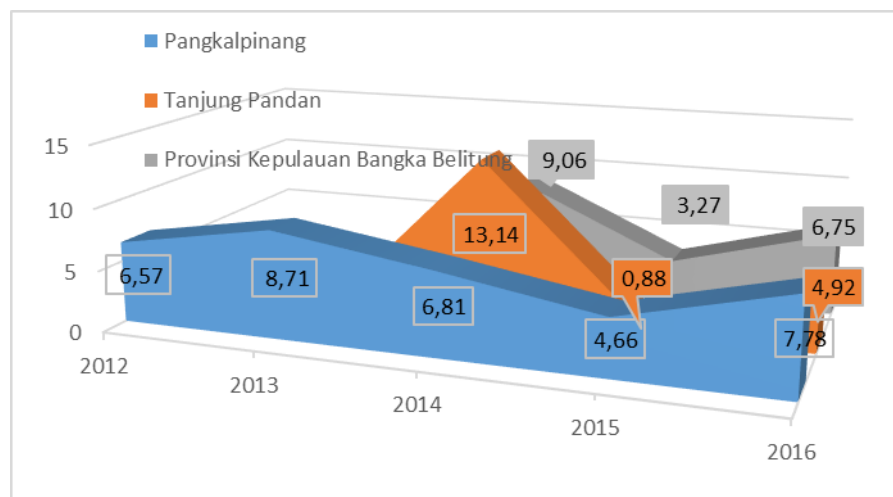
Secara keseluruhan, kontribusi PDRB Pulau Sumatera terhadap total 34 provinsi pada tahun 2016 sebesar 22,02 persen. Namun kontribusi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif masih kecil yaitu hanya memberikan sumbangan sebesar 2,35 persen terhadap pembentukan PDRB Sumatera dan 0,52 persen terhadap pembentukan PDRB Nasional.

(3) Laju Inflasi

Sepanjang periode tahun 2012-2016 inflasi Kota Pangkalpinang sangat fluktuatif. Pada tahun 2012 tingkat inflasi berada pada angka 6,57 persen, meningkat di tahun 2013 menjadi sebesar 8,71 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2015 menjadi 4,66 persen dan naik kembali menjadi 7,78 persen pada tahun 2016. Sementara di Tanjung Pandan laju inflasi mulai dihitung pada tahun 2014 yang mencapai 13,14 persen tertinggi di Indonesia, kemudian menurun tajam menjadi 0,88 di tahun berikutnya dan meningkat kembali menuju angka 4,92 persen pada tahun 2016. Secara rata-rata dari nilai laju inflasi di dua kota tersebut, laju inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2014 sebesar 9,06%, turun menjadi 3,27 persen pada tahun 2015 dan meningkat kembali menjadi 6,75 persen di tahun 2016.

Grafik II.5.

Laju Inflasi Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahunan 2012-2016



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Jika dicermati menurut kelompoknya, sepanjang periode tahun 2012-2016 hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi kecuali transportasi dan

komunikasi yang sempat mengalami deflasi pada tahun 2012 dan 2015. Kelompok bahan makanan mengalami inflasi tertinggi, yaitu rata-rata sebesar 8,62 persen, diikuti kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan tembakau rata-rata sebesar 7,22 persen, dan kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga rata-rata sebesar 6,68 persen. Sedangkan terendah ada pada kelompok sandang dengan rata-rata inflasi sebesar 4,85 persen.

Tabel II.19.

Laju Inflasi Tahun 2012-2016
Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum	6,57	8,71	6,81	4,66	7,78
1. Bahan Makanan	8,50	11,08	3,39	6,63	13,49
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	7,95	6,82	8,63	7,92	4,77
3. Perumahan	5,81	9,20	8,85	3,74	3,59
4. Sandang	5,79	1,63	6,61	2,60	7,63
5. Kesehatan	5,19	5,08	8,13	5,50	4,31
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	10,31	3,77	6,65	8,62	4,04
7. Transportasi dan Komunikasi	-0,11	11,17	6,98	-2,04	11,42

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017.

Sementara itu di Tanjung Pandan dengan laju inflasi sangat fluktuatif selama 2014-2016 kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, dan pendidikan, rekreasi dan olahraga merupakan kelompok penyumbang inflasi terbesar yang patut diwaspadai disertai kelompok sandang yang cenderung lebih tinggi di tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya.

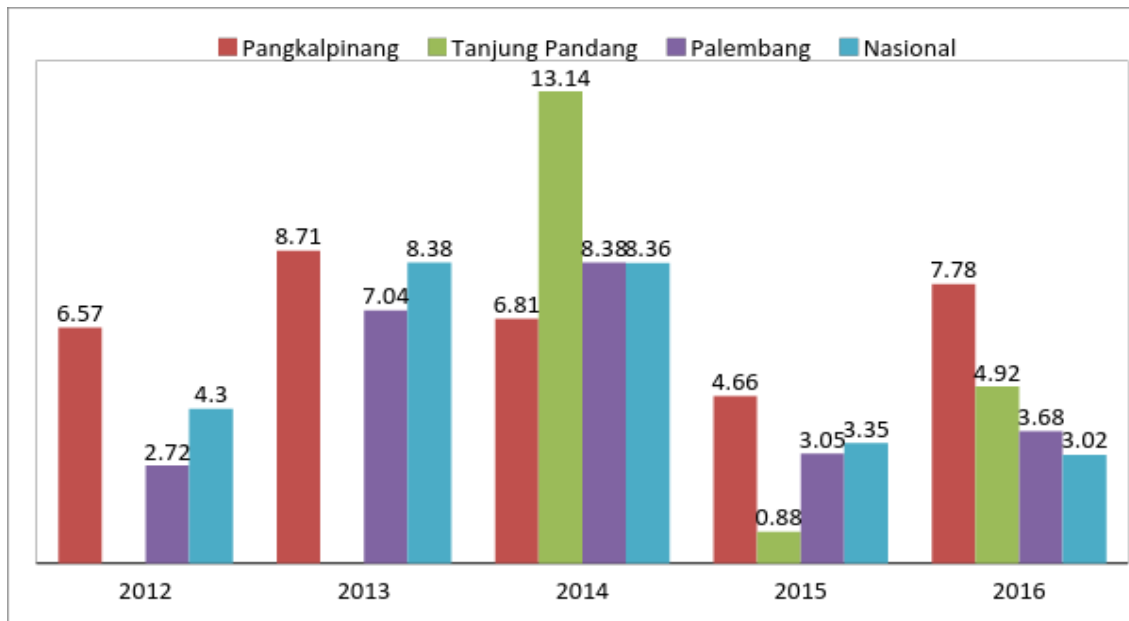
Tabel II.20.

Laju Inflasi Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2014-2016

Kelompok Pengeluaran	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Umum	13.14	0.88	4.92
1. Bahan Makanan	21.36	-1.36	2.26
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6.91	0.88	2.01
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	6.87	0.66	0.17
4. Sandang	12.03	0.08	0.15
5. Kesehatan	4.11	0.16	0.10
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	15.35	0.41	0.18
7. Transportasi dan Komunikasi	20.47	0.05	0.05

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Grafik II.6.
Perbandingan Angka Inflasi Tahun 2012-2016
Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Jika dibandingkan dengan laju inflasi nasional dan kota Palembang sebagai kota terdekat dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka selama periode tahun 2012-2016, laju inflasi Kota Pangkalpinang selalu lebih tinggi. Namun sejak laju inflasi di Kota Tanjung Pandan dihitung, laju inflasi tertinggi ada di Kota Tanjung Pandan yang mencapai 13.14 persen ditahun 2014. Tetapi kondisi berbeda terjadi pada tahun 2015, dimana inflasi Kota Tanjung Pandan terendah yaitu 0.88 persen dibandingkan dengan Kota Pangkalpinang dan Palembang masing-masing 4.66 persen dan 3.05 persen. Tahun 2016, secara keseluruhan inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 7,78 persen lebih tinggi dari pada Palembang 3,68 persen dan Nasional 3,02 persen.

(4) PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Bahwa PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita selain dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dari daerah tersebut.

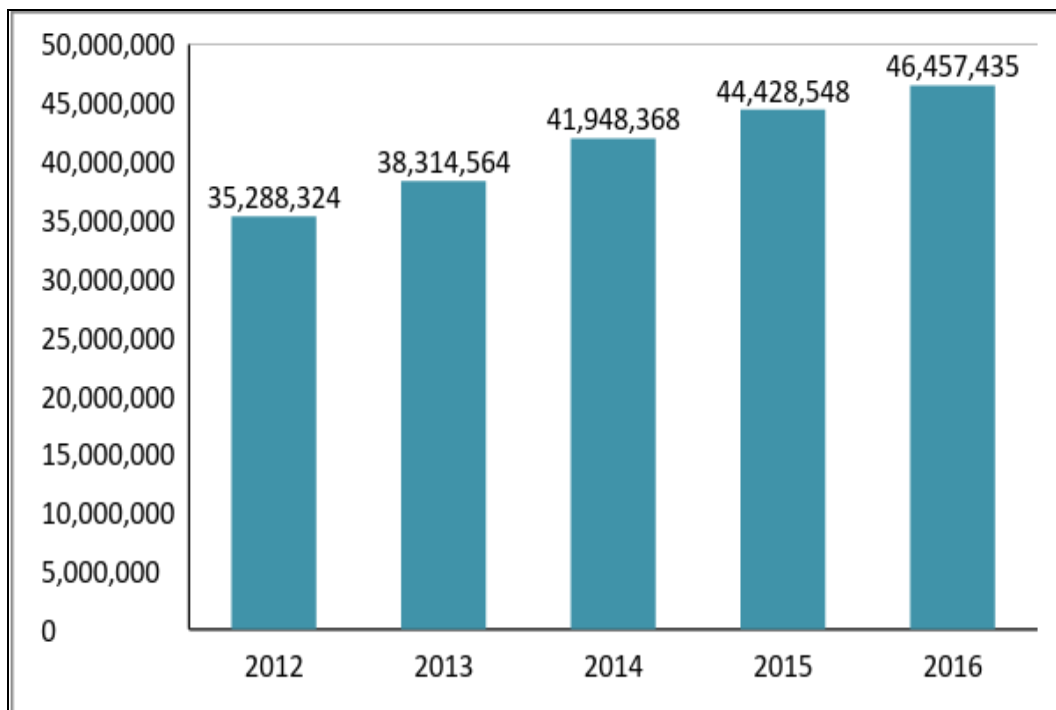
Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012 - 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp.35.288.324, kemudian naik mencapai Rp.46.457.435 rupiah pada

tahun 2016 atau meningkat sebesar Rp.11.169.111. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi belum cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut.

Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012-2016, sebagaimana disajikan pada Grafik II.7.

Grafik II.7.

PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2017

(5) Indeks Gini

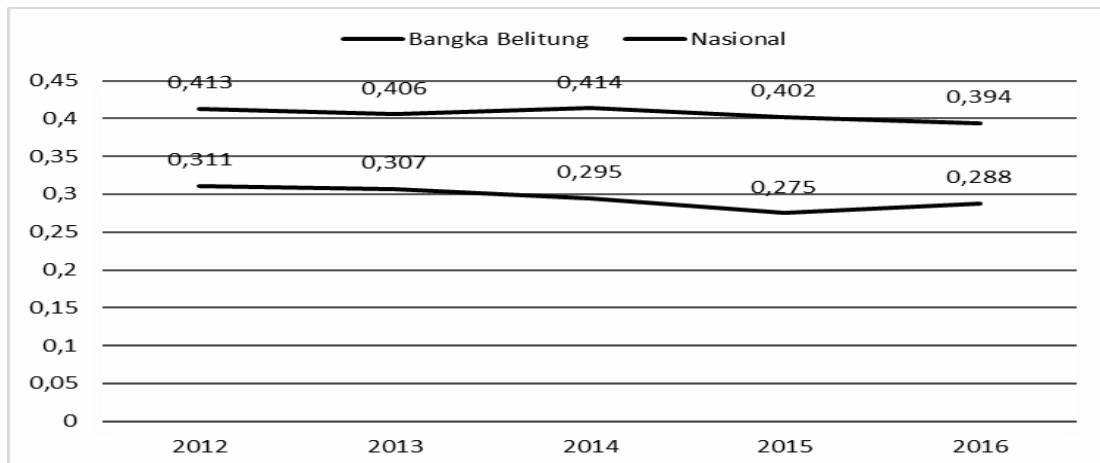
Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Pada Gambar di bawah terlihat bahwa Rasio Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu lebih rendah daripada nasional. Selama periode 2012-2015 nilai rasio Gini cenderung menurun dari 0,311 pada tahun 2012 menjadi 0,275 tahun 2015 dan naik kembali pada tahun 2016 sebesar 0,288. Naiknya angka Rasio Gini

di tahun 2016 patut diwaspadai mengingat Rasio Gini sebagaimana yang ditampilkan pada Grafik II.8 menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin merata walaupun secara nasional rasio gini nasional relatif tinggi.

Grafik II.8.

Indeks Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

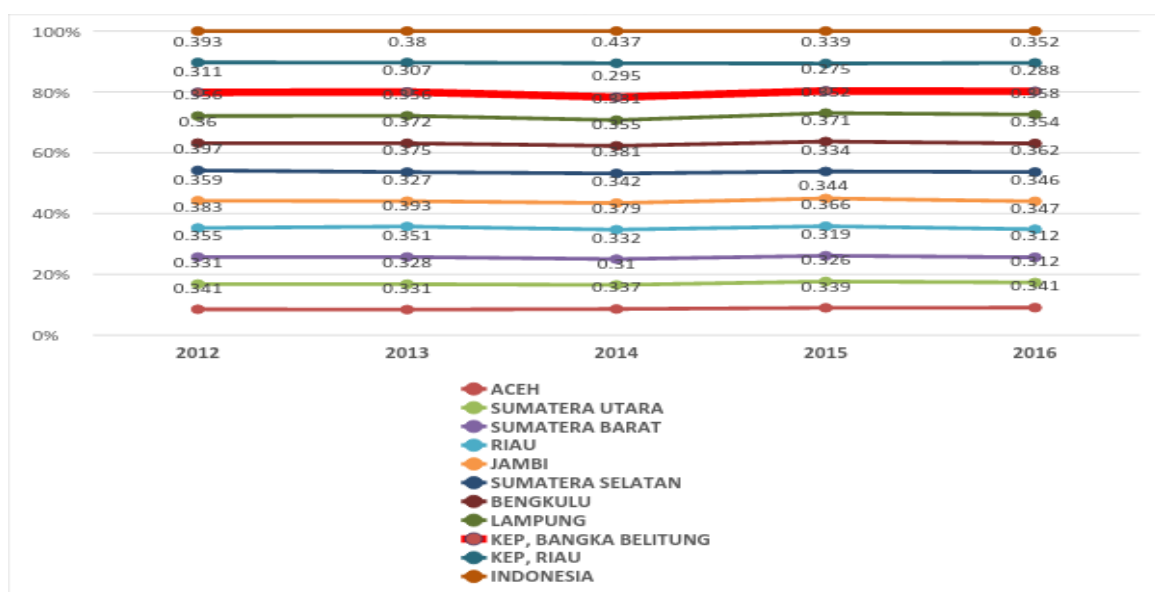


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Rasio Gini wilayah Sumatera dapat diamati pada tabel berikut ini, dimana nilai kesenjangan pendapatan desa dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling rendah di Pulau Sumatera dan sejak tahun 2014 selalu berada dibawah angka 0,30 sedangkan di provinsi lainnya selalu diatas 0,3.

Grafik II.9.

Indeks Gini Wilayah Sumatera dan Nasional Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

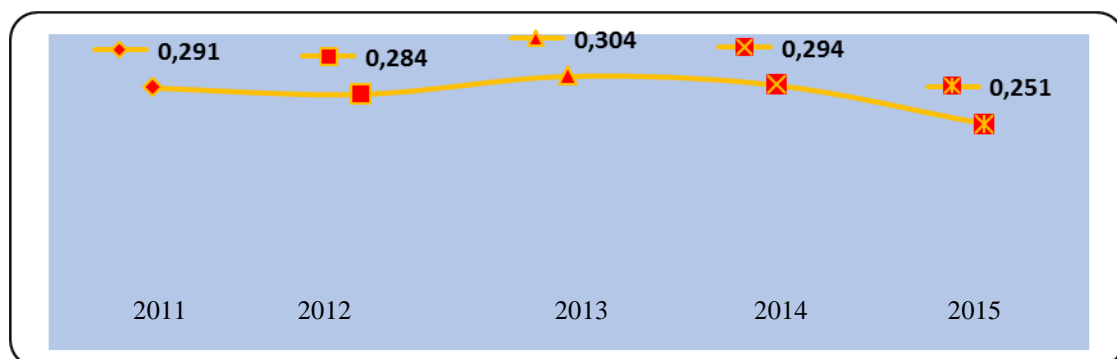
(6) Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson merupakan ukuran ketimpangan pendapatan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antar wilayah/daerah. Jika Ketimpangan Williamson mendekati 0, maka ketimpangan distribusi pendapatan antara kabupaten kota adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata. Jika Ketimpangan Williamson mendekati 1, maka ketimpangan distribusi pendapatan antara kabupaten kota adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata.

Pada periode 2011 sampai 2015 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kecenderungan fluktuatif menurun pada periode akhir. Pada tahun 2011 angka indeks sebesar 0,291 dan menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,284 dan naik pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,304. Pada tahun 2014 turun menjadi 0,294 dan kembali turun menjadi 0,251 di akhir periode 2015. Berdasarkan angka ini, maka pembangunan wilayah antar kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendekati merata. Hal ini sebagaimana yang ditampilkan pada Grafik II.10 berikut:

Grafik II.10.

Indeks Williamson Tahun 2011-2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda tahun 2016, data diolah.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

(1) Pendidikan

a. Angka Melek huruf

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Dalam perencanaan

pembangunan, Angka Melek Huruf digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Angka melek huruf dari tahun 2011-2014 cenderung meningkat namun stagnan pada tahun 2015-2016. Hal ini menunjukkan perlunya program keaksaran yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Angka melek huruf di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.21 berikut. Data menunjukkan bahwa angka melek huruf terendah dan berada dibawah rata-rata angka provinsi adalah Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Barat, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Tabel II.21.

Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15+ Menurut Kabupaten Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2012 s.d 2016

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	96,71	96,8	98,24	97,87	97,77
2	Bangka Barat	93,85	94,08	95,15	96,36	96,51
3	Bangka Tengah	96,79	96,81	97,29	97,78	97,47
4	Bangka Selatan	93,68	94,60	95,71	95,44	96,84
5	Belitung	96,57	97,65	98,68	98,86	97,35
6	Belitung Timur	96,74	97,63	98,92	98,77	98,28
7	Kota Pangkalpinang	98,22	98,3	99,26	98,60	99,41
	Provinsi Kep.Bangka Belitung	95,88	96,44	97,60	97,63	97,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017.

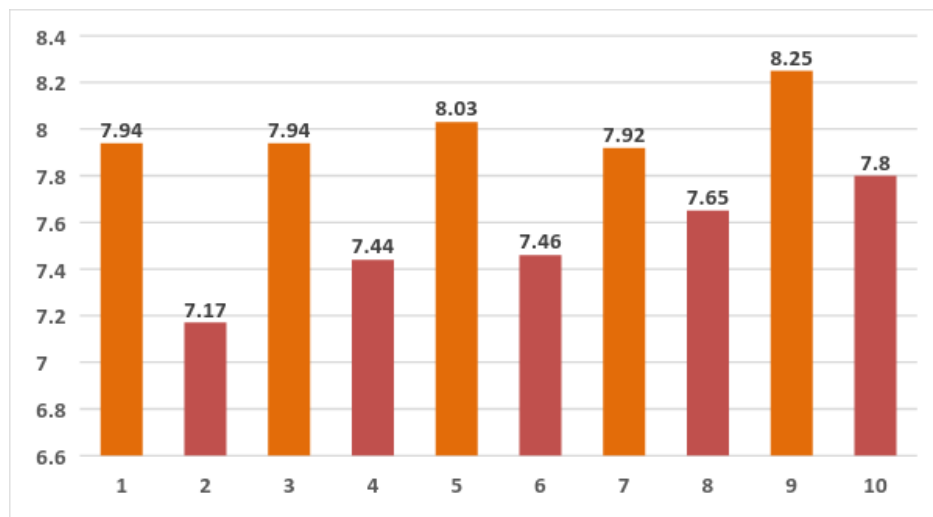
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang dan Indeks Pembangunan Manusia dapat diamati dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Sedangkan Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang yang diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas dan menunjukkan lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak dan dapat diamati pada tabel berikut ini.

Dari Grafik II.11 diketahui angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat dari tahun 2012 hingga 2016. Walaupun pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah perempuan turun dibandingkan tahun 2014 tetapi kemudian meningkat kembali di tahun 2016.

Grafik II.11.
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel II.22.
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tahun)

No	Kabupaten/ Kota	2012		2013		2014		2015		2016	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1	Bangka	8,56	7,51	8,34	7,63	8,28	7,47	8,12	8,03	8,50	8,25
2	Belitung	7,94	7,24	8,40	8,09	8,15	7,82	8,33	8,13	8,44	7,81
3	Bangka Barat	7,17	6,64	7,10	6,48	7,47	6,89	7,69	7,31	7,88	7,22

No	Kabupaten/ Kota	2012		2013		2014		2015		2016	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
4.	Bangka Tengah	7,40	6,65	7,48	6,76	7,35	6,61	7,25	6,75	7,41	6,91
5.	Bangka Selatan	6,37	5,54	6,45	6,35	6,56	6,23	5,90	5,65	6,77	6,47
6.	Belitung Timur	7,98	7,50	7,59	7,31	8,20	7,74	7,88	7,78	8,72	8,29
7.	Pangkalpinang	9,91	8,98	9,83	9,19	10,00	9,33	10,26	9,71	9,94	9,36
	Provinsi	7,94	7,17	7,94	7,44	8,03	7,46	7,92	7,65	8,25	7,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017.

Melihat perkembangan rata-rata lama sekolah di setiap kabupaten/kota tampak menunjukkan pola yang sama yaitu terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah di setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2016, tiga kabupaten dengan angka rata-rata lama sekolah terendah dan berada di bawah rata-rata lama sekolah provinsi yaitu Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka Barat. Sedangkan rata-rata lama sekolah tertinggi ada di Kota Pangkalpinang. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai rata-rata lama sekolah pada tiga daerah tersebut khususnya dan Bangka Belitung umumnya.

Dari Grafik II.12 diketahui harapan lama sekolah meningkat dari 10,79 pada tahun 2012 menjadi 11,71 pada tahun 2016. Kesenjangan angka jelas terlihat antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Grafik II.12.

Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016



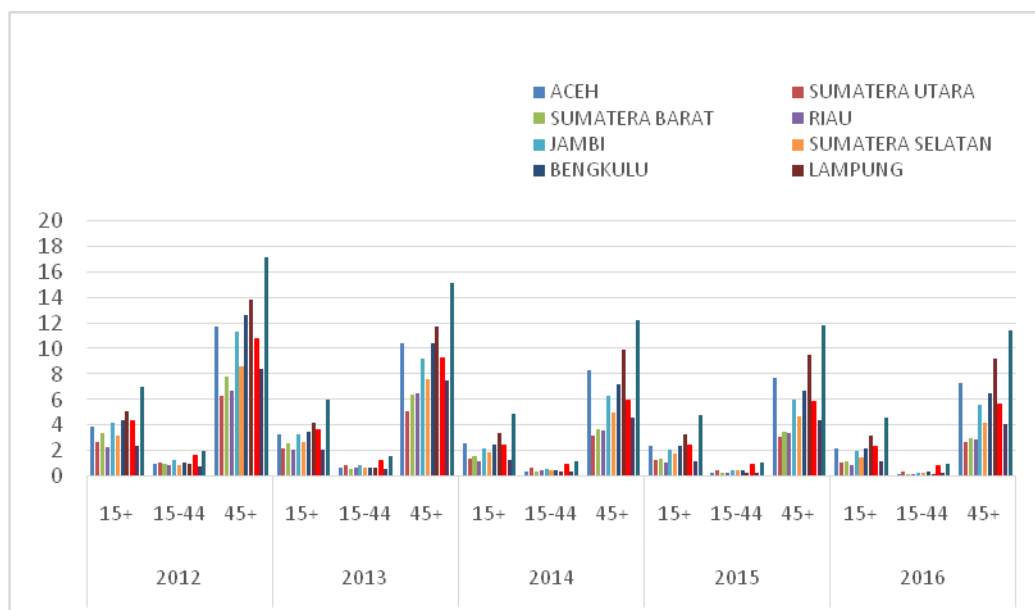
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

c. Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu. Memperhatikan Grafik II.13 diketahui selama periode 2012-2016, angka buta huruf Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah daripada nasional tetapi cenderung tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Angka buta huruf Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk usia penduduk 15-44 tahun tertinggi se-Sumatera dan urutan kedua tertinggi untuk usia 15 tahun keatas.

Grafik II.13.

Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2012 s.d 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

d. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) didefinisikan sebagai proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. APTS bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Tabel II.23.

Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah (%)								
	2012	2013	2014	2015			2016		
				SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Bangka	n/a	n/a	n/a	0,54	8,75	21,63	0,60	8,07	3,65
Belitung	n/a	n/a	n/a	1,05	10,39	16,62	0,00	5,62	3,76
Bangka Barat	n/a	n/a	n/a	0,21	6,64	16,08	0,77	13,47	6,67
Bangka Tengah	n/a	n/a	n/a	1,34	6,25	11,72	0,46	6,32	6,41
Bangka Selatan	n/a	n/a	n/a	0,83	7,46	21,93	0,37	7,98	23,05
Belitung Timur	n/a	n/a	n/a	2,27	12,58	9,45	0,00	7,68	13,01
Kota Pangkal Pinang	n/a	n/a	n/a	0,00	4,25	11,51	0,00	7,73	3,67
Kep. Bangka Belitung	n/a	n/a	n/a	0,77	7,87	15,92	0,37	8,11	7,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

APTS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi terutama untuk tingkat Sekolah Menengah yang dapat diamati pada tabel diatas. Tahun 2016 APT SMP meningkat dari 7,87 di tahun 2015 menjadi 8,11 persen di tahun 2016 berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 8 sampai 9 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 8 anak yang putus sekolah. Sementara itu APK SMA menunjukkan penurunan cukup besar dari 15,92 persen tahun 2015 menjadi 7,87 persen ditahun 2016, namun demikian angka ini juga terbilang tinggi mengingat secara rata-rata dari 100 anak usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 7 sampai 8 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 7 anak yang putus sekolah. APTS SD sangat baik dari 0,77 persen tahun 2015 menjadi 0,37 persen di tahun 2016 yang berarti bahwa secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 0 sampai 1 anak yang putus sekolah.

Untuk tingkat Kabupaten/kota, APTS cukup tinggi terutama untuk tingkat sekolah menengah. Pada tahun 2016, APTS tertinggi SMP ada di Kabupaten Bangka Barat yaitu 13,47 persen berarti secara rata-rata yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 13 sampai 14 anak putus sekolah untuk usia 13-15 tahun, sementara kabupaten lainnya berkisar antara 5 sampai 8 anak yang putus sekolah. sementara untuk APTS SMA, persentase tertinggi ada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 23,05 persen berarti secara rata-rata yang sedang atau pernah bersekolah terdapat ada 23 sampai 24 anak putus sekolah dan cenderung 23 anak putus sekolah usia 16-18 tahun. Disusul Kabupaten Belitung Timur sebesar 13,01 persen

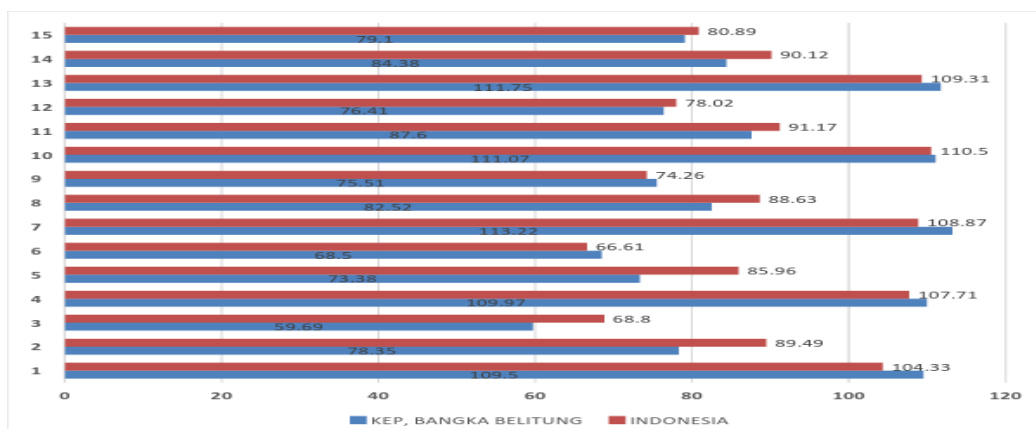
yang berarti berarti secara rata-rata yang sedang atau pernah bersekolah terdapat ada 13 anak putus sekolah usia 16-18 tahun. Sementara di Kota Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan APTS SMA cukup rendah dibandingkan kabupaten lainnya yaitu masing-masing 3,76 persen dan 3,67 persen yang menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak merata untuk SMA yang berlokasi jauh dari pusat kota.

e. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjang sekolah tersebut. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai.

Perkembangan APK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2016 dapat diamati pada Grafik II.14 dan Tabel II.24 dibawah ini. APK SM/SMA/SMK/Paket C Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi masih berada di bawah nasional. Pada tahun 2016 APK SM/SMK/MA/Paket C sebesar 79,1 sedangkan Nasional 80,89. Untuk APK SMP/Mts/Paket B angkanya fluktuatif selama periode tahun tersebut dan selalu berada dibawah angka nasional. Angka tertinggi terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 87,6 dan kembali turun ditahun 2016 sebesar 84,38 persen sedangkan Nasional 90,12. Sementara untuk APK SD/MI/Paket A mencapai angka tertinggi di tahun 2013 sebesar 113,22 tetapi selalu lebih tinggi dari angka nasional. Pada tahun 2016 APK SD/MI/Paket A sebesar 111,75 dan Nasional 109,31.

Grafik II.14.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia
Tahun 2012-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2017

Sementara itu diluar sekolah paket, APK SD/MI selama periode 2012-2016 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 109,50 menjadi 111,75. Sementara APK SMP/MTs juga menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ketahun dari 78,35 pada tahun 2012 menjadi 84,38 pada tahun 2016. Begitupula APK SMA/MA/SMK meningkat signifikan dari 59,69 tahun 2012 menjadi 79,10 pada tahun 2016. Walaupun meningkat, mengingat persentasenya APK tingkat sekolah menengah tergolong rendah terutama menengah atas.

Tabel II.24
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSD/MI	155,832	159,972	168,300	168,655	160.167
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	142,312	145,469	148,649	151,846	157.866
	APK SD/MI	109,50	109,97	113,22	111,07	111,75
2.	SMP/MTs					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSMP/MTs	54.220	51.888	59.649	64.684	60.498
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	69,202	70,740	72,284	73,840	79.565
	APK SMP/MTs	78,35	73,35	82,52	87,60	84,38
3.	SMA/MA/SMK					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSMA/MA/SMK	41.133	48.250	54.353	56.185	47.512
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	68,911	70,438	71,981	73,531	80.125
	APK SMA/MA/SMK	59,69	68,50	75,51	76,41	79,10

*) Belum termasuk data jumlah siswa MI, MTs, MA.

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Tabel II.25.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014/2015
Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

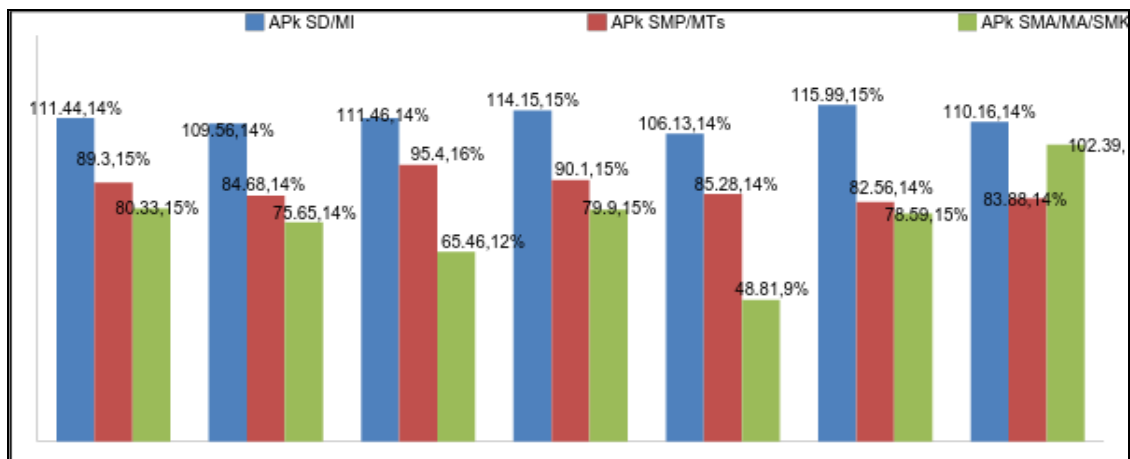
No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APK	Jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APK	Jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	38.315	34,382	111,44	15.005	16,803	89,30	13.257	16,503	80,33
2	Belitung	20.946	19,118	109,56	8.214	9,700	84,68	7.321	9,677	75,65
3	Bangka Barat	25.016	22,444	111,46	9.850	10,325	95,40	6.523	9,965	65,46
4.	Bangka Tengah	23.518	20,603	114,15	9.123	10,126	90,10	8.193	10,254	79,90
5.	Bangka Selatan	24.319	22,914	106,13	9.389	11,010	85,28	5.245	10,745	48,81
6.	Belitung Timur	14.922	12,865	115,99	5.013	6,072	82,56	4.634	5,896	78,59
7.	Pangkalpinang	38.315	34,382	111,44	15.005	16,803	89,30	13.257	16,503	80,33
	Jumlah	20.946	19,118	109,56	8.214	9,700	84,68	7.321	9,677	75,65

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Angka partisipasi kasar pada tahun 2014/2015 tingkat SD/MI terendah di Kabupaten Bangka Selatan 106,13. Walaupun demikian hal ini bukanlah suatu prestasi buruk bahkan telah menunjukkan tingginya partisipasi sekolah pada tingkat SD/MI.

Grafik II.15

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014/2015
Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

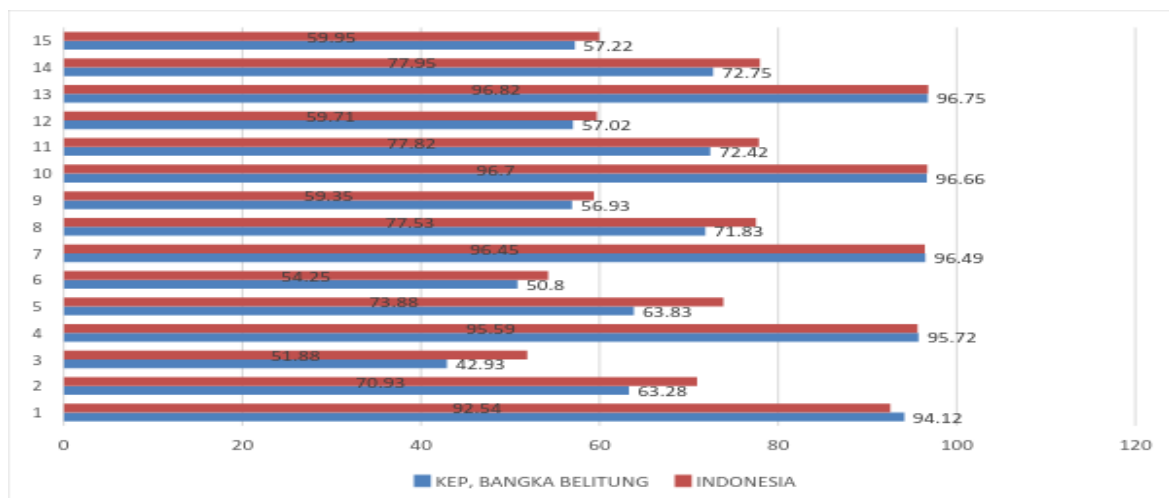
Angka partisipasi kasar tahun 2014/2015 tingkat SMP/MTs terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 82,56 dan tingkat SMA/MA/SMK terendah di Kabupaten Bangka Selatan 48,81. APK tingkat SMP/MTs secara keseluruhan masih berada di bawah APK nasional (101,6) sedangkan APK tingkat SMA/MA/SMK secara umum juga masih di bawah nasional (79,2) kecuali Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang APK-nya telah berada di atas APK nasional.

f. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

Perkembangan APM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2016 dapat diamati pada Grafik II.16 dan Tabel II.26 dibawah ini. APM SM/SMA/SMK/Paket C Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi masih berada di bawah nasional. Pada tahun 2016 APM SM/SMK/MA/Paket C sebesar 57,22 sedangkan Nasional 59,92. Sementara APM SMP/MTs/Paket B sebesar 72,75 dan lebih rendah daripada nasional yaitu 77,95. Sedangkan SD/MI/Paket A sebesar 96,75 dan lebih rendah sedikit daripada nasional yaitu 96,82.

Grafik II.16
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia
Tahun 2012-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

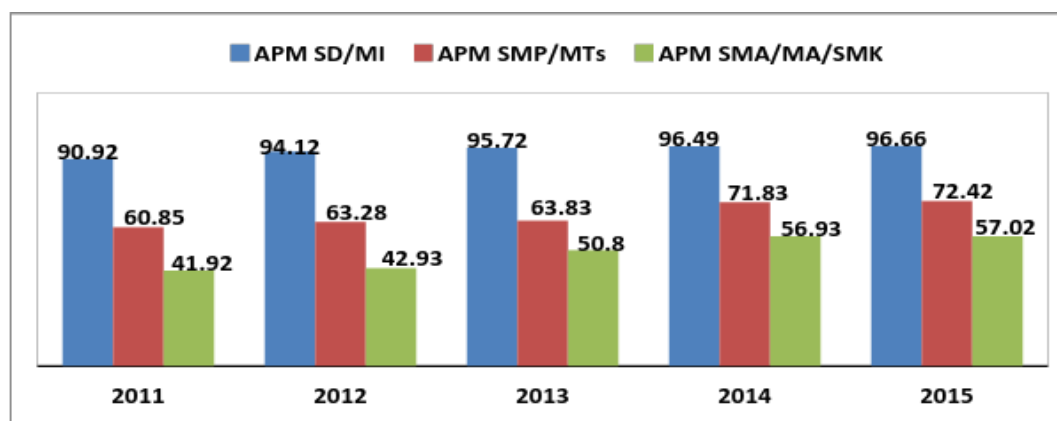
Tabel II.26.
Perkembangan APM Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SD/MI						
	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	126.542	133.944	139.243	143.431	146.774	
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	139,180	142,312	145,469	148,649	151,846	
	APM SD/MI	90,92	94,12	95,72	96,49	96,66	96,75
2.	SMP/MTs						
	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	41.183	43,791	45,153	51.921	53.475	
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	67,680	69,202	70,740	72,284	73,840	
	APM SMP/MTs	60,85	63,28	63,83	71,83	72,42	72,75
3.	SMA/MA/SMK						
	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/MA/SMK	28.251	29.583	35.782	40.979	41.927	
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	67,393	68,911	70,438	71,981	73,531	
	APM SMA/MA/SMK	41,92	42,93	50,80	56,93	57,02	57,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Sementara itu diluar sekolah paket, pada kurun waktu tahun 2011-2015 Angka Partisipasi Murni pada seluruh tingkat pendidikan meningkat. APM SD/MI pada tahun 2015 sebesar 96,99 telah melampaui APM nasional. Namun APM SMP/MTs Tahun 2015 sebesar 72,4 masih di bawah nasional berbeda dengan APM SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 55,3 yang telah berada di atas APM nasional.

Grafik II.17
Perkembangan APM Tahun 2011-2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Angka partisipasi murni untuk setiap kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada Tabel II.29 menunjukkan bahwa APM tingkat SD/MI terendah pada Tahun 2015 ada di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 95,08, tingkat SMP/MTs terendah di Kota Pangkalpinang sebesar 66,34 dan terendah tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 37,62.

Tabel II.27
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015
menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

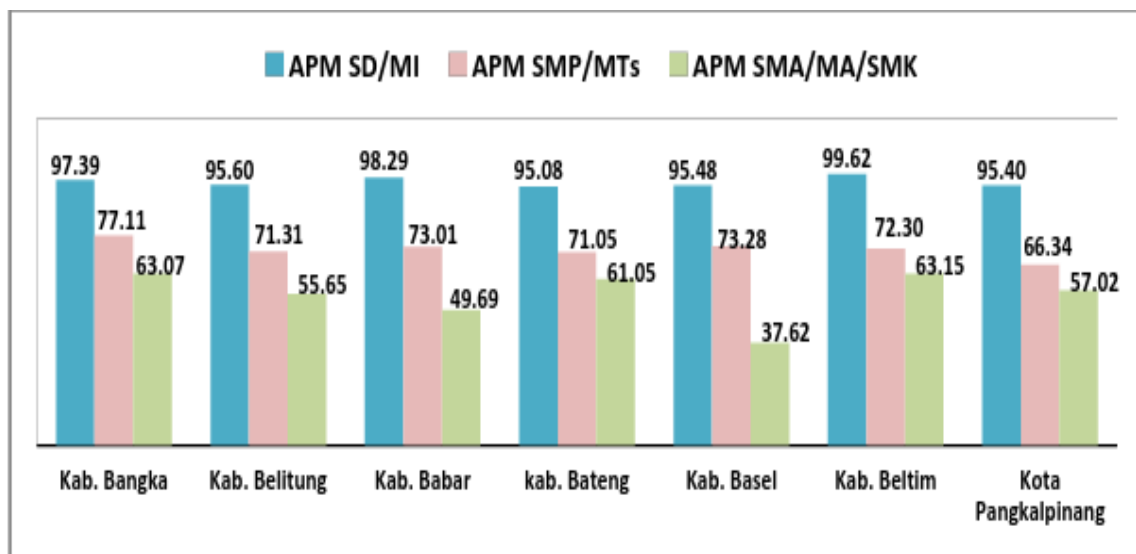
No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APM	Jumlah siswa usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APM	Jumlah siswa usia 16- 18 tahun bersekolah di SMA/MA/ SMK	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	33.485	34.382	97,39	12.957	16.803	77,11	10.408	16.503	63,07
2	Belitung	18.277	19.118	95,60	6.917	9.700	71,31	5.385	9.677	55,65
3	Bangka Barat	22.060	22.444	98,29	7.538	10.325	73,01	4.952	9.965	49,69
4.	Bangka Tengah	19.589	20.603	95,08	7.194	10.126	71,05	6.260	10.254	61,05
5.	Bangka Selatan	21.878	22.914	95,48	8.068	11.010	73,28	4.042	10.745	37,62
6.	Belitung Timur	12.816	12.865	99,62	4.390	6.072	72,30	3.723	5.896	63,15
7.	Pangkalpinang	18.622	19.520	95,40	6.504	9.804	66,34	7.086	10.491	67,54
	Jumlah	146.727	151.846	96,66	53.568	73.840	72,42	41.856	73.531	57,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016.

Angka partisipasi murni tingkat SD/MI pada Tahun 2015 di seluruh kabupaten/kota telah melampaui angka partisipasi murni nasional. Sedangkan untuk tingkat SMP, MTs seluruh kabupaten/koat APMnya berada di bawah nasional.

Grafik II.18

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015
menurut Kabupaten/KotaProvinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berbeda dengan APM tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka, Belitung, Bangka Tengah, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang telah melampaui APM nasional, hanya Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan saja yang berada di bawah nasional.

(2) Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Kesehatan menjadi salah satu topik perhatian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan harus menjadi topik strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.28

Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran
Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2016

No	Kabupaten/ Kota	2013		2014		2015		2016	
		Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bangka	6,96	16,2	5,35	6,73	7,54	9,58	7,43	8,23
2	Belitung	14,75	14,16	12,91	13,81	11,29	12,26	12,17	14,02
3	Bangka Tengah	4,95	4,95	5,74	6,74	6,46	7,86	6,46	6,46
4	Bangka Barat	9,21	8,48	7,61	7,87	7,37	8,38	6,63	7,14
5	Bangka Selatan	8,84	7,74	7,37	8,42	6,28	7,38	5,85	7,52
6	Belitung Timur	14,73	12,84	10,22	11,15	8,25	8,25	6,71	8,62
7	Kota Pangkalpinang	4,73	3,48	2,92	3,16	3,38	3,38	6,33	6,33
	Prov. Kep. Bangka Belitung	8,52	7,60	6,92	7,78	7,05	8,13	7,22	8,07

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan Tabel II.28, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2013–2016 di Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan menurun walaupun sedikit. Untuk tahun 2016 angka kematian bayi dan balita yang paling tinggi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 12,17 dan 14,02 dan Kabupaten Bangka dimana angka kematian bayi dan balita masing-masing 7,43 dan 8,23. Kedua kabupaten ini memiliki angka kematian bayi yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi. Naik turunnya angka kematian bayi dan balita dari tahun-ketahun di semua kabupaten perlu diwaspadai dan dicermati dengan baik seperti peningkatan angka kematian bayi dan balita di Kota Pangkalpinang yang mencapai titik tertingginya ditahun 2016 sebesar 6.33.

b. Usia Harapan Hidup

Tingginya Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional terutama di bidang kesehatan. UHH saat lahir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 mencapai 69,92 tahun sementara nasional 70,1 pada tahun 2015. UHH tertinggi berada masih berada di Kota Pangkalpinang 72,57 tahun diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur 71,30 tahun, Kabupaten Bangka 70,52 tahun, dan Kabupaten Belitung 70,38 tahun, Kabupaten Bangka Tengah 70,38 tahun, Kabupaten Bangka Barat 69,52 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 66,99 tahun. Dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini berarti angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi

Tabel II.29

Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012-2016

Provinsi/Kabupaten /Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	70,40	70,45	70,47	70,48	70,52
Belitung	70,15	70,20	70,22	70,32	70,38
Bangka Barat	69,39	69,44	69,46	69,47	69,52
Bangka Tengah	69,90	69,95	69,98	70,28	70,38
Bangka Selatan	66,41	66,51	66,56	66,86	66,99
Belitung Timur	70,98	71,01	71,03	71,23	71,30
Pangkalpinang	72,26	72,29	72,31	72,51	72,57
Prov. Kep. Bangka Belitung	69,48	69,64	69,72	69,88	69,92

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

C. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (ABI) dan Persentase Balita Gizi Buruk merupakan indikator standard Nasional dan Internasional untuk mengukur pembangunan urusan Kesehatan di suatu negara dan telah diakui oleh *World Health of Organization (WHO)*. Angka Kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 adalah 92,23 menurun dari tahun 2015 sebesar 115,05. Penyebab langsung kematian ibu adalah pendarahan, eklampsia, infeksi dan lain-lain. Sedangkan angka Kematian Ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel II.30 Berikut:

Tabel II.30

Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran
Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Provinsi/Kabupaten /Kota	Angka Kematian Ibu				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	107,16	121,03	107,00	188,50	96,85
Belitung	167,84	176,99	120,05	96,77	147,55
Bangka Barat	174,96	124,41	149,81	152,44	127,52
Bangka Tengah	215,29	82,55	104,96	56,16	58,69
Bangka Selatan	109,02	107,12	105,26	81,97	0,00
Belitung Timur	151,90	92,08	46,45	45,85	95,83
Pangkalpinang	74,53	124,60	48,63	96,60	121,65
Prov. Kep. Bangka Belitung	137,56	119,69	100,88	115,00	92,23

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan Tabel II.30, angka kematian ibu pada tahun 2012–2016 di Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan menurun walaupun sedikit. Untuk tahun 2016 angka kematian ibu yang paling tinggi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 147,55 dan Kabupaten Bangka Barat sebesar 127,52. Kedua kabupaten ini memiliki angka kematian ibu yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi. Naik turunnya angka kematian ibu dari tahun-ketahun di semua kabupaten perlu diwaspadai dan dicermati dengan baik serta perlu diketahui penyebab utama dari tingginya angka kematian ibu di dua kabupaten tersebut.

D. Persentase balita gizi buruk

Berikut ini pada tabel II.30a menjelaskan perkembangan persentase balita dengan gizi buruk dari tahun 2012 sampai dengan 2016, dimana untuk Tahun 2016 persentase balita dengan Gizi Buruk paling tinggi di Kota Pangkalpinang dengan persentase sebesar 0,10 sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Bangka Tengah dengan 0,03 %.

Tabel II.30a
Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	0,15	0,06	0,13	0,08	0,06
2	Belitung	0	0,01	0,01	0,03	0,05
3	Bangka Tengah	0,12	0,10	0,04	0,06	0,03
4	Bangka Barat	0,03	0,07	0,05	0,04	0,09
5	Bangka Selatan	0,21	0,05	0,02	0,05	0,04
6	Belitung Timur	0,20	0,15	0,02	0,06	0,04
7	Kota Pangkalpinang	0,16	0,11	0,01	0,05	0,10
	Kepulauan Bangka Belitung	0,12	0,07	0,05	0,05	0,06

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

d. Penyakit Menular

Jumlah kasus penyakit menular cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel II.31

Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	HIV	DBD	Diare	TB	Malaria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	30	218	6571	336	24
2	Belitung	47	120	1896	254	15
3	Bangka Barat	18	160	5391	165	139
4	Bangka Tengah	52	86	4145	171	35
5	Bangka Selatan	1	89	3182	126	38
6	Belitung Timur	5	18	2542	52	4
7	Kota Pangkalpinang	80	77	3231	226	24
	Kepulauan Bangka Belitung	233	768	26.938	1.330	279

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(3) Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2012-2015 telah mengalami penurunan dari 5,37 persen menjadi 4,83 persen. Namun mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 5,04 persen. Kemungkinan kenaikan dikarenakan adanya kenaikan pada jumlah angkatan kerja. Sedangkan lapangan pekerjaan masih kurang. Selain itu tingkat migrasi tinggi, sementara kualitas penduduk yang masuk tersebut relatif masih rendah. Sementara itu Indeks Kedalaman Kemiskinan sudah menunjukkan penurunan selama tahun 2012-2014, kemudian meningkat tajam di tahun 2015 menjadi 0,89, dan mulai turun menjadi 0,75 di tahun 2016.

Tabel II.32

Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d. 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,37	5,25	4,97	4,83	5,04
2.	Jumlah Penduduk Miskin	70.210	70.900	67.230	66.620	71.070
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	382.412	427.081	469.814	529.979	563.361
4.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,65	0,62	0,60	0,89	0,75

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel II.33
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d. 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	3,37	3,47	3,04	2,77	5,22
2.	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	6,69	6,97	6,84	6,83	5,04

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Memperhatikan Tabel II.33, pada tahun 2012-2016 tingkat kemiskinan di desa lebih besar daripada di kota. Tingkat kemiskinan di kota mencapai titik terendahnya sebesar 2,77 persen pada tahun 2015, tetapi kemudian meningkat tajam menjadi 5,22 persen pada tahun 2016. Sedangkan di desa, selama periode tahun 2012-2016 cenderung turun. Walaupun sempat mengalami kenaikan sebesar 6,97 persen di tahun 2013, tetapi kemudian turun signifikan menjadi 5,04 persen ditahun 2016 yang justru lebih rendah daripada tingkat kemiskinan di kota. Hal ini disebabkan karena pemutusan hubungan kerja yang terjadi di kota yang memiliki lapangan pekerjaan dominan di sektor industri dan jasa sebagai akibat perlambatan ekonomi di tahun 2015. Hal ini sangat pendapatan masyarakat perkotaan yang pada akhirnya masuk kedalam perangkap kemiskinan.

Tabel II.34
Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (Persen)
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	5.57	5.40	5,20	5,63	5,52
Belitung	7.26	8.48	7,36	8,38	7,85
Bangka Barat	3.72	3.26	3,15	3,08	2,74
Bangka Tengah	5.77	5.46	3,27	5,67	5,64
Bangka Selatan	4.4	4.01	3,87	3,74	3,62
Belitung Timur	7.43	6.90	6,68	7,33	6,99
Kota Pangkalpinang	4.29	4.15	4,04	4,97	5,02
Kepulauan Bangka Belitung	5.37	5.25	4,97	5,40	5,22

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017.

Sementara itu, berdasarkan Tabel II.34, dapat diketahui persentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Sementara itu, angka kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan.

Adapun perbandingan jumlah penduduk miskin pada provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada tabel II.35 berikut:

Tabel II.35

Data Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (Ribu Jiwa)

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	909,04	840,70	837,42	859,41	841,31
Sumatera Utara	1407,25	1339,16	1.360,60	1.508,14	1.452,55
Sumatera Barat	404,74	407,47	354,74	349,53	376,51
Riau	483,07	469,28	498,28	562,92	501,59
Jambi	271,67	266,15	281,75	311,56	290,81
Sumatera Selatan	1057,03	1110,37	1.085,80	1.112,53	1.096,50
Bengkulu	311,66	327,35	316,50	322,83	325,60
Lampung	1253,83	1163,06	1.143,93	1.1100,68	1.139,78
Kepulauan Bangka Belitung	71,36	69,22	67,23	66,62	71,07
Kepulauan Riau	131,22	126,67	124,17	114,83	119,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2017

Menurut tabel jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling sedikit diantara provinsi lainnya yang ada di Sumatera dengan persentase relatif kecil 5,04 persen. Namun demikian hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dari provinsi lainnya di Sumatera. Berikut tabel persentase penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatera.

Tabel II.36.

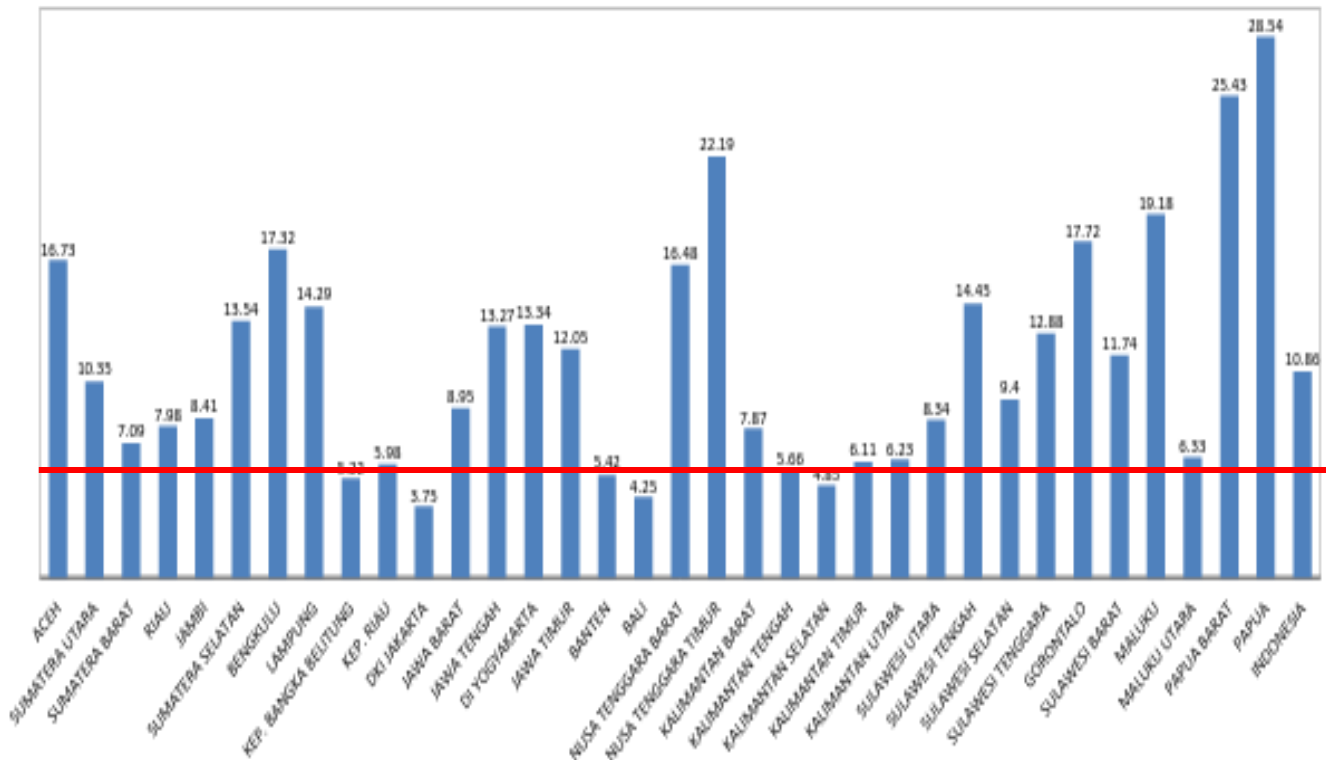
Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera
Tahun 2012-2016

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	19,46	17,60	16,98	17,11	16,43
Sumatera Utara	10,67	10,06	9,85	10,79	10,27
Sumatera Barat	8,19	8,14	6,90	6,71	7,14
Riau	8,22	7,72	7,99	8,82	7,67
Jambi	8,42	8,07	8,38	9,12	8,37
Sumatera Selatan	13,78	14,24	13,62	13,77	13,39
Bengkulu	17,7	18,34	17,09	17,16	17,03
Lampung	16,18	14,86	14,21	13,53	13,86
Kepulauan Bangka Belitung	5,53	5,21	4,97	4,83	5,04
Kepulauan Riau	7,11	6,46	6,40	5,78	5,84

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2017

Sementara itu berdasarkan data kemiskinan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan (%) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2016 adalah persentasenya berada di bawah rata-rata wilayah induknya (nasional).

Grafik II.19
Grafik Tingkat Kemiskinan (%)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nasional Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

(4) Rasio penduduk yang bekerja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Provinsi yang baru terbentuk menjadi salah satu daerah yang berpeluang besar dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, baik pencari kerja maupun membangun bidang usaha sendiri. Rasio penduduk yang bekerja yang merupakan perbandingan antara Penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, selama periode 2012-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung stabil, tahun 2012 sebesar 0,97% dengan penduduk yang bekerja sebanyak 583.102 dan tahun 2016 menurun sebesar 0,97 % dengan penduduk yang bekerja sebanyak 686.830 orang. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dikarenakan meningkatnya pula angkatan kerja penduduk usia 15 tahun keatas.

Tabel II.37

Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Usia kerja	920.065	948.702	973.192	998.120	1.022.955
2.	Angkatan Kerja	604.163	619.700	636.959	665.842	705.173
3.	Penduduk yang Bekerja	583.102	596.786	604.223	623.949	686.830
4.	Rasio Penduduk yang bekerja	0.97	0.96	0.95	0.94	0,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Untuk mengamati banyaknya sebaran penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.40, tren TPAK dari tahun 2012-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif dimana tahun 2012 sebesar 65,67 dan tahun 2013 turun menjadi 65,30, tahun 2015 naik menjadi 66,71, dan naik menjadi 68,93 ditahun 2016. Walaupun terjadi peningkatan TPAK, tingkat penangguran menunjukkan tren penurunan di tahun 2016 sebesar 2,60..

Tabel II.38

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
dan Tingkat Pengangguran Provinsi kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,10	65,30	62,09	66.71	68,93
2.	Tingkat Pengangguran	3,49	3,70	5.14	6.29	2,60

Catatan: * Pada bulan Agustus.

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2012-2016 ditampilkan pada Tabel II.41 menunjukkan 40-50 persen lapangan pekerjaan yang tersedia dari sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan. Lapangan pekerjaan pertanian meningkat signifikan antara tahun 2012-2015, dari 28,60 persen menjadi 36,36 persen di tahun 2015 kemudian turun menjadi 32,13 persen ditahun 2016. Sektor pertambangan menunjukkan penurunan signifikan ditahun 2012-2015 dari 22,10 persen menjadi 12,24 persen tetapi turun sedikit ditahun 2016 yaitu 11,48%. Hal ini menunjukan bahwa penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak ke sektor pertanian disebabkan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung lebih cenderung untuk bertani ketimbang untuk bekerja di bidang pertambangan walaupun pada tiga tahun terakhir harga komoditas pertanian dan perkebunan relatif menurun kecuali lada yang cenderung naik. Sedangkan untuk sektor pertambangan, relatif menurun selama lima tahun terakhir dikarenakan semakin terbatasnya cadangan timah yang dapat diakses oleh masyarakat. Mulai membaiknya harga komoditas logam timah di tahun 2016 menyebabkan industri logam timah lebih produktif sehingga terjadi peningkatan serapan kerja disektor ini. Selain itu, mahalnya biaya produksi lada sementara produktifitas lada rendah mengakibatkan masyarakat lebih memilih sektor lainnya yaitu perdagangan dan jasa kemasyarakatan.

Tabel II.39

Penduduk 15 tahun ke atas Tahun 2012 s.d 2016
menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lapangan Pekerjaan Utama	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sektor Primer :					
1. Pertanian	28,60	28,06	31.41	36.63	32,13
2. Pertambangan	22,10	21,28	17.50	12.24	11,48
Sektor Sekunder:					
3. Industri Pengolahan	6,20	6,06	5.88	5.65	8,02
4. Listrik, Gas dan Air	0,30	0,35	0.21	0.46	0,91
5. Bangunan	5,40	4,99	5.16	4.61	3,21
Sektor Tersier:					
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	19,90	18,49	20.45	19.68	21,69
7. Angkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi	2,40	2,90	2.86	2.91	2,88
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	1,80	1,93	2.19	2.11	1,99
9. Jasa Kemasyarakatan	13,40	15,94	14.35	15.70	17,70
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2017

Di luar sektor pertanian, secara kuantitas aktivitas ekonomi yang paling banyak dijalankan adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum, dan industri pengolahan masing-masing dengan distribusi usaha sebesar 43,28 persen, 14,41 persen dan 12,54 persen. Selaras dengan jumlah usaha, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu 27,85 persen dari seluruh tenaga kerja. Namun demikian kategori pertambangan dan penggalian menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan distribusi 21,80 persen, disusul industri pengolahan 11,02 persen, dan pendidikan sebesar 9,69 persen. Sedangkan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum 9,66 persen.

Jika dilihat menurut skala usaha, UMK mencatat tenaga kerja sebesar 84,87 persen

atau sebanyak 287.827 orang sedangkan UMB sebesar 15,13 persen atau sebanyak 51.282 orang.

Tabel II.40

Jumlah Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja Lapangan Usaha Non Pertanian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Lapangan Usaha	Jumlah Usaha			Jumlah Tenaga Kerja		
	UMK	UMB	Distribusi (%)	UMK	UMB	Distribusi (%)
Pertambangan dan Penggalian	12.142	104	9,61	67.538	6.401	21,80
Industri Pengolahan	15.859	115	12,54	27.589	9.780	11,02
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	180	29	0,16	524	1.938	0,73
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan aktivitas remediasi	266	11	0,22	624	256	0,26
Konstruksi	1.366	69	1,10	11.053	1.968	3,84
Perdagangan besar dan eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	54.387	759	43,28	85.247	9.182	27,85
Pengangkutan dan Pergudangan	2.323	162	1,95	3.936	2.289	1,84
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	18.288	77	14,41	30.395	2.364	9,66
Informasi dan Komunikasi	2.866	96	2,32	3.706	1.391	1,50
Aktivasi Keuangan dan Asuransi	445	376	0,64	2.668	5.916	2,53
Real Estat	5.605	48	4,44	6.475	325	2,01
Jasa Perusahaan	1.978	87	1,62	4.094	1.561	1,67
Pendidikan	3.488	49	2,78	30.495	2.375	9,69
Aktivasi Kesehatan Manusia dan Aktivasi Sosial	1.539	36	1,24	4.992	5.204	3,01
Jasa Lainnya	4.679	26	3,69	8.491	332	2,60
Jumlah	125.381	2.044	100	287.827	51.282	100

Sumber: Data Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara itu untuk mengamati sebaran tenaga kerja per lapangan usaha di Kabupaten/Kota dapat diamati pada tabel II.41 Kabupaten Bangka memiliki sebaran tenaga kerja terbanyak yaitu 71.447 orang dengan kategori lapangan usaha dominan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebanyak 19.914 orang dan pertambangan, energi, pengolahan air dan limbah sebanyak 17.676 orang. Kota Pangkalpinang dengan sebaran tenaga kerja sebanyak 60.903 orang. Sebagai ibukota provinsi menjadi tempat penyebaran tenaga kerja terbesar di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan jumlah 20.958 orang dan industri pengolahan dengan jumlah 6.754 orang. Kabupaten Belitung memiliki sebaran tenaga kerja ketiga terbanyak

yaitu 51.199 orang dengan lapangan usaha dominan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan jumlah 14.003 orang dan industri pengolahan dengan jumlah 8.303 orang. Sedangkan Bangka Selatan, Belitung Timur dan Bangka Tengah merupakan daftar kabupaten terendah menyerap tenaga kerja lapangan usaha non pertanian dimana lapangan usaha dominan ketiga kabupaten ini adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dan Pertambangan, Energi, Pengolahan Air dan Limbah. Hal ini menjelaskan masih tingginya ketergantungan aktivitas ekonomi di lapangan usaha primer non pertanian yaitu pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan.

Tabel II.41

Jumlah Tenaga Kerja Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha Non Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2016

Lapangan Usaha	Bangka	Belitung	Bangka Barat	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Belitung Timur	Pangkalpinang	Bangka Belitung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sektor Primer :								
Pertambangan, Energi, Pengolahan Air dan Limbah	17.676	6.546	16.072	10.821	9.322	14.700	2.144	77.281
Sektor Sekunder:								
Industri Pengolahan	8.789	8.303	3.975	3.696	2.443	3.409	6.754	37.369
Konstruksi	2.679	3.096	730	1.252	702	2.014	2.548	13.021
Sektor Tersier:								
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	19.914	14.003	10.851	12.072	9.711	7.280	20.958	94.429
Pengangkutan dan Pergudangan	790	1.375	547	785	342	337	2.049	6.225
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	6.071	5.887	3.178	3.528	3.038	3.099	7.958	32.759
Informasi dan Komunikasi	949	740	424	579	401	446	1.558	5.097
Aktivasi Keuangan dan Asuransi	909	1.527	766	1.084	523	563	3.212	8.584
Real Estat	1.422	1.144	566	580	464	480	2.174	6.800
Jasa Perusahaan	803	814	421	530	316	511	2.260	5.655
Pendidikan	7.576	4.308	5.313	3.994	3.454	3.089	5.136	32.870
Aktivasi Kesehatan manusia dan	2.186	1.570	1.245	1.125	680	1.084	2.306	10.196

Lapangan Usaha	Bangka	Belitung	Bangka Barat	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Belitung Timur	Pangkalpinang	Bangka Belitung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aktivitas Sosial								
Jasa Lainnya	1.683	1.916	681	834	444	1.059	2.206	8.823
Jumlah	71.447	51.199	44.769	40.880	31.840	38.071	60.903	339.109

Sumber: Data Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(5) Angka Kriminalitas yang Tertangani

Dalam penciptaan iklim investasi, angka kriminalitas di suatu daerah menjadi perhatian investor untuk melakukan investasi. Berdasarkan data, tindak pidana pencurian/perampokan, psikotropika, penganiayaan, pembunuhan, dan kesusilaan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka meningkatkan keamanan masyarakat. Adapun perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.42

Tabel II.42
Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 - 2016

No	Jenis Tindak Pidana	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pencurian/Perampokan	120	318	357	302	323	892
2	Penganiayaan	48	75	98	74	82	181
3	Pembunuhan	-	12	13	12	11	13
4.	Kesusilaan	-	50	39	30	48	78
5.	Psikotropika	138	187	152	222	232	201
6.	Perjudian	27	58	154	98	65	45
7.	Pemeriksaan	-	1	13	9	8	8
8.	Kelalaian Menyebabkan Kematian/Terluka	-	14	63	63	47	-
9.	Senjata Tajam	4	22	20	14	16	7

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Sementara itu, kasus psikotropika untuk jumlah penyalahgunaan narkoba cenderung tinggi yang dapat diamati pada Tabel II.43 Terjadi peningkatan yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir baik jenis penyalahguna coba pakai maupun pemakai/pengguna sementara dari sisi penyelesaian tidak cukup dapat tertangani.

Tabel II.43

Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenis Penyalahguna	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Coba Pakai	3.854			9.078	8.304	
2	Teratur Pakai	7.063			7.191	6.709	
3	Pecandu non Suntik	4.850			1.827	1.790	
4.	Pecandu Suntik	238			478	435	
Jumlah		10.642			18.547	17.238	

Sumber: BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel II.44 menampilkan jumlah tindak pidana dan penyelesaian tindak pidana yang ditangani oleh kepolisian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa Jumlah Tindak Pidana berfluktuasi dari tahun ke tahun. Demikian pula Penyelesaian Tindak Pidana. Secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan. Sejumlah faktor penyebab banyaknya jumlah tindak pidana dan belum maksimalnya persentase penyelesaian tindak pidana antara lain banyaknya orang yang mengalami ketertindasan akibat krisis berkepanjangan berujung pada tindak pidana. Selain itu juga dipicu oleh lemahnya kontrol sosial yang tidak diikuti dengan langkah penegakan hukum. Pada saat kontrol sosial melemah, juga terjadi demoralisasi pihak petugas yang mestinya menjaga keamanan. Aparat yang harusnya menjaga keamanan, seringkali justru melakukan tindak pelanggaran. Pada saat yang sama masyarakat belum atau tidak melihat adanya upaya yang berarti dari aparat keamanan sendiri untuk mengembalikan citranya.

Tabel II.44Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2016

NO	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Tindak Pidana	2.547	2.547	2.069	2.124	1.870
2	Penyelesaian Tindak Pidana	884	1.148	796	1.486	1.210
Persentase		34,71	45,07	38,47	69,96	64,71

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

(6) Perkembangan sosial

Tabel II.45 menunjukkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2012 hingga 2015 menunjukan tren yang meingkat tetapi pada tahun

2015-2016 kecendrungan penurunan jumlah PMKS. Perkembangan data sosial disajikan pada Tabel II.45

Tabel II.45
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	29.177	38.506	43.968	52.346	49.579

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Pelayanan urusan wajib

(1) Pendidikan

a. Angka partisipasi sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan perbandingan dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah di suatu daerah mencerminkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2011 s/d 2016 disajikan pada Tabel II.46

Tabel II.46
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SD/MI						
	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	135.394	139.053	142.749	147.400	150.662	
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	139,180	142,312	145,469	148,649	151,846	
	APS SD/MI (%)	97,28	97,71	98,13	99,16	99,22	99,25
2.	SMP/MTs						

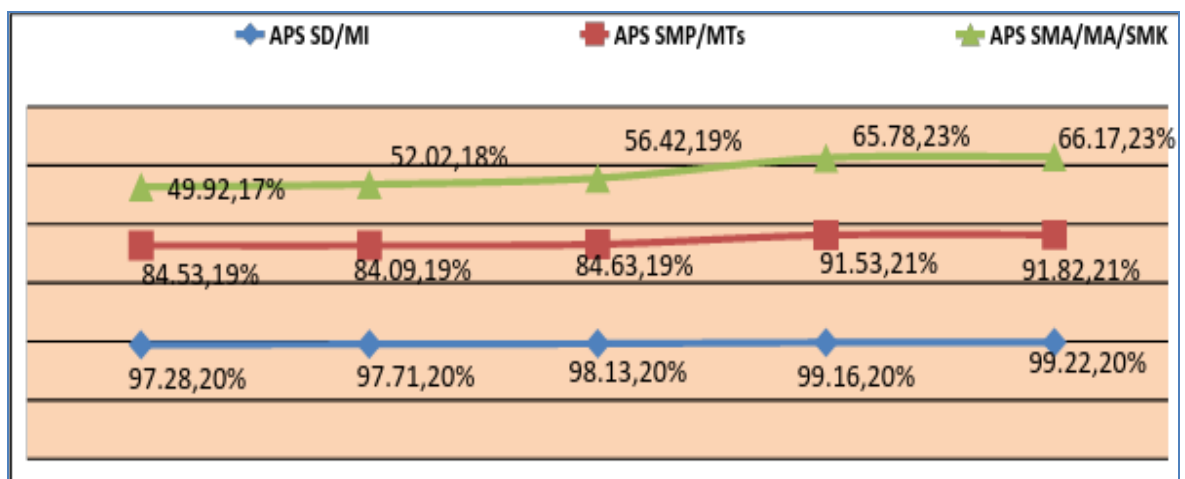
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	57.210	58.192	59.867	66.161	67.780	
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	67,680	69,202	70,740	72,284	73,840	
	APS SMP/MTs (%)	84,53	84,09	84,63	91,53	91,82	92,03
3.	SMA/MA/SMK						
	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/MA/SMK	33.642	35.847	39.741	47.349	48.655	
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	67,393	68,911	70,438	71,981	73,531	
	APS SMA/MA/SMK (%)	49,92	52,02	56,42	65,78	66,17	66,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2016 selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2015 APS tingkat SD/MI sebesar 99,22%, hal ini menunjukkan masih ada penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 1.184 anak atau 0,78% yang belum mendapatkan layanan sekolah tingkat SD/MI.

Grafik II.20

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs Tahun 2011 sebesar 84,53% dan menurun pada Tahun 2012 yaitu 84,09% dan terus meningkat hingga Tahun 2015 menjadi 91,82%. Demikian juga halnya dengan APS tingkat SMA/MA/SMK

dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014 mengalami kenaikan namun menurun pada Tahun 2015. Angka partisipasi sekolah tingkat SMA/MA/SMK Tahun 2015 sebesar 66,17% yang menunjukkan bahwa masih terdapat 33,83% penduduk usia 16-18 tahun belum mendapatkan layanan sekolah tingkat SMA/MA/SMK.

Angka partisipasi sekolah menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.47

Tabel II.48.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015
menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

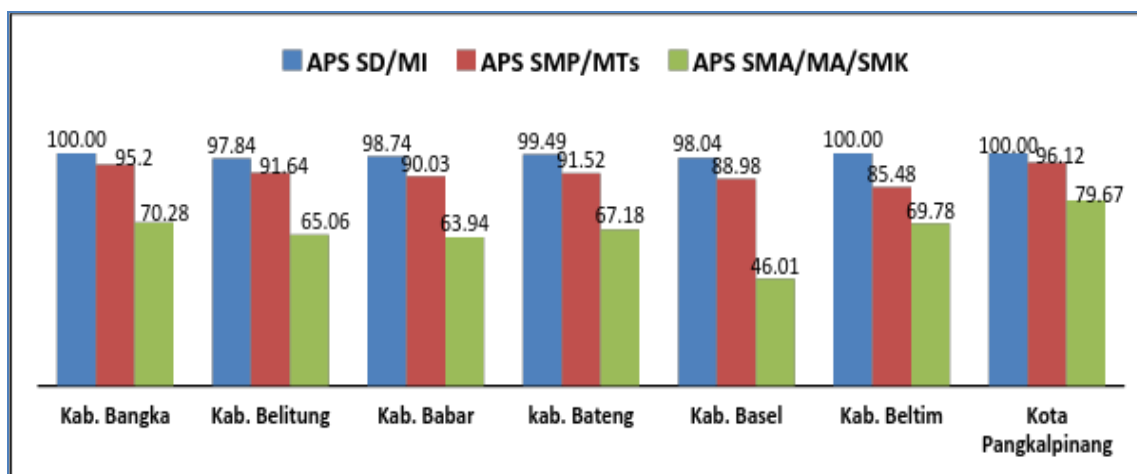
No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7- 12 tahun	Jumlah pendudu k usia 7- 12 tahun	APS	Jumlah siswa usia 13- 15 tahun	Jumlah pendudu k usia 13-15 tahun	APS	Jumlah siswa usia 16- 18 tahun	Jumlah pendud uk usia 16-18 tahun	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	34.382	34.382	100	15.996	16.803	95,20	11.598	16.503	70,28
2	Belitung	18.705	19.118	97,84	8.889	9.700	91,64	6.296	9.677	65,06
3	Bangka Barat	22.161	22.444	98,74	9.295	10.325	90,03	6.372	9.965	63,94
4.	Bangka Tengah	20.498	20.603	99,49	9.267	10.126	91,52	6.889	10.254	67,18
5.	Bangka Selatan	22.465	22.914	98,04	9.797	11.010	88,98	4.944	10.745	46,01
6.	Belitung Timur	12.865	12.865	100	5.190	6.072	85,48	4.114	5.896	69,78
7.	Pangkalpinan g	19.520	19.520	100	9.424	9.804	96,12	8.358	10.491	79,67
	Jumlah	150.596	151.846	99,22	67.859	73.840	91,82	48.571	73.531	66,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Angka partisipasi sekolah Tahun 2015 tingkat SD/MI di Kabupaten bangka, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang mencapai 100%, ini menunjukkan seluruh penduduk usia 7-12 tahun telah mendapatkan layanan sekolah tingkat SD/MI. Namun masih ada daerah kabupaten yang belum mencapai 100% APSnya yaitu Kabupaten Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Bangka Selatan, yang menunjukkan masih ada penduduk usia 7-12 tahun belum mendapatkan layanan sekolah SD/MI.

Grafik II.21

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015
Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015), diolah

Angka partisipasi sekolah Tahun 2015 tingkat SMP/MTs terendah di Kabupaten Belitung Timur 85,48% dan belum ada daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai APS 100%. Ini menunjukkan bahwa pada setiap kabupaten dan kota masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan tingkat SMP/MTs.

Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMA/MA/SMK, APS terendah di Kabupaten Bangka Selatan 46,01%, yang menggambarkan bahwa lebih dari setengah penduduk usia 16-18 tahun belum mendapatkan layanan pendidikan tingkat SMA/MA/SMK. Begitu juga halnya dengan daerah kabupaten/kota lainnya, masih terdapat penduduk usia 16-18 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMA/MA/SMK.

b. Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah / Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Selama kurun waktu 2011-2014 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan.

Tabel II.49

Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah
Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
	Jumlah gedung sekolah	809	817	815	812	830
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	139.180	142.312	145.469	148.649	151.846
	Rasio	58,13	57,41	56,03	54,63	54,66
2.	SMP/MTs					
	Jumlah gedung sekolah	219	234	231	232	244
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	67.680	69.202	70.740	72.284	73.840
	Rasio	32,36	33,81	32,65	32,10	33,04
3.	SMA/MA/SMK					
	Jumlah gedung sekolah	130	133	157	139	139
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	67.393	68.911	70.438	71.981	73.531
	Rasio	19,29	19,30	22,29	19,31	18,90

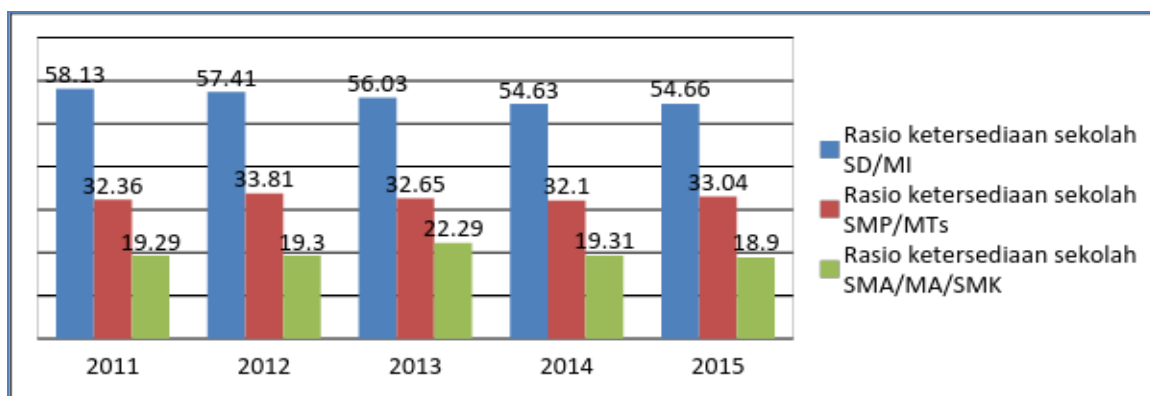
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Keterangan: Jumlah Gedung Sekolah sumber data dari Dinas Pendidikan

Pada tahun 2011 rasio ketersediaan sekolah mencapai 58,13 sekolah per 10.000 penduduk, dan menurun hingga 54,63 sekolah pada Tahun 2014. Pada Tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah sedikit meningkat dibanding tahun 2014 yaitu 54,66 sekolah per 10.000 penduduk.

Gambar II.7

Ketersediaan Sekolah Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2016, diolah

Berdasarkan data, rasio ketersediaan sekolah yang terendah ada pada tingkatan SMA/SMK/MA, dengan jumlah penduduk usia sekolah pada tingkatan tersebut berjumlah 73.531 orang, namun kapasitas sekolah yang tersedia adalah hanya 139 sekolah atau dengan rasio 18,90.

Data mengenai ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2014/2015 menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.50

Tabel II.50

Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015
menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7- 12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 16-18th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	187	34.382	54,39	59	16.803	35,11	34	16.503	20,60
2	Belitung	121	19.118	63,29	29	9.700	29,90	17	9.677	17,57
3	Bangka Barat	138	22.444	61,49	43	10.325	41,65	22	9.965	22,08
4.	Bangka Tengah	97	20.603	47,08	26	10.126	25,68	13	10.254	12,68
5.	Bangka Selatan	94	22.914	41,02	36	11.010	32,70	18	10.745	16,75
6.	Belitung Timur	105	12.865	81,62	24	6.072	39,53	13	5.896	22,05
7.	Pangkalpinang	88	19.520	45,08	27	9.804	27,54	18	10.491	17,16
	Jumlah	830	151.846	54,66	244	73.840	33,04	139	73.531	18,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Keterangan : Jumlah Gedung Sekolah sumber data dari Dinas Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah Tahun 2014/2015 tingkat SD/MI terendah terdapat di Kabupaten Bangka Selatan 41,02, tingkat SMP/MTS dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Tengah yaitu masing-masing 25,68 dan 12,68.

Sedangkan rasio ketersediaan sekolah Tahun 2014/2015 tingkat SD/MI tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung Timur 81,62, tingkat SMP/MTS di Bangka Barat dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Tengah yaitu masing-masing 41,65 dan 22,08.

(2) Kesehatan

a. Jumlah rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada kurun waktu 2011-2016, ketersediaan fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi baik dan di setiap kabupaten kota sudah memiliki rumah sakit pemerintah. Berikut ini jumlah

rumah sakit pemerintah diuraikan pada Tabel II.51

Tabel II.51
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	1	1	2	2	2	2
Belitung	1	1	1	1	1	1
Bangka Barat	1	1	1	1	1	1
Bangka Tengah	1	1	1	1	1	1
Bangka Selatan	1	1	1	1	1	1
Belitung Timur	1	1	1	1	1	1
Pangkal Pinang	1	1	1	1	1	1
Provinsi Kep. Babel	7	7	8	8	8	8

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

b. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Tabel II.52
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	7	7	8	8	8
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya milik Pemerintah	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	9	9	9	9	9
6.	Jumlah Penduduk	1.289.321	1.339.773	1.343.881	1.372.813	1.401.827
7.	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel II.53

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten /Kota	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kab. Bangka	2	0,01	1	0,00	-	-	-	-	2	0,01	5	0,02
2	Kab. Bangka Barat	1	0,00	-	-	-	-	-	-	1	0,00	2	0,01
3	Kab. Bangka Tengah	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
4	Kab. Bangka Selatan	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
5	Kab. Belitung	1	0,01	-	-	-	-	-	-	1	0,01	2	0,01
6	Kab. Belitung Timur	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
7	Kota Pangkalpinang	1	0,01	-	-	-	-	-	-	3	0,02	4	0,02
	Jumlah	8	0,04	35	0,00	-	-	-	-	7	0,03	16	0,08

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel di bawah, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2016 di kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar dibanding tahun 2015, seperti terjadi di Kabupaten Bangka Selatan yang mengalami peningkatan sebesar 74,8 persen, diikuti Kabupaten Bangka Barat 89,5 persen, Kabupaten Bangka Tengah 56,8 persen, Kota Pangkalpinang 88,7 persen. Namun juga terjadi penurunan akses terhadap air bersih yang tidak begitu besar, yakni di Kabupaten Belitung menjadi 74,2 persen dan Kabupaten Belitung Timur menjadi 76 persen.

Tabel II.54

Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses
Terhadap Air Bersih Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	81,39	87,7	87,7	75,3	77,9
2	Belitung	78,44	75,6	75,6	84,5	74,2
3	Bangka Tengah	78,87	48,2	48,2	47,7	56,8
4	Bangka Barat	54,66	87,4	87,4	83,7	89,5

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
5	Bangka Selatan	73,80	76,4	76,4	59,6	74,8
6	Belitung Timur	72,39	100	100	76,6	76,0
7	Kota Pangkalpinang	91,84	92,0	92,0	87,7	88,7
	Kepulauan Bangka Belitung	76,38	80,2	80,2	73,7	77,6

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Beberapa jenis penyakit yang menjadi perhatian dan sekaligus topik penting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain penyakit malaria, HIV, dan demam berdarah. Perkembangan angka penyakit yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut.

HIV/AIDS merupakan masalah lintas sektoral yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan semakin tersedianya akses pelayanan HIV dan AIDS jumlah kasus yang dilaporkan pun semakin banyak. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan gejala penyakit berat karena menurunnya imunitas tubuh akibat infeksi HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*). Berdasarkan laporan kegiatan serosurvey yang dilakukan di beberapa populasi berisiko menunjukkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah dengan epidemi terkonsentrasi (prevalensi > 5% pada populasi berisiko).

Dari kegiatan serosurvey pada populasi berisiko diperoleh data prevalensi >5% di dua kabupaten, yaitu tertinggi di Kota Pangkalpinang 6.67%, Bangka 3.94%, sedangkan di dua kabupaten lainnya prevalensi HIV adalah sebagai berikut Belitung Timur 2,17% dan Bangka Selatan 1.08% sedangkan yang terendah di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Belitung, Bangka Tengah dan Bangka Barat 0%. Prevalensi kasus HIV/AIDS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disajikan dalam tabel II.55 berikut:

Tabel II.55
Perkembangan Prevalensi HIV
(Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko)
Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bangka	0	8,33	3,94	3,94	0	0	0
2	Belitung	0,56	2,70	1,80	0	0	0	0
3	Bangka Tengah	8,11	2,50	0,01	0	0	0	0
4	Bangka Barat	4,94	0	0	0	0	0	0
5	Bangka Selatan	0	3,17	9,84	1,08	0	0	0
6	Belitung Timur	3,85	0,20	0,02	2,17	0	0	0

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Kota Pangkalpinang	1,96	6,98	10,33	6,67	0	0	0
	Kepulauan Bangka Belitung	8,11	8,33	10,33	13,86	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Dengan adanya fenomena gunung es dalam masalah HIV menggambarkan bahwa peningkatan penemuan kasus HIV/AIDS tidak berarti merupakan suatu kegagalan, melainkan disebabkan semakin banyak kasus yang dilaporkan terkait semakin tersedianya akses bagi masyarakat yang memerlukan.

Dalam rangka pengendalian permasalahan kesehatan yang terjadi dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pula ketersediaan tenaga dokter menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan tersebut. Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.56

Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	11	12	12	12	12
2	Belitung	9	9	9	9	9
3	Bangka Tengah	7	7	8	8	8
4	Bangka Barat	8	8	8	8	8
5	Bangka Selatan	9	9	9	9	9
6	Belitung Timur	6	6	6	7	7
7	Kota Pangkalpinang	9	9	9	9	9
	Kepulauan Bangka Belitung	59	60	61	62	62

Sumber: BPS Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel II.57

Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2012		2013		2014		2015		2016	
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
(1)	(2)	(5)	(6)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	11	36	11	37	12	36	12	33	12	35
2	Belitung	9	31	9	31	9	31	9	33	9	32
3	Bangka Tengah	7	18	7	21	7	18	8	19	8	20
4	Bangka Barat	8	19	8	19	8	19	8	18	8	19
5	Bangka Selatan	9	29	8	28	9	29	9	29	9	28
6	Belitung Timur	6	18	6	17	6	18	6	18	7	17
7	Kota Pangkalpinang	9	19	9	7	9	19	9	19	9	19
	Prov. Kep. Bangka Belitung	59	169	58	160	60	169	61	169	62	170

Sumber: BPS Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel II.58

Perkembangan Jumlah Dokter Tahun 2010 s.d 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah	2011			2012			2013			2014			2015			2016		
	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Prov. Kep. Babel	6	1	0	16	2	1	26	4	4	25	8	14	28	8	23	24	7	9
Bangka	60	13	17	60	11	22	62	9	29	67	5	33	82	17	50	68	25	40
Belitung	40	10	2	41	10	8	51	18	9	42	11	14	45	14	18	67	14	34
Bangka Tengah	39	7	2	42	7	4	46	8	5	42	5	7	42	5	7	48	9	7
Bangka Barat	38	5	2	54	5	4	57	8	3	52	11	5	47	11	6	39	9	8
Bangka Selatan	27	5	0	27	6	0	26	7	3	27	7	4	32	7	6	28	5	11
Belitung Timur	34	5	0	34	8	2	34	10	4	39	9	4	41	9	10	37	8	12
Pangkalpinang	61	17	41	61	21	51	63	20	56	69	25	49	69	25	49	75	24	51PNS
Jumlah	305	63	64	335	70	92	365	84	113	363	81	130	386	96	169	386	101	172

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017;

Keterangan : U : Dokter Umum G : Dokter gigi Sp : Dokter Spesialis

Berdasarkan data pada Tabel II.58 terlihat bahwa jumlah dokter terus mengalami peningkatan, namun kebutuhan akan tenaga dokter masih dirasakan kurang, terutama pada tenaga dokter spesialis. Terbatasnya ketersediaan akan dokter spesialis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan banyaknya masyarakat yang harus berobat keluar daerah dan hal tersebut dirasakan memberatkan masyarakat terutama dari sisi pembiayaan.

(3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan.

Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur pengelolaan dan sanksinya oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengaturan kawasan dalam Perda Tata Ruang terbagi dua kawasan yaitu: Kawasan lindung seluas 189.965 Ha merupakan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan yang di bawahnya; Kawasan Budidaya berupa kawasan hutan produksi seluas 432.884Ha, kawasan pertanian (903.450 Ha), kawasan perikanan, kawasan pertambangan (400.000Ha), kaw industri, kaw pariwisata, kaw permukiman (59.188Ha), dan kawasan peruntukan lainnya seluas 750Ha Berdasarkan penentuan kriteria lahan kritis sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor SK.167/V-set/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis, mana lahan kritis terbagi atas lima kriteria yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Kriteria yang umum digunakan sebagai data lahan kritis adalah yang termasuk dalam kriteria sangat kritis (1) dan kritis (2), sedangkan kriteria agak kritis bersama-sama dengan kritis dan sangat kritis, dapat dikatakan sebagai lahan kurang produktif bila ditinjau dari aspek daya dukung/kemampuan lahan (*land capability*).

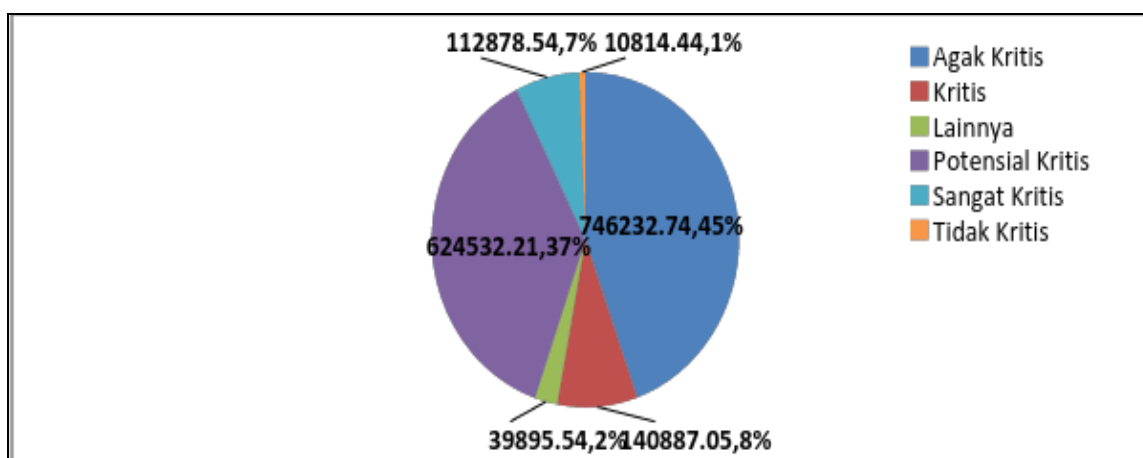
Tabel II.59
Analisis Total Kelas Tingkat Lahan Kritis Tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kelas Kritis	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Agak Kritis	746.232,74
2	Kritis	140.887,05
3	Lainnya	39.895,54
4	Potensial Kritis	624.532,21
5	Sangat Kritis	112.878,54
6	Tidak Kritis	10.814,44
Jumlah		1.675.240,51

Sumber: inventarisasi kerusakan lingkungan/lahan Prov. Kep. Bangka Belitung(BLHD), 2014

Grafik II.22

Presentase Lahan Kritis Tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Inventarisasi kerusakan lingkungan/lahan (BLHD), 2014

Dapat dilihat dari presentase total lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kelas agak kritis mendapatkan presentasi terbanyak sebesar 45 persen atau 746.232,74 Ha. Diikuti dengan potensial kritis sebesar 37 persen atau seluas 624.532,21 Ha. Sementara itu yang termasuk lahan kritis adalah seluas 140.887,05 Ha atau 8 persen. Sedangkan yang tidak kritis adalah seluas 10.814,44 Ha atau hanya 1 persen saja.

Adanya beberapa perubahan lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2013 ke tahun 2014 yang disebabkan banyak faktor seperti kegiatan pertambangan, industri, dan lain-lain.

Urusan Penataan Ruang, dilaksanakan dalam mendukung target sasaran pembangunan daerah yaitu, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Capaian kinerja pembangunan pada urusan tata ruang salah satunya adalah dengan melihat kesesuaian antara perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Gambaran mengenai capaian kinerja urusan penataan ruang, adalah sebagaimana yang tertuang didalam tabel II.60 berikut.

Tabel II.60

Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang
Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	11.57	11.57	11.57	11.57	
Ketaatan terhadap RTRW	87.50	95.00	100.00	100.00	
Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	n.a	3.50	6.89	17.20	
Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	-	-	-	-	

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2016)

Berdasarkan table II.60 diatas, dapat terlihat bahwa capaian kinerja urusan penataan ruang cenderung meningkat dan berada diatas target yang telah ditetapkan didalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2016 telah ditetapkan 1 (satu) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Tanjung Kelayang Belitung. Penetapan KEK Pariwisata tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

b. Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan guna mendukung target sasaran daerah dalam Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. Salah satunya adalah untuk memastikan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantab.

Perkembangan panjang jalan berdasarkan kewenangan dan kondisi pada masing-masing jalan dan jembatan pada tahun 2015 adalah sebagaimana tertuang didalam tabel II.61 berikut:

Tabel II.61

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2016

No	Kondisi Jalan	Negara	Provinsi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jenis Permukaan			
	Diaspal	600,4	896,33	1.496,73
	Kerikil	0,00	0,00	0,00
	Tanah	0,00	3,00	3,00
2.	Kondisi Jalan			
	Baik	539,17	387,33	926,50
	Sedang	52,72	441,89	494,61
	Rusak	7,20	58,60	65,80
	Rusak Berat	1,30	11,51	12,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Berdasarkan data diatas, terdapat 58,60 km panjang jalan provinsi dalam keadaan rusak dan 441,89 km kondisi jalan dalam keadaan sedang. Dengan kondisi yang demikian, maka peningkatan kualitas jalan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Tabel II.62

Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksi dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2016

Jenis Kontruksi		Negara	Provinsi	Jumlah Total
(1)		(2)	(3)	(5)
1. Beton+Kayu/Baja+Kayu		0,00	81,30	81,30
2. Beton Bertulang		1 804,03	2 876,90	4 680,93
3. Rangka baja		992,15	474,00	1 466,15
Jumlah/Total	2015	2 796,18	3 432,20	6 228,38
	2014	2 273,98	3 969,85	6 243,83
	2013	2 228,00	3 444,80	5 672,80
	2012	2 173,00	2 123,40	4 296,00
	2011	2 262,00	1 522,90	3 784,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

(4) Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Tabel II.63

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	N/A	N/A	1.053	1.097	1.229	1238
2.	Jumlah penduduk	1.258.234	1.286.551	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1401827
3.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk	N/A	N/A	8,01	8,16	8,95	8,83

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dari tabel Rasio Jumlah polisi Pamong Praja di atas, menunjukkan bahwa rasio jumlah polisi pamong praja per jumlah penduduk relatif meningkat dimana tahun 2013 sebesar 8,01 meningkat menjadi 8,16 tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 8,95. Walaupun kenaikan ini relatif kecil namun dapat dijadikan patokan bahwa Pemerintah daerah memberikan perhatian yang cukup terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.64

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Pos Siskamling	N/A	N/A	609	721	988	1.138
2.	Jumlah Desa	372	380	381	387	386	386
3.	Rasio Jumlah siskamling	N/A	N/A	1,60	1,86	2,56	2,95

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Dari tabel Rasio Pos Siskamling di atas, menunjukkan peningkatan rasio jumlah Pos Siskamling di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana tahun 2013 sebesar 1,97 meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 2,33 dan tahun 2015 sebesar 3,20.

(5) Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen baik pemerintah maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial, meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel II.66 dimana tahun 2012 jumlah PMKS sebesar 29.177 orang, tahun 2013 meningkat menjadi 38.506 orang, tahun 2015 sebesar 52.346 orang dan tahun 2016 turun menjadi 49.579.

Tabel II.65

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	29.177	38.506	43.968	52.346	49.579

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

(6) Tenaga Kerja

Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan peningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, peningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial dan pengembangan Jamsostek, peningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak.

Dalam menggambarkan seberapa Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.66, tren TPAK dari tahun 2013-2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif dimana tahun 2013 sebesar 65,30 dan tahun 2014 turun menjadi 62,09 sedangkan tahun 2017 naik menjadi 66,72, ini berarti bahwa penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi (bekerja dan mencari kerja) sebesar 66,72 % turun dibandingkan tahun 2016 yang hanya 68,93 %.

Tabel II.66
Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK
Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65.30	62,09	66.71	68,93	66,72
2.	Tingkat Pengangguran	3,70	5,14	6,29	2,60	3,78

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Salah satu indikator dari kualitas Sumber Daya manusia (SDM) dari penduduk yang bekerja adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan dimana kualitas penduduk bekerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Perbaikan kualitas penduduk bekerja diarahkan untuk menurunkan penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA/SMK) tinggi (Diploma dan Universitas).

Tabel II.67
Perkembangan Penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja
menurut pendidikan tertinggi Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

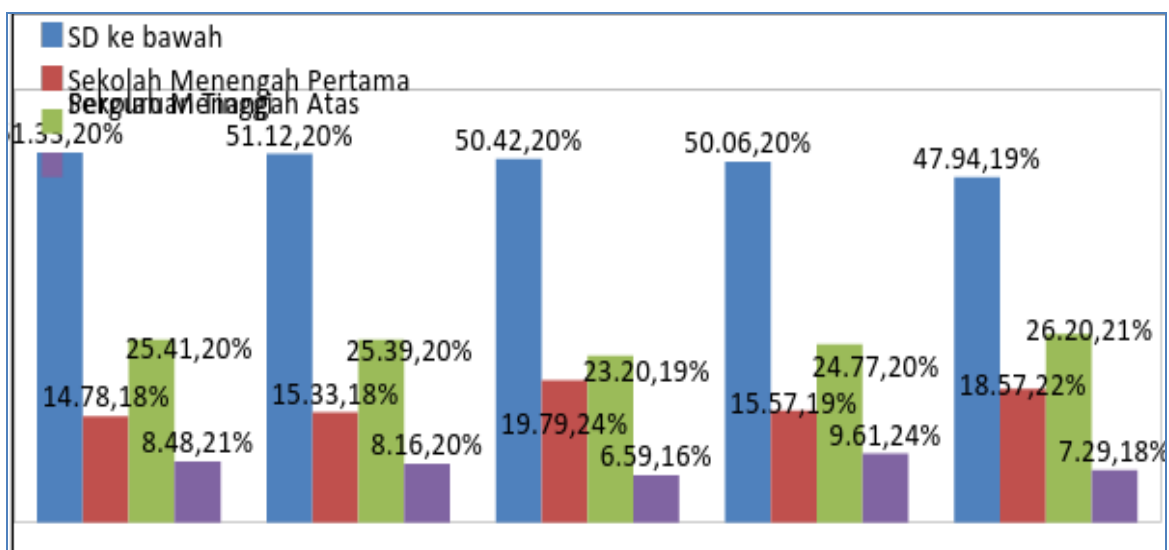
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SD ke bawah	51.33	51.12	50.42	50.06	47.94	47,21
2.	Sekolah menengah Pertama	14.78	15.33	19.79	15.57	18.57	14,98
3.	Sekolah menengah atas	25.41	25.39	23.20	24.77	26.20	27,26
4.	Perguruan Tinggi	8.48	8.16	6.59	9.61	7.29	10,55

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan Grafik II.23, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja masih didominasi oleh kategori pendidikan SD ke bawah walaupun dengan tren yang menurun, dimana tahun 2011 sebesar 51,33 % dan tahun 2016 sebesar 47,21 %. Sedangkan untuk kategori pendidikan menengah pertama, Sekolah menengah atas dan Perguruan Tinggi menunjukkan tren yang berfluktuatif namun untuk dua tahun terakhir (2015 dan 2016) menunjukkan tren peningkatan, dimana untuk sekolah menengah atas tahun 2015 sebesar 26,20% sedangkan tahun 2016 sebesar 27,26 %. untuk kategori penduduk yang bekerja dengan tingkat Perguruan Tinggi juga menunjukkan tren peningkatan, dimana tahun 2015 sebesar 7,29 % sedangkan tahun 2016 sebesar 10,55 %. Dari gambaran ini menunjukkan bahwa kualitas penduduk yang bekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah dimana masih didominasi oleh tingkat lulusan Sekolah dasar dan Sekolah menengah pertama sebesar 62,19 % sedangkan tingkat lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi sebesar 37,81%.

Grafik II.24

Penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi
Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan Tabel II.68, secara kewilayahan untuk penduduk usia kerja menurut Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, relatif meningkat hanya untuk Kabupaten Belitung yang mengalami penurunan dimana tahun 2014 sebesar 136.813 orang dan tahun 2015 turun menjadi 129.985 orang. Namun secara kumulatif untuk provinsi kepulauan Bangka Belitung Penduduk usia kerja selama 5 (lima) tahun terakhir meningkat.

Tabel II.68

Data Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	201.933	208.239	214.926	220.272	225.989	n/a
2.	Kab. Belitung	115.053	119.211	123.535	136.813	129.985	n/a
3.	Kab. Bangka Barat	125.921	129.846	133.298	133.833	140.408	n/a
4.	Kab. Bangka Tengah	117.671	120.188	122.345	125.701	128.764	n/a
5.	Kab. Bangka Selatan	124.523	128.040	130.355	126.662	137.251	n/a
6.	Kab. Belitung Timur	79.149	81.813	84.767	86.961	89.134	n/a
7.	Kota Pangkal Pinang	129.644	132.728	139.476	142.950	146.589	n/a
	Prov. Kep. Bangka Belitung	893.894	920.065	948.702	973.192	998.120	1.022.955

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Keterangan: Sakernas Tahunan 2016 tidak dilaksanakan sehingga data tidak dapat dirinci hingga level kabupaten/kota estimasi level kab/kota tidak tersedia

Berdasarkan Tabel II.69 secara kewilayahan untuk Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berfluktuasi untuk semua Kabupaten Kota. Untuk tahun 2015 TPAK tertinggi di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 70,32 % dan terendah di Kabupaten Bangka sebesar 63,88 % sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016 sebesar 68,93 %.

Tabel II.69

Data TPAK Tahun 2011 s.d 2016
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	68,25	64,24	64,40	65,45	63,88	n/a
2.	Kab. Belitung	68,01	67,83	67,81	63,48	67,64	n/a
3.	Kab. Bangka Barat	69,27	65,42	69,17	67,12	65,47	n/a
4.	Kab. Bangka Tengah	68,94	64,00	62,13	62,48	66,48	n/a
5.	Kab. Bangka Selatan	70,38	65,00	64,53	67,08	70,32	n/a
6.	Kab. Belitung Timur	67,97	67,00	64,85	68,79	68,11	n/a
7.	Kota Pangkal Pinang	66,22	67,51	64,68	64,90	67,41	n/a
	Prov. Kep. Bangka Belitung	68,43	65,67	65,32	65,45	66,71	68,93

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Sakernas Agustus)

Keterangan: Sakernas Tahunan 2016 tidak dilaksanakan sehingga data tidak dapat dirinci hingga level kabupaten/kota estimasi level kab/kota tidak tersedia

Penduduk yang bekerja menurut kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat, kecuali

Kabupaten Bangka dimana pada tahun 2014 sebesar 132.128 orang turun pada tahun 2015 menjadi 131.559 orang sedangkan secara kumulatif untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penduduk yang bekerja untuk kurun 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat dan untuk tahun 2016 penduduk yang bekerja sebanyak 686.830 orang.

Tabel II.70
Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2011 s.d 2016
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	133.488	130.059	132.508	132.128	131.559	n/a
2.	Kab. Belitung	75.921	74.430	81.599	82.200	83.903	n/a
3.	Kab. Bangka Barat	84.044	81.732	88.601	84.219	86.480	n/a
4.	Kab. Bangka Tengah	78.514	73.428	73.376	74.102	79.971	n/a
5.	Kab. Bangka Selatan	84.203	80.044	82.739	88.740	94.575	n/a
6.	Kab. Belitung Timur	52.448	53.502	53.758	58.259	59.159	n/a
7.	Kota Pangkal Pinang	81.016	84.907	84.205	84.575	88.302	n/a
	Prov. Kep. Bangka Belitung	589.634	583.102	596.786	604.223	623.949	686.830

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Sakernas Agustus)

Keterangan: Sakernas Tahunan 2016 tidak dilaksanakan sehingga data tidak dapat dirinci hingga level kabupaten/kota estimasi level kab/kota tidak tersedia

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari Kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi makro dari Pemerintah Daerah. Dari Tabel II.85, Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Untuk Tahun 2015 terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya yang memiliki TPT yang tinggi yaitu Kabupaten Bangka sebesar 8,87%, Kabupaten Bangka Tengah sebesar 6,58 % dan Kota Pangkalpinang sebesar 10,64%. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan bangka Belitung sebesar 6.29% dan secara Nasional Provinsi Kepulauan Bangka belitung lebih tinggi dari rata-rata Nasional dimana rata-rata nasional sebesar 6,18%.

Tabel II.71

Data Tingkat Pengangguran Tahun 2011 s.d 2016
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	3,15	2,77	4,26	8,36	8,87	n/a
2.	Kab. Belitung	2,97	1,76	2,59	3,03	4,57	n/a
3.	Kab. Bangka Barat	3,64	3,79	3,91	1,21	5,92	n/a
4.	Kab. Bangka Tengah	3,21	4,54	3,47	5,64	6,58	n/a
5.	Kab. Bangka Selatan	3,92	3,83	1,64	3,26	2,01	n/a
6.	Kab. Belitung Timur	2,51	2,42	2,20	2,61	2,55	n/a
7.	Kota Pangkal Pinang	5,63	5,52	6,66	8,84	10,64	n/a
	Prov. Kep. Bangka Belitung	3,61	3,49	3,70	5,14	6,29	2,60

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Sakernas Agustus 2016)

Keterangan: Sakernas Tahunan 2016 tidak dilaksanakan sehingga data tidak dapat dirinci hingga level kabupaten/kota estimasi level kab/kota tidak tersedia

Berdasarkan Tabel II.71, dapat dilihat jumlah pengangguran pada tahun 2015 terbesar di Kabupaten Bangka yaitu 12.805 orang dan terendah pada Kabupaten Belitung Timur sebanyak 1.550 Orang sedangkan secara kumulatif untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 18.343 orang menurun dari tahun 2015 yang hanya sebanyak 41.893 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang masih rendah dan tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja dan pencari kerja terutama mereka yang datang dari wilayah pedesaan yang masih beranggapan bahwa di wilayah perkotaan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di bandingkan wilayah pedesaan.

Tabel II.72

Data Pengangguran Tahun 2011 s.d 2016
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	3.341	5.900	12.053	12.805	n/a
2.	Kab. Belitung	2.327	2.169	2.635	4.015	n/a
3.	Kab. Bangka Barat	3.177	3.605	1.083	5.443	n/a
4.	Kab. Bangka Tengah	2.604	2.639	4.430	5.631	n/a
5.	Kab. Bangka Selatan	3.432	1.377	2.769	1.936	n/a
6.	Kab. Belitung Timur	1.348	1.211	1.562	1.550	n/a
7.	Kota Pangkal Pinang	4.835	6.013	8.204	10.513	n/a
	Prov. Kep. Bangka Belitung	22.064	22.657	32.736	41.893	18.343

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Keterangan: Sakernas Tahunan 2016 tidak dilaksanakan sehingga data tidak dapat dirinci hingga level kabupaten/kota (estimasi level kab/kota tidak tersedia)

(7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi melalui pengambilan keputusan serta penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi. IPG juga termasuk salah satu indikator atau indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan dan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.73 dan Tabel II.74.

Tabel II.73

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bangka	52,85	58,07	59,40	62,01	61,32	
2.	Belitung	49,21	49,37	48,56	40,16	52,00	
3.	Bangka Barat	56,29	58,28	54,81	55,57	59,37	
4.	Bangka Tengah	44,54	45,08	54,93	54,29	50,71	
5.	Bangka Selatan	43,77	45,79	37,80	37,13	37,93	
6.	Belitung Timur	47,21	49,65	50,11	63,33	63,04	
7.	Kota Pangkal Pinang	50,01	55,20	56,10	55,44	55,22	
	Prov. Kep. Bangka Belitung	56,03	56,54	57,29	56,12	56,29	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel II.74

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bangka	85,86	86,03	86,77	86,92	87,17	
2.	Belitung	85,59	85,73	86,61	87,19	87,98	
3.	Bangka Barat	87,28	87,86	88,11	88,56	88,71	
4.	Bangka Tengah	89,26	90,06	90,28	90,60	90,61	
5.	Bangka Selatan	79,75	81,24	82,17	82,52	82,83	
6.	Belitung Timur	83,95	84,17	84,29	85,37	86,10	
7.	Kota Pangkal Pinang	82,05	92,08	92,30	92,47	93,09	
	Prov. Kep. Bangka Belitung	87,10	87,54	87,73	87,74	88,37	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angka pemberdayaan gender (IDG) dan pembangunan gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan trend yang semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun secara nasional, IDG masih berada di peringkat 32 dan IPG di peringkat 27 dari 34 Provinsi. Namun hal ini berarti bahwa tingkat partisipasi perempuan yang antara lain tercermin pada bidang politik melalui jumlah keterwakilan perempuan didalam keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Pada periode 2004-2009 berjumlah 1 (satu) orang, meningkat menjadi 5 (lima) orang pada periode 2009-2014. Sementara itu peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi juga semakin meningkat yang ditandai dengan tingginya angka pangkatan kerja yang bekerja dari jenis kelamin perempuan.

b. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I-IV.

Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.75

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2014 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	5	4	4
2.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	51	52	49
3.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	191	199	191
4.	Pekerja perempuan di pemerintah	1.354	1.407	1.403
5.	Jumlah pekerja perempuan	204.416	224.467	
6.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	0,66	0,63	0,42

Sumber: BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari 0,66 pada tahun 2014 menjadi 0,63 di tahun 2015, meskipun jumlah pekerja perempuan di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan dan jumlah perempuan

yang bekerja juga mengalami peningkatan. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya keluarga.

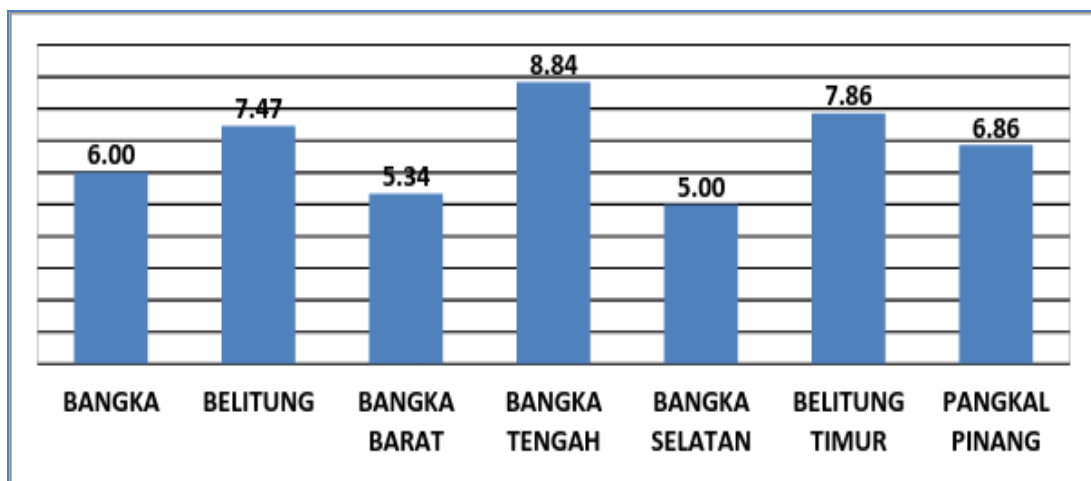
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah menurut Kabupaten/Kota tahun 2014 disajikan dalam Tabel II.76 dan Grafik II.25 berikut:

Tabel II.76
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jumlah Pekerja Perempuan	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	2.761	46.031	6,00
2	Kabupaten Bangka Barat	1.609	30.123	5,34
3	Kabupaten Bangka Selatan	1.415	28.303	5,00
4	Kabupaten Bangka Tengah	1.807	20.447	8,84
5	Kabupaten Belitung	1.986	26.591	7,47
6	Kabupaten Belitung Timur	1.609	20.479	7,86
7	Kota Pangkalpinang	2.224	32.442	6,86
	Jumlah	13.411	204.416	6,56

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Grafik II.25
Grafik Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Berdasarkan Grafik II.25, Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah tahun 2014 berdasarkan Kabupaten/Kota menunjukkan persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang tertinggi ada di Kabupaten Bangka

Tengah dengan angka 8,84 dan yang terendah di kabupaten Bangka Selatan dengan angka 5,00.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rasio KDRT adalah jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga, gambaran terhadap perkembangan Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.77

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah KDRT	55	135	115	84	61	
2.	Jumlah Rumah Tangga	320.079	327.280	334.550	341.866	349.534	
3.	Rasio KDRT(%)	0,017	0,041	0,034	0,025	0,017	

Sumber: Profil Profil Gender, kerja sama BPS dengan BPPKBPA

Berdasarkan Tabel II.77 jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012-2015 mengalami penurunan dari 135 ditahun 2012 menjadi 61 di tahun 2015.

(8) Pangan

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas pembangunan nasional yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan dan pengawasan keamanan pangan segar.

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu system pangan yang terdiri atas tiga (3) sub sistem yaitu:

- a) Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk;

- b) Distribusi pangan yang lancar dan merata;
- c) Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan.

Data ketersediaan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2016 ditampilkan dalam Tabel II.78

Tabel II.78
Data Ketersediaan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2012 – 2016

No	Keterangan	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Ketersediaan Beras (Lokal)	Ton/Thn	8.937,15	13.102,15	16.652,00	16.873,00	15.838,00
2	Ketersediaan Beras (Import)	Ton/Thn	128.524,00	77.592,00	46.420,00	95.390,00	125.011,00
3	Ketersediaan Beras (Lokal + Import)	Ton/Thn	137.461,00	90.694,00	63.072,00	112.263,00	140.849,00
4	Kebutuhan Beras (HBKN)	Ton/Thn	113.304,00	120.073,00	115.816,00	117.376,00	119.854,00
5	Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/Hari	2.221,00	4.300,00	2.768,82	2.437,20	2.490,00
6	Ketersediaan Protein	Gram/Kap/Hari	92,80	75,71	65,07	79,38	71,56
7	Ketersediaan Lemak	Gram/Kap/Hari	56,93	345,23	120,53	144,63	76,55
8	PPH Ketersediaan	Skor	93,10	70,00	57,24	78,50	78,78

(Sumber : Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016)

Salah satu parameter sederhana untuk menilai keberhasilan penyediaan pangan, tingkat diversifikasi/keanekaragaman pangan dan mutu gizi pangan adalah dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH). Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (dietary score). Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan komposisinya semakin baik/berimbang.

Tujuan penyusunan PPH yaitu untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutrition balance*) berdasarkan cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Pengelompokan Pola Pangan Harapan dapat dilihat pada Tabel II.79

Tabel II.79

Pengelompokan Pangan Berdasarkan Pola Pangan Harapan

No	Kelompok Pangan	Jenis Komoditas (Kelompok PPH)
1	Padi-padian	Beras & olahannya, jagung & olahannya, gandum & olahannya
2	Umbi-umbian	Ubi kayu & olahannya, ubi jalar, kentang, talas, sagu (termasuk makanan berpati)
3	Pangan hewani	Daging & olahannya, ikan & olahannya, telur, susu & olahannya
4	Minyak & lemak	Minyak kelapa, minyak sawit, margarin, lemak hewani
5	Buah/biji berminyak	Kelapa, kemiri, kenari, cokelat
6	Kacang-kacangan	Kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang mete, kacang tunggak, kacang lain, tahu, tempe, tauco, oncom, sari kedelai, kecap
7	Gula	Gula pasir, gula merah, sirup, minuman jadi dalam botol/kaleng
8	Sayur & buah	Sayur segar & olahannya, buah segar & olahannya, termasuk emping
9	Lain-lain	Aneka bumbu & bahan minuman spt terasi, cengkeh, ketumbar, merica, pala, asam, bumbu masak, teh, kopi

(Sumber : Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016)

Pola konsumsi pangan yang diperoleh dari hasil rekapitulasi analisis data kabupaten/kota menunjukkan situasi pola konsumsi pangan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti pada Tabel II.80 dan Pola Pangan Harapan per kelompok pangan ditampilkan pada Tabel II.81.

Tabel II.80

Direktori Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Skor PPH Konsumsi	Konsumsi Pangan (g/kap/hari)	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	% AKE	Konsumsi Protein (g/kap/hari)	Konsumsi Sayuran dan Buah (kg/kap/th)	% AKP
1	2012	86,2	1026	1880	94	68,1	95,9	130,9
2	2013	87,7	1151	2034	102,8	71,4	110,2	137,1
3	2014	88,2	1093	2002	98,2	68,5	99,1	131,7
4	2015	88,0	1082	2031	100,9	75,6	93,8	145,5
5	2016	88,17	1068	1976	91,9	67,3	102,8	118,07

(Sumber : Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016)

Tabel II.81

Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2012 - 2016

No	Kelompok Pangan	Skor PPH					Standar Maks (Nasional)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Padi-padian	25,0	25,0	24,8	25,0	24,6	25,0
2	Umbi-umbian	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	2,5
3	Pangan Hewani	24,0	24,0	24,0	24,0	23,9	24,0
4	Minyak dan Lemak	3,5	4,1	4,6	4,6	4,4	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,3	0,5	0,5	0,4	0,3	1,0
6	Kacang-kacangan	5,2	4,6	6,1	5,7	5,8	10,0
7	Gula	1,5	1,5	1,6	1,4	1,3	2,5
8	Sayur dan Buah	25,2	26,5	25,2	25,4	26,3	30,0
9	lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	86,2	87,7	88,2	88,0	88,17	100,0

(Sumber : Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016)

Idealnya pangan yang beredar harus aman, bermutu dan bergizi karena pangan sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang merugikan dan membahayakan kesehatan. Untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman diperlukan regulasi dan kebijakan dalam penanganan keamanan pangan.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan menuntut adanya peningkatan upaya-upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai keamanan pangan segar. Selain melalui pemberian informasi mengenai keamanan pangan segar, juga perlu dilaksanakan pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar. Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar perlu dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pangan segar yang diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha dan pangan segar yang beredar aman dikonsumsi. Pengawasan pangan segar dapat dilakukan melalui pengambilan sampel pangan segar yang beredar dan dilakukan uji residu kimia/pestisida serta pemantauan terhadap penerapan standar budidaya yang baik atau Good Agriculture Practices (GAP). Data hasil pengawasan keamanan pangan segar yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 – 2016 ditampilkan pada Tabel II.82

Tabel II.82
Data Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012- 2016

No	Tahun	Komoditi		Keterangan	
		Jenis	Jumlah sampel	Sampel aman	Sampel tidak aman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2012	- Sayuran	10	6	4 (pestisida)
		- Buah	4	4	
		- Beras	1	0	1 (pestisida)
2	2013	- Sayuran	23	14	4 (pestisida), 2 (logam berat), 3 (E coli)
		- Buah	2	2	
		- Beras	6	6	
3	2014	- Sayuran	55	54	1 (pestisida)
		- Buah	15	15	
		- Beras	5	2	3 (logam berat)
4	2015				
	- APBD	- Sayuran	74	69	5 (E coli)
		- Buah	16	16	
	- APBN	- Sayuran	22	20	2 (pestisida)
		- Buah	4	4	
		- Beras	2	1	1 (pestisida)
5	2016				
	- APBD	- Sayuran	24	12	10 (pestisida), 2 (E coli)
		- Buah	6	6	
	- APBN	- Sayuran	18	18	
		- Buah	6	6	

(Sumber : Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016)

(9) Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan penyadaran para pemangku kepentingan melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencapai target daerah yaitu meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Gambaran mengenai capaian IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada table II.83

Tabel II.83

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IKLH	58.17	59.29	60.21	60.56	57,44

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan data diatas, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat setiap tahunnya, namun demikian peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Dengan demikian maka masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seleruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel II.101, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2014 di semua kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan. Penurunan akses terhadap air bersih yang paling besar terjadi di Kabupaten Belitung Timur menjadi 73,82 persen diikuti Kabupaten Bangka Barat menjadi 77,58 persen. Hal ini menandakan kebutuhan masyarakat akan akses air bersih harus menjadi perhatian serius dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber-sumber air bersih di tahun berikutnya.

Tabel II.84

Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses
Terhadap Air Bersih Tahun 2010 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	81,39	87,7	73.82	75,3	77,9
2	Belitung	78,44	75,6	73.73	84,5	74,2
3	Bangka Tengah	78,87	48,2	38.68	47,7	56,8
4	Bangka Barat	54,66	87,4	77.58	83,7	89,5
5	Bangka Selatan	73,80	76,4	75.18	59,6	74,8
6	Belitung Timur	72,39	100	73.82	76,6	76,0
7	Kota Pangkalpinang	91,84	92,0	86.72	87,7	88,7
	Kepulauan Bangka Belitung	76,38	80,2	71.24	73,7	77,6

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

(10) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel II.85

Perkembangan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	41	58	60	59	63
Rasio Bayi Berakte Kelahiran				95.5	95.1
Rasio Pasangan Ber-akte Nikah					
Kepemilikan KTP	551.011	740.365	765.507	761.597	837.252
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	287	328	407	292	491
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	2.349.199	1.269.381	1.281.099	1.292.863	1.321.117
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	551.011	740.365	765.507	761.597	837.252

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Kependudukan, pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, KB, 2017.

(11) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Pengendalian Penduduk

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan *unmet need* (kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi) yang rendah. Namun kondisi ini tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung, mengingat pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selain dari angka kelahiran juga disebabkan adanya migrasi penduduk dari luar Bangka Belitung.

Pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung relative lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional. Gambaran tentang laju pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2011 – 2016 adalah sebagaimana disajikan pada table II.104.

Tabel II.86
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertumbuhan (%)	2,25	2,22	2,19	2,15	2,11

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Memperhatikan data diatas, terlihat bahwa sejak tahun 2012 terjadi trend penurunan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini seiring dengan menurunnya aktivitas pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung.

b. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Gambaran terhadap perkembangan Rasio Akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.87
Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

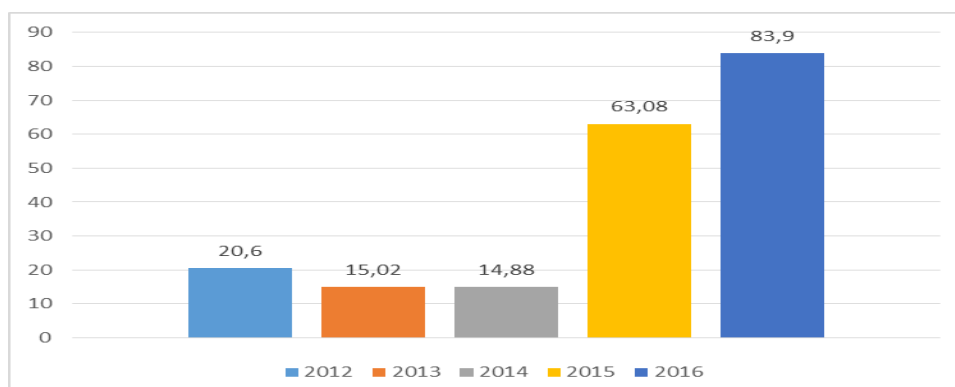
No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah akseptor KB	52.762	40.976	37.576	176.549	229.250
2.	Jumlah pasangan usia subur	256.116	272.808	252.481	279.880	273.191
3.	Rasio akseptor KB	20,60	15,02	14,88	63,08	83,9

Sumber: BKKBN

Berdasarkan pada tabel II.87 pada kurun waktu 2012-2016 rasio akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup fluktuatif, namun terjadi peningkatan cukup tinggi antara tahun 2014 hingga tahun 2016 dari 14,88 ditahun 2014 menjadi 83,9 pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada Grafik II.23 berikut :

Grafik II.26

Grafik Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Perkembangan Rasio Akseptor KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara rinci menurut kabupaten/ Kota disajikan dalam Tabel II.88

c. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan tingkat kesejahteraan kriteria keluarga dibagi menjadi beberapa tahap diantaranya, Keluarga Pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya sedangkan Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal diantaranya :

1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga;
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih;
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
4. Bagian yang terluas darilantai rumahbukan dari tanah;
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan.

Gambaran terhadap perkembangan keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel II.89 dan Grafik II.27 sebagai berikut:

Tabel II.88

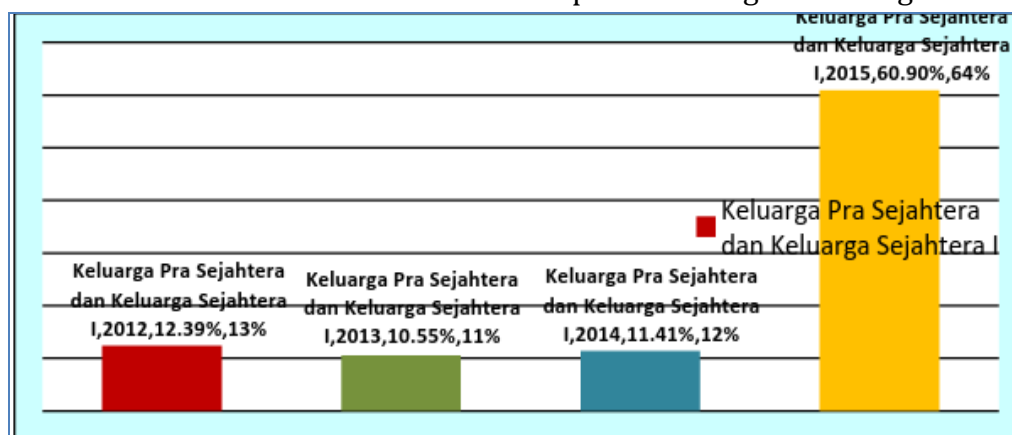
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah keluarga pra sejahtera	10.462	8.667	10.948	20.248	20.648
2.	Jumlah keluarga sejahtera I	33.228	30.487	31.085	190.421	190.421
3.	Jumlah keluarga sejahtera I +	308.978	332.088	326.471	135.259	107.369
4.	Jumlah keluarga	352.668	371.242	368.504	345.928	318.438

Sumber: BKKBN

Grafik II.27

Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan Grafik II.28 Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I mengalami tren Fluktuatif dari tahun 2012 sampai tahun 2014, namun dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan yang drastis, hal ini di pengaruhi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera I.

(12) Perhubungan

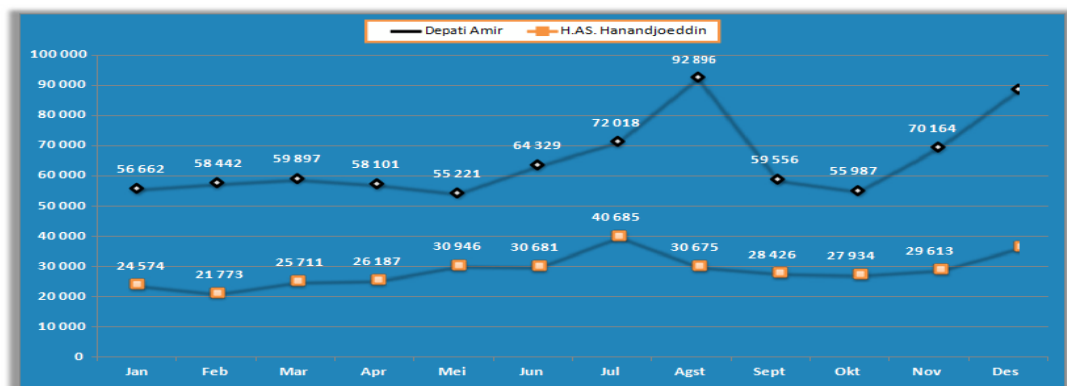
Perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM

yang profesional, mandiri dan produktif. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah serta peningkatan Status Bandara Depati Amir di Pangkalan Baru, Bangka Tengah dan HAS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, Belitung menjadi Bandara Internasional.

Gambaran tentang perkembangan pelaksanaan urusan perhubungan udara di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015, adalah sebagaimana disajikan pada Grafik II.29.

Grafik II.29

Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandann Tahun 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan gambar tersebut, pada tahun 2015 kenaikan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada bulan Juli, Agustus dan Desember. Hal ini disebabkan karena pada moment tersebut bertepatan dengan liburan anak sekolah, kuliah dan hari besar keagamaan.

Sementara itu, gambaran mengenai kondisi perhubungan laut di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 adalah sebagai termuat pada table II.90 berikut:

Tabel II.89

Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Pelayaran	Jumlah Kapal (Unit)	Berat (Grt)
(1)	(2)	(3)
1. Luar Negeri		
a. Reguler	8	4.389
b. Nonreguler	92	180.044
2. Pelayaran Dalam Negeri	1.988	2.870.313
3. Pelayaran Rakyat	316	63.288

4. Pelayaran Perintis	-	-
5. Kapal Negara/Tamu	-	-

Sumber : *International Port Cooperation, 2017*

Kunjungan kapal di seluruh pelabuhan di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 masih didominasi oleh pelayaran dalam negeri yaitu sebanyak 1.988 unit dengan berat total 2.909.102 Grosston.

Tabel II.90

Jumlah Terminal Bus, Teminal Udara dan Pelabuhan Laut Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terminal Bus/Angkot/Angdes	N/A	12	12	12	12	12
2.	Pelabuhan Udara	2	2	2	2	2	2
3.	Pelabuhan Laut (Pelabuhan pengumpan, Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Khusus)	N/A	55	63	66	74	58

Sumber: *Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

Tabel II.91

Jumlah ijin trayek Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah ijin trayek	N/A	25	26	27	27	42

Sumber: *Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

(13) Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika yang selama ini telah dilaksanakan, yaitu meliputi belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran terutama di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan tertinggal, belum optimalnya pengembangan layanan *e-Gov* yang ditunjukkan dengan masih rendahnya instansi yang memanfaatkan layanan *e-Gov* yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan

berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Nasional.

(14) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting terhadap pencapaian target sasaran kinerja pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan mendasar pada urusan ini antara lain adalah: masih lemahnya pengawasan terhadap koperasi, kapasitasSDM Koperasi yang masih belum mantap, rendahnya akses anggota koperasi dan UMKM terhadap akses permodalan yang ada, belum optimalnya sarana pemasaran yang salah satunya melalui pasar tradisional, pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM yang juga masih belum optimal, serta pengembangan skala usaha yang masih cenderung mengalami stagnasi.

Tabel II.92

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Koperasi Aktif	N/A	738	782	798	812	821
2.	Jumlah Koperasi	N/A	950	998	1.076	1.103	1.149
3.	Persentase Koperasi Aktif		77.70	78.35	74.16	73.61	71,45

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Persentase koperasi yang aktif di provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan, dari data di atas tahun 2013 sebesar 78, 35 % menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 74,16 % dan menjadi 73,61 % pada tahun 2015.

Tabel II.93

Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah UKM	284.859	286.992	291.322	292.456	293.985

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Jika dilihat dari tabel di atas, jumlah UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif meningkat selama lima tahun terakhir, pada tahun 2012 UKM sebanyak 284.859 meningkat pada tahun 2014 dan 2015 menjadi masing-masing 291.322 dan 292.456 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 293.985.

(14) Penanaman Modal

Pada tingkat nasional, arah pengembangan penanaman modal diorientasikan pada peningkatan daya saing penanaman modal, hal ini ditegaskan dalam pernyataan visi penanaman modal nasional, yaitu: “Terwujudnya daya saing penanaman modal untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal.

Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi, perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Menyajikan data terkini (*up to date*) peta potensi sumber daya dan peluang investasi lingkup provinsi, Terkoneksinya kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan investor/pengusaha besar, Tersedianya konsep produk turunan komoditas unggulan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tersedianya SDM promosi yang mempunyai kemampuan marketing investasi.

Tabel II.94

Jumlah Investasi dan Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Investasi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Investor	34	43	41	100	74
2	Nilai Investasi (Trillin Rp)	1.066	1.707	1.739	2.056	1.156

Sumber: BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

(15) Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Tabel II.95

Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	270	270	270	270	270
2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	7	15	15	14	12

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dari data Tabel II.96 di atas, jumlah organisasi pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir (2012 s.d 2016) relatif stabil dan tanpa penambahan yaitu sebanyak 270 Organisasi Pemuda.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

(1) Kelautan dan Perikanan

Sebagai provinsi yang bercirikan kepulauan, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas lautan 79,80 persen dari total wilayahnya pasti memiliki potensi perikanan yang besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Adapun potens pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada Tabel II.97

Tabel II.96

Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014

No.	Uraian	Potensi Produksi (Ton)					Produksi Tahun (Ton)					%
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Perikanan Tangkap	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	202.565,20	199.241,40	203.284,40	139.542,95	188.573,60	18,81 %
2.	Perikanan Budidaya	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	8.113,60	2.939,10	4.198,62	4.305,29	4.618,87	0,22 %

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

a) Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014 tercatat sebesar 4,198.62 ton. Produksi ini naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.939,08 ton. Kenaikan produksi budidaya pada tahun 2014 disumbangkan oleh produksi rumput laut.

Produksi Budidaya terbesar berdasarkan media tebar adalah budidaya kolam yaitu sebesar 2.275,14 Ton dengan komoditas terbanyak dihasilkan adalah ikan lele sebanyak 1.613,57 ton, disusul oleh Budidaya Laut sebesar 1.088 dengan komoditas utama yaitu Rumput laut Cottoni sebesar 525 Ton dan disusul Budidaya Laut lainnya dengan komoditas kerang darah sebesar sebesar 445,13 Ton. Untuk Budidaya Tambak tercatat pada tahun 2014 juga mengalami penurunan, dimana tercatat 0.12 ton dengan komoditas ikan nila.

b) Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km² atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (sumber : KEP MEN KP Nomor : KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumberdaya Ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014, jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 203,284.4 ton dan mengalami kenaikan dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2013 sebesar 4,043 Ton dimana jumlah produksinya 199,241.4 ton. Produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuatif dari tahun 2003, produksi terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 119,845,44 ton dan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 203,284.4 ton, hal ini menunjukkan sektor perikanan tangkap juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melihat sektor perikanan tangkap yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung, maka sektor perikanan tangkap diharapkan terus berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tetap berlandaskan penangkapan secara lestari dan berkelanjutan.

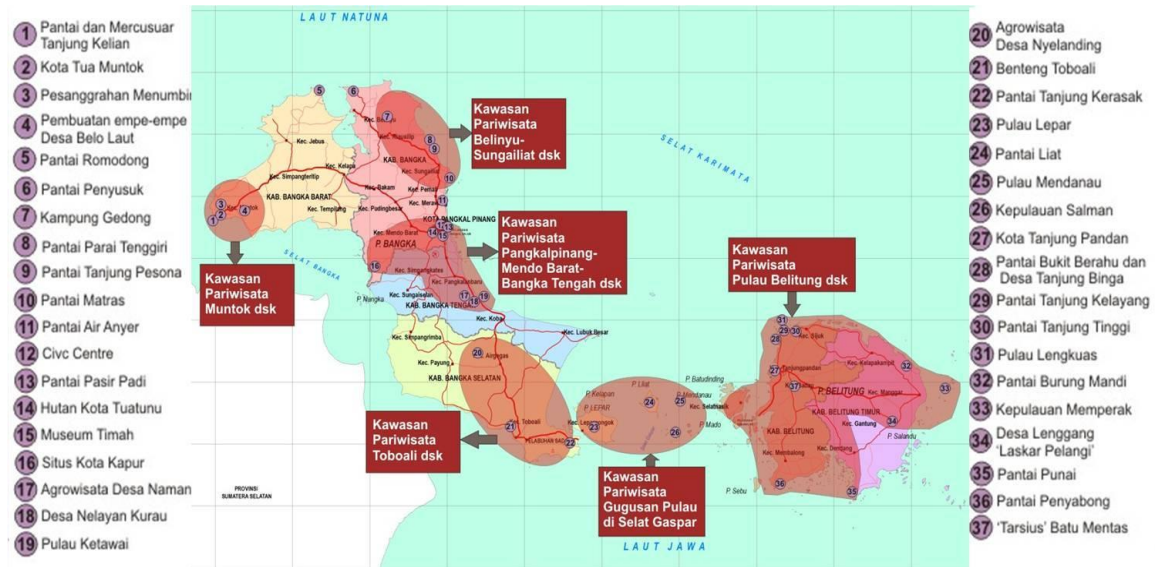
Pada tahun 2013, produksi yang dihasilkan untuk perikanan tangkap hanya 18,81 persen dari total potensi produksi. Sementara itu, untuk perikanan budidaya, hanya 0,22 persen dari total potensi. Artinya, masih sangat terbuka peluang untuk dilakukan peningkatan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dalam rangka mensejahterakan masyarakat terutama nelayan.

(2) Pariwisata

Bangka Belitung sejak tahun 2010 telah ditetapkan sebagai daerah kunjungan wisata bahari ketiga di Indonesia setelah Bali dan Lombok. Selain itu, sejak tahun 2011, melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, telah menetapkan Kawasan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Selain dikarenakan memiliki potensi wisata yang baik, secara geografis pun mendukung Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia.

Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada gambar II.8 berikut.

Gambar II.8.
Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Tabel II.97
Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Wisatawan Dalam Negeri	191.200	221.747	236.370	278.516	301.938	
2.	Jumlah Wisatawan Luar Negeri	1.495	1.864	2.035	2.314	3.498	
3.	Jumlah	192.695	223.611	238.405	280.830	305.436	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Sesuai dengan kategori wisatawan yang dikeluarkan oleh BPS, dimana wisatawan di bagi menjadi 2 jenis yaitu wisatawan Dalam Negeri dan wisatawan luar negeri. Jumlah wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dan itu sangat bagus karena dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2011 jumlah wisatawan sebanyak 192.695 orang meningkat di tahun 2012 menjadi 223.611 orang dan pada tahun 2015 sebesar 305.436 orang.

(3) Pertanian

Beberapa komoditas strategis dan unggulan daerah sektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan antara lain, yaitu : lada, karet, kelapa sawit, padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, cabai, bawang merah, sayuran dataran rendah, durian, jeruk, manggis, buah naga, nanas, sapi, ayam dan itik.

Adapun luasan lahan yang secara eksisting dan potensi yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian, adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.99

Tabel II.98
Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
I.	LAHAN PERTANIAN	
I.1.	Lahan Sawah	22.771
	a. Irigasi	4.602
	b. Tadah hujan	16.397
	c. Pasang surut	270
	d. Lebak	1.502
I.2.	Lahan Bukan Sawah	1.163.881
	a. Tegal	117.376
	b. Ladang	28.147
	c. Perkebunan	367.848
	d. Hutan rakyat	42.637
	e. Pengembalaan	2.263
	f. Sementara tidak diusahakan	67.415
	g. Lain-lain	538.195
	Jumlah	1.642.414

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2017

(4) Kehutanan

Pada tahun 2016 tercatat 654.167,15 Ha kawasan hutan, sesuai fungsinya terdiri dari 35.453,89 Ha Hutan Konservasi, 185.531,34 Ha Hutan Lindung, 432.489,33 Ha Hutan Produksi, dan 692,58 Ha Hutan Produksi Konversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.124.

Tabel II.99
Luas Kawasan Hutan Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Luas Kawasan Hutan	2011 (Ha)	2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Hutan Konservasi	34.690	35.473	35.472,19	35.453,89	35.453,89	35.453,89
Hutan Lindung	156.730	189.965	189.972,25	189.983,52	185.531,34	185.531,34
Hutan Produksi	466.090	432.884	432.882,82	432.882,82	432.489,33	432.489,33
Hutan Produksi Konversi	N/A	692,58	692,58	692,58	692,58	692,58
Jumlah	657.510	659.014,58	659.019,84	659.012,81	654.167,14	654.167,15

Sumber: *Bangka Belitung Dalam Angka, 2017*

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayan XIII Pangkalpinang, 2017

Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan terdiri atas Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah : 1. Hasil hutan kayu (meranti, nyatoh, manggeris, belangeran, pelawan, ramin, membalong, mandaru, rengas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau), 2. Hasil hutan bukan kayu (gaharu, madu alam, jamur pelawan, aren dan rotan).

(5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun

2006. Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ya tersaji pada tabel II.125 berikut.

Tabel II.100

Produksi Biji Timah (Tin Ore) dan Logam Timah (Tin Metal) Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Bijih Timah	22.124,23	15.403,86	19.719,32	55.548,31	56.906,44
	Logam Timah (Tin Metal)	25.442,11	14.107,70	16.431,98	53.673,12	55.768,98-

Sumber: Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

(6) Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan oleh Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Kondisi perkembangan ekspor dan impor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.102

Tabel II.101

Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U\$)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ekspor (us Dollar)	1.761,5	1.596,4	1.653,1	1.191,1	1.290,7
	Timah	1.527,9	1.374,9	1.376,8	973,2	963,8
	Non Timah	233,6	221,7	276,3	217,9	326,8
2.	Impor (us Dollar)	88,9	49,1	58,9	49,9	132,0
	Migas	15,3	14,3	20,3	31,4	41,4
	Non Migas	73,6	34,8	37,7	18,5	90,61

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Ekspor di Kepulauan Bangka Belitung masih sangat didominasi oleh ekspor logam timah. Pada tahun 2011, ekspor Kepulauan Bangka Belitung mencapai 2.833 juta USD,

namun pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan menjadi 1.596,6 juta USD dan pada tahun 2015 terus menurun menjadi 1.191,1 juta USD. Sementara itu, impor Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh impor non migas. Pada tahun 2011, impor mencapai 91,6 juta USD dan menurun pada tahun 2012 dan 2014 meningkat menjadi 58 juta USD. Namun kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2015 menjadi 49,9 juta USD. Berdasarkan kondisi ekspor dan impor Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka neraca perdagangan dalam kurun waktu 2011 – 2015 tersebut dalam kondisi surplus neraca perdagangan.

(7) Perindustrian

Pengembangan sektor industri di Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui pengembangan kawasan. Beberapa kawasan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri antara lain adalah:

1. Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat Belinyu, Kabupaten Bangka;
2. Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat (Kecamatan Lubuk Besar), Kabupaten Bangka Tengah;
3. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Muntok di Kawasan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat;
4. Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan;
5. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan;
6. Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan;
7. Kawasan pelabuhan dan industri Sadai, Kabupaten Bangka Selatan;
8. Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
9. Kawasan minapolitan Selat Nasik, Kabupaten Belitung;
10. Kawasan industri perikanan Tanjung Binga, Kabupaten Belitung;
11. Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
12. Kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
13. Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
14. Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan
15. Kawasan lintas timur Pulau Bangka.

Tabel II.102

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Industri Kecil	6.747	8.956	10.954	12.094	
	Laju pertumbuhan	N/A	0,25	0,18	0,09	
2.	Industri Menengah	6.827	9.065	11.057	12.206	
	Laju pertumbuhan	N/A	0,25	0,18	0,09	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan tabel di atas laju pertumbuhan industri kecil dan menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung menurun, dimana tahun 2013 sebesar 0,25 % menurun menjadi 0,18 % tahun 2014 dan tahun 2015 kembali menurun menjadi 0,09 %.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

(1) Pengeluaran rata-rata per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi per kapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi per kapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.128.

Tabel II.103

Angka Rata-Rata Pengeluaran per Kapita se Bulan, Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata rata pengeluaran per kapita	867.065	951.307	1.023.121	1.118.101	1.211.879

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Berdasarkan aspek kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan, yaitu membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan konsumsi makanan, maka rata-rata pengeluaran per kapita pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun, yaitu dari Rp. 814.288 pada tahun 2011 menjadi Rp. 1.211.879 pada tahun 2016.

(2) Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecenderungan nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dengan Rasionilasi tukar petani ditampilkan pada Tabel II.105

Tabel II.104
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)	121,70	128,47	112,62	121,95	120,77
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	122,73	128,14	110,89	116,46	119,09
3	Rasio	0,99	1,003	1,016	1,04	1,01

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

- 1) Rata-rata 2013 mencakup Januari-November 2013 dengan tahun dasar 2007 (2007=100)
- 2) Mulai Desember 2013, penghitungan NTP menggunakan tahun dasar 2012 (2012=100)

Berdasarkan tabel II.105 maka diperoleh kondisi bahwa dalam kurun waktu 2011-2016 menunjukkan trend yang terus meningkat dan pada tahun 2015 NTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah berada pada angka 1,04. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang diindikasikan dengan Nilai Tukar Petani sudah semakin sejatera.

(3) Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan berapa besar konsumsi rumah tangga non pangan per keluarga per tahun. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.106 dapat dijelaskan bahwa konsumsi rumah tangga non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun yaitu sebesar Rp. 8.065.723,37 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 9.286.512,45 pada tahun 2015. Selain itu, dilihat dari rasio perbandingan antara total pengeluaran dan total pengeluaran konsumsi RT Non-Pangan sepanjang kurun waktu lima tahun relatif konstan.

Tabel II.105

Persentase Konsumsi RTN Non-Pangan Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	8.065.723	8.339.273	8.746.368	9.082.432	9.286.512	
2	Total pengeluaran	14.992.051	15.454.545	16.063.118	16.671.131	17.264.385	
3	Rasio	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Selanjutnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.106 menunjukkan bahwa besaran total pengeluaran non-pangan pada setiap Kabupaten/kota secara relatif sangat bervariasi. Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau kebiasaan penduduk setempat terkait perilaku pengeluarannya. Apabila suatu penduduk dalam suatu wilayah/daerah nilai pengeluaran pangannya lebih besar dari pada nilai pengeluaran non-pangan, maka daerah tersebut dapat dikatakan secara relatif sebagai daerah berkembang, tetapi apabila pengeluaran pangan lebih kecil dari pada nilai pengeluaran non-pangan maka daerah tersebut dapat dikatakan relatif maju.

Tabel II.106

Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita
Tahun 2014 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	Total pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	8.405.782,57	15.398.026,32	0,5459
2	Kabupaten Bangka Barat	9.447.327,08	17.744.791,67	0,5324
3	Kabupaten Bangka Selatan	9.461.271,19	17.372.881,36	0,5446
4	Kabupaten Bangka Tengah	8.963.538,30	16.486.184,11	0,5437
5	Kabupaten Belitung	11.846.791,45	15.524.559,63	0,7631
6	Kabupaten Belitung Timur	10.027.771,61	18.149.812,86	0,5525
7	Kota Pangkalpinang	9.237.663,68	16.771.357,44	0,5508
	Provinsi	9.082.432,14	16.671.130,95	0,5448

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

(4) Rasio daya serap tenaga kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2014 disajikan pada Tabel II.108

Tabel II.107
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	2.061	19.664	12.532	12.532	n/a	n/a
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	17	39	40	40	n/a	n/a
3	Rasio daya serap tenaga kerja	121,23	504,20	313,30	313,30	n/a	n/a

Sumber: Sektoral

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

(1) Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel II.108
Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Panjang Jalan	899,33	899,33	899,33	899,33	899,33	899,33
2	Jumlah Kendaraan	323.429	381.099	396.676	395.951	398.065	381.193
3	Rasio	0.0028	0.0024	0.0023	0.0023	0.0023	0,0024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perhubungan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk 6 (enam) tahun terakhir tahun 2011-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif menurun dimana tahun 2011 sebesar 0,0028 turun pada tahun 2014 menjadi 0,0023 dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,0024.

Tabel II.109
Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2015
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	734,5	79.548	0.0092
2	Kabupaten Bangka Barat	847,44	42.514	0.0199
3	Kabupaten Bangka Selatan	569,47	40.218	0.0142
4	Kabupaten Bangka Tengah	292,48	41.293	0.0071
5	Kabupaten Belitung	624,67	68.186	0.0092
6	Kabupaten Belitung Timur	480,88	42.134	0.0114
7	Kota Pangkalpinang	356,10	84.172	0.0042
	Provinsi	9.082.432,14	398.065	0,5448

Sumber: Dinas PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Memperhatikan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada 2015 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang memiliki rasio paling rendah, hal ini karena Kota Pangkalpinang memiliki luas wilayah yang relatif kecil namun jumlah kendaraan yang sangat banyak sehingga rasionya menjadi kecil, sedangkan Kabupaten Bangka Barat memiliki rasio yang paling besar yaitu 0,0199.

(2) Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.111

Tabel II.110

Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	12.350 Ha	282.719 Ha	0.04
2	Kabupaten Bangka Barat	15.560 Ha	266.501 Ha	0.06
3	Kabupaten Bangka Selatan	18.155 Ha	342.553 Ha	0.05
4	Kabupaten Bangka Tengah	23.741 Ha	188.895 Ha	0.13
5	Kabupaten Belitung	46.225 Ha	183.144 Ha	0.25
6	Kabupaten Belitung Timur	40.709 Ha	269.982 Ha	0.19
7	Kota Pangkalpinang	-	11.880 Ha	0.00
	Jumlah	156.740 Ha	1.485.674 Ha	0.11

Sumber: DDA 2015

(3) Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambaran perkembangan kondisi infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.112

Tabel II.111

Infrastruktur Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Infrastruktur	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3,60	4,07	4,25	5,83	3,21	
2.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	22	22	26	26	26	
3.	Ketaatan terhadap RTRW	75	75	75	75	100	
4.	Persentase Penduduk berakses air minum	15,02	15,19	29,29	64,98	46,22	
5.	Rasio daya tersambung pada rumah tangga	65,69	69,9	69,13	67,95	80,96	
6.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	48,06	62,76	92,81	80,96	88,96	
7.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,67	0,61	0,65	0,66	0,68	
8.	Panjang jalan dilalui roda 4	0,87	0,84	0,93	0,95	0,90	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

(1) Angka Kriminalitas

Di dalam penciptaan iklim investasi, angka kriminalitas yang terjadi di suatu daerah menjadi perhatian investor untuk melakukan investasi. Berdasarkan data, angka kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif naik turun pada periode-periode akhir. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka menjaga situasi yang kondusif guna meningkatkan daya tarik dan jumlah investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.113:

Tabel II.112
Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2016

No	Jenis Tindak Pidana	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pencurian/perampokan	217	120	318	357	307	323	
2.	Penganiayaan	65	48	75	98	74	82	
3.	Pembunuhan	4	-	12	13	12	11	
4.	Kesusilaan	1	-	50	39	30	48	
5.	Psikotropika	115	138	187	152	222	232	
6.	Perjudian	30	27	58	154	98	65	
7.	Pemeriksaan	1	-	1	13	9	8	
8.	Kelalalaian menyebabkan kematian	11	-	14	63	63	47	
9.	Senjata tajam	8	4	22	20	14	16	
10.	Angka kriminalitas yang tertangani	3,27	2,43	4,99	5,01	5,01	5,01	

Sumber: Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung

Ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam pengertian yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa Jumlah Tindak Pidana berfluktuasi dari tahun ke tahun. Demikian pula Penyelesaian Tindak Pidana. Secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan. Sejumlah faktor penyebab banyaknya jumlah tindak pidana dan belum maksimalnya persentase penyelesaian tindak pidana antara lain banyaknya orang yang mengalami ketertindasan akibat krisis berkepanjangan berujung pada tindak pidana. Selain itu juga dipicu oleh lemahnya kontrol sosial yang tidak diikuti dengan langkah penegakan hukum. Pada saat kontrol sosial melemah, juga terjadi demoralisasi pihak petugas yang mestinya menjaga keamanan. Aparat yang harusnya menjaga keamanan, seringkali justru melakukan tindak pelanggaran. Pada saat yang sama masyarakat belum atau tidak melihat adanya upaya yang berarti dari aparat keamanan sendiri untuk mengembalikan citranya.

Tabel II.113

Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

NO	JENIS KRIMINALITAS	TAHUN									
		2012		2013		2014		2015		2016*	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	Narkoba	172	157	180	158	188	197	227	192	107	54
2	Pembunuhan	9	6	9	5	9	8	9	10	2	2
3	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	seksusal	51	12	42	39	40	28	58	55	22	13
5	Penganiayaan	205	73	133	91	73	46	88	53	25	8
6	Pencurian	188	72	166	65	148	71	188	77	71	21
7	Perampokan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pemerasan	18	3	9	4	3	2	8	6	6	2
9	Penipuan	146	78	156	52	182	82	124	63	81	20
10	Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
11	Pembakaran	5	1	7	6	9	9	15	8	3	0
12	Penyelundupan	0	0	3	3	5	5	5	4	3	0
13	Lain-lain	1831	1027	1949	1262	1501	834	1756	1021	495	182
TOTAL		2625	1429	2654	1685	2158	1282	2478	1489	816	302

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

*Tahun 2016 data sampai dengan bulan Mei.

Keterangan:

JTP = Jumlah Tindak Pidana

PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

(2) Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif sedikit daripada Provinsi lain. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan stabilitas keamanan bermasyarakat relative lebih aman. Jumlah demo Tahun 2010–2016 masih bersifat fluktuatif yang disebabkan terjadinya gejolak di masyarakat akibat inflasi atau daya beli masyarakat yang kurang tiap tahunnya. Diharapkan tahun-tahun yang akan datang lebih kondusif lagi. Jumlah demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.115

Tabel II.114

Jumlah Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2016

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bidang politik	3	7	2	1	5	3	12
2	Bidang Ekonomi	19	18	8	7	10	24	16
3	Kasus pemogokan kerja	12	12	4	1	2	3	-
4	Jumlah unjuk rasa	8	2	14	9	17	30	17

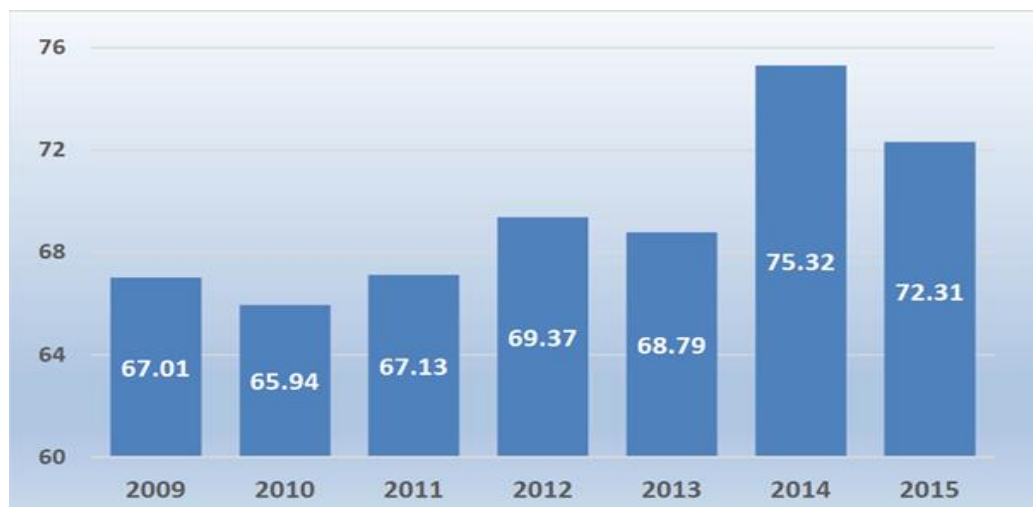
Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung, 2016

*Mei 2016

(3) Indeks Demografi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia. Setiap tahun sejak tahun 2009, IDI mengukur demokrasi di negeri ini dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. IDI dibagi dalam tiga kategori, yaitu baik (IDI > 80 poin), sedang (IDI 60-80 poin) dan buruk (IDI < 60 poin). Pencapaian IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Gambaran mengenai capaian IDI di Kepulauan Bangka Belitung periode 2009-2015 disajikan di dalam Grfaik II.30

Grafik II.30
Perkembangan IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 2009-2015



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan Grafik II.30, maka dapat disajikan informasi bahwa kondisi IDI Kepulauan Bangka Belitung pada periode 2009-2015 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 67,01; 2010 yang sebesar 65,94; 2011 sebesar 67,13; 2012 sebesar 69,37; 2013 sebesar 68,79; 2014 sebesar 75,32 dan 2015 sebesar 72,31). Walaupun mengalami fluktuasi yaitu terjadinya peningkatan maupun penurunan yang cukup signifikan selama 7 tahun terakhir, namun tingkat demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan penghitungan Indeks sejak tahun 2009 hingga 2015 tetap berada pada kategori “sedang”. Hal ini menunjukkan bahwa IDI sebagai salah satu alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas di Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naikturunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi di masyarakat.

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, di antaranya adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Gambaran mengenai komponen penghitungan IDI 2009-2015, dapat terlihat pada Tabel II.116 berikut:

Tabel II.115
Komponen Penghitungan IDI 2009-2016

Aspek	Variabel	Indikator
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dlm Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
3. Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Terdapat 3 (tiga) provinsi yang mengalami kenaikan kinerja demokrasi dari kategori “sedang” menjadi “baik” yakni provinsi Kalimantan Timur yaitu dari 77,77 menjadi 81,24 dan Provinsi Kalimantan Utara yang baru terbentuk, dengan nilai IDI sebesar 80,16. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta berhasil mempertahankan posisinya yaitu pada level baik dengan nilai 85,32 (naik 0,62 poin) untuk DKI Jakarta dan 83,19 untuk DIY (naik 0,48 poin). Capaian beberapa provinsi menembus kategori kinerja demokrasi “baik” merupakan hal yang baru terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir dalam pengukuran IDI. Masih terdapat 2 (dua) provinsi dengan kinerja “buruk”, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan sebanyak 28 provinsi lainnya berada dalam kinerja demokrasi kategori “sedang”. Termasuk juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kelompok ini. Secara keseluruhan dari 33 Provinsi, nilai IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan ke-17 di Indonesia. Posisi ini turun setelah sebelumnya pada 2014 Provinsi Kep. Bangka Belitung menempati urutan ke 11 di Indonesia. Sedangkan untuk daerah Sumatera, Bangka Belitung menempati posisi ketiga setelah provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Secara lengkap perkembangan IDI setiap provinsi tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada Tabel II.117

Tabel II.116
Perkembangan IDI Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2014-2015

Provinsi	IDI 2014				IDI 2015			
	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
Aceh	72,29	69,76	63,94	88,73	67,78	74,81	63,98	64,97
Sumatera Utara	68,02	79,86	61,97	62,75	69,01	82,02	62,17	63,52
Sumatera Barat	63,99	47,21	61,82	88,56	67,46	52,99	69,77	82,01
Riau	68,40	74,35	59,74	74,69	65,83	66,46	66,61	63,80
Jambi	71,15	78,23	54,01	89,48	70,68	75,89	62,12	77,72
Sumatera Selatan	74,82	86,09	63,57	78,53	79,81	96,06	78,79	61,00
Bengkulu	71,70	79,49	63,98	74,16	73,60	78,50	68,45	75,61
Lampung	71,62	72,06	63,69	83,66	65,95	71,99	63,19	62,74
Kep. Bangka Belitung	75,32	89,80	56,48	87,01	72,31	81,25	66,95	69,60
Kepulauan Riau	68,39	82,47	58,35	66,61	70,26	80,16	65,01	66,13
DKI Jakarta	84,70	91,72	73,94	92,97	85,32	89,64	83,19	83,26
Jawa Barat	71,52	83,95	65,22	65,89	73,04	79,10	81,89	51,37
Jawa Tengah	77,44	87,87	67,08	80,77	69,75	79,44	67,28	61,48
D.I.Yogyakarta	82,71	86,25	76,07	88,82	83,19	90,41	77,98	82,38
Jawa Timur	70,36	81,62	56,29	78,54	76,90	85,26	67,44	81,39
Banten	75,50	81,10	63,68	87,22	68,46	74,28	63,72	68,66
Bali	76,13	92,16	61,27	79,56	79,83	94,42	77,42	65,31
Nusa Tenggara Barat	62,62	58,73	62,08	68,38	65,08	51,59	61,11	88,36
Nusa Tenggara Timur	68,81	85,92	65,13	53,12	78,47	93,19	71,69	70,73
Kalimantan Barat	80,58	98,44	63,12	85,84	76,40	96,81	65,57	67,95
Kalimantan Tengah	79,00	92,93	66,42	81,48	73,46	85,07	68,31	67,05
Kalimantan Selatan	70,84	58,43	76,45	77,53	74,76	54,15	85,77	83,17
Kalimantan Timur	77,77	93,28	70,42	69,94	81,24	93,07	82,74	63,99

(4) Kemudahan Perizinan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. Dasar hukum dari pelayanan terpadu antara lain, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayani 38 jenis perizinan guna mempermudah para pelaku usaha meningkatkan investasinya di daerah itu. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai melaksanakan penyelenggaraan PTSP sejak pertengahan 2011 bertempat di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), penyelenggaraan PTSP ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2010 tertanggal 27 Desember dengan jumlah pelayanan perizinan

dan non perizinan sebanyak 31 jenis baik perizinan penanaman modal maupun perizinan teknis bersifat sektoral. Kewenangan PTSP dalam pelayanan perizinan bertambah menjadi 38 jenis sejak disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2014 tertanggal 12 Mei. PTSP melayani hampir semua perizinan baik di sektor penanaman modal, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, sektor kehutanan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta sektor perindustrian dan perdagangan. Ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 38 jenis perizinan hampir keseluruhannya tanpa dipungut biaya. Tercatat hanya tiga jenis perizinan yang masih dikenakan biaya yakni perizinan pembuatan izin trayek, izin sektor perikanan dan kelautan serta perizinan memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Untuk masalah perizinan tersebut pemerintah provinsi menyadari bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi, namun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan adanya PTSP ini kita semua berharap semoga mutu pelayanan prima bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mottonya yakni cepat, transparan, sederhana, mudah dan pasti.

(5) Pengenaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.118 dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2013-2015 pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan diikuti oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak rokok dan pajak air permukaan kontribusinya masih relatif rendah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang. Dasar hukum pengenaan pajak antara lain :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Tabel II.117
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Juta)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	151.034,97	149.719,57	162.036,29	172.239,98	171.879,40
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	143.964,32	154.884,48	139.175,29	110.239,08	111.656,78
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	135.136,44	139.313,51	163.479,97	165.429,32	151.587,72
4	Pajak Air Permukaan	3.171,79	3.544,64	4.036,07	4.860,32	5.707,53
5	Pajak Rokok	-	-	39.534,99	54.176,24	67.152,03
	Jumlah	433.307,52	447.462,20	508.262,62	506.944,94	507.983,46

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Secara akumulatif Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sektor Pajak Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2012 s.d tahun 2016. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3.88 % selama 5 (lima) tahun Pendapatan Pajak Daerah tumbuh rata-rata sebesar Rp. 18.668.985.817,66 (Delapan belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas koma enam puluh enam rupiah). Walaupun kenaikan terjadi secara fluktuatif pada bagian-bagian Pendapatan Pajak Daerah namun secara keseluruhan Pajak Daerah mengalami peningkatan.

(6) Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrument kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim investasi dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.119, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kurun waktu 2008-2014 jumlah perda yang sahkan untuk mendukung iklim investasi sebanyak 8 Perda, mulai dari Perda pembentukan BUMD sampai dengan Perda penyertaan modal pada bank pembangunan daerah.

Tabel II.118
Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Yang Mendukung Iklim Investasi

No	Nomor	Perda
1	18 Tahun 2008	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera
2	11 Tahun 2008	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Perkreditan
3	12 Tahun 2008	Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Sumsel
4	1 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Babel
5	3 Tahun 2010	Pembentukan BUMD PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	7 Tahun 2011	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung
7	7 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung
8	3 Tahun 2014	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah

Sumber: Biro Hukum Setda Prov. Kep. Bangka Belitung

2.4.4. Fokus Sumber Daya manusia

(1) Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam proses percepatan pembangunan di daerah. Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaganya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan

tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja. Kualitas sumber daya manusia di suatu daerah memberikan gambaran secara tidak langsung terhadap kualitas daerah. Rasio tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan seperti ditampilkan pada Tabel II.120

Tabel II.119
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

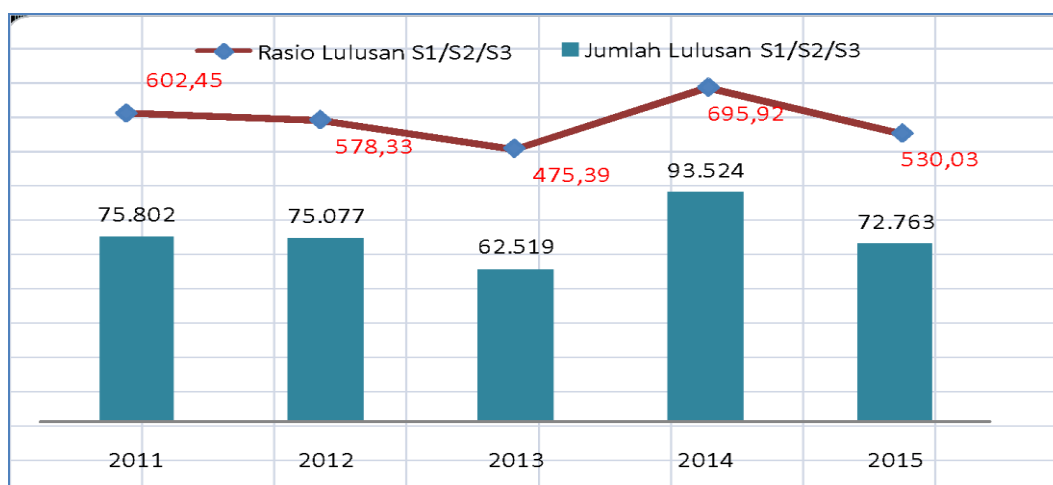
N o	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	75.802	75.077	62.519	93.524	72.763	n/a
2.	Jumlah penduduk	1.258.234	1.286.551	1.315.123	1.343.881	1.372.813	n/a
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	602,45	578,33	475,39	695,92	530,03	n/a

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Keterangan: No.1 dan 2 sumber Dinas Pendidikan

Berdasarkan grafik Grafik II.31 di bawah dapat dijelaskan bahwa Kualitas tenaga kerja/rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) cenderung berfluktuasi dimana tahun 2011 sebesar 602,45 per-10.000 penduduk sedangkan tahun 2015 menurun menjadi 530,03 per-10.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja dengan latar pendidikan sarjana/ perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun, walaupun sempat pada tahun 2014 rasio ini meningkat sebesar 695,92 per-10.000 penduduk. Diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dengan kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai dengan keinginan pengguna tenaga kerja agar dapat terserap dalam perusahaan-perusahaan, dan secara otomatis dapat meningkatkan rasio kelulusan S1/S2/S3.

Grafik II.31
Rasio lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

(2) Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat ketergantungan merupakan rasio perbandingan antara usia tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Rasio ketergantungan ini digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Berdasarkan Tabel II.121 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2011 sebesar 47,98 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 47,35 dan kembali mengalami hingga tahun 2015 rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 46,83. Ini mengindikasikan bahwa tingkat ketegantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk yang produktif untuk lima tahun terakhir semakin kecil dan jumlah penduduk usia kerja menjadi semakin besar dibandingkan dengan penduduk bukan usia kerja.

Tabel II.120
Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	361.800	365.752	369.912	377.995	386.133	n/a
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	46.154	47.690	49.520	50.602	51.688	n/a
3.	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2)	407.954	413.442	419.432	428.597	437.821	n/a

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	850.280	873.109	895.691	915.284	934.992	n/a
5.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	47,98	47,35	46,83	46,83	46,83	n/a

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Pertengahan tahun/Juni)



**PANTAI PARAI TENGGIRI
SUNGAILIAT - BANGKA**

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022**

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kemampuan keuangan di suatu daerah adalah bagian penting dalam menjawab aspek keterkaitan perencanaan dan pembangunan yang dapat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya kinerja keuangan pada periode sebelumnya dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Hasil analisis juga digunakan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi lima tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah

3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016

Kemampuan keuangan di suatu daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terkait dengan peraturan yang ada, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi antara belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) serta pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016, digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam periode 2012-2016, pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dari Rp. 1.384.937.385.356,64 pada tahun 2012 menjadi Rp. 1.950.153.950.302,77 pada tahun 2016. Berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah, maka selama kurun waktu 5 tahun, rata-rata realisasi pendapatan daerah 98,62%, sebagaimana disajikan pada Tabel III.1.

Tabel III.1
Perkembangan Pendapatan Daerah
Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	1.387.545.298.963,62	1.384.937.385.356,64	99,81%
2013	1.554.611.722.708,58	1.529.110.292.281,15	98,36%
2014	1.722.417.070.217,83	1.719.774.423.456,42	99,85%
2015	1.918.085.118.953,54	1.886.998.635.504,14	98,38%
2016	2.017.171.126.824,26	1.950.153.950.302,77	96,68%

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Kontribusi Pendapatan Daerah tersebar dalam 3 (tiga) komponen besar, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel III.2
Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian	Kontribusi Terhadap Pendapatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Asli Daerah				
2012	423.107.063.158,62	438.373.572.678,64	103,61%	31,65%
2013	478.877.918.597,58	495.786.504.873,15	103,53%	32,42%
2014	556.742.867.297,83	563.108.840.861,42	101,14%	32,74%
2015	558.971.218.953,54	571.802.890.055,14	102,30%	30,30%
2016	581.397.810.824,26	575.152.636.957,77	98,93%	29,49%
Dana Perimbangan				
2012	785.306.155.805,00	821.499.996.517,00	104,61%	59,32%
2013	933.756.954.111,00	907.835.915.596,00	97,22%	59,37%
2014	1.034.374.722.920,00	1.025.142.797.595,00	99,11%	59,61%
2015	1.179.487.500.000,00	1.130.400.495.449,00	95,84%	59,90%
2016	1.430.773.316.000,00	1.126.284.913.345,00	78,72%	57,75%

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian	Kontribusi Terhadap Pendapatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
2012	179.132.080.000,00	125.063.816.161,00	69,82%	9,03%
2013	141.976.850.000,00	125.487.871.812,00	88,39%	8,21%
2014	131.299.480.000,00	131.522.785.000,00	100,17%	7,65%
2015	179.626.400.000,00	184.795.250.000,00	102,88%	9,79%
2016	5.000.000.000,00	248.716.400.000,00	4974,33%	12,75%

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Jika dilihat dari sumber dananya dalam 5 tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 31,32%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kategori sedang. Dana perimbangan memberikan sumbangan rata-rata sebesar 59,19%, hal ini berarti ketergantungan pendanaan terhadap pemerintah pusat masih relatif besar, karena daerah tetap masih belum mampu sepenuhnya lepas dari ketergantungan dengan pemerintah pusat.

Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, dapat dilihat dari rasio PAD terhadap realisasi belanja. PAD mampu membiayai rata-rata 31,47% dari kebutuhan belanja. Sedangkan dana perimbangan berkontribusi rata-rata sebesar 59,43%. Namun demikian, selama periode 2012-2016, trend kontribusi PAD terhadap APBD relatif naik sedikit yang menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan PAD cukup mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan belanja daerah, walaupun masih harus ditutupi dengan pendanaan lainnya.

Tabel III.3
Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan
Tahun Anggaran 2012-2016

Uraian	Realisasi	Realisasi	Kemampuan (%)
	Pendapatan	Belanja	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Asli Daerah			
2012	438.373.572.678,64	1.332.038.719.571,07	32,91
2013	495.786.504.873,15	1.609.666.436.460,31	30,80
2014	563.108.840.861,42	1.596.086.858.479,20	35,28
2015	571.802.890.055,14	1.869.958.486.295,70	30,58
2016	575.152.636.957,77	2.070.521.259.422,32	27,78
Rata-Rata			31,47
Dana Perimbangan			
2012	821.499.996.517,00	1.332.038.719.571,07	61,67
2013	907.835.915.596,00	1.609.666.436.460,31	56,40
2014	1.025.142.797.595,00	1.596.086.858.479,20	64,23
2015	1.130.400.495.449,00	1.869.958.486.295,70	60,45
2016	1.126.284.913.345,00	2.070.521.259.422,32	54,40

Uraian	Realisasi	Realisasi	Kemampuan (%)
	Pendapatan	Belanja	
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-Rata			59,43
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
2012	125.063.816.161,00	1.332.038.719.571,07	9,39
2013	125.487.871.812,00	1.609.666.436.460,31	7,80
2014	131.522.785.000,00	1.596.086.858.479,20	8,24
2015	184.795.250.000,00	1.869.958.486.295,70	9,88
2016	248.716.400.000,00	2.070.521.259.422,32	12,02
Rata-Rata			9,46

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

A. Pendapatan Asli Daerah

Selama Periode 2012-2016 realisasi PAD mengalami peningkatan. Hal ini diperoleh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Realisasi PAD sampai dengan tahun 2016 menurut jenis PAD dapat dilihat pada Tabel III.4.

Tabel III.4
Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sampai dengan 2016 menurut jenis PAD

No.	Sumber Pendapatan	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4:3)	(6=4-3)
1	Pajak daerah	509.130.376.289,67	507.983.460.531,72	99,77	(1.146.915.757,95)
2	Retribusi Daerah	8.886.514.493,56	8.651.866.891,72	97,36	(234.647.601,84)
3	Hasil PMD & Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.613.342.583,77	5.613.342.582,77	100	(1)
4	Lain-lain PAD yang Sah	57.767.577.457,26	52.903.966.951,56	91,58	(4.863.610.505,70)
	Jumlah	581.397.810.824,26	575.152.636.957,77	98,93	(6.245.173.866,49)

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

1) Pajak Daerah

Secara umum realisasi Pajak Daerah Tahun 2012-2016 tergambar pada Tabel III.5.

Tabel III.5
Realisasi Pajak Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)	(5=3-2)
2012	388.292.073.530,71	396.527.427.024,20	102,12	8.235.353.493,49
2013	433.307.517.261,08	447.462.199.032,28	103,27	14.154.681.771,20
2014	499.202.994.535,74	508.262.616.895,88	101,81	9.059.622.360,14
2015	500.844.014.371,82	506.944.936.060,22	101,22	6.100.921.688,4
2016	509.130.376.289,67	507.983.460.531,72	99,77	(1.146.915.757,95)
Jumlah	2.330.776.975.989,02	2.367.180.639.544,30	101,56	36.403.663.555,28

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan bahwa pada periode 2012-2016 secara rata-rata, realisasi penerimaan dari pajak daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan realisasi rata-rata mencapai 101,56 persen.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada kepentingan pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi daerah mempunyai potensi untuk dikembangkan, karena kinerjanya bersifat pemenuhan atas permintaan berbagai jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada masyarakat. Perkembangan realisasi Retribusi Daerah 2012-2016, dapat dilihat pada Tabel III.6.

Tabel III.6
Realisasi Retribusi Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)	(5=3-2)
2012	2.588.161.500,00	3.689.016.557,31	142,53	1.100.855.057,31
2013	3.198.987.950,00	5.327.340.928,00	166,53	2.128.352.978,00
2014	5.901.678.950,00	9.357.405.765,00	158,55	3.455.726.815,00
2015	8.445.970.286,00	11.520.365.059,00	136,40	3.074.394.773,00
2016	8.886.514.493,56	8.651.866.891,72	97,36	(234.647.601,84)
JUMLAH	29.021.313.179,56	38.545.995.201,03	132,89	9.524.682.021,47

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Pada komponen retribusi daerah, selama periode 2012 – 2016 rata-rata realisasi pendapatan mengalami kenaikan sebesar 132,89 persen dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 166,53 persen.

3) Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, diperoleh dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada perusahaan swasta. Realisasi penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah selama periode 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel III.7.

Tabel III.7

Realisasi Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)	(5=3-2)
2012	1.906.601.335,95	7.193.085.574,73	377,27	5.286.484.238,78
2013	7.500.000.000,00	5.390.252.312,97	71,87	(2.109.747.687,03)
2014	7.500.000.000,00	1.205.926.846,39	16,08	(6.294.073.153,61)
2015	7.500.000.000,00	5.243.416.236,78	69,91	(2.256.583.763,22)
2016	5.613.342.583,77	5.613.342.583,77	100,00	-
JUMLAH	30.019.943.919,72	24.646.023.554,64	82,10	(5.373.920.365,08)

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Selama kurun waktu 2012-2016 Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah rata-rata tidak mencapai target, hanya pada Tahun 2012 realisasi jauh melampaui target.

4) Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada pajak daerah, retribusi daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan lain-lain PAD utamanya bersumber dari Penerimaan Jasa Giro, Rekening Deposito pada bank dan Rupa-rupa Pendapatan. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD 2012-2016, secara rata-rata melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 102,18 persen, meskipun pada tahun 2016 realisasi masih berada dibawah target yaitu sebesar 91,58 persen, sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 114,02 persen, sebagaimana tertera pada Tabel III.8.

Tabel III.8
Realisasi Lain-lain PAD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)	(5=3-2)
2012	30.320.226.773,96	30.964.043.522,40	102,12	643.816.748,44
2013	34.871.413.386,50	37.606.712.599,90	107,84	2.735.299.213,40
2014	44.138.193.812,09	44.282.891.354,15	100,33	144.697.542,06
2015	42.181.234.295,72	48.094.172.699,14	114,02	5.912.938.403,42
2016	57.767.577.457,26	52.903.966.951,56	91,58	(4.863.610.505,70)
Jumlah	209.278.645.725,53	213.851.787.127,15	102,18	4.573.141.401,62

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada Daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Dana Perimbangan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2012 melampaui target sebesar 104,61 persen. Selanjutnya Tahun 2013-2016 realisasi dana perimbangan masih dibawah target, dengan rincian sebagaimana yang dapat dilihat pada Table III.9.

Tabel III.9
Realisasi Dana Perimbangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)	(5=3-2)
2012	785.306.155.805,00	821.499.996.517,00	104,61	36.193.840.712,00
2013	933.756.954.111,00	907.835.915.596,00	97,22	(25.921.038.515,00)
2014	1.034.374.722.920,00	1.025.142.797.595,00	99,11	(9.231.925.325,00)
2015	1.179.487.500.000,00	1.130.400.495.449,00	95,84	(49.087.004.551,00)
2016	1.430.773.316.000,00	1.126.284.913.345,00	78,72	(304.488.402.655,00)
JUMLAH	5.363.698.648.836,00	5.011.164.118.502,00	93,43	(352.534.530.334,00)

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi,

sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan komponen pendapatan daerah yang meliputi Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan dan Bagi Hasil dari Pertambangan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012-2016, dapat dilihat pada Table III.10.

Tabel III.10
Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 3 - 2
2012	126.082.690.805	162.276.531.517	128,71	36.193.840.712
2013	172.446.266.111	146.525.227.596	84,97	(25.921.038.515)
2014	184.182.116.920	174.950.191.595	94,99	(9.231.925.325)
2015	226.155.287.000	188.157.236.449	83,20	(37.998.050.551)
2016	130.875.389.000	142.860.016.345	109,16	11.984.627.345
JUMLAH	839.741.749.836	814.769.203.502	97,03	(24.972.546.334)

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan tabel 3.10 di atas dapat terlihat bahwa secara rata-rata realisasi pada komponen Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 97,03 persen, dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 128,71 persen.

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Adapun realisasi DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012-2016 adalah sebagaimana yang terlihat pada Tabel III.11.

Tabel III.11
Dana Alokasi Umum / Penyeimbang DAU
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 3 - 2
2012	634.087.815.000,00	634.087.815.000,00	100,00	-
2013	717.140.118.000,00	717.140.118.000,00	100,00	-
2014	806.820.146.000,00	806.820.146.000,00	100,00	-
2015	897.887.443.000,00	897.887.443.000,00	100,00	-
2016	905.526.208.000,00	905.526.208.000,00	100,00	-
Jumlah	3.961.461.730.000,00	3.961.461.730.000,00	100,00	-

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan tabel 3.11, dapat dijelaskan bahwa DAU selama tahun 2012-2016 secara rata-rata sebesar 100 persen. Upaya peningkatan DAU secara terus menerus dilakukan, antara lain secara bersama-sama dengan provinsi yang tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk memasukkan luas wilayah laut sebagai dasar perhitungan alokasi DAU ke daerah.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK dari Tahun 2012-2014 sebesar 100 persen, menurun pada Tahun 2015 sebesar 80 persen dan Tahun 2016 realisasi hanya mencapai 19,75 persen. Hal ini bukan disebabkan karena kurangnya alokasi yang diberikan Pemerintah Pusat, namun karena adanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan mendapat alokasi DAK tidak dapat dilaksanakan. Secara periodik, realisasi DAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2012-2016 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.12.

Tabel III.12
Realisasi Pos Dana Alokasi Khusus
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 3 - 2
2012	25.135.650.000,00	25.135.650.000,00	100,00	-
2013	44.170.570.000,00	44.170.570.000,00	100,00	-
2014	43.372.460.000,00	43.372.460.000,00	100,00	-
2015	55.444.770.000,00	44.355.816.000,00	80,00	(11.088.954.000,00)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 3 - 2
2016	394.371.719.000,00	77.898.689.000,00	19,75	(316.473.030.000,00)
Jumlah	562.495.169.000,00	234.933.185.000,00	41,77	(327.561.984.000,00)

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Bidang Infrastruktur Jalan, Dana Penyesuaian Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID), dan Sumbangan Pihak Ketiga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Kenaikan yang sangat signifikan pada Tahun 2016 sebesar 4974,33 persen yang bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Adapun Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2012-2016 adalah sebagaimana tergambar pada Tabel III.13.

Tabel III.13

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 3 - 2
2012	179.132.080.000,00	125.063.816.161,00	69,82	(54.068.263.839,00)
2013	141.976.850.000,00	125.487.871.812,00	88,39	(16.488.978.188,00)
2014	131.299.480.000,00	131.522.785.000,00	100,17	223.305.000,00
2015	179.626.400.000,00	184.795.250.000,00	102,88	5.168.850.000,00
2016	5.000.000.000,00	248.716.400.000,00	4974,33	243.716.400.000,00
Jumlah	637.034.810.000,00	815.586.122.973,00	128,03	178.551.312.973,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel III.14.

Tabel III.14
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi
Pendapatan Daerah Tahun 2012 s/d Tahun 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	1.384.937.385.356,64	1.529.110.292.281,15	1.719.774.423.456,42	1.886.998.635.504,14	1.950.153.950.302,77	8,99
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	438.373.572.678,64	495.786.504.873,15	563.108.840.861,42	571.802.890.055,14	575.152.636.957,77	7,20
1.1.1.	Pajak Daerah	396.527.427.024,20	447.462.199.032,28	508.262.616.895,88	506.944.936.060,22	507.983.460.531,72	6,59
1.1.2.	Retribusi Daerah	3.689.016.557,31	5.327.340.928,00	9.357.405.765,00	11.520.365.059,00	8.651.866.891,72	29,57
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	7.193.085.574,73	5.390.252.312,97	1.205.926.846,39	5.243.416.236,78	5.613.342.583,77	59,79
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	30.964.043.522,40	37.606.712.599,90	44.282.891.354,15	48.094.172.699,14	52.903.966.951,56	14,45
1.2.	Dana Perimbangan	821.499.996.517,00	907.835.915.596,00	1.025.142.797.595,00	1.130.400.495.449,00	1.126.284.913.345,00	8,33
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	162.276.531.517,00	146.525.227.596,00	174.950.191.595,00	188.157.236.449,00	142.860.016.345,00	(1,71)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	634.087.815.000,00	717.140.118.000,00	806.820.146.000,00	897.887.443.000,00	905.526.208.000,00	9,44
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	25.135.650.000,00	44.170.570.000,00	43.372.460.000,00	44.355.816.000,00	77.898.689.000,00	37,95
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	125.063.816.161,00	125.487.871.812,00	131.522.785.000,00	184.795.250.000,00	248.716.400.000,00	20,06

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Dilihat dari tabel di atas rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan daerah dari kurun waktu tahun 2012-2016 masih kurang dari 100%, namun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3.1.1.1. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah pada periode 2012–2016 dipergunakan untuk upaya percepatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang dijabarkan dalam periode perencanaan pembangunan setiap tahun.

Pemahaman terhadap tantangan pembangunan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam visi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yaitu “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”.

Mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya dan kondisi daerah, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2012 – 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan *One Village One Product (OVOP)* dan koperasi komoditi;
2. Pengembangan Pariwisata;
3. Penguatan *rural urban linkages*;
4. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
5. Program SATAM EMAS;
6. Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun;
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
9. Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks. Tambang;
10. Pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah;
12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
13. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tersebut telah dilakukan upaya-upaya antara lain dengan mengintensifkan segala sektor pendapatan yang dapat dijadikan sumberdaya untuk membiayai pembangunan daerah.

Kinerja Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2012-2016 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.15.

Tabel III.15
Kinerja Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2012	1.619.791.080.526,16	1.332.038.719.571,07	82,24	287.752.360.955,09
2013	1.837.133.947.551,69	1.609.666.436.460,31	87,62	227.467.511.091,38
2014	1.924.383.150.881,78	1.596.086.858.479,20	82,94	328.296.292.402,58
2015	2.226.356.387.053,48	1.869.958.486.295,70	83,99	356.395.900.757,78
2016	2.354.864.921.673,87	2.070.521.259.422,32	87,93	284.343.662.251,55
Jumlah	9.962.527.487.686,98	8.478.271.760.228,60	85,10	1.484.255.727.458,38

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan tabel 3.15, dapat dijelaskan bahwa pada periode 2012-2016 jumlah anggaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan berjumlah Rp.9.962.527.487.686,98 dengan realisasi sebesar Rp.8.478.271.760.228,60 atau 85,10 persen.

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012-2016 sebesar Rp.5.360.712.750.314,50 dengan realisasi sebesar Rp.4.719.751.740.952,68 atau 88,04 persen, sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.16.

Tabel III.16
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2012	899.998.312.627,10	764.754.923.151,34	84,97	135.243.389.475,76
2013	903.552.315.666,19	808.318.501.177,15	89,46	95.233.814.489,04
2014	1.016.409.393.479,78	855.780.981.423,84	84,20	160.628.412.055,94
2015	1.228.793.606.173,98	1.080.851.837.395,72	87,96	147.941.768.778,26
2016	1.311.959.122.367,45	1.210.045.497.804,63	92,23	101.913.624.562,82
Jumlah	5.360.712.750.314,50	4.719.751.740.952,68	88,04	640.961.009.361,82

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

1.) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012-2016 sebesar Rp.1.611.440.351.066,59 dengan realisasi sebesar Rp.1.446.076.727.405,55 atau 89,74 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.17.

Tabel III.17
Realisasi Belanja Pegawai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 3 - 2
2012	259.671.381.413,45	216.271.987.558,98	83,29	43.399.393.854,47
2013	271.046.501.338,43	246.900.473.917,87	91,09	24.146.027.420,56
2014	303.779.760.640,61	274.339.635.936,42	90,31	29.440.124.704,19
2015	347.016.633.146,16	312.375.890.443,08	90,02	34.640.742.703,08
2016	429.926.074.527,94	396.188.739.549,20	92,15	33.737.334.978,74
Jumlah	1.611.440.351.066,59	1.446.076.727.405,55	89,74	165.363.623.661,04

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

2.) Belanja Bunga

Belanja Bunga dalam APBD selama tahun 2012-2016 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

3.) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012-2016 hanya dianggarkan pada Tahun 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,00, namun tidak terealisasi sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.18.

Tabel III.18
Realisasi Belanja Subsidi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	1.000.000.000,00	-	0,00	1.000.000.000,00
Jumlah	1.000.000.000,00	-	0,00	1.000.000.000,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

4.) Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012-2016 sebesar Rp.1.364.823.263.090,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.246.639.691.279,00 atau 91,34 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.19.

Tabel III.19
Realisasi Belanja Hibah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2012	227.862.015.575,00	197.922.560.299,16	86,86	29.939.455.275,84
2013	237.196.220.829,00	220.160.775.826,00	92,82	17.035.445.003,00
2014	203.224.437.112,00	167.022.782.500,00	82,19	36.201.654.612,00
2015	289.428.845.000,00	257.790.335.224,00	89,07	31.638.509.776,00
2016	407.111.744.574,00	403.743.237.430,00	99,17	3.368.507.144,00
Jumlah	1.364.823.263.090,00	1.246.639.691.279,16	91,34	118.183.571.810,84

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

5.) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012-2016 sebesar Rp.7.204.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.410.710.000,00 atau 75,10 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.20.

Tabel III.20
Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 3 - 2
2012	1.151.500.000,00	669.500.000,00	58,14	482.000.000,00
2013	2.794.950.000,00	2.611.950.000,00	93,45	183.000.000,00
2014	1.030.000.000,00	745.500.000,00	72,38	284.500.000,00
2015	1.228.500.000,00	666.700.000,00	54,27	561.800.000,00
2016	1.000.000.000,00	717.060.000,00	71,71	282.940.000,00
Jumlah	7.204.950.000,00	5.410.710.000,00	75,10	1.794.240.000,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

6.) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012-2016 sebesar Rp.1.149.718.399.975,71 dengan realisasi sebesar Rp.1.062.524.793.332,52 atau 93,22 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.21.

Tabel III.21
Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2012	244.847.671.436,11	212.792.435.968,20	86,91	32.055.235.467,91
2013	181.566.637.624,28	177.383.055.670,28	97,70	4.183.581.954,00
2014	233.243.093.633,99	212.859.716.663,42	91,26	20.383.376.970,57
2015	332.323.833.855,82	303.413.474.847,19	91,30	28.910.359.008,63
2016	157.738.163.425,51	156.076.110.183,43	98,95	1.662.053.242,08
Jumlah	1.149.718.399.975,71	1.062.524.793.332,52	93,22	87.193.606.643,19

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

7.) Belanja Bantuan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012-2016 sebesar Rp.1.206.573.309.062,00 dengan realisasi sebesar Rp.957.583.417.669,00 atau 79,36 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.22.

Tabel III.22

Realisasi Belanja Bantuan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2012	163.000.111.928,00	137.098.439.365,00	84,11	25.901.672.563,00
2013	209.912.803.188,00	161.262.245.763,00	76,82	48.650.557.425,00
2014	265.398.559.934,00	200.796.461.884,00	75,66	64.602.098.050,00
2015	256.078.694.172,00	206.510.260.515,00	80,64	49.568.433.657,00
2016	312.183.139.840,00	251.916.010.141,00	80,69	60.267.129.698,00
Jumlah	1.206.573.309.062,00	957.583.417.669,00	79,36	248.989.891.393,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

8.) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012-2016 sebesar Rp.19.943.477.120,20 dengan realisasi sebesar Rp.1.516.401.306,45 atau 7,60 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.23.

Tabel III.23

Realisasi Belanja Tidak Terduga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2012	3.456.632.274,54	-	0,00	3.456.632.274,54
2013	1.036.202.686,48	-	0,00	1.036.202.686,48
2014	9.733.542.159,18	16.884.440,00	0,17	9.716.657.719,18
2015	2.717.100.000,00	95.176.366,45	3,50	2.621.923.633,55
2016	3.000.000.000,00	1.404.340.500,00	46,81	1.595.659.500,00
Jumlah	19.943.477.120,20	1.516.401.306,45	7,60	18.427.075.813,75

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

B. Belanja Langsung

Belanja Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 - 2016 yang digunakan sebagai belanja pembangunan dianggarkan sebesar Rp.4.601.814.737.472,48 dengan realisasi sebesar Rp.3.758.520.019.275,92 atau 81,67 persen, sebagaimana yang dapat terlihat pada Tabel III.24.

Tabel III.24
Realisasi Belanja Langsung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2012	719.792.767.899,06	567.283.796.419,73	78,81	152.508.971.479,33
2013	933.581.631.985,50	801.347.935.283,16	85,84	132.233.696.702,34
2014	907.973.757.402,00	740.305.877.055,36	81,53	167.667.880.346,64
2015	997.560.780.879,50	789.106.648.899,98	79,10	208.454.131.979,52
2016	1.042.905.799.306,42	860.475.761.617,69	82,51	182.430.037.688,73
Jumlah	4.601.814.737.472,48	3.758.520.019.275,92	81,67	843.294.718.196,56

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

1.) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012-2016 sebesar Rp.425.513.072.531,07 dengan realisasi sebesar Rp.380.899.845.846,04 atau 89,52 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.25.

Tabel III.25
Realisasi Belanja Pegawai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2012	56.038.330.774,00	49.903.757.399,42	89,05	6.134.573.374,58
2013	93.576.429.047,07	79.233.302.203,68	84,67	14.343.126.843,39
2014	78.574.583.300,00	70.712.733.013,01	89,99	7.861.850.286,99
2015	92.273.195.330,00	81.446.272.543,00	88,27	10.826.922.787,00
2016	105.050.534.080,00	99.603.780.686,93	94,82	5.446.753.393,07
Jumlah	425.513.072.531,07	380.899.845.846,04	89,52	44.613.226.685,03

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

2.) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2012-2016 sebesar Rp.1.482.587.464.761,93 dengan realisasi sebesar Rp.1.202.764.044.309,65 atau 82,08 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.26.

Tabel III.26
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2012	284.522.141.225,00	226.599.150.786,94	79,64	57.922.990.438,06
2013	396.726.112.442,43	319.348.056.189,02	80,50	77.378.056.253,41
2014	447.315.828.222,00	364.039.655.088,00	81,38	83.276.173.134,00
2015	599.476.960.259,50	473.942.522.699,00	79,06	125.534.437.560,50
2016	605.139.780.708,62	531.095.000.241,86	87,76	74.044.780.466,76
Jumlah	1.482.587.464.761,93	1.202.764.044.309,65	82,08	418.156.437.852,73

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

2.) Belanja Modal

Belanja Modal dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012-2016 sebesar Rp.1.843.120.841.983,86 dengan realisasi sebesar Rp.1.462.595.788.425,06 atau 78,60 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.27.

Tabel III.27
Realisasi Belanja Modal
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 3 - 2
2012	379.232.295.900,45	290.780.888.233,37	76,68	88.451.407.667,08
2013	443.279.090.396,00	402.766.576.890,45	90,86	40.512.513.505,55
2014	382.083.345.880,00	305.553.488.954,35	79,97	76.529.856.925,65
2015	305.810.625.290,00	233.717.853.657,98	76,43	72.092.771.632,02
2016	332.715.484.517,80	229.776.980.688,90	69,06	102.938.503.828,90
Jumlah	1.843.120.841.983,86	1.462.595.788.425,06	78,60	380.525.053.558,80

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Adapun proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dirinci seperti pada Tabel III.28.

Tabel III.28
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	URAIAN	2014	2015	2016
		(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5
A	Belanja Tidak Langsung	84,20	87,96	92,23
1	Belanja Pegawai	90,31	90,02	92,15
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	82,19	89,07	99,17
5	Belanja Bantuan Sosial	72,38	54,27	71,71
6	Belanja Bagi Hasil	91,26	91,30	98,95
7	Belanja Bantuan Keuangan	76,66	80,64	80,69
8	Belanja Tidak Terduga	0,17	3,50	46,81
B	Belanja Langsung	81,53	79,10	82,51
1	Belanja Pegawai	89,99	88,27	94,82
2	Belanja Barang dan Jasa	81,38	79,06	87,76
3	Belanja Modal	79,97	76,43	69,06

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Dari tabel 3.28 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terhadap anggaran belanja dari tahun-tahun sebelumnya semakin meningkat akan tetapi masih terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan realisasi belanja pada beberapa komponen belanja, hal ini menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah cukup baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi.

3.1.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Pembiayaan Daerah dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012-2016 dianggarkan sebesar Rp.1.375.081.527.560,38 dengan realisasi sebesar Rp.1.374.959.305.055,38 atau 99,99 persen dengan uraian sebagai yang dapat dilihat pada Tabel III.29.

Tabel III.29
Realisasi Pembiayaan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 3 - 2
2012	232.245.781.562,54	232.123.559.057,54	99,95%	(122.222.505,00)
2013	282.522.224.843,11	282.522.224.843,11	100,00%	-
2014	201.966.080.663,95	201.966.080.663,95	100,00%	-
2015	320.653.645.641,17	320.653.645.641,17	100,00%	-
2016	337.693.794.849,61	337.693.794.849,61	100,00%	-
Jumlah	1.375.081.527.560,38	1.374.959.305.055,38	99,99%	(122.222.505,00)

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

A. Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan penerimaan mencakup komponen: 1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman; dan 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pembiayaan Penerimaan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016 dianggarkan sebesar Rp.1.392.581.527.560,38 dengan realisasi sebesar Rp.1.392.452.305.055,38 atau 99,99 persen sebagaimana yang terlihat pada Tabel III.30.

Tabel III.30
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 3 - 2
2012	242.245.781.562,54	242.123.559.057,54	99,95	(122.222.505,00)
2013	285.022.224.843,11	285.022.224.843,11	100,00	-
2014	201.966.080.663,95	201.966.080.663,95	100,00	-
2015	325.653.645.641,17	325.653.645.641,17	100,00	-
2016	337.693.794.849,61	337.693.794.849,61	100,00	-
Jumlah	1.392.581.527.560,38	1.392.452.305.055,38	99,99	(122.222.505,00)

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan pengeluaran mencakup komponen: 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal pemerintah daerah; 3) pembayaran pokok utang; dan 4) pemberian pinjaman. Adapun pembiayaan pengeluaran dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012-2016 dianggarkan sebesar Rp.17.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.17.500.000.000 atau terealisasi sebesar 100 persen sebagaimana yang tergambar dalam Tabel III.31.

Tabel III.31
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 3 - 2
2012	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	-
2013	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	-
2014	-	-	0,00	-
2015	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
2016	-	-	0,00	-
Jumlah	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	100,00	-

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

3.1.2 Neraca Daerah

3.1.2.1 Pertumbuhan Neraca Daerah

Neraca merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, sebagai informasi neraca menyediakan gambaran mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai tingkat rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara ekonomis, efektif dan efisien atau memenuhi unsur *value for money*. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2012-2016 seperti terlihat pada Tabel 3.32 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai

berikut:

- Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2010-2014, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 5,04% yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat sebesar 5,04% dalam lima tahun terakhir. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi dan aset tetap. Aset lancar berupa kas, piutang, persediaan. Investasi berupa investasi jangka panjang. Sementara Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan.
- Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai -2,31%, meskipun piutang menurun sebesar -106,69%. Hal ini disebabkan karena komponen aset lancar, yaitu kas dan persediaan, mengalami pertumbuhan sebesar -2,38% dan -109,74%. Melihat komposisi selama periode 2010-2014, pertumbuhan aset lancar menunjukkan bahwa kondisi aset lancar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kondisi cukup sehat karena aset lancar yang pada umumnya berupa pendanaan tunai telah tersebar dalam bentuk investasi dengan rata-rata pertumbuhan 24,45%. Selain itu aset lancar memiliki karakteristik yang likuid, maka dengan sendirinya akan berfluktuasi sesuai dengan penggunaannya. Bentuk investasi yang dilakukan berupa aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya) dengan rata-rata pertumbuhan 5,49%.
- Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2010-2014 dengan rata-rata sebesar -37,08%, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu tersebut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang baik secara tepat waktu.
- Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2010-2014, merupakan kewajiban jangka pendek (atau kewajiban lancar) berupa utang perhitungan pihak ketiga sebesar 27,34%, dan utang jangka pendek lainnya yang meningkat sebesar 31,60%, kewajiban jangka pendek ini masih bisa ditutupi dengan aset lancar yang dimiliki, dengan membandingkan rasio utang dengan rasio total aset sebesar 1,02:1, dan dalam kurun waktu 2010-2014, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Kewajiban tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar dan Dana Investasi merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2010-2014 mengalami pertumbuhan sebesar 5,17% yang berarti bahwa ekuitas dana cukup sehat.

Tabel III.32

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	301.572.897.573,86	228.843.544.644,57	336.581.522.153,71	354.821.504.563,62	235.487.309.498,46	(4,83)
1.1.1.	Kas	285.098.852.603,75	201.974.157.213,95	325.665.761.941,17	337.693.977.136,14	217.350.414.204,06	(5,28)
1.1.2.	Piutang	6.920.338.063,16	4.212.950.982,32	4.196.087.830,70	4.904.541.665,22	5.200.699.808,70	(5,55)
1.1.3.	Persediaan	9.553.688.906,95	22.656.436.448,30	6.719.672.381,84	12.222.985.762,26	12.936.195.485,70	6,25
1.1.4.	Biaya Dibayar Di Muka (Uang Muka Proyek)	-	-	-	-	-	-
1.2.	INVESTASI	75.305.268.445,94	77.868.518.678,28	80.192.603.080,41	80.369.021.802,92	82.237.317.816,27	1,78
1.3.	ASET TETAP	2.845.139.692.749,38	3.667.865.712.707,60	3.934.635.477.255,26	2.921.949.259.971,30	3.400.008.327.539,19	3,63
1.3.1.	Tanah	927.354.570.834,00	730.030.470.550,00	730.335.823.971,00	355.192.113.597,00	372.119.606.315,00	(16,69)
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	282.033.703.187,00	374.169.568.809,34	401.001.644.557,38	408.649.937.762,00	529.400.666.385,41	13,42
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	436.502.251.325,43	796.082.531.091,14	810.085.813.261,36	700.080.821.527,97	885.491.468.775,92	15,20
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	918.536.192.720,30	1.637.900.942.882,66	1.517.825.546.201,34	1.716.568.302.414,82	2.258.185.675.506,80	20,75
1.3.5.	Aset tetap lainnya	14.659.905.490,00	19.875.805.639,00	24.925.514.239,00	18.317.369.165,00	24.893.432.457,06	11,17
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	266.053.069.192,65	109.806.393.735,46	450.461.135.025,18	433.597.800.152,58	32.191.566.715,00	(34,45)
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	(710.457.084.648,07)	(802.274.088.616,00)	-
1.4.	ASET LAINNYA	2.706.102.000,00	7.339.635.965,00	7.277.422.525,47	34.310.278.567,19	38.898.122.400,31	70,42
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	104.942.000,00	72.371.900,00	39.966.800,00	9.446.900,00	-	-
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	kemitraan dengan pihak kedua	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	Aset tak berwujud	-	29.140.000,00	29.140.000,00	519.255.400,00	622.604.400,00	-

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.5.	Aset Lain-lain	2.601.160.000,00	7.238.124.065,00	7.208.315.725,47	33.781.576.267,19	38.275.518.000,31	71,22
	JUMLAH ASET DAERAH	3.224.723.942.769,18	3.981.917.411.995,45	4.358.687.025.014,85	3.391.450.064.905,03	3.756.631.077.254,23	3,10
2.	KEWAJIBAN	86.352.620,54	15.111.033.385,66	91.260.272.553,28	35.312.623.656,24	115.183.779.404,41	321,72
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	86.352.620,54	15.111.033.385,66	91.260.272.553,28	35.312.623.656,24	115.183.779.404,41	321,72
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	76.627.760,64	2.091.550,00	12.096.827,00	136.363,00	23.928.474,00	(20,77)
2.1.2.	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Utang Pajak	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Bagian lancar utang jangka panjang dalam negeri	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Pendapatan Diterima dimuka	-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Utang jangka pendek lainnya	9.724.860,00	15.108.941.835,66	91.248.175.726,28	35.312.487.293,24	115.159.850.930,41	552,65
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Utang dalam negeri	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	Utang jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	-
3.	EKUITAS DANA	3.224.637.590.148,54	3.966.806.378.609,79	4.267.426.752.461,57	3.356.137.441.248,79	3.641.447.297.849,82	2,46
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	301.486.526.953,22	213.732.511.258,91	245.321.249.600,43	-	-	-
3.1.1.	SILPA	285.022.224.843,11	201.966.080.663,95	325.653.645.641,17	-	-	-
3.1.2.	Cadangan Piutang	6.920.338.063,16	4.212.950.982,32	4.196.087.830,70	-	-	-
3.1.3.	Cadangan Persediaan	9.553.688.906,95	22.656.436.448,30	6.719.672.381,84	-	-	-
3.1.4.	Pendapatan yang ditangguhkan	-	5.985.000,00	19.473,00	-	-	-

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1.5.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(9.724.860,00)	(15.108.941.835,66)	(91.248.175.726,28)	-	-	-
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	2.923.151.063.195,32	3.753.073.867.350,88	4.022.105.502.861,14	-	-	-
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	2.845.139.692.749,38	3.667.865.712.707,60	3.934.635.477.255,26	-	-	-
3.2.2.	Diinvestasikan dalam Aset lainnya	2.706.102.000,00	7.339.635.965,00	7.277.422.525,47	-	-	-
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	75.303.268.445,94	77.868.518.678,28	80.192.603.080,41	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.224.723.942.769,18	3.981.917.411.995,45	4.358.687.025.014,85	3.391.450.064.905,03	3.7560.631.077.254,23	3,10

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2012-2016

3.1.2.2 Rasio Neraca

A. Rasio Likuiditas

Ratio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Data Rasio Likuiditas selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2012– 2016 sebagaimana Tabel III.33.

Tabel III.33
Rasio Likuiditas Neraca Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Rasio Likuiditas	Rumus	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio Lancar	Aset Lancar/Kewajiban Jangka Pendek	3.492,34	15,14	3,69	10,05	2,04
Quick Rasio	(Aset Lancar-Persediaan) / Kewajiban Jangka Pendek	3.412,20	14,87	3,64	9,91	2,00
Rasio total hutang terhadap total aset	Total Hutang/Total Aset	0,00	0,00	0,02	0,01	0,03
Rasio Utang terhadap Modal	Total Hutang/Total Ekuitas	0,00	0,00	0,02	0,01	0,03

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2012-2016

B. Rasio Solvabilitas

Ratio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2012–2016 sebagaimana pada Tabel III.34.

Tabel III.34
Rasio Solvabilitas Neraca Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Rasio Likuiditas	Rumus	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio Kewajiban terhadap Total Aset	Kewajiban/Total Aset	0,00	0,00	0,02	0,01	0,03
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	Kewajiban/Total Ekuitas	0,00	0,00	0,02	0,01	0,03

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2012-2016

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2012-2016, rata-rata realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memenuhi kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung adalah 84,94 persen, Sedangkan rata-rata penganggaran untuk belanja pegawai selama periode 2012-2016 sebesar 16,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan pegawai relatif lebih kecil persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan. Secara rinci proporsi penggunaan anggaran dapat dilihat pada Tabel III.35.

Tabel III.35
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Presentase belanja pegawai terhadap pengeluaran
1	2	3	4
2012	259.671.381.413,45	1.619.791.080.526,16	16,13%
2013	271.046.501.338,43	1.837.133.947.551,69	14,75%
2014	303.779.760.640,61	1.924.383.150.881,78	15,79%
2015	347.016.633.146,16	2.226.354.387.053,48	15,59%
2016	429.926.074.527,94	2.354.864.921.673,87	18,26%
Jumlah	1.611.440.351.066,59	9.962.527.487.686,98	16,17%

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012-2016

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Kondisi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun tahun 2012-2016 sebesar 92-95% yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan sisanya untuk melakukan investasi. Defisit riil anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diuraikan pada Tabel III.36.

Tabel III.36
Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.384.937.385.356,64	1.529.292.281,15	1.719.774.423.456,42	1.886.998.635.504,14	1.950.153.950.302,77
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.332.038.719.571,07	1.609.666.436.450,31	1.596.086.858.479,20	1.869.958.486.295,70	2.070.521.259.422,32
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-
	Surplus/ (Defisit) Riil	285.022.224.843,11	201.966.080.663,95	123.687.564.977,22	12.040.149.208,44	(120.367.309.199,55)

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat pada Tahun 2016 terjadi defisit anggaran dikarenakan komposisi pendapatan lebih kecil dari belanja, untuk menutupi defisit anggaran tersebut terdapat komposisi penutup anggaran seperti pada Tabel III.37.

Tabel III.37
Komposisi Penutup Defisit Anggaran
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Uraian	Proporsi dari total Surplus/(defisit) riil				
		2012(%)	2013(%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1	2			3	4	5
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	21,85	(28,26)	61,24	(5,23)	(35,64)
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,14	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Dilihat dari tabel di atas defisit riil anggaran pada tahun 2014-2016 dapat ditutupi dengan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, adapun realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel III.38.

Tabel III.38
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah SiLPA	285.022.224.843,11	100,00	201.966.080.663,95	100,00	325.653.645.641,17	100,00	337.693.794.849,61	100,00	217.326.485.730,06	100,00
2	Pelampauan Penerimaan PAD	15.266.509.520,02	5,36	16.908.586.275,57	8,37	6.365.973.563,59	1,95	12.831.671.101,60	3,80	(6.245.173.866,49)	-2,87
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	36.193.840.712,00	12,70	(25.921.038.515,00)	-12,83	(9.231.925.325,00)	-2,83	(49.087.004.551,00)	-14,54	(304.488.402.655,00)	-140,11
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(54.068.263.839,00)	-18,97	(16.488.978.188,00)	-8,16	223.305.000,00	0,07	5.168.850.000,00	1,53	243.716.400.000,00	112,14
5	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	242.123.559.057,54	84,95	285.022.224.843,11	141,12	201.966.080.663,95	62,02	356.395.900.757,78	105,54	284.343.662.251,55	130,84
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum diselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2012-2016



MUSEUM TIMAH INDONESIA - PANGKALPINANG

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022**

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Sejumlah permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, sehingga menjadi fokus perhatian untuk pembangunan di masa mendatang.

- Rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disumbang dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang sudah berusia kerja.
- Kurangnya kuantitas dan kualitas pengembangan pendidikan kejuruan berbasis unggulan daerah.
- Perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, misalnya kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah, dan pendirian rumah hunian yang kurang layak hal ini terlihat dari masih rendahnya persentase rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang pada tahun 2015 berada pada angka 75,62% tetapi relatif lebih baik jika dibandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada diangka 71,88%.
- Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih belum terlalu tinggi yang berada pada angka 69,88 tahun pada tahun 2015 tetapi masih relatif lebih baik di bandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 69,72 tahun.
- Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang terlihat dari jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 berada pada angka 115,05 terjadi peningkatan di bandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 101,00. Sedangkan untuk angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 berada pada angka

7,05 terjadi peningkatan di bandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 4,00.

- Masih tingginya penyakit menular khususnya HIV/AIDS, diare dan Demam Berdarah Dengue (DBD).
- Jumlah tenaga kesehatan yang jumlahnya masih belum optimal. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat, karena mereka tidak dapat dilayani dengan cepat. Penurunan ini disebabkan karena kondisi geografis yang cukup sulit dan kesejahteraan hidup mereka belum terpenuhi sehingga mereka pindah ke tempat lain yang lebih mudah dan terjamin kesejahteraannya. Hal ini terlihat dari rasio dokter per 100.000 penduduk pada tahun 2015 berada pada angka 0,000287, rasio perawat per 100.000 penduduk pada tahun 2015 berada pada angka 226,86 dan rasio bidan per 100.000 penduduk pada tahun 2015 berada pada angka 88,46.
- Kondisi kemantapan menurun dengan meningkatnya Kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam dan anomali cuaca.
- Terbatasnya kemampuan pendanaan penyelenggaraan jalan dari Pemerintah dibanding kebutuhan terhadap *life time* & panjang penanganan jalan dan jembatan.
- Masih rendahnya kinerja pelayanan air bersih dan krisis air baku karena pencemaran yang cukup tinggi akibat aktivitas tambang timah rakyat.
- Cakupan layanan sanitasi saat ini masih rendah.
- Belum adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional dan pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R.
- Tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pembangunan.
- Masih terdapatnya kawasan kumuh perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Masih rendahnya kepemilikan rumah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin.
- Belum terintegrasi penyediaan air minum dan sanitasi dalam penyediaan pengembangan perumahan.
- Masih terbatasnya lahan untuk pembangunan air minum komunal.
- *Backlog* perumahan belum terdata dengan baik
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi di masyarakat. Walaupun mengalami fluktuasi yaitu terjadinya peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir.

- Masih lemahnya ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman di masyarakat, sehingga masyarakat terjamin keamanannya dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
- Masih tingginya tingkat kriminalitas sehingga mengganggu peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan, serta pemeliharaan kantrantibnas.
- Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), pendidikan politik masyarakat.
- Belum optimalnya penguatan kelembagaan politik yang dapat menyeraskan penyaluran aspirasi berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat.
- Belum optimalnya pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, hal ini terlihat dari data persentase Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial hanya 11,01% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan di bandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 14,27%.
- Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.
- Masih belum optimalnya pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan didukung oleh peraturan perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, penyusunan dan penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai. Hal tersebut terlihat dari angka Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat yang dilayani dan diberdayakan masih relatif rendah berada pada angka 16,99 % pada tahun 2015 relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 13,88 %. Sedangkan berkaitan dengan angka persentase Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mampu berperan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial berada pada angka 6,29% pada tahun 2015 mengalami penurunan jika di bandingkan dengan angka pada tahun 2014 yang berada pada angka 22,08 %;
- Masih tingginya disparitas tingkat kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan di perkotaan sebesar 2,78 % pada bulan maret 2016 dan angka kemiskinan di pedesaan berada pada angka 7,72 %. hal ini terjadi karena garis kemiskinan di desa lebih tinggi berada pada angka 546.998 pada Maret 2016 jika di bandingkan dengan garis kemiskinan di perkotaan yang berada pada angka 521.773. Garis kemiskinan yang tinggi ini disumbang dari

masih tingginya tingkat harga komoditas pangan dan non pangan yang berada di pedesaan. Kemudian garis kemiskinan provinsi kepulauan Bangka Belitung juga merupakan garis kemiskinan tertinggi di Indonesia yang berada pada angka 534.229. sehingga untuk menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan dengan mengendalikan angka inflasi komoditas pangan dan non pangan;

- Masih tingginya jumlah tindak pidana jenis pencurian/perampokan dari 120 masalah tahun 2011 meningkat menjadi 357 masalah di tahun 2013 dan masih berada di angka 323 masalah tahun 2015 Selain itu tindak pidana psikotropika meningkat cukup besar tiap tahunnya dari 138 masalah menjadi 232 masalah di tahun 2016. Di sisi lain penanganan tindak pidana yang tertangani masih berkisar 50 persen hingga 60 persen. Selama tahun 2011-2015 terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba dari 3.854 pengguna menjadi 9.078 pengguna di tahun 2014, dan masih terdata 8.304 pengguna di tahun 2016. Hal ini menunjukkan masih tingginya jumlah penyalahgunaan narkoba.
- Meningkatnya tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hal ini terlihat dari angka pengangguran pada Agustus 2015 berada pada angka 6,29% dan mengalami peningkatan terus menerus jika dibandingkan dengan angka pengangguran pada Agustus 2013 dan Agustus 2014 yang masing-masing berada pada angka 3,70% dan 5,14%.
- Tingginya masyarakat yang bekerja pada sektor primer, melambatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor pertambangan dan sektor pertanian dimana kedua sektor tersebut merupakan penyumbang tenaga kerja terbesar dalam menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini terlihat dari data februari 2016 sektor pertanian dan pertambangan masing-masing menyumbang tenaga kerja sebesar 32% dan 11,27%.
- Rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, serta kesejahteraan pekerja, kualitas penduduk yang bekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah dimana masih didominasi oleh tingkat lulusan Sekolah dasar dan Sekolah menengah pertama sebesar 65,51% sedangkan tingkat lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi sebesar 34,49%.
- Masih belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender hal ini terlihat dari TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) penduduk perempuan tahun 2015 mencapai 56,26% naik dibandingkan tahun 2014 hanya sebesar 43,97%. Sedangkan tingkat pengangguran perempuan sebesar 8,21% lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran laki-laki sebesar 5,27%. Kemudian juga terlihat dari masih adanya disparitas antara angka harapan hidup laki-laki dan perempuan dimana untuk laki-laki berada pada angka 68,01 Tahun dan perempuan berada pada angka 71,85 Tahun, sedangkan untuk Rata-rata lama

sekolah perempuan dan laki-laki terlihat laki-laki berada pada angka 7,99 Tahun dan Perempuan 7,14 tahun, dan untuk pengeluaran perkapita antara perempuan dan laki-laki terjadi ketimpangan yang sangat tinggi di mana laki-laki berada pada angka Rp. 17.670.000/tahun dan perempuan berada pada angka Rp.8.232.000/tahun berdasarkan data.

- Masih adanya kesenjangan atau ketimpangan di dalam menjamin hak anak dalam mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan hal ini terlihat dari hak kelangsungan hidup anak berada pada angka 83,60, Hak Perlindungan anak berada pada angka 77,64; Hak Tumbuh Kembang Anak berada pada angka 65,74, hak partisipasi anak berada pada angka 80,23 dan hak identitas anak berada pada angka 93,05 berdasarkan data Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) tahun 2015.
- Tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus. Pada beberapa jenis kasus, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami penurunan.
- Di sub sektor pertanian produksi padi masih tergantung pada musim (tadah hujan) dengan ladang dan gaga rancah pada musim hujan. diarahkan pada produksi padi ladang. Situasi ini membawa permasalahan tersendiri, yaitu: *pertama*, produktivitas relatif lebih rendah dari produktivitas padi sawah. Kondisi ini menggambarkan inefisiensi dalam pemanfaatan lahan untuk penanaman dengan menggunakan sistem padi ladang; *kedua*, sistem ladang berpindah yang dijalankan oleh mayoritas petani tradisional bisa mengganggu kelestarian dan produksi hutan karena pembukaan ladang baru dilakukan melalui pembabatan atau pembakaran hutan.
- Produksi bahan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih jauh di bawah kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga perlu mendatangkan dari daerah lain sehingga sewaktu-waktu bisa mengancam ketahanan pangan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Belum adanya perhatian serius yang menyangkut diversifikasi vertikal dan horizontal atas tanaman palawija yang sebenarnya dapat dikembangkan dengan baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Adanya kesulitan ditingkat petani untuk melakukan akses ke pasar atas komoditi yang dihasilkannya maupun untuk memperoleh pupuk dan pestisida.
- Pembangunan prasarana fisik pendukung pertanian padi sawah yang dilakukan selama ini kurang memberi manfaat nyata dalam mendorong peningkatan produksi padi sawah.
- Masih lemahnya kemampuan produksi pangan lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di

tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata, dan terjangkau

- Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan.
- Pengelolaan SDA seperti sumberdaya tambang, yang masih mengabaikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas-kuantitas SDA.
- Kurang berfungsinya aparaturnya penegak hukum dalam menindak para penjahat lingkungan dapat mengakibatkan makin maraknya kegiatan perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat mengancam keberadaan SDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- Permasalahan banjir.
- Degradasi lingkungan sungai dan pantai akibat pertambangan.
- Belum optimalnya pengelolaan lahan kritis.
- Masalah Struktur penduduk didominasi oleh usia produktif, yaitu pada umur 15–64 tahun atau sekitar 66,25% dari total penduduk. Ini memberikan implikasi bahwa pada masa 20 tahun ke depan akan terjadi peningkatan beban penduduk usia tua, yaitu umur 60 tahun atau lebih.
- Dalam jangka panjang dapat terjadi peningkatan kepada struktur penduduk yang semakin menua (*aging population*). Hal ini disebabkan usia harapan hidup semakin tinggi, sementara pertumbuhan kependudukan rendah.
- Masih rendahnya pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.
- Belum optimalnya sistem administrasi kependudukan akan dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.
- Masih adanya desa tertinggal yang harus diintervensi untuk mengelurkannya dari ketertinggalannya hal ini terlihat dari data Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2014 jumlah desa tertinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 12 desa dan desa berkembang berjumlah 52 desa dari total desa berjumlah 309 desa.
- Lemahnya kualitas dan kapasitas aparaturnya desa dalam menjalankan pembangunan desa.
- Belum optimalnya pengembangan ekonomi dan sumber daya alam desa yang berbasis komoditas lokal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah BUMDes yang ada dan

dalam kondisi aktif. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 309 desa yang tersebar di enam kabupaten. Setidaknya setiap desa memiliki BUMDes sebagai wadah untuk mengelola aset, modal desa dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

- Belum maksimalnya pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditandai dari menurunnya persentase desa/kelurahan yang berhasil memfasilitas lembaga kemasyarakatan dalam hal pembangunan partisipatif.
- Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.
- Masih rendahnya penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Permasalahan berkaitan dengan migrasi seperti yang terjadi di daerah lain selalu berkaitan dengan kesempatan kerja. Peluang pekerjaan merupakan magnet atau daya tarik terhadap terjadinya migrasi masuk ke suatu daerah.
- Belum optimalnya pengembangan transportasi laut dan udara yang murah dalam mendukung pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena karakteristik daerah yang tidak berbatasan darat secara langsung dengan daerah lain.
- Belum optimalnya penataan Transportasi darat termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi, dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa, dan perdagangan.
- Masih sempitnya ruas jalan dan lingkaran luar yang menghubungkan antar kabupaten-kota untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi jangka panjang. Lalu lintas antar kabupaten diprediksikan akan meningkat seiring dengan lancarnya arus barang dan jasa dari pelabuhan ke daerah yang jauh dari pelabuhan;
- Belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah.
- Kurangnya pertimbangan ekonomis untuk pengembangan jaringan komunikasi dengan melihat situasi lapangan di mana penduduknya tidak banyak dan sangat tersebar.
- Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi didalam memfasilitasi dan menjalankan pembangunan baik dari sisi pemerintahan maupun dunia usaha.
- Masih lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan pembangunan dengan basis sistem informasi.

- Masih adanya wilayah blank spot yang tidak terakses dengan jaringan komunikasi atau teknologi informasi.
- Masih banyaknya desa yang belum melek terhadap terhadap teknologi informasi.
- Masih belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.
- Masih kurangnya bantuan modal dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan, dan pelatihan manajemen dalam pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
- Masih rendahnya upaya pengembangan skala usaha.
- Belum optimalnya sarana pemasaran produk UKM.
- Masih rendahnya akses anggota koperasi dan UKM terhadap perbankan.
- Kurangnya pengawasan terhadap koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak.
- Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.
- Rendahnya tingkat ketersediaan data terkait peta potensi sumber daya dan peluang investasi lingkup provinsi yang valid dan terkini.
- Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Belum optimalnya koordinasi kemitraan usaha bagi usaha kecil dan menengah dengan investor/pengusaha besar.
- Belum optimalnya kerjasama promosi penanaman modal.
- Belum adanya penetapan zonasi laut yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan antar sektor terutama sektor kelautan dan perikanan, sektor pertambangan dan sektor pariwisata.
- Masih marak terjadinya *illegal, unregulated, unreported fishing* di wilayah perairan provinsi kepulauan Bangka Belitung.
- Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing.
- Masih rendahnya produktifitas dalam peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- Masih rendahnya akses permodalan dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

- Masih terbatasnya kualitas serta kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah.
- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata.
- Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata.
- Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lainnya seperti perkebunan, dan pertambangan.
- Belum optimalnya pembangunan prasarana fisik pendukung pertanian yang dilakukan selama ini dalam mendorong peningkatan produksi pertanian.
- Masih rendahnya kesejahteraan petani yang terlihat dari nilai tukar petani serta masih rendahnya peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian.
- Masih rendahnya produktivitas usaha pertanian serta belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna yang inovatif.
- Belum optimalnya populasi dan produksi ternak di semua kabupaten/kota yang ada. Di sisi lain produksi ternak secara komersil masih belum memadai. Kebanyakan masyarakat masih menempatkan peternakan sebagai aktivitas sampingan.
- Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petani dan kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
- Masih rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.
- Belum berkembangnya industri hilir produk hasil kehutanan untuk meningkatkan pembangunan daerah.
- Belum semua kawasan hutan dilakukan tata batas.
- Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan *illegal logging*, *illegal minning* dalam kawasan hutan.
- Semakin meningkatnya luasan lahan kritis pada kawasan hutan.
- Belum adanya sistem pengelolaan database kehutanan berbasis Teknologi Informasi.
- Kapasitas pembangkit masih di bawah beban puncak.
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan energi baru terbarukan sebagai energi alternatif.
- Belum optimalnya hilirisasi sumber daya mineral logam.

- Belum adanya hilirisasi sumber daya mineral non-logam dan batuan.
- Belum optimalnya tata kelola timah dari hulu ke hilir.
- Rendahnya kualitas dan daya saing produk daerah.
- Lemahnya sistem tata kelola perdagangan produk lokal daerah.
- Tingginya ketergantungan daerah terhadap produk-produk dan bahan baku yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik komoditas pangan maupun komoditas non pangan.
- Kurangnya jiwa *entrepreneur* aparaturnya pemerintah didalam memfasilitasi perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
- Belum optimalnya industri pengolahan berbasis sumber daya alam.
- Pengembangan industri yang masih terfokus kepada pengembangan industri smelter timah.
- Belum optimalnya pengembangan industri yang berbasis ekonomi kreatif.
- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menunjang keberadaan industri pengolahan.
- Masih rendahnya daya saing dan akses pasar untuk produk daerah.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis dalam jangka menengah daerah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;

4. Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani;
6. Prioritas janjipolitik yang perlu diwujudkan;
7. Kesesuaian dengan RPJPD-P.

Berdasarkan identifikasi dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi adalah sebagai berikut:

<u>Isu Ekonomi</u>	
1.	Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
2.	Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi
3.	Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah
4.	Kemandirian Pangan Rendah
5.	Tingginya tingkat inflasi
6.	Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral belum optimal
7.	Hilirisasi sumber daya mineral masih rendah
8.	Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan
9.	Tingkat Investasi Rendah
10.	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
<u>Isu Infrastruktur dan Konektivitas</u>	
11.	Kebutuhan akan energi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi
12.	Konektivitas antar pulau sebagian besar sulit dijangkau
13.	Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi
14.	Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik
15.	Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas
16.	Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika
<u>Isu Sumber Daya Manusia</u>	
17.	Tingkat pendidikan SDM masih rendah
<u>Isu Kesehatan</u>	
18.	Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas
19.	Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah
20.	Pengguna narkoba dan penderita HIV AIDS meningkat
<u>Isu Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Demokrasi</u>	
21.	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
22.	Kondusivitas demokrasi belum stabil
<u>Isu Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana</u>	

23.	Lingkungan hidup banyak yang rusak
24.	Rawan bencana
25.	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten

4.3. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penyusunan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wajib dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dilakukan dengan mengkaji materi kebijakan, rencana, dan/atau program yang terdapat dalam RPJMD 2017-2022. Kajian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perumusan isu pembangunan berkelanjutan, isu pembangunan berkelanjutan paling strategis, isu pembangunan berkelanjutan paling prioritas, identifikasi dan analisis materi kebijakan, rencana, dan/atau program di dalam RPJMD terhadap isu prioritas, analisis pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup, perumusan mitigasi, alternatif perbaikan, hingga perumusan rekomendasi perbaikan materi kebijakan, rencana, dan/atau program.

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif dan juga hasil keseluruhan proses KLHS. Berdasarkan hasil keseluruhan proses KLHS, maka telah dirumuskan beberapa rekomendasi KLHS yang harus diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program RPJMD 2017-2022, sebagai berikut.

1. Merevisi beberapa indikator kinerja program pada beberapa kebijakan umum, antara lain:
 - a) Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat Belinyu, Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok, Pengembangan Kawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik, Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok tidak perlu adanya kegiatan pembangunan pemecah gelombang. Sebagai kompensasinya, pemecah gelombang alami berupa hutan mangrove yang masih ada perlu dipertahankan dan ditambah ketebalannya.
 - b) Pengembangan kawasan mandiri terpadu (KTM Batu Betumpangdan KTM Gantung) perlu memasukkan indikator tingkat produktivitas pertanian dan tingkat kesejahteraan petani (transmigran).
 - c) Pada Kebijakan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Sektor Kelautan dan Perikanan; Peningkatkan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Produk Pertanian Khususnya Komoditas Karet, Lada dan Sapi; serta Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan

Kepariwisataan; indikatornya perlu dibuat lebih rinci dan perlu disebutkan lokasi kegiatan.

- d) Judul kebijakan umum Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Kepariwisataan perlu diganti menjadi Kebijakan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Kepariwisataan
 - e) Pada kebijakan umum Peningkatkan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Industri Pengolahan Sumber Daya Alam Pertambangan Khususnya Sumberdaya Alam Pertambangan Timah, untuk indikator kinerja Pertumbuhan industri pengolahan pertambangan timah diubah menjadi Pertumbuhan industri pengolahan pertambangan timah dan mineral ikutannya.
2. Memasukkan program pencegahan dan mitigasi bencana di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Gantung.
 3. Mengintegrasikan rumusan mitigasi dan/atau alternatif kedalam bentuk program-program disertai dengan indikator-indikator, waktu pelaksanaan dan pembiayaannya. Untuk lebih jelasnya dapat melihat hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif.
 4. Setiap rencana pengembangan kawasan strategis perlu didahului dengan penyusunan rencana induk pengembangan (RIP) dan rencana strategis (renstra) dan dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebelum dilakukan pembangunan fisik.
 5. Untuk beberapa kebijakan yang berlokasi di area yang di dalamnya terdapat kawasan lindung, seperti: 1) Pengembangan kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga, 2) pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera, 3) Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat, dan 4) Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka, perlu memilih lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dengan tidak mengganggu area kawasan lindung yang ada di dalamnya.
 6. Pemerintah Provinsi harus segera menerbitkan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sebagai pedoman penggunaan ruang pesisir dan laut untuk mendukung sejumlah kebijakan pengembangan kawasan strategis yang berada di wilayah pesisir dan laut.
 7. Dalam pengembangan kawasan peruntukan pariwisata perlu memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, mengingat sebagian besar lokasi pengembangan sudah dikelola oleh masyarakat melalui BUMDes maupun karang taruna.

8. Pemerintah Provinsi perlu memetakan dan menetapkan kawasan produksi pangan provinsi agar kebijakan/program pemantapan ketahanan pangan lebih fokus pada kawasan tertentu dan mencegah terjadinya perubahan peruntukan kawasan pertanian untuk kepentingan non pertanian.
9. Pemerintah provinsi perlu segera mengidentifikasi dan menginventarisasi kawasan lindung yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencegah terjadinya okupasi oleh masyarakat dan perubahan fungsi lindung. Selanjutnya hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut dikukuhkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Lindung di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang berlebihan di masa datang, pemerintah perlu memfasilitasi dan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membangun instalasi pengolahan air bersih beserta jaringan penyalurannya dengan air baku berasal dari air permukaan seperti air kolong dan air sungai terdekat.



BATU GERBANG - BELINYU

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022**

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005- 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034 dan visi-misi dan program kepala daerah terpilih, serta RPJMD Provinsi tetangga yang berbatasan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah **“PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025”**, yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah.
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Fokus pembangunan pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 adalah pada upaya menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.

Pada tahapan ini, peningkatan perekonomian daerah, perlu diberikan perhatian pada upaya memberikan nilai tambah hasil produk unggulan provinsi. Keterkaitan industri ke depan dan ke belakang menjadi perhatian utama dalam mengembangkan nilai tambah produk unggulan daerah ini. Sebagai contoh: hasil pertanian ubi, komoditas ini dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan yang berbahan baku utama ubi, dari kelapa sawit selain menghasilkan CPO juga bisa menghasilkan biogas. Demikian juga dengan hasil perikanan laut dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan berbasis hasil produksi tersebut, selain itu dapat diupayakan pengembangan industri-industri pengalengan ikan yang memiliki daya saing ekspor.

Sementara itu, pengembangan kualitas SDM (dalam semua aspek) menjadi perhatian sejalan dengan upaya untuk semakin memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAK yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk mempersiapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai "pemain/subjek" dan bukan "penonton/objek" dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di provinsi ini. Pada periode ini, diyakini perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) dan ilmu pengetahuan sudah sangat maju dan karenanya pengembangan SDM di sini adalah SDM yang mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sesuai untuk mengelola data mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki.

Pada akhir tahap ketiga ini, kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat terus meningkat, pertumbuhan PDRB sebagai indikator dari kondisi perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,25 sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 71,05 (di tahun 2016 masih sebesar 69,55).

Guna mencapai target dari sasaran pokok pembangunan tersebut, maka:

- a. Dalam meningkatkan perekonomian daerah, arah kebijakan prioritas yang dilaksanakan adalah:
 1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
 2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
 3. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
 4. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
 5. Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam;
 6. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
 7. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
 8. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
 9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;

10. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
 11. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
 12. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
 13. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
 14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;
 15. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
- b. Sedangkan untuk tercapainya sasaran pokok terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah:
1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing;
 2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;
 3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
 4. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.

Sementara itu, visi RPJMN untuk periode 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan 7 (tujuh) misi, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

5.1. Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, periode 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat pendapatan masyarakatnya terus meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berinovasi untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung, sehingga unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Efisien dan Cepat** dimaknai mampu mengelola anggaran pembangunan yang optimal dan hemat, dengan peningkatan penggunaan *e-Government* (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. **Teknologi** dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

5.2. Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada

6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor.
- b. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. **Konektivitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Kesehatan Masyarakat** adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. ***Tata Kelola Pemerintahan yang baik*** adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
- b. ***Pembangunan demokrasi*** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. ***Pengendalian bencana*** adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.
- b. ***Kualitas lingkungan hidup*** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan RPJPD 2005 – 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; RPJM Nasional 2015 – 2019; Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Teroilih; RPJMD Provinsi Tetangga yang berbatasan dan terdekat. Permasalahan yang ada, isu-isu strategis, serta capaian kinerja urusan pemerintahan 5 tahun yang lalu (2012-2017) , maka dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat
3. Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah
4. Meningkatnya pendidikan masyarakat
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
6. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas
7. Meningkatnya pembangunan demokrasi
8. Meningkatnya tata kelola kebencanaan
9. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup

Untuk mencapai ke 9 (sembilan) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 22 (dua puluh dua) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian
2. Meningkatnya produksi sub sektor perikanan
3. Meningkatnya pengembangan dan pembangunan pariwisata
4. Meningkatnya produksi sektor pertambangan
5. Meningkatnya pembangunan berbasis industri
6. Terwujudnya kemandirian energi
7. Meningkatnya belanja pemerintah daerah
8. Menurunnya angka pengangguran
9. Menurunnya angka kemiskinan
10. Menurunnya angka inflasi
11. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
12. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah
13. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
14. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
15. Meningkatnya kesempatan mengikuti pendidikan bagi masyarakat
16. Meningkatnya pembangunan kesehatan masyarakat
17. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
18. Birokrasi yang efektif dan efisien

19. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
20. Meningkatnya pembangunan berdemokrasi
21. Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana
22. Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup

Baik tujuan maupun sasaran, semuanya ditetapkan indikatornya, disertai target-target capaian selama 5 tahun (2017-2022), sehingga bisa diukur keberhasilan pencapaiannya, dan ditetapkan dalam RPJMD ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah,
yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja Tujuan :
 - a. Meningkatnya Persentase pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
 - Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan
 - Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dengan indikator kinerja sasaran Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
 - Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalan
 - Meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan
 - Terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan

2. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran pemerintah perkapita yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya belanja pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah
 - b. Pendapatan perkapita masyarakat yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Menurunnya angka Pengangguran dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Pengangguran
 - Menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Kemiskinan
 - Menurunnya angka Inflasi dengan indikator kinerja sasaran Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja sasaran Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Misi II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Terbangunnya Daerah Irigasi (ha)
 - Ketersediaan Air Baku (M3)
 - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
 - b. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
 - Persentase kawasan permukiman yang tertata
 - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
 - c. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
 - Persentase armada pengangkutan
 - Persentase jalan kondisi mantap

Misi III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dengan indikator tujuan Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka harapan lama sekolah (Angka harapan lama sekolah, Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)

Misi IV : Meningkatkan kesehatan masyarakat, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka Kesehatan Masyarakat

Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
 - Tingkat kematangan Maturitas SPIP
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
 - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat
 - b. Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - Nilai rata-rata delapan area perubahan
 - c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)
 - Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
- Skor aspek kebebasan sipil
 - Skor aspek hak-hak politik
 - Skor aspek lembaga demokrasi

Misi VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas Bencana Daerah
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH], yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas daerah sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Air
 - Indeks Udara
 - Indeks Tutupan Lahan
 - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Keterkaitan dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, Indikator kinerja tujuan, sasaran dan Indikator kinerja sasaran berserta target selama 5 tahun digambarkan seperti pada Tabel V.1 berikut ini.

Tabel V.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah				
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1 Persentase Pertumbuhan PDRB	1 Meningkatkan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	1 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
			2 Meningkatkan produksi sub sektor perikanan	1 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan
			3 Meningkatkan pengembangan pembangunan pariwisata	1 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
			4 Meningkatkan produksi sektor pertambangan	1 Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian
			5 Meningkatkan pembangunan berbasis industri	1 Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan
			6 Terwujudnya kemandirian energi	1 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor ketenagalistrikan
2	Meningkatkan pendapatan Pemerintah dan masyarakat	1 Pengeluaran pemerintah perkapita	1 Meningkatkan belanja pemerintah Daerah	1 Persentase Pertumbuhan belanja pemerintah daerah
		2 Pendapatan perkapita masyarakat	1 Menurunnya angka Pengangguran	1 Persentase Angka Pengangguran
			2 Menurunnya angka kemiskinan	1 Persentase Angka Kemiskinan
			3 Menurunnya angka Inflasi	1 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
				Belitung
			4 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1 Persentase laju pertumbuhan Penduduk
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas				
3	Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	1 Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi	1 Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah;	1 Terbangunnya Daerah irigasi (ha)
				2 Ketersediaan air baku (m3)
			2 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	1 Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
				2 Persentase kawasan permukiman yang tertata
				3 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
			3 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
				2 Persentase armada pengangkutan
				3 Persentase jalan kondisi mantap
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal				
4	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	1 Rata-rata lama sekolah (Rata-rata lama sekolah gabungan, rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	1 Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	1 Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat				
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup (Angka Usia Harapan Hidup gabungan, Angka Usia	1. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
		Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)		
Misi V.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi				
6	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	1 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi	1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan
				2 Tingkatkematangan Maturitas SPIP
				3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi
				4 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
			2 Birokrasi yanganefektif dan efisien	1 Indeks Profesionalitas ASN
			3 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	1 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
				2 Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat
7	Meningkatkan pembangunan demokrasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1 Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	1 Skor aspek kebebasan sipil
				1 Skor aspek hak-hak politik
				1 Skor aspek lembaga demokrasi
Misi VI . Ppengendalian bencana dankualitas lingkungan hidup				
8	Meningkatkan tata kelola kebencanaan	1 Indeks Resiko Bencana	1 Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	1 Indeks kapasitas Bencana Daerah
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 Indeks kualitas air sungai
				2 Indeks kualitas udara
				3 Indeks tutupan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
				4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Tabel V.2
Target Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2017-2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB	4,11	5,20	5,30	5,40	5,50	5,60	5,60
2	Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	Pengeluaran pemerintah perkapita,(dalam ribuan)	1.864	1.890	1.940	1.980	2.020	2.060	2.060
		Pendapatan perkapita,(dalam ribuan)	46.457	50.732	53.015	55.401	57.894	60.499	60.499
3	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi	6,90	7.58	7,77	7,87	7,97	8,00	8,00
4	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah	7,68	8,76	8,83	8,89	8,92	9,00	9,00
			L=8,90	L = 8,96	L= 8,98	L = 8,99	L = 9.00	L= 9,00	L= 9,00

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		perempuan	P=7,76	P=7,98	P = 7,99	P = 8.0	P = 8,05	P = 8,10	P = 8,10
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	69,97 L=68,17 P=71,96	69.98 L = 68,24 P = 72,00	70.16 L = 68,37 P = 72,12	70,23 L = 68,40 P = 72,23	70,36 L = 68,50 P = 72,30	70,48 L = 68,60 P = 72,45	70,48 L = 68,60 P = 72,45
6	Mewujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	63,15	68.08	73.39	73.41	73.43	73.50	73.50
7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	83,10	83.20	83.35	83.50	83.65	83.75	83.75
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	162	159	156	153	150	147	147
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,59	59.76	60.96	62.18	63.42	64.69	64.69

Tabel V.3
Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2017-2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	1 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,76	4,95	5.15	5.36	5.57	5,80	5,80
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	2 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	3,74	3,92	4.10	4.29	4.48	4.69	4.69

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatnya pengembangan dan Pembangunan pariwisata	3 jumlah kunjungan wisatawan domestik	330.322	389.009	389.009	419.594	448.937	477.181	477.181
		4 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	3.723	5.159	5.159	5.637,25	6.355	6.946	6.946
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	5 Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.54
5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	6 Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	2,62	2.67	2.73	2.78	2.84	2.89	2.89
6	Terwujudnya kemandirian energi	7 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan	15,35	17.34	19.59	22.14	25.02	28.27	28.27
7	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	8 Persentase pertumbuhan pengeluaran Pemerintah daerah	5,50	5.6	5.65	5.70	5.75	5.80	5.80
8	Menurunnya angka Pengangguran	9 Persentase Angka Pengangguran	2,6	5.7	5.6	5.5	5.3	5.3	5.3
9	Menurunnya angka kemiskinan	10 Persentase Angka Kemiskinan	5,04	4.17	4.15	4.10	4.05	4.0	4.0
10	Menurunnya angka Inflasi	11 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6,75	6.42	6.31	6.24	6.17	6.02	6.02
11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	12 Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,11	2.09	2,09	2,08	2,08	2,08	2,08
12	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	13 Terbangunnya Daerah irigasi (ha)	1.034	1.084	1.135	1.187	1.240	1.294	1.294
		14 Ketersediaan air baku (m3)	N.A	N.A	N,A	90.000	145.000	175.000	175.000
13	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	15 Persentase akses jalan lingkungan yang memadai	N.A	14%	34%	54%	86%	100%	100%
		16 Persentase kawasan permukiman yang tertata	N.A	16%	38%	56%	89%	100%	100%
		17 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	N.A						
14	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	18 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	0.17%	0.17%	0.18%	0.19%	0.20%	0.21%	2.495
		19 Persentase armada pengangkutan	N.A	0.33%	0.34%	0.35%	0.36%	0.37%	4.875
		20 Persentase jalan kondisi mantap	92,2	93.50	94.50	95.50	96	96.50	96.50
15	Meningkatnya kesempatan	21 Angka harapan lama sekolah , (Angka	11,71	11.84	11.89	11.94	12.00	12.00	12.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	mengikuti pendidikan bagi masyarakat	harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	L=11,93 P=12,07	L=12,08 P=12,21	L=12,37 P=12,46	L=12,51 P=12,63	L=12,69 P=12,79	L=12,81 P=12,93	L=12,81 P=12,93
16	Meningkatnya pembangunan kesehatan masyarakat	22 Angka Kesehatan Masyarakat	76,94	71,6	77,58	82,97	85,92	89,98	89,98
17	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	23 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		24 Tingkat kematangan Maturitas SPIP	3	3	3	3	4	4	4
		25 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	63	76	82	85	88	92	92
		26 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat	N.A	2,75	2,78	2,8	2,85	2,9	2,9
18	Birokrasi yang efektif dan efisien	27 Nilai rata-rata delapan area perubahan	N.A	30	35	40	45	50	50
		28 Indeks Profesionalitas ASN	N.A	60	75	80	85	90	95
19	Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	29 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	N.A	1	5	10	15	20	20
		30 Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	N.A	70	78	83	85	90	90
20	Meningkatnya pembangunan berdemokrasi	31 Skor aspek kebebasan sipil	81,70	87,75	87,76	87,79	87,80	87,82	87,82
		32 Skor aspek hak-hak politik	80,25	81,72	81,76	81,79	81,80	81,85	81,85
		33 Skor aspek lembaga demokrasi	80,10	80,30	80,33	80,36	80,50	80,54	80,54
21	Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	34 Indeks kapasitas bencana daerah	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,35
22	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	35 Indeks kualitas air sungai	64,56	65,85	67,80	67,16	68,51	69,88	69,88
		36 Indeks kualitas udara	82,81	85,30	87,86	90,49	93,21	96,01	96,01
		37 Indeks tutupan lahan	37,51	37,88	38,26	38,64	39,03	39,81	39,81

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		38 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	N.A	7.745,58	7.280,85	6.843,99	6.433,35	6.047,35	6.047,35

Sementara itu untuk indikator sasaran Tingkat Kemiskinan, pengangguran dan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 dan 2019 ditargetkan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019 Tingkat kemiskinan 3,0 untuk tahun 2018 dan 2,7 untuk tahun 2019, untuk angka pengangguran 2,9 tahun 2018 dan 2,7 tahun 2019, sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi 7,1 tahun 2018 dan 7,5 untuk tahun 2019.



MUSEUM KATA - BELITUNG TIMUR

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022**

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Prioritas RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 (Tahap Ketiga)

Pada tahap lima tahun ketiga, prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.

Pada tahapan ini, dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, perhatian perlu diberikan pada upaya untuk memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan provinsi. Keterkaitan industri ke depan dan ke belakang dapat menjadi perhatian dan tumpuan utama. Sebagai contoh: hasil pertanian ubi, komoditas ini dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan yang berbahan baku utama ubi, dari kelapa sawit selain menghasilkan CPO juga bisa menghasilkan biogas. Demikian juga dengan hasil perikanan laut dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan berbasis hasil produksi tersebut, selain itu dapat diupayakan pengembangan industri-industri pengalengan ikan yang memiliki daya saing ekspor.

Sementara itu, perhatian terhadap pengembangan kualitas SDM dan dalam semua aspek menjadi perhatian sejalan dengan upaya untuk semakin memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAK yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk mempersiapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai "pemain/subjek" dan bukan "penonton/objek" dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di provinsi ini. Pada periode ini, diyakini perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) dan ilmu pengetahuan sudah sangat maju dan karenanya pengembangan SDM di sini adalah SDM yang mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki.

Pada akhir tahap ketiga ini, kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat terus meningkat, pertumbuhan PDRB sebagai indikator dari kondisi

perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,25 sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengindikasikan tingkat kualitas SDM diharapkan meningkat menjadi 71,05.

Guna mencapai target sasaran pokok pembangunan tersebut, maka:

- a. Pada sasaran pokok meningkatnya perekonomian daerah, arah kebijakan prioritas yang dilaksanakan adalah:
 1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
 2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
 3. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
 4. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
 5. Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam;
 6. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
 7. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
 8. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
 9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
 10. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
 11. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
 12. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
 13. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
 14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;

15. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
- b. Pada sasaran pokok terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah:
 1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing;
 2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;
 3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
 4. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, refoemasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi pembangunan harus didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro yang ada di daerah. Oleh karena itu, sebelum masuk pada strategi pembangunan, perlu diuraikan diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian dengan analisis SWOT ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi misi RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan antar lain sebagai berikut :

- a.) **Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan dengan arah kebijakan Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan;
 - b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
 - c. Pembinaan hubungan industri sektor pertanian
 - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
 - e. Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah.
3. Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
 - c. Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas
 - d. Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan peternakan

b.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan arah kebijakan Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan

- b. Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan
 - c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
 - e. Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.
2. Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
 - b. Pengembangan Kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
 - c. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
 - d. Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
 - e. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
 - f. Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar
- c.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**
1. Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif , peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata
 - b. Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
 - c. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
 - d. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan

- e. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata
 - f. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan
 - g. Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
2. Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
 - b. Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
 - c. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
 - d. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
 - e. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
 - f. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
 - g. Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
 - h. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
3. Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
- a. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
 - b. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil

d.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
- b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk sumber daya mineral
- c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral
- d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertambangan khususnya sektor sumber daya mineral
- e. Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral

e.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pembangunan berbasis industri dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

- 1. Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
 - c. Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
 - d. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
 - e. Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
 - f. Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri

f.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terwujudnya kemandirian energi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah dengan arah kebijakan Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;

g.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya belanja publik pemerintah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan arah kebijakan Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

h.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Pengangguran dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Penciptaan peluang kesempatan kerja
 - b. Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan

i.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka kemiskinan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
 - b. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

j.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Inflasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi
 - b. Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi

k.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dilakukan dengan Strategi sebagai berikut:

1. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan arah kebijakan Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

- l.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**
1. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
 2. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku
- m.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**
1. Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat
 2. Meningkatkan penataan kawasan permukiman dengan arah kebijakan Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi
 3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
- n.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**
1. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan
 2. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung jalan dan terminal
 3. Meningkatkan aksesibilitas dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan
- o.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. peningkatan mutu layanan pendidikan.
 - b. Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
 - c. Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral

p.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
 - b. peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
 - c. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
 - d. Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza

q.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah dengan arah kebijakan Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
2. Peningkatan tata kelola pengawasan dengan arah kebijakan Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel
3. Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja dengan arah kebijakan Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatkan manajemen pelaksanaan urusan pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan

5. Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan dengan arah kebijakan Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dengan arah kebijakan Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa

r.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang efektif dan efisien dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - b. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
2. Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur

s.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien
 - b. Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
 - c. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,
 - d. Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.

- e. Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
- f. Menjamin hak anak dalam pembangunan

t.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat
 - b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
3. Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi dengan arah kebijakan Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi

u.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana dengan arah kebijakan Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
 - b. Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur

v.) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas air dengan arah kebijakan Pengendalian kualitas air
2. Meningkatkan kualitas Udara dengan arah kebijakan pengendalian kualitas udara
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan tutupan lahan
 - b. Pengembangan Perhutanan Sosial

4. meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 - b. Pengembangan kawasan TPA Regional

6.3. Unggulan Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang di fokuskan kepada pencapaian visi misi RPJMD 2017-2022, yang dalam implementasinya akan dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang langsung mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai muara terakhir dari setiap tujuan pembangunan yang dilakukan. Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

A. PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

B. PEMBANGUNAN BAHARI

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

C. PENGEMBANGAN PARIWISATA

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city

D. PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatnya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

E. PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH

Fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat Daerah dan meningkatkan pendapatan dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

F. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

G. PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa

optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kemen ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

H. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/enterpreneur bidang pariwisata di Babel

I. PEMBANGUNAN KESEHATAN

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

J. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor,

Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan adminstrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan

K. PEMBANGUNAAN BERDEMOKRASI

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

L. PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

M. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahar; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca

6.4. Tema Prioritas Pembangunan Daerah

1. Tahun 2018, Tema Proritas Pembangunan “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia”.
2. Tahun 2019, Tema Proritas Pembangunan “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas”.
3. Tahun 2020, Tema Proritas Pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kesehatan masyarakat dan Pendidikan Masyarakat”.
4. Tahun 2021, Tema Proritas Pembangunan “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah”.

5. Tahun 2022, Tema Prioritas Pembangunan “Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan tanggap bencana”.

Untuk melihat keselarasan dan keterkaitan antara strategis dengan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dalam Tabel VI.1.

Tabel VI.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis

Visi : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN		STRATEGI	
1		2		3		4	
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah							
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	1	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah pertanian berkelanjutan
						2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan
						3	Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunaan dan perternakan
		2	PEMBANGUNAN BAHARI	2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	4	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
						5	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya
						6	Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanaan
3	PENGEMBANGAN PARIWISATA	3	Meningkatnya pengembangan	7	Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor		

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN		STRATEGI	
1		2		3		4	
				Pembangunan pariwisata		dalam mengembangkan pembangunan pariwisata	
						8	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
						9	Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
		4	PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN	4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	10	Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan
				5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	11	Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah
				6	Terwujudnya kemandirian energi	12	Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah
2	Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	5	PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH	7	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	13	Meningkatakan pendapataaan asli daerah
		6	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	8	Menurunnya angka Pengangguran	14	Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan
				9	Menurunnya angka kemiskinan	15	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4	
				diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.
		10 Menurunnya angka Inflasi	16	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi
		11 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	17	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas				
3 Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	7 PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR	DAN 12 Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	18	Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian
			19	Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku
		13 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	20	Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat
			21	Meningkatkan penataan kawasan permukiman
			22	Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
		14 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	23	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas

TUJUAN			UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN		STRATEGI	
1			2		3		4	
							perhubungan laut	
							24	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat
							25	Meningkatakan aksesibilitas
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal								
4	Meningkatnya Masyarakat	Pendidikan	8	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	15	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	26	Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat
							27	Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat								
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		9	PEMBANGUNAN KESEHATAN	16	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	28	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi								
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas		10	PENINGKATAN KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK	TATA 17	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	29	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
							30	Peningkatan tata kelola pengawasan
							31	Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja
							32	Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan
							33	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa

TUJUAN			UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH			SASARAN		STRATEGI	
1			2			3		4	
						18	Birokrasi yang efektif dan efisien	34	Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi
								35	Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
						19	Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	36	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
								37	Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien
7	Terwujudnya demokrasi	pembangunan	11	PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI		20	Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	38	Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif
								39	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat
								40	Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi
Misi VI . Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup									
8	Meningkatnya kebencanaan	tata kelola	12	PENINGKATAN PEMBANGUNAN KEBENCANAAN	BIDANG	21	Meningkanya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	41	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana
9.	Meningkatnya lingkungan hidup	tata kelola	13	PENEGNDALIAN LINGKUNGAN HIDUP		22	Peningkatan Kualitas Lingkungan	42	Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana
								43	Meningkatkan kualitas air
								44	Meningkatkan kualitas Udara

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
			45 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan
			46 meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan

Tabel VI.2
Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
2	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanan	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanan	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanan	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanan	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanan
3	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
4	Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	Pembinaan hubungan industri sektor pertanian
5	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
6	Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah	Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah	Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah	Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah	Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah
7	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
8	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
9	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
10	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas
11	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian
12	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.
13	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
14	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan
15	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan
16	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
17	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	sektor kelautan dan perikanan.	sektor kelautan dan perikanan.	sektor kelautan dan perikanan.	sektor kelautan dan perikanan.	sektor kelautan dan perikanan.
18	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
19	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
20	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
21	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar
22	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
23	Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
24	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
25	Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
26	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
27	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan
28	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
29	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
30	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
31	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	kawasan lintas timur Pulau Bangka	kawasan lintas timur Pulau Bangka	kawasan lintas timur Pulau Bangka	kawasan lintas timur Pulau Bangka	kawasan lintas timur Pulau Bangka
32	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
33	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
34	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
35	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
36	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
37	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
38	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil
39	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
40	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral
41	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral
42	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	daya saing sektor sumber daya mineral	daya saing sektor sumber daya mineral	daya saing sektor sumber daya mineral	daya saing sektor sumber daya mineral	daya saing sektor sumber daya mineral
43	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral
44	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
45	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
46	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
47	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
48	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
49	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri
50	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;
51	Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk	Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk	Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk	Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk	Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.
52	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja
53	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan
54	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
55	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
56	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi
57	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	inflasi	inflasi	inflasi	inflasi	inflasi
58	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
59	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
60	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku
61	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
62	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi
63	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
64	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan
65	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal
66	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	jembatan	jembatan	jembatan	jembatan	jembatan
67	peningkatan akses pelayanan pendidikan	peningkatan akses pelayanan pendidikan	peningkatan akses pelayanan pendidikan	peningkatan akses pelayanan pendidikan	peningkatan akses pelayanan pendidikan
68	peningkatan mutu layanan pendidikan.	peningkatan mutu layanan pendidikan.	peningkatan mutu layanan pendidikan.	peningkatan mutu layanan pendidikan.	peningkatan mutu layanan pendidikan.
69	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
70	Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral
71	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
72	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
73	Pemenuhan kuantitas dan	Pemenuhan kuantitas dan	Pemenuhan kuantitas dan	Pemenuhan kuantitas dan	Pemenuhan kuantitas dan

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	kualitas tenaga kesehatan	kualitas tenaga kesehatan	kualitas tenaga kesehatan	kualitas tenaga kesehatan	kualitas tenaga kesehatan
74	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza
75	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
76	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel
77	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
78	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan
79	Peningkatan Penataan peraturan perundang-	Peningkatan Penataan peraturan perundang-	Peningkatan Penataan peraturan perundang-	Peningkatan Penataan peraturan perundang-	Peningkatan Penataan peraturan perundang-

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	undangan	undangan	undangan	undangan	undangan
80	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa
81	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
82	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
83	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur
84	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
85	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien
86	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
87	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,
88	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
89	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
90	Menjamin hak anak dalam pembangunan	Menjamin hak anak dalam pembangunan	Menjamin hak anak dalam pembangunan	Menjamin hak anak dalam pembangunan	Menjamin hak anak dalam pembangunan
91	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat
92	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
93	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	masyarakat	masyarakat	masyarakat	masyarakat	masyarakat
94	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi
95	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
96	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
97	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur
98	Pengendalian kualitas air	Pengendalian kualitas air	Pengendalian kualitas air	Pengendalian kualitas air	Pengendalian kualitas air
99	pengendalian kualitas udara	pengendalian kualitas udara	pengendalian kualitas udara	pengendalian kualitas udara	pengendalian kualitas udara
100	Peningkatan tutupan lahan	Peningkatan tutupan lahan	Peningkatan tutupan lahan	Peningkatan tutupan lahan	Peningkatan tutupan lahan

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
101	Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengembangan Perhutanan Sosial
102	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
103	Pengembangan TPA Regional	Pengembangan TPA Regional	Pengembangan TPA Regional	Pengembangan TPA Regional	Pengembangan TPA Regional

6.5. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022, disusun berdasarkan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah.

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam menyusun RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pendekatan perencanaan pembangunan Tematik, Holistik, Integratif, dan spasial (THIS). Pendekatan THIS pada dasarnya adalah pendekatan yang memberi penekanan pada keterpaduan, bukan pendekatan yang berangkat dari sektor atau tugas dan fungsi semata tetapi tugas dan fungsi mendukung keterpaduan. Karena penekanannya pada keterpaduan, perencanaan menggunakan pendekatan ini berangkat dari tema pembangunan yang menjadi dasar atau starting pointnya dalam lingkup daerah, tema bisa bersumber dari isu-isu strategis dan/atau prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Inilah titik pusat (core) dari perencanaan berbasis pendekatan THIS. Tema pembangunan berdasarkan prioritas Kepala Daerah biasanya tema makro kemudian diturunkan dengan tema-tema yang lebih kecil. Dalam konteks penyusunan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tema besarnya adalah Visi yang diturunkan ke tema-tema yang lebih kecil dan saling berhirarki ke Misi, Tujuan, Indikator tujuan, sasaran, indikator Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan. Hirarki dari visi sampai ke Arah kebijakan ini dinamakan tema sedangkan arah kebijakan sendiri merupakan tema yang paling kecil, yang akan membagikan Perangkat Daerah mana saja yang akan terlibat dalam membangun tema kecil tersebut. Dalam hal ini perangkat daerah yang terlibat tersebut kita namakan integratif. Kemudian program-program dan kegiatan yang ada pada setiap Perangkat Daerah yang terlibat untuk membangun suatu tema kecil itu dinamakan Holistik. Kemudian spasial digunakan untuk mendukung pembangunan tematik besarnya yang akan menjadi tema kecil yang diintervensi oleh banyak Perangkat Daerah yang juga dinamakan integratif dan masing-masing perangkat daerah mengintervensi dengan program dan kegiatan yang dinamakan juga holistik.

Dalam konteks penyusunan RPJMD ini arah kebijakan merupakan tema kecil dari turunan tema besar yang merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai yang membagi perangkat daerah serta program dan kegiatannya dalam mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut. Keterkaitan hubungan antara Sasaran, strategi, program pembangunan daerah, arah kebijakan, indikator kinerja outcome, capaian kinerja kondisi awal dan kondisi akhir, Program Perangkat Daerah, bidang urusan, dan PD penanggung jawab diuraikan sebagaimana Tabel VI.3.

Tabel VI.3
Program Pembangunan Daerah Yang disertai Pagu Indikatif
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;							410,511,576,133		1,623,450,491,760		1,429,566,536,262		1,626,325,200,143		1,241,055,102,506		
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi			Persentase Pertumbuhan PDRB			5.2	270,875,228,800	5.3	1,377,887,500,571	5.4	1,173,819,330,852	5.5	1,351,100,676,100	5.6	918,779,911,791		
Sasaran : Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan			Persentase Pertumbuhan Produksi sub 1 sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan			4.95	73,912,674,053	5.15	133,570,873,200	5.36	141,302,109,383	5.57	156,416,695,935	5.8	174,964,311,637		
1 Program Penyusunan kebijakan Perlindungan lahan pertanian untuk berkelanjutan							250,000,000		300,000,000		350,000,000		400,000,000		450,000,000		
Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Pertambahan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang di implementasikan	Urusan Pertanian	N.A	1	250,000,000	2	300,000,000	1	350,000,000	1	400,000,000	1	450,000,000	6	DINAS PERTANIAN
2 Program Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan							45,786,023,886		64,726,504,311		68,400,508,922		73,005,911,914		85,048,544,524		
	2 Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian	Urusan Pertanian	17	14	4,060,265,000	15	7,475,000,000	15	7,950,000,000	15	7,500,000,000	16	7,550,000,000	75	DINAS PERTANIAN
			Persentase Pertambahan Kelompok tani	Urusan Pertanian	10	10	2,330,132,500	10	3,887,500,000	10	4,150,000,000	10	3,950,000,000	10	4,000,000,000	50	DINAS PERTANIAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			yang melakukan pemberdayaan disektor pertanian														
			Persentase Kelembagaan pertanian aktif	Urusan Pertanian	10	10	2,330,132,500	10	3,887,500,000	10	4,150,000,000	10	3,950,000,000	10	4,000,000,000	50	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	Persentase Pertambahan Jumlah benih lada yang bersertifikat dan berlabel	Urusan Pertanian	375	525	146,000,000	655	103,000,000	785	108,000,000	915	113,000,000	1,050,000	190,000,000	1,050,000	UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
			Persentase Pertambahan Jumlah benih karet yang bersertifikat dan berlabel,	Urusan Pertanian	375	525	146,000,000	655	103,000,000	785	108,000,000	915	113,000,000	1,050,000	190,000,000	1,050,000	UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
			Pertambahan Jumlah benih padi yang bersertifikat dan berlabel	Urusan Pertanian	100	125	196,000,000	150	206,000,000	175	216,000,000	200	226,000,000	250	380,000,000	250	UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
			Pertambahan Jumlah benih hortikultura yang bersertifikat dan berlabel,	Urusan Pertanian	1	1,25	196,000,000	1,5	206,000,000	1,75	216,000,000	2	226,000,000	2,5	380,000,000	2,5	UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
			Persentase varietas unggul lokal yang didaftarkan menjadi unggul Nasional	Urusan Pertanian	2	2	196,000,000	2	206,000,000	2	216,000,000	2	226,000,000	2	380,000,000	2	UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN	Persentase penurunan areal tanam yang terserang OPT	Urusan Pertanian	5	5	530,000,000	5	530,000,000	5	530,000,000	5	530,000,000	5	1,000,000,000	5	UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Pertambahan Ketersediaan bibit lada	Urusan Pertanian	-	25	1,740,105,000	50	355,000,000	75	430,000,000	100	405,000,000	150	571,666,667	150	UPTD Balai Benih Pertanian
			Pertambahan Ketersediaan bibit karet	Urusan Pertanian	200	40	1,740,105,000	40	355,000,000	40	430,000,000	40	405,000,000	150	571,666,667	40	UPTD Balai Benih Pertanian

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pertambahan Ketersediaan benih sumber padi	Urusan Pertanian	-	2	1,740,105,000	4	355,000,000	6	430,000,000	6	405,000,000	150	571,666,667	6	UPTD Balai Benih Pertanian
			Pertambahan Ketersediaan bibit ayam	Urusan Pertanian	1	5	1,740,105,000	6	355,000,000	8	430,000,000	11	405,000,000	150	571,666,667	15	UPTD Balai Benih Pertanian
			Pertambahan Ketersediaan anakan sapi	Urusan Pertanian	8	15	1,740,105,000	20	355,000,000	25	430,000,000	30	405,000,000	150	571,666,667	35	UPTD Balai Benih Pertanian
			Pertambahan Ketersediaan kandang temak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana	Urusan Pertanian	1	6	1,625,087,500	1	355,000,000	1	430,000,000	1	405,000,000	150	571,666,667	2	
		PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Persentase peningkatan produksi dan produktifitas komoditi strategis tanaman pangan padi	Urusan Pertanian	38,393.00	40,313.00	2,000,000,000	43,135.00	1,046,477,500.00	47,017.00	1,097,030,000.00	52,188.00	1,152,530,000.00	60,017.00	1,203,030,000.00	60,017	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Peningkatan produksi lada	Urusan Pertanian	39,153	41,111	2,975,000,000	43,577	5,396,000,000	46,628	5,851,000,000	49,892	6,306,000,000	53,883	9,821,000,000	53,883	DINAS PERTANIAN
			Peningkatan produksi karet	Urusan Pertanian	56,864	58,438	3,752,000,000	60,173	5,396,000,000	61,407	5,851,000,000	62,481	6,306,000,000	63,575	9,821,000,000	63,575	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah populasi temak besar sapi	Urusan Pertanian	11,545	13,09	3,150,000,000	14,399	3,590,000,000	15,838	4,085,000,000	17,422	4,530,000,000	19,164	4,805,000,000	19,164	DINAS PERTANIAN
			Pertambahan Jumlah populasi temak ayam	Urusan Pertanian	11,500,000	12,075,000	2,000,000,000	12,678,800	3,590,000,000	13,312,700	4,085,000,000	13,978,320	4,530,000,000	14,677,240	4,805,000,000	14,677,240	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Persentase izin usaha hasil hutan kayu (%)	Urusan Pertanian	100%	100%	284,024,350	100%	300,000,000	100%	330,000,000	100%	340,000,000	100%	350,000,000	100%	DINAS KEHUTANAA N
			Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan (%)	Urusan Pertanian	100%	100%		100%	1,600,000,000	100%	1,650,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,750,000,000	100%	DINAS KEHUTANAA N

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung peningkatan produksi pertanian yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	1,006,804,900	30%	1,059,645,145	35%	1,062,627,402	40%	1,065,758,772	40%	1,069,046,711	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Penelitian dan pengemban gan)	10%	25%	175,542,697	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	Ada	151,857,335.00									Ada	DLH
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian yang dapat diakses masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	15%	50,000,000	25%	60,000,000	35%	70,000,000	45%	80,000,000	55%	90,000,000	55%	KOMINFO
	3 Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertanian yang berkompetensi	Urusan Tenaga Kerja	0.14	0.14	125,000,000	0.14	250,000,000	0.17	250,000,000	0.17	375,000,000	0.21	375,000,000	40	UPD BLKI
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pertanian yang bersertifikasi	Urusan Tenaga Kerja	N.A			17.54	420,000,000	21.3	400,000,000	22.56	400,000,000	23.06	400,000,000	23.06	DISNAKER

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	Urusan Tenaga Kerja	0.02	0.02	113,426,250	0.02	67,500,000	0.02	52,500,000	0.02	50,000,000	0.02	43,750,000	0.1	UPTD BALAI PRODUKTIFIT AS
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian, perkebunan dan peternakan yang memiliki akreditasi A	Urusan Pendidikan	50	100	582,776,471	100	627,511,765	100	682,558,824	100	715,547,059	100	747,082,353	100	DINDIK
			Persentase SMK Pertanian dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Urusan Pendidikan	0	0	582,776,471	50	627,511,765	50	682,558,824	100	715,547,059	100	747,082,353	100	DINDIK
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N.A	3%	377,357,723	3%	814,650,000	3%	956,998,000	3%	1,049,602,400	3%	1,007,059,200	3%	DINAS KUMKM
			persentase peningkatan volume usaha koperasi sapi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N.A	1%	98,000,000	1%	271,550,000	1%	410,142,000	1%	449,829,600	2%	671,372,800	2%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N.A	1.38%	52,810,000	3.09%	244,500,000	4.68%	409,500,000	3.44%	269,100,000	4.68%	456,106,000	4.68%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERA SIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N.A	0%	575,085,436	0.34%	946,880,000	0.36%	1,105,545,280	0.34%	878,198,000	0.37%	1,125,300,000	0.37%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERA SIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out- ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4	Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	Urusan Tenaga Kerja	2	99,889,671	2	337,365,000	2	241,642,800	2	287,494,000	2	335,294,000	10	DISNAKER
	5	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5%	377,740,804	5%	210,000,000	5%	218,000,000	5%	222,800,000	5%	244,000,000	25%	DINAS KUMKM
Persentase peningkatan produk usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang dikembangkan dengan bantuan peralatan tepat guna				persentase koperasi sektor pertanian berkualitas sesuai standar	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2%	51,068,377	2%	12,080,250	2%	14,544,056	2%	17,371,951	2%	20,720,000	10%	DINAS KUMKM
Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	40%	61.30 %	77%	1,006,950,000	43.48 %	900,000,000	43.48 %	900,000,000	43.48 %	900,000,000	43.48%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri pada sektor pertanian	Urusan Perindustrian	1,149	1,474	0	1499	495,000,000	1524	200,000,000	1549	210,000,000	1547	220,000,000	1547	DISPERINDA G
			Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian	Urusan Perindustrian	9.98	10.13 %	0	10.28 %	150,000,000	10.44 %	200,000,000	10.58 %	200,000,000	10.73 %	0	10.73%	DISPERINDA G
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar penquijiaan	Urusan Perindustrian	2	3	1,069,362,000	2	3,526,429,000	2	2,239,907,000	1	2,164,907,000	1	2,264,907,000	1	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALI AN MUTU

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		MUTU PRODUK																
	6	Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase pertambahan kebijakan sumber daya alam yang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	75	70	369,610,000	75	930,000,000	75	984,125,000	75	1,072,456,250	80	1,130,079,063	80	BIRO EKONOMI
		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian	Urusan Penanaman Modal	N.A	3	537,369,500	0		0		3	2,510,000,000	0		3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Pertambahan Jumlah UKM pertanian yang bermitra dengan investor	Urusan Penanaman Modal	N.A	1	166,704,500	1	525,000,000	1	342,500,000	2	352,000,000	2	260,833,333	2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah investor Sektor Pertanian	Urusan Penanaman Modal	N.A	2	880,921,250	3	232,375,050	3	243,750,000	4	257,500,100	4	271,250,000	16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sektor pertanian yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	Urusan Penanaman Modal	N.A	0.43%	57,692,452	0.44%	263,750,000	0.45%	298,750,000	0.46%	342,500,000	0.47%	346,750,000	0.47%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	80	80	156,000,000	90	76,500,000	100	120,000,000	90	81,000,000	100	95,000,000	450	DINAS KUMKM
	7 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10%	26%	1,056,112,699	42%	1,843,301,336	58%	1,935,466,403	81%	2,032,239,723	100%	2,133,851,709	100%	DINAS PMD
		PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	Urusan Pertanian	N.A	30	197,998,500	40	1,046,477,500.00	50	1,097,030,000.00	60	1,152,530,000.00	70	1,203,030,000.00	70	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	Urusan Pertanian	6	31	400,000,000	56	5,396,000,000	81	5,851,000,000	106	6,306,000,000	131	9,821,000,000	131	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	Urusan Pertanian	4	8	850,000,000	14	3,590,000,000	20	4,085,000,000	26	4,530,000,000	32	4,805,000,000	32	DINAS PERTANIAN
3 Program Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan							27,876,650,167		68,544,368,889		72,551,600,461		83,010,784,021		89,465,767,113		
	8 Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN	Tersedianya Kawasan budiaya komoditas padi di KTM Batu	Urusan Pertanian	N.A			1	348,843,333							1	DINAS PERTANIAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out- ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		HOLTIKULTURA	Betumpang														
			Tersedianya Kawasan budiya komoditas cabai di KTM Batu Betumpang	Urusan Pertanian	N.A			1	348,843,333							1	DINAS PERTANIAN
			Tersedianya Kawasan budiaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	Urusan Pertanian	N.A			1	348,843,333							1	DINAS PERTANIAN
			Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Batu Betumpang	Urusan Pertanian	N.A												DINAS PERTANIAN
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93.50%	94.50 %	9,173,480,000	95.50 %	17,757,836,800	96.50 %	19,533,620,480	97.50 %	21,486,982,528	98.50 %	23,635,680,781	99.50%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87%	88%	5,125,000,000	89.00 %	332,739,256	90.00 %	366,013,181	91.00 %	5,402,614,499	92.00 %	942,875,949	93.00%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang	Urusan Transmigras i	N.A		220,598,665										DISNAKER
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan Kawasan KTM Batu Betumpang yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	21,555,429	30%	22,633,200	35%	23,764,860	40%	24,953,103	40%	26,200,758	45%	BAPPEDA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	9 Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Kota Terpadu Mandiri Gantung	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	0	50%	1,000,000,000	75%	500,000,000	100%	1,000,000,000	100%	DINAS PUPR
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.95%	91.95 %	11,264,460,644	92.95 %	20,522,005,508	93.95 %	22,574,206,059	94.95 %	24,831,626,665	95.95 %	27,314,789,332	96.95%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83%	84.00 %		85.00 %	16,449,300,928	86.00 %	18,094,231,021	87.00 %	19,903,654,123	88.00 %	21,894,019,535	89.00%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi di kawasan kota terpadu mandiri Gantung	Urusan Pertaniaan	N.A			1	348,843,333							1	DINAS PERTANIAN
			Tersedianya Kawasan Budidaya komoditas cabai di Kawasan kota Terpadu mandiri Gantung	Urusan Pertaniaan	N.A			1	348,843,333							1	DINAS PERTANIAN
			Tersedianya Kawasan Budidaya bawang merah di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gantung	Urusan Pertaniaan	N.A			1	348,843,333							1	DINAS PERTANIAN
			Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Gantung	Urusan Pertaniaan	N.A												DINAS PERTANIAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kota Terpadu Mandiri Gantung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada					ada	1,000,000,000					Ada	DLH	
		PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Gantung	Urusan Transmigras i	N.A												DISNAKER	
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase Kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan Kawasan KTM Gantung yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	21,555,429	30%	22,633,200	35%	23,764,860	40%	24,953,103	40%	26,200,758	45%	BAPPEDA	
	10	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Tersedianya kawasan Pengembangan budidaya lada	Urusan Pertanian	3	1	1,250,000,000	1	5,396,000,000	1	5,851,000,000	1	6,306,000,000	1	9,821,000,000	1	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas yang di implementasikan	Urusan Pertanian	N.A			ada	750,000,000							ada	DINAS PUPR	
	11	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi	Urusan Pertanian	N.A			1	348,843,333		-		-		-	1	DINAS PERTANIAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out- ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			Tersedianya Kawasan budidaya komoditi cabai	Urusan Pertanian	N.A			1	348,843,333			-		-		1	DINAS PERTANIAN	
			Tersedianya Kawasan budidaya bawang merah	Urusan Pertanian	N.A			1	348,843,333			-		-		1	DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi	Urusan Pertanian	2	1	800,000,000	-	3,590,000,000	1	4,085,000,000	-	4,530,000,000	-	4,805,000,000	3	DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada			ada	561,630,000								DLH	
Sasaran : Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan			1	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan		3.92	25,935,389,175	4.10	79,095,612,145	4.29	90,571,676,055	4.48	144,904,471,121	4.69	104,161,520,529			
1	Program Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil						6,880,317,000		13,506,000,000		15,597,200,000		18,407,400,000		24,358,000,000			
	12	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN RUANG LAUT	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	Urusan Kelautan dan Perikanan	550	815,077	200,000,000	820,077	2,100,000,000	825,077	2,220,000,000	830,077	2,629,000,000	835,077	3,114,800,000	835,077	DKP
			Persentase sarana dan prasarana yang	Urusan Kelautan dan	0	1.60	5,100,000,000	2.13	8,856,000,000	2.13	10,517,200,000	2.13	12,688,400,000	2.66	17,643,200,000	10.64	DKP	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Perikanan													
		PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	65.00 %	1,216,773,000	70.00 %	2,550,000,000	75.00 %	2,860,000,000	80.00 %	3,090,000,000	85.00 %	3,600,000,000	85.00%	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	Urusan Perhubunga n	N.A	12.00 %	363,544,000	15.00 %	399,898,000	18.00 %	439,888,000	25.00 %	483,877,000	30.00 %	532,264,000	100.00%	DISHUB
2 Program Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya							16,539,656,961		49,713,888,725		51,268,775,273		57,042,264,990		59,295,276,750		
	13 Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanan yang berkompetensi	Urusan Tenaga Kerja	0.11%	0.11%	125,000,000	0.11%	250,000,000	0.15%	250,000,000	0.15%	375,000,000	0.19%	375,000,000	40	UPTD BLKI
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanan bersertifikat kompetensi	Urusan Tenaga Kerja	17.54%			17.54	300,000,000	21.3	310,000,000	22.56	320,000,000	23.06	330,000,000	23.06	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor Perikanan	Urusan Tenaga Kerja	0.12	0.12	113,426,250	0.12	67,500,000	0.12	52,500,000	0.12	50,000,000	0.12	43,750,000	0.6	UPTD BALAI PRODUKTIFITASI
		PROGRAM PENINGKATAN DAN	Persentase Jumlah SMK dengan program	Urusan Pendidikan	50	50	582,776,471	100	627,511,765	100	682,558,824	100	715,547,059	100	747,082,353	100	DINDIK

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	keahlian perikanan yang memiliki akreditasi A														
			Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Urusan Pendidikan	50	50	582,776,471	100	627,511,765	100	682,558,824	100	715,547,059	100	747,082,353	100	DINDIK
	14 Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha sektor kelautan dan perikanan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5%	5%	490,000,000	5%	1,364,300,000	5%	1,367,140,000	5%	1,499,432,000	5%	1,678,432,000	5%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor perikanan terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1%	1%	52,810,000	3%	244,500,000	3%	227,500,000	3%	269,100,000	5%	456,106,000	5%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERA SIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0%	0%	575,085,437	0%	650,980,000	0%	725,514,090	0%	649,036,000	0%	853,050,000	0%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERA SIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanan	Urusan Perindustria n	0.67%	0.68%	0	0.70%	280,000,000	0.71%	170,000,000	0.72%	180,000,000	0.74%	190,000,000	0.74%	DISPERINDA G
		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Urusan Kelautan dan Perikanan	17,08	11,62	559,168,000	12,12	980,000,000	12,62	1,585,000,000	13,12	1,550,000,000	13,62	2,300,000,000	13,62	DKP
			Angka Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	Urusan Kelautan dan Perikanan	49	53	734,620,000	54	1,446,000,000	55	1,485,000,000	56	1,500,000,000	57	1,545,000,000	57	DKP

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			Volume Produksi Olahan (ton)	Urusan Kelautan dan Perikanan	24	20,61	1,857,605,000	21,11	175,000,000	21,61	180,000,000	22,11	185,000,000	22,61	190,000,000	22,61	DKP	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Urusan Kelautan dan Perikanan	181	211,3	6,039,100,000	215,3	23,345,000,000	219,3	27,870,000,000	223,3	34,535,000,000	227,3	34,860,000,000	227,3	DKP	
			Nilai Tukar Nelayan (Indeks)		107	108	-	109	2,400,000,000	110	2,500,000,000	111	2,600,000,000	112	2,700,000,000	112	DKP	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	8.75	276,672,000	9.63	885,000,000	10.59	1,140,000,000	11.65	1,245,000,000	12.81	1,250,000,000	53.41	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN LAUT	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	0.05	223,906,000	0.06	540,000,000	0.07	600,000,000	0.08	645,000,000	0.09	690,000,000	0.34	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	0.3	69,227,100	0.33	215,500,000	0.36	246,000,000	0.4	260,000,000	0.44	274,000,000	1.83	UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS) PEMALI	
	15	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJA AN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	Urusan Tenaga Kerja	0.49	1.2	99,889,671	1.2	337,365,000	1.6	241,642,800	1.6	287,494,000	1.6	335,294,000	7.2	DISNAKER
	16	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase jumlah koperasi bidang Kelautan dan Perikanan yang berkualitas sesuai standar	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.60%	3.60%	377,740,804	3.60%	632,250,000	3.60%	900,000,000	3.60%	730,350,000	3.60%	1,008,000,000	4%	DINAS KUMKM
			Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan	5%	5%	47,690,000	5%	86,200,000	5%	98,400,000	5%	104,000,000	5%	109,600,000	5%	DINAS KUMKM	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			sektor kelautan dan perikanan	Menengah													
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	Peningkatan produk Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Urusan Perindustria n	70	550(78 6%)	0	550(96 %)	2,475,000,000	550(49 %)	2,475,000,000	550(49 %)	2,475,000,000	550(49 %)	2,475,000,000	2750	DISPERINDA G
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	80.00 %	-	84.00 %	5,650,000,000	88.00 %	3,750,000,000	92.00 %	2,300,000,000	96.00 %	2,350,000,000	96.00%	UPTD LABORATORI UM PENGUJIAN DAN PENGENDALI AN MUTU HASIL PERIKANAN
	17	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor perikanan dan kelautan yang digunakan untuk promosi investasi di sektor perikanan dan Kelautan	Urusan Penanaman Modal	N.A	0	5	2,255,000,000		0		0		0	5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pertambahan Jumlah UKM Sektor kelautan dan perikanan yang bermitra dengan investor	Urusan Penanaman Modal	N.A	1	166,704,500	1	525,000,000	1	342,500,000	1	352,000,000	2	260,833,333	2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor sektor kelautan dan perikanan	Urusan Penanaman Modal	N.A	1	880,921,250	2	232,375,050	2	243,750,000	4	257,500,100	4	271,250,000	4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sektor kelautan dan perikanan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	Urusan Penanaman Modal	N.A	0.43%	57,692,452	0.44%	263,750,000	0.45%	298,750,000	0.46%	342,500,000	0.47%	346,750,000	0.47%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung sektor Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	10%	25%	56,804,900	30%	59,645,145	35%	62,627,402	40%	65,758,772	40%	69,046,711	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang kelautan dan perikanan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	10%	25%	175,540,655	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Peningkatan produk Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70	550	2,260,500,000	550	2,475,000,000	550	2,475,000,000	550	2,475,000,000	550	2,475,000,000	550	DINAS KUMKM
			pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	160	160	134,000,000	160	173,500,000	150	134,000,000	160	169,000,000	150	155,000,000	780	DINAS KUMKM
3 Program Pengembangan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan							2,515,415,214		15,875,723,420		23,705,700,782		69,454,806,131		20,508,243,779		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	18 Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A			19,5	610,000,000	22,5	1,220,000,000	26,5	1,220,000,000	31	1,830,000,000	31	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasa n Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	75	0	220	73,000,000	270	113,000,000	330	133,000,000	420	163,000,000	420	DKP
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis minapolitan Lepar Pongok	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1%	1%	0	1%	34,000,000	1%	42,000,000	1%	28,000,000	1%	48,000,000	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri perikana an dikawasa n Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Urusan Perindustria n	N.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDA G
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada			ada	1,000,000,000							1 Dok	DLH
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Urusan Perhubunga n	N.A			30%	2,200,000,000			30%	2,400,000,000			60%	DISHUB

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang di implementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	0	0	C	1,500,000,000	75	0	100	1,000,000,000			100%	DINAS PUPR
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	850,000,000	25%	8,935,000,000	26%	1,828,500,000	27%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	450,000,000	20%	5,045,000,000	21%	549,500,000	22%	DINAS PUPR
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar pongok yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	21,555,429	30%	22,633,200	35%	23,764,860	40%	24,953,103	40%	26,200,758	40%	BAPPEDA
	19 Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis etalase perikanan selat nasik	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	10	-	121	73,000,000	163	113,000,000	225	133,000,000	307	163,000,000	307	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Perikanan	Urusan Kelautan dan	N.A			33	610,000,000	35	1,220,000,000	37	1,220,000,000	39	1,830,000,000	39	DKP

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		TANGKAP	Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik	Perikanan													
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis etalase perikanan selat nasik	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1%	1%	0	1%	34,000,000	1%	42,000,000	1%	28,000,000	1%	48,000,000	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik	Urusan Perindustria n	N.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDA G
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	650,000,000	25%	8,715,000,000	26%	1,586,500,000	27%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	400,000,000	20%	5,040,000,000	21%	544,000,000	22%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada					ada	1,000,000,000						DLH
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Urusan Perhubunga n	N.A			30%	2,250,000,000			30%	2,350,000,000			60%	DISHUB

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PERHUBUNGAN LAUT	pendukung perhubungan laut kawasan strategis etalase perikanan Selat Nasik														
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang diimplementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A			50	1,500,000,000	75	750,000,000.00	100	1,000,000,000.00			100	DINAS PUPR
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan Kawasan Strategis Perikanan selat nasik yang terintegrasi dalam dokumen Perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	10%	25%	21,555,429	30%	22,633,200	35%	23,764,860	40%	24,953,103	40%	26,200,758	40%	BAPPEDA
	20 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1%	1%	0	1%	34,000,000	1%	42,000,000	1%	28,000,000	1%	48,000,000	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan panjang bangunan pemecah gelombang atau penahan abrasi di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	-	5%	750,000,000	35%	4,500,000,000.00	70%	5,775,000,000.00	100%	4,950,000,000.00	100%	DINAS PUPR
			Persentase penyediaan volume air baku di kawasan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan	0	0	-	5%	250,000,000	50%	2,500,000,000	100%	2,750,000,000				DINAS PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Ruang													
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.85%	96.85 %	2,215,258,000	97.85 %	2,436,783,800	98.00 %	2,680,462,180	99.00 %	10,948,508,398	99.50 %	4,043,359,238	99.50%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93%	94.00 %	235,490,927	95.00 %	259,040,020	96.00 %	284,944,022	97.00 %	5,313,438,424	98.00 %	844,782,267	99.00%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A			10	457,500,000	13,125	915,000,000	14,25	915,000,000	15,75	1,372,500,000	53,125	DKP
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1%	1%	0	1%	34,000,000	1%	42,000,000	1%	28,000,000	1%	48,000,000	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Urusan Perhubungan	N.A		0		0	30%	2,450,000,000	30%	2,500,000,000	0		60%	DISHUB
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	50	1,500,000,000	75		100	1,000,000,000				DINAS PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Industri Perikanan Tanjung Binga yang diimplemtasikan														
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	21,555,429	30%	22,633,200	35%	23,764,860	40%	24,953,103	40%	26,200,758	45%	BAPPEDA
	21 Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A			5	152,500,000	4,375	305,000,000	4,75	305,000,000	5,25	457,500,000	19,375	DKP
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N.A			1%	50,000,000	2%	65,000,000	2%	70,000,000	2%	75,000,000	2%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Urusan Perhubunga n	N.A					25%	3,000,000,000	25%	2,500,000,000	0		50%	DISHUB
Sasaran : Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata			1 jumlah kunjungan wisatawan domestik dan			378,85 3	123,361,212,904	412,89 6	1,060,842,030,898	449,99 6	763,079,493,376	490,43 2	872,775,815,668	534,50 1	473,666,307,855		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			wisatawan mancanegara)														
1 Program pengembangan pembangunan pariwisata							84,109,760,550		1,015,376,508,362		694,410,442,434		700,802,909,855		355,578,059,821		
	22 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	Urusan Pariwisata	N.A	N.A	688,840,167		3,912,278,833		4,261,935,500		4,331,092,833		5,057,107,667		BUDPAR
			Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	Urusan Pariwisata	N.A	N.A	688,840,167		3,912,278,833		4,261,935,500		4,331,092,833		5,057,107,667		BUDPAR
			Pertumbuhan kelembagaan pariwisata	Urusan Pariwisata	N.A	N.A	688,840,167		3,912,278,833		4,261,935,500		4,331,092,833		5,057,107,667		BUDPAR
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.70%	2.70%	377,740,804	2.70%	105,000,000	2.70%	109,000,000	2.70%	111,400,000	2.70%	122,000,000	2.70%	KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		0.06%	142,500,000	0.06%	650,980,000	0.06%	967,352,120	0.06%	859,742,000	0.06%	961,950,000	0.06%	KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.69%	0.69%	52,810,000	2.06%	163,000,000	1.51%	136,500,000	2.75%	179,400,000	2.20%	79,818,550	2.20%	KUMKM
			persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.06%	0.06%	575,085,437	0.25%	650,980,000	0.32%	967,352,120	0.32%	859,742,000	0.32%	961,950,000	0.32%	KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN DAN	Persentase SMK pariwisata Terkareditasi A	Urusan Pendidikan	66.67	100	582,776,471	100	627,511,765	100	682,558,824	100	715,547,059	100	747,082,353	100	DINDIK

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN															
	23 Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek wisata yang terkelola	Urusan Pariwisata	N.A	32%	2,128,785,200	32%	1,010,218,120	33%	1,027,653,800	33%	1,117,131,400	36%	1,132,988,100	36%	BUDPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	Urusan Pariwisata	0	5	8,866,985,000	7	11,207,306,000	9	11,903,841,000	11	12,646,920,000	13	13,369,388,000	9	BUDPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata	Urusan Perhubunga n	N.A	20%	750,000,000	30%	2,200,000,000							50%	DISHUB
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	Urusan Perhubunga n	N.A	50%	4,205,274,834	20%	1,200,000,000	30%	2,300,000,000	30%				100%	DISHUB
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.51%	93.51 %	29,581,883,353	94.51 %	175,539,390,280	95.51 %	193,093,329,308	96.51 %	212,402,662,239	97.51 %	233,642,928,463	98.51%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84%	85.00 %	13,400,784,644	86.00 %	34,540,863,108	87.00 %	37,994,949,419	88.00 %	46,794,444,361	89.00 %	46,473,888,797	90.00%	DINAS PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out- ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUKM	Pertumbuhan produk parekras	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10%	10%	832,791,485	10%	620,000,000	10%	670,000,000	10%	720,000,000	10%	800,000,000	10%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	15%	50,000,000	25%	60,000,000	35%	70,000,000	45%	80,000,000	55%	90,000,000	55%	DISKOMINFO
		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase kesesuain perencanaan yang mendukung pengembangan pariwisata yang terintegrasi dalam dokumen perencaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	71,006,166	30%	74,556,475	35%	78,284,299	40%	82,198,514	40%	86,308,439	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan Pariwisata yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Penelitian dan pengemban gan)	10%	25%	175,542,697	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA
	24 Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	Urusan Tenaga Kerja	17.54			17.54	300,000,000	21.3	310,000,000	22.56	320,000,000	23.06	330,000,000	23.06	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase peningkatan i kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	Urusan Tenaga Kerja	0	0.11	1,000,000,000	0.15	1,125,000,000	0.15	1,125,000,000	0.19	1,250,000,000	0.71	1,250,000,000	40	UPD BLKI
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	Urusan Tenaga Kerja	0	0.05	113,426,250	0.05	67,500,000	0.05	52,500,000	0.05	50,000,000	0.05	43,750,000	0.05	UPTD BALAI PRODUKTIF AS

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Urusan Pendidikan	0	33.33	582,776,471	33.33	627,511,765	66.66	682,558,824	66.66	715,547,059	100	747,082,353	100	DINDIK
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N.A	1%	98,000,000	1%	199,500,000	2%	457,320,000	2%	546,856,000	2%	570,000,000	2%	KUMKM
	25 Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	N.A	20%	415,000,000	6.67%	456,500,000	6.25%	502,150,000	5.88%	552,365,000	11.11 %	607,601,500	11.11%	DISKEPORA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	N.A	2.00%	500,000,000	4.00%	550,000,000	6.00%	605,000,000	6.00%	665,500,000	8.00%	732,050,000	8.00%	DISKEPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	N.A	8.33%	3,007,917,057	16.67 %	753,250,000,000	16.67 %	409,100,000,000	25.00 %	387,000,000,000	25.00 %	15,250,000,000	25.00%	DISKEPORA
		PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan.	Urusan Kebudayaan	N.A	N.A	8,483,966,000		12,524,381,100		12,735,571,000		14,007,100,400		13,979,105,000		BUDPAR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			dimanfaatkan dan dibina														
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Rasio Penyelenggaraan event penunjang kepariwisataan dengan priode waktu satu tahun	Urusan Pariwisata	N.A	N.A	2,174,557,000		2,394,317,000		2,514,033,000		2,639,734,000		2,771,462,000		BUDPAR
	26 Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJA AN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	Urusan Tenaga Kerja	1.44	1.6	204,864,278	1.6	34,515,000	1.6	41,554,447	1.6	49,634,146	1.6	59,200,000	8	DISNAKER
	27 Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi sektor pariwisata yang berkualitas	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1%	1%	114,000,000	1%	281,000,000	1%	400,000,000	1%	324,600,000	1%	448,000,000	5%	
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	75	205	2,042,550,000	250	750,000,000	250	650,000,000	250	500,000,000	250	650,000,000	1,205	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	Urusan Perindustria n	0.30%	0.31%	282,513,500	0.32%	429,016,200	0.33%	518,819,440	0.35%	562,583,328	0.38%	411,099,994	0.38%	DISPERINDA G
	28 Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD, PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanama n Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	0	70	291,089,700	72	829,500,000	73	870,975,000	74	914,523,750	75	960,249,938	75	BIRO EKONOMI

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.																
		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata	Urusan Penanaman Modal	N.A	0		0		0		0		4	2,040,000,000	4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	Urusan Penanaman Modal	N.A			1	525,000,000	1	342,500,000	1	352,000,000	1	260,833,333	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	Urusan Penanaman Modal	N.A	2	880,921,250	3	232,375,050	3	243,750,000	4	257,500,100	4	271,250,000	16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	Urusan Penanaman Modal	N.A	0.43%	57,692,452	0.44%	263,750,000	0.45%	298,750,000	0.46%	342,500,000	0.47%	346,750,000	0.47%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 Program Pengembangan kawasan pendukung pembangunan pariwisata							31,098,633,803		33,275,297,890		46,195,223,381		85,333,581,024		48,201,745,571		
	29 Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian	Urusan Perhubungan	N.A					30%	2,550,000,000					30%	DISHUB

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian	Urusan Perhubunga n			1,618,005,833		2,257,581,071		2,584,434,898		2,813,858,486		2,677,621,667		DISHUB
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan mendukung pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	138,757,624	30%	93,195,506	35%	97,855,282	40%	102,748,046	40%	107,885,448	45%	BAPPEDA
	30 Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ASDP Manggar-Ketapang yang diimplementasika n	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0					50	1,500,000,000	75	750,000,000	100	1,000,000,000	100	DINAS PUPR
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis ASDP Manggar dan Ketapang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	900,000,000	25%	8,990,000,000	26%	1,889,000,000	27%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	550,000,000	20%	5,055,000,000	21%	560,500,000	22%	DINAS PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP - Manggar yang digunakan dalam perencanaan Kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada					ada	1,000,000,000						DLH
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang	Urusan Perhubunga n	N.A							30%	2,600,000,000	30%	2,900,000,000	60%	DISHUB
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan Kawasan Strategis ASDP Manggar- Ketapang yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	N.A												BAPPEDA
	31 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	persentase sarana dan prasarana Pariwisata di kawasan pariwisata Tanjung Gunung yang terbangun dan dikelola	Urusan Pariwisata	N.A	32%	2,128,785,200	32%	1,010,218,120	33%	1,027,653,800	33%	1,117,131,400	36%	1,132,988,100	36%	BUDPAR
			Persentase sarana dan prasaranapariwis ata di kawasan Lintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan dikelola	Urusan Pariwisata	N.A	32%	2,128,785,200	32%	1,010,218,120	33%	1,027,653,800	33%	1,117,131,400	36%	1,132,988,100	36%	BUDPAR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Urusan Perhubunga n	N.A	40%	5,517,547,000	30%	3,750,000,000	25%	3,140,000,000					95%	DISHUB
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93.44%	94.44 %	10,128,018,000	95.44 %	11,140,819,800	96.44 %	12,254,901,780	97.44 %	13,480,391,958	98.44 %	14,828,431,154	99.44%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87%	88%	2,381,290,232	89.00 %	5,119,419,256	90.00 %	5,631,361,181	91.00 %	11,194,497,299	92.00 %	7,313,947,029	93.00%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Tanjung Gunung dan Lintas Timur Pulau Bangka yang diimplementasika n	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		50	1,000,000,000	75	500,000,000	100	1,000,000,000						DINAS PUPR
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	10%	25%	138,757,624	30%	93,195,506	35%	97,855,282	40%	102,748,046	40%	107,885,448	40%	BAPPEDA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		KEWILAYAHAN	Tanjung Gunung dan Lintas Timur Pulau Bangka yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	(Perencana an)														
	32	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang	Urusan Pariwisata	N.A	32%	2,128,785,200	32%	1,010,218,120	33%	1,027,653,800	33%	1,117,131,400	36%	1,132,988,100	36%	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	Urusan Perhubunga n												DISHUB	
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	900,000,000	25%	8,990,000,000	26%	1,889,000,000	27%	PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	550,000,000	20%	5,055,000,000	21%	560,500,000	22%	PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pariwisata Tanjung Kelayang yang diimplementasika n	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				50	1,000,000,000	75	500,000,000	100	1,000,000,000				PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	Urusan Perhubunga n	N.A		0	25%	3,000,000,000	30%	3,300,000,000	35%	3,630,000,000	40%	3,993,000,000	40%	DISHUB
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada												DLH
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	21,555,429	30%	22,633,200	35%	23,764,860	40%	24,953,103	40%	26,200,758	45%	BAPPEDA
	33 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Kota Tua Muntok	Urusan Pariwisata	N.A	32%	2,128,785,200	32%	1,010,218,120	33%	1,027,653,800	33%	1,117,131,400	36%	1,132,988,100	36%	BUDPAR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Kota Tua Mentok	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	650,000,000	25%	8,715,000,000	26%	1,586,500,000	27%	PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Kota Tua Mentok	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	470,000,000	20%	5,047,000,000	21%	551,700,000	22%	PUPR
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Kota Tua Mentok yang diimplementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A					50	1,000,000,000	75	500,000,000	100	1,000,000,000	100	PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok	Urusan Perhubungan	N.A	15%	1,618,005,833	20%	2,257,581,071	30%	2,584,434,898	35%	2,813,858,486	40%	2,677,621,667	40%	DISHUB
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada					ada	800,000,000						DLH
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan Kawasan Kota Tua Mentok yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	10%	25%	21,555,429	30%	22,633,200	35%	23,764,860	40%	24,953,103	40%	26,200,758	45%	BAPPEDA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			PD														
	34 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisian Simpang Rimba	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisian Simpang Rimba yang diimplementasika n	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A					50	750,000,000	75	500,000,000	100	500,000,000	100	PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan gunung Permisian Simpang Rimba	Urusan Pariwisata	N.A			25%	1,250,000,000	30%	1,500,000,000	30%	1,650,000,000	35%	1,000,000,000	35%	BUDPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba	Urusan Perhubung an	N.A			20%	525,000,000	30%	625,000,000	35%	750,000,000	40%	850,000,000	40%	DISHUB
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada					Ada	1,000,000,000					Ada	DLH
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan pariwisata gunung Permisian	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%					2%	750,000,000	1%	1,000,000,000	25%	3,000,000,000	26%	PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Simpang Rimba														
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%					2%	300,000,000	1%	500,000,000	20%	3,000,000,000	21%	PUPR
	35Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung yang diimplementasika n	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A			25%	500,000,000	50%	650,000,000	75%	700,000,000	100%	500,000,000	100%	PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Urusan Pariwisata	N.A			25%	1,000,000,000	30%	1,350,000,000	30%	1,500,000,000	35%	1,500,000,000	35%	BUDPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Urusan Perhubunga n	N.A			25%	500,000,000	30%	625,000,000	35%	750,000,000	40%	850,000,000	40%	DISHUB
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada							Ada	850,000,000			Ada	DLH

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%			2%	750,000,000	2%	850,000,000	1%	1,000,000,000	25%	3,000,000,000	26%	PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%			2%	350,000,000	2%	500,000,000	1%	500,000,000	20%	3,000,000,000	21%	PUPR
	36 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang di implementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A					50%	750,000,000	75%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Urusan Pariwisata	N.A			25%	1,250,000,000	30%	1,500,000,000	30%	1,650,000,000	35%	1,000,000,000	35%	BUDPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Urusan Perhubunga n	N.A			20%	525,000,000	30%	625,000,000	35%	750,000,000	40%	850,000,000	40%	DISHUB
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada									Ada	1,000,000,000	Ada	DLH

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			digunakan dalam perencanaan kawasan														
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%					2%	750,000,000	1%	1,000,000,000	25%	3,000,000,000	26%	PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%					2%	300,000,000	1%	500,000,000	20%	3,000,000,000	21%	PUPR
3	Program Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan						8,152,818,551		12,190,224,646		22,473,827,561		86,639,324,789		69,886,502,463		
	37 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89.25%	90.25 %	5,379,938,000	91.25 %	5,917,931,800	92.25 %	6,509,724,980	93.25 %	7,160,697,478	94.25 %	7,876,767,226	95.25%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80%	81.00 %	1,095,365,304	82.00 %	2,204,901,834	83.00 %	1,425,392,017	84.00 %	1,567,931,219	85.00 %	1,724,724,341	86.00%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	-	5%	350,000,000.00	35%	2,450,000,000.00	70%	2,695,000,000.00	100%	2,310,000,000.00	100%	DINAS PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	-	5%	250,000,000.00	50%	2,500,000,000.00	100%	2,750,000,000.00			100%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya pada kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Urusan Kelautan dan Perikanan		60.00 %	650,000,000	65.00 %	456,000,000	75.00 %	498,000,000	80.00 %	553,200,000	85.00 %	611,040,000	85.00%	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Presentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Urusan Perhubunga n	N.A							30%	2,500,000,000	30%	2,700,000,000	60%	DISHUB
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada												DLH
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase tersedianya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum di kawasan konektivitas pulau bangka dan pulau sumatera	Urusan Pertanahan	0							50	50,000,000,000	100	50,000,000,000	100	DINAS PUPR
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pendoembangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	10%	25%	138,757,624	30%	93,195,506	35%	97,855,282	40%	102,748,046	40%	107,885,448	40%	BAPPEDA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		KEWILAYAHAN	kawasan konektivitas pulau bangka dan pulau sumatera yang terintegrasi dalam Dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	(Perencana an)													
	38 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	650,000,000	25%	8,715,000,000	26%	1,586,500,000	27%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	470,000,000	20%	5,047,000,000	21%	551,700,000	22%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	-	5%	350,000,000.00	35%	2,450,000,000.00	70%	2,695,000,000.00	100%	2,310,000,000.00	100%	DINAS PUPR
			Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	-	5%	250,000,000.00	50%	2,500,000,000.00	100%	2,750,000,000.00			100%	DINAS PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	138,757,624	30%	93,195,506	35%	97,855,282	40%	102,748,046	40%	107,885,448	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pulau- pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Urusan Perhubunga n	N.A	30%	750,000,000	30%	2,225,000,000	40%	2,825,000,000					100%	DISHUB
Sasaran : Meningkatnya Produksi sektor pertambangan			Persentase Pertumbuhan 1 Produksi sektor pertambangan dan penggalian			0.50	6,712,321,256	0.51	8,617,985,195	0.52	10,924,061,435	0.53	9,624,451,622	0.54	9,600,022,532		
1 Program Peningkatan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah hasil tambang yang berwawasan lingkungan							6,712,321,256		8,617,985,195		10,924,061,435		9,624,451,622		9,600,022,532		
	39 Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Persentase Perusahaan pertambangan non logam yang menerapkan good mining practices	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	45%	50%	223,820,000	65%	450,000,000	70%	450,000,000	75%	500,000,000	80%	550,000,000	80%	DINAS ESDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN	Persentase Perusahaan pertambangan	Urusan Energi dan Sumber	45%	50%	350,000,000	60%	550,000,000	65%	650,000,000	70%	700,000,000	80%	750,000,000	80%	DINAS ESDM

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		MINERAL LOGAM	logam yang menerapkan good mining practices	Daya Mineral													
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	N.A	16%	150,000,000	33%	500,000,000	49%	500,000,000	65%	550,000,000	81%	600,000,000	81%	DINAS ESDM
		PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Prosentase jumlah Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	90%	90%	961,515,000	72	1,316,000,000	75	1,356,000,000	75	1,405,015,000	80	1,560,030,000	80	BIRO EKONOMI
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan sumber daya mineral;	Urusan Perindustrian	1.03%	1.04%	0	1.04%	0	1.04%	150,000,000	1.04%	0	1.03%	0	1.03%	DISPERINDA G
			pertumbuhan industri turunaan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan	Urusan Perindustrian	3	4	0	4	260,000,000	5	0	5	300,000,000	5	0	5	DISPERINDA G
		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan sumber daya mineral yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	10%	25%	56,804,900	30%	59,645,145	35%	62,627,402	40%	65,758,772	40%	69,046,711	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sumber daya mineral yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	10%	25%	175,542,697	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA
	40 Pengembangan standarisasi SDM	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase peningkatan	Urusan Tenaga	17.54			17.54	300,000,000	21.3	310,000,000	22.56	320,000,000	23.06	330,000,000	23.06	DISNAKER

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	tenaga kerja sektor sumber daya mineral bersertifikat kompetensi	Kerja													
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase tenaga kerja bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutan	Urusan Tenaga Kerja	0	0.14	125,000,000	0.14	250,000,000	0.17	250,000,000	0.17	375,000,000	0.21	375,000,000	60	UPD BLKI
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral	Urusan Tenaga Kerja	0	0.05	113,426,250	0.05	67,500,000	0.05	52,500,000	0.05	50,000,000	0.05	43,750,000	0.05	UPTD BALAI PRODUKTIFIT AS
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor sumber daya mineral terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.69%	0.69%	52,810,000	2.06%	163,000,000	1.51%	136,500,000	2.75%	179,400,000	2.20%	79,818,550	2.20%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERA SIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			Persentase SDM Usaha Kecil sektor sumber daya mineral terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N.A	0.06%	575,085,436	0.18%	443,850,000	0.13%	345,482,900	0.18%	415,260,000	0.14%	363,000,000		UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERA SIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	41 Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJA AN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	Urusan Tenaga Kerja	0	1.36	99,889,671	4.8	337,365,000	4.8	241,642,800	4.8	287,494,000	4.8	335,294,000	20.56	DISNAKER
	42 Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN	Persentase produk sumber daya mineral yang disertifikasi	Urusan Perindustria n	0.67	0.68	0	0.7	280,000,000	0.71	170,000,000	0.72	180,000,000	0.74	190,000,000	0	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALI AN MUTU

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	saing sektor sumber daya mineral	PENGENDALIAN MUTU PRODUK															
43	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Prosentase Jumlah Kebijakan pembangunan Sumber Daya Mineral yang diimplementasika n	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	73	70	1,575,349,600	72	829,500,000	73	870,975,000	74	914,523,750	75	960,249,938	75	BIRO EKONOMI
		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi disektor sumber daya mineral	Urusan Penanaman Modal	N.A	0		0		3	1,795,000,000	0		0		0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pertambahan Jumlah UKM yang bermitra dengan investor sumber daya mineral	Urusan Penanaman Modal	N.A					1	342,500,000	1	352,000,000	0.381	260,833,333		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan jumlah investor sumber daya mineral	Urusan Penanaman Modal	N.A	2	880,921,250	3	232,375,050	3	243,750,000	4	257,500,100	4	271,250,000	16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	Urusan Penanaman Modal	N.A	0.43%	57,692,452	0.44%	263,750,000	0.45%	298,750,000	0.46%	342,500,000	0.47%	346,750,000	0.47%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Presentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral	Urusan Penanaman Modal	75%	78%	1,314,464,000	79%	2,165,000,000	82%	2,525,000,000	84%	2,240,000,000	86%	2,305,000,000	86%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sasaran : Meningkatnya pembangunan berbasis industri			Persentase Pertumbuhan 1 Produksi sektor industri pengolahan			2.67	28,303,173,815	2.73	80,101,353,988	2.78	152,206,029,868	2.84	151,573,482,982	2.89	140,558,702,527		
Program Pengembangan 1 Kawasan industri berbasis potensi daerah							28,303,173,815		80,101,353,988		152,206,029,868		151,573,482,982		140,558,702,527		
	44 Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Lahan bersertifikat untuk kepentingan di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	Urusan Pertanahan	N.A			50	25,000,000,000	50	25,000,000,000					50,000,000,000	DINAS PUPR
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	750,000,000	25%	8,825,000,000	26%	1,707,500,000	11,282,500,000	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	550,000,000	20%	5,055,000,000	21%	560,500,000	6,165,500,000	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan ndustri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	-	5%	350,000,000.00	35%	2,450,000,000.00	70%	2,695,000,000.00	100%	2,310,000,000.00	7,805,000,000	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN	Pertumbuhan Jumlah Industri di	Urusan Perindustria	N.A	0	541,699,333	1	550,000,000	1	606,666,667	1	766,666,667	1	850,000,000		DISPERINDA G

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	n													
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan	Urusan Perhubunga n	N.A	10%	743,718,500	30%	2,250,000,000	30%	2,300,000,000					70%	DISHUB
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	21,555,429	30%	22,633,200	35%	23,764,860	40%	24,953,103	40%	26,200,758	45%	BAPPEDA
	45 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri terpadu air kelik	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	600,000,000	25%	8,660,000,000	26%	1,526,000,000	10,786,000, 000	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan strategis industri terpadu air kelik	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	480,000,000	20%	5,048,000,000	21%	552,800,000	6,080,800,0 00	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan strategis industri terpadu air kelik	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	-	5%	350,000,000	35%	2,450,000,000.00	70%	2,695,000,000.00	100%	2,310,000,000.00	7,805,000,0 00	DINAS PUPR
			Persentase penvediaan	Urusan Pekerjaan	0	0	-	5%	250,000,000	50%	2,500,000,000.00	100%	2,750,000,000.00			5,500,000,0 00	DINAS PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			volume air baku di kawasan strategis industri terpadu air kelik	Umum dan Penataan Ruang													
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik yang digunkan untuk perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada					ada	1,000,000,000.00						DLH
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	Urusan Perhubunga n	N.A			10%	375,000,000	20%	750,000,000	20%	900,000,000			50%	DISHUB
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Air Kelik yang diimplementasika n	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A					50	1,500,000,000	75	500,000,000	100	1,000,000,000	100	DINAS PUPR
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK) yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	21,555,429	30%	22,633,200	35%	23,764,860	40%	24,953,103	40%	26,200,758	40%	BAPPEDA
	46 Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan	88.78%	89.78 %	4,323,300,000	90.78 %	13,870,579,800	91.78 %	15,257,637,780	92.78 %	16,783,401,558	93.78 %	18,461,741,714	94.78%	DINAS PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Tanjung Berikat		Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	Ruang													
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.00%	86.00 %	5,189,562,171	87.00 %	11,208,518,388	88.00 %	12,329,370,227	89.00 %	13,562,307,250	90.00 %	14,918,537,975	91.00%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Presentase luas areal kawasan hutan yang dikelola didi Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	Urusan Kehutanaan			250,000,000		250,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		DINAS KEHUTANAA N
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	ada	900,000,000										DLH
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Urusan Perhubunga n	N.A			20%	1,800,000,000	20%	2,000,000,000			30%	3,000,000,000	20%	DISHUB
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Darat menuju Kawasan	Urusan Perhubunga n	N.A			25%	3,000,000,000	25%	3,100,000,000			50%	4,500,000,000	25%	DISHUB

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat														
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP)Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang diimplementasika n	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	75%	500,000,000	100%	1,000,000,000							100%	DINAS PUPR
			Persentase tersedianya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum di kawasan Industri dan pelabuhan tanjung Berikat	Urusan Pertanahan	N.A					25%	20,000,000,000	50%	20,000,000,000	100%	20,000,000,000	100%	DINAS PUPR
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat yang terintegrasi dalam Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencana an)	10%	25%	21,555,429	30%	22,633,200	35%	23,764,860	40%	24,953,103	40%	26,200,758	40%	BAPPEDA
	47 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	600,000,000	25%	8,660,000,000	26%	1,526,000,000	27%	DINAS PUPR
			Presentase panjang jembatan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	480,000,000	20%	5,048,000,000	21%	552,800,000	22%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud vana terbangun di	Urusan Pekerjaan Umum dan	0	0	-	5%	350,000,000.00	35%	2,450,000,000.00	70%	2,695,000,000.00	100%	2,310,000,000.00	100%	DINAS PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			kawasaan Strategis Industri Sadai	Penataan Ruang													
			Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Sadai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	-	5%	250,000,000.00	50%	2,500,000,000.00	100%	2,750,000,000.00				DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase peningkatan sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Strategis Industri Sadai	Urusan Perhubunga n	N.A									50%	2,350,000,000	50%	DISHUB
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) KIPT Sadai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50%	75%	500,000,000	100%	1,000,000,000.00								DINAS PUPR
			Persentase Tersediannya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum diKIPT sadai	Urusan Pertanahan	N.A					25%	15,000,000,000	50%	15,000,000,000	100%	15,000,000,000	100%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai	Urusan Perindustria n	N.A	0	541,699,333	1	550,000,000	1	606,666,667	1	766,666,667	1	850,000,000		DISPERINDA G
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	ada	900,000,000										DLH
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pendoembangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	10%	25%	21,555,429	30%	22,633,200	35%	23,764,860	40%	24,953,103	40%	26,200,758	45%	BAPPEDA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		KEWILAYAHAN	Kawasan Strategis Industri Sadai yang terintegrasi dalam dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	(Perencana an)													
	48 Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Urusan Perhubunga n	N.A		0		0	30%	2,250,000,000		-	30%	2,350,000,000	60%	DISHUB
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.36%	88.36 %	13,263,718,000	89.36 %	14,590,089,800	90.36 %	16,049,098,780	91.36 %	25,654,008,658	92.36 %	20,219,409,524	93.36%	DINAS PUPR
			Persentase Panjang jembatan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.36%					90.36 %	16,049,098,780			92.36 %	20,219,409,524	93.36%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat (Ton)	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	10	0	120	300,000,000	160	310,000,000	220	320,000,000	300	325,000,000	300	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A			2,75	610,000,000	3	1,220,000,000	3,25	1,220,000,000	3,55	1,830,000,000	3,55	DKP

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat														
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1%	1%	0	1%	34,000,000	1%	42,000,000	1%	28,000,000	1%	48,000,000	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanaan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Urusan Perindustria n	N.A	0	541,699,333	1	550,000,000	1	606,666,667	1	766,666,667	1	850,000,000		DISPERINDA G
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	25%		100%	750,000,000							100%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada			Ada	750,000,000								DLH
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan Kawasaan strategis Industri Perikanaan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu terintegrasi dalam dokumen perencanaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	21,555,429	30%	22,633,200	35%	23,764,860	40%	24,953,103	40%	26,200,758	40%	BAPPEDA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out- ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Renstra dan renja PD														
	49 Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri yang memproduksi	Urusan Perindustria n	N.A												DISPERINDA G
Sasaran : Terwujudnya kemandirian energi			1 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrika n			17.34	12,650,457,597	19.59	15,659,645,145	22.14	15,735,960,735	25.02	15,805,758,772	28.27	15,829,046,711		
1 Program Pengembangan Kemandirian Energi							12,650,457,597		15,659,645,145		15,735,960,735		15,805,758,772		15,829,046,711		
	50 Pemenuhan Energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	Persentase penggunaan EBT	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	6.81%	6.82%	12,118,110,000	6.83%	15,000,000,000	6.84%	15,000,000,000	6.85%	15,000,000,000	6.86%	15,000,000,000	6.86%	ESDM
			Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai standar	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	40%	50%	150,000,000	60%	250,000,000	65%	250,000,000	70%	250,000,000	80%	250,000,000	80%	ESDM
			Persentase perusahaan di bidang ketenagalistrikan yang sesuai standar yang diinginkan	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	40%	50%	150,000,000	60%	200,000,000	65%	250,000,000	70%	300,000,000	80%	300,000,000	80%	ESDM
		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan kemandirian energi yang terintegrasi dalam	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	56,804,900	30%	59,645,145	35%	62,627,402	40%	65,758,772	40%	69,046,711	45%	BAPPEDA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD														
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang kemandirian energi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	10%	25%	175,542,697	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Prosentase Jumlah Kebijakan Sumber daya energi yang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	NA	NA		80%		80%		80%		80%			BIRO EKONOMI
Tujuan : Meningkatkan pendapatan Pemerintah dan masyarakat			1 Pengeluaran pemerintah perkapita			1,8	10,971,060,582	1,9	13,476,838,284	2	11,988,005,382	2,1	13,619,100,005	2,2	15,160,310,363		
Sasaran : Meningkatkan belanja pemerintah Daerah			1 Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah			5.6	10,971,060,582	5.65	13,476,838,284	5.70	11,988,005,382	5.75	13,619,100,005	5.80	15,160,310,363		
1 Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah							10,971,060,582		13,476,838,284		11,988,005,382		13,619,100,005		15,160,310,363		
	51 Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	26.05%	23.76 %	2,808,900,000	24.19 %	2,506,533,250	24.62 %	311.446.388	25.05 %	2,701,151,322	25.48 %	3,226,198,630	25.48%	BAKUDA
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN	Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	73.95%	76.24 %	1,317,000,000.00	75.81 %	1,511,430,825.00	75.38 %	1,642,050,038.00	74.95 %	1,486,275,041.00	74.52 %	1,932,354,545.00	74.52%	BAKUDA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		LAIN LAIN YANG SAH															
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing	Urusan Tenaga Kerja	500,000,000	100%	150,000,000	150%	200,000,000	200%	250,000,000	250%	275,000,000	300%	300,000,000	300%	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab lingkungan	Urusan Lingkungan Hidup	1,000,000,000	0.05%	2,020,760,182	1%	2,323,874,209	1.15%	2,672,455,341	2%	3,073,323,642	2.50%	3,534,322,188	2.50%	DLH
		PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORUIM KESEHATAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Kesehatan	Urusan Kesehatan	80%	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	600,000,000	100%	650,000,000	100%	700,000,000	100%	DINKES
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ASN	Persentase kontribusi penyelenggaraan diklat terhadap PAD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	0,10%	0,10%	1.600.000.000	0,16%	2.400.000.000	0,19%	3.100.000.000	0,19%	4.000.000.000	0,19%	5.200.000.000	0,19%	BKPSDM
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	10%	200,000,000	20%	220,000,000	25%	242,000,000	30%	266,200,000	35%	292,820,000	35%	PUPR
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PERALATAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Pengujian Bina Marga	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	10%	150,000,000	20%	165,000,000	25%	181,500,000	30%	199,650,000	35%	219,615,000	35%	UPTD PENGAWASA N DAN PERALATAN BELITUNG
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Pertambahan Jumlah DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam) Mineral Logam	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	77,7 Miliar	70 Miliar	103,700,000	80 Miliar	250,000,000	80 Miliar	250,000,000	80 Miliar	275,000,000	80 Miliar	300,000,000	390 Miliar	DINAS ESDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	Pertambahan Jumlah lifting MIGAS Babel	Urusan Energi dan Sumber Daya	480 Ribu Barel	460 Ribu Barel	125,850,000	440 Ribu Barel	300,000,000	420 Ribu Barel	350,000,000	400 Ribu Barel	350,000,000	400 Ribu Barel	350,000,000	2,12 juta Barel	DINAS ESDM

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Mineral													
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase pertumbuhan pendapatan Daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	4 Miliar	1,5 Miliar	0	1,7 Miliar	200,000,000	1,9 Miliar	200,000,000	2 Miliar	200,000,000	2 Miliar	200,000,000	9,1 Miliar	DINAS ESDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertambahan pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)	Urusan Kelautan dan Perikanan		368 juta	1,941,740,000	420 juta	2,200,000,000	441 juta	2,400,000,000	463 juta	2,600,000,000	468	2,600,000,000	2,192	DKP
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	Urusan Kelautan dan Perikanan	25 juta	25 juta	863,730,400	26,25 juta	1,850,000,000	28,88 juta	1,900,000,000	31,76 juta	192,500,000	34,94 juta	105,000,000	146,83 juta	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN LAUT	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	Urusan Kelautan dan Perikanan	150 juta	75 juta	789,380,000	165 juta	1,200,000,000	173,25 juta	1,300,000,000	187,11 juta	1,350,000,000	205,82 juta	1,400,000,000	881,18 juta	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARA AN	Prosentase pertambahan pendapatan dari pengelolaan perhubungan udara	Urusan Perhubunga n	N.A			20%	35,240,000,000	25%	35,000,000,000	10%	800,000,000			65%	DISHUB
			2 Pendapatan perkapita Masyarakat			50,732	128,665,286,751	53,015	232,086,152,905	55,401	243,759,200,028	57,894	261,605,424,038	60,499	307,114,880,352		
Sasaran : Menurunnya angka Pengangguran			Persentase 1 Angka Pengangguran			5.7	31,845,014,709	5.6	49,003,548,042	5.5	44,427,409,856	5.3	39,719,072,490	5.3	54,839,686,614		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penciptaan 1 Peluang lapangan pekerjaan dan usaha							31,845,014,709		49,003,548,042		44,427,409,856		39,719,072,490		54,839,686,614		
	52 Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Urusan Tenaga Kerja	8	14.29	366,450,473	17.14	1,935,000,000	20	1,485,000,001	22.86	2,000,000,000	25.71	1,560,000,000	25.71	DISNAKER
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	Urusan Perindustria n	5.03%	5.10%	3,308,181,750	5.17%	4,951,778,000	5.24%	5,406,876,450	5.31%	5,903,681,733	5.38%	6,071,749,571	5.38%	DISPERINDA G
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda yang bekerja	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	N.A	10.20 %	300,770,106	10.20 %	330,847,117	10.20 %	363,931,828	10.20 %	400,325,011	10.20 %	440,357,512	10.20%	DISKEPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	6.79%	182,230,000	6.82%	500,000,000	6.84%	600,000,000	6.86%	700,000,000	6.87%	800,000,000	6.87%	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	1.12%	49,940,000	1.14%	3,054,000,000	1.16%	3,474,000,000	1.18%	3,744,000,000	1.20%	4,044,000,000	1.20%	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	15%	50,000,000	25%	60,000,000	35%	70,000,000	45%	80,000,000	55%	90,000,000	55%	DISKOMINFO
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.51%	93.51 %	8,630,639,498	94.51 %	15,693,703,448	95.51 %	17,063,073,793	96.51 %	20,769,381,172	97.51 %	34,846,319,289	98.51%	DINAS PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out- ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8%	10%	1,872,543,635.00	12%	2,500,000,000.00	14%	3,000,000,000.00	16%	3,500,000,000.00	18%	4,000,000,000	18%	DINAS PUPR
		PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase wirausaha	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15%	15%	15,530,000,000	15%	18,200,000,000	15%	11,055,600,000	15%	550,000,000	15%	800,000,000	15%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	60 Orang	100 Orang	699,412,383	100 Orang	734,383,002	100 Orang	771,102,152	100 Orang	809,657,260	100 Orang	850,140,123	560 Orang	DINAS PMD
		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase kesesuaian perencanaan penanggulangan pengangguran yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	10%		71,006,167	30%	74,556,475	35%	78,284,299	40%	82,198,514	40%	86,308,439	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	persentase rekomendasi kajian tentang penanggulangan pengangguran yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	10%	25%	175,542,697	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA
	53 Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.29	8.08	608,298,000.00	7.73	819,280,000.00	7.52	886,208,000.00	7.31	989,828,800.00	7.01	1,040,811,680	6.68	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALI AN PENDUDUK KB
Sasaran : Menurunnya angka kemiskinan			1 Persentase			4.17	56,248,216,686.00	4.15	81,038,029,850.00	4.10	105,467,086,648.00	4.05	114,658,422,069.00	4.0	128,221,797,483.00		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Angka Kemiskinan														
1 Program Penanggulangan Kemiskinaan dan PMKS							56,248,216,686.00		81,038,029,850.00		105,467,086,648.00		114,658,422,069.00		128,221,797,483.00		
	54 Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	Urusan Sosial	N.A	19.64	14,116,988,000	19.64	15,131,000,000	19.64	15,131,000,000	20.55	15,832,000,000	20.55	15,832,000,000	100	DINSOS
		PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0%	1.52%	11,759,260,000	2.55%	23,248,486,250	2.55%	42,597,259,188	2.55%	47,736,498,066	2.55%	53,517,087,776	2.55%	DINAS PRKP
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	Urusan Pendidikan	100	100	2,924,400,000	100	2,982,000,000	100	3,040,800,000	100	3,100,800,000	100	3,162,000,000	100	DINDIK
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	Urusan Pendidikan	100	100	2,128,800,000	100	2,170,800,000	100	2,214,000,000	100	2,257,200,000	100	2,301,600,000	100	DINDIK
		PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase kepesertaaan JKN	Urusan Kesehatan	78	78	17,725,148,408	92	20,127,800,000	100	22,140,580,000	100	24,354,638,000	100	26,790,101,800	100	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	Urusan Kesehatan			225,000,000										DINAS KESEHATAN
	55 Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	Urusan Pemberday aan Perempuan dan Perlindunga n Anak	10.69	10.68	562,426,000	9.47	343,668,600	8.86	378,035,460	8.25	415,839,003	7.64	457,422,907	7.64	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDAL AN PENDUDUK KB

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	Urusan Sosial	5.4	5.4	1,300,000,000	18.15	3,500,000,000	24.27	4,832,000,000	23.99	4,930,000,000	28.2	6,018,000,000	100	DINSOS
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	Urusan Perdaganga n	0	10%	339,742,500	10%	660,320,000	10%	750,352,000	10%	821,387,000	10%	910,525,000		DISPERINDA G
		PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	NTP subsektor Tanaman Pangan	Urusan Pertanian	93.08	94.08	473,238,750	95.08	1,046,477,500.00	97.08	1,097,030,000.00	98.08	1,152,530,000.00	100.08	1,203,030,000	100.08	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Peningkatan Nilai tukar petani (NTP) subsektor tanaman pangan dan holtikultura	Urusan Pertanian	100.35	100.55	473,238,750	100.75	1,046,477,500	100.95	1,097,030,000.00	101.15	1,152,530,000.00	101.35	1,203,030,000	101.35	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor perkebunan	Urusan Pertanian	97	99	780,000,000	101	5,396,000,000	102	5,851,000,000	104	6,306,000,000	106	9,821,000,000	106	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor Peternakan	Urusan Pertanian	92.86	93.86	850,000,000	94.86	3,590,000,000	95.86	4,085,000,000	96.86	4,530,000,000	97.86	4,805,000,000	97.86	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinaan yang dapat diakses oleh masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	10%	15%	50,000,000	25%	60,000,000	35%	70,000,000	45%	80,000,000	55%	90,000,000	55%	DISKOMINFO
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	Urusan Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana	11.3	10.69	1,265,596,000	10.08	1,735,000,000	9.47	2,183,000,000	8.86	1,989,000,000	8.25	2,111,000,000	8.25	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALI AN PENDUDUK KB
		PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJA AN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja	N.A		320,008,756		400,000,000		450,000,000		500,000,000		545,000,000		DISNAKER

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		SOSIAL															
			persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja	45.70%	50%	368,121,200	65%	1,303,540,000	75%	1,104,452,000	80%	1,048,063,000	90%	1,642,986,000	90%	DISNAKER
			persentase penurunan kecelakaan kerja	Urusan Tenaga Kerja	0.36	0.34	34,448,000	0.32	580,800,000	0.3	337,410,000	0.3	595,000,000	0.3	240,000,000	0.3	DISNAKER
		PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	10%	25%	376,257,625	30%	421,154,145	35%	427,211,852	40%	433,572,445	40%	440,251,067	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	persentase rekomendasi kajian tentang penanggulangan kemiskinan yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	10%	25%	175,542,697	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA
Sasaran : Menurunnya angka Inflasi			1Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			6.42	38,797,963,034	6.31	97,743,420,868	6.24	89,862,158,339	6.17	102,817,357,034	6.02	120,012,145,188		
1Program peningkatan pengendalian inflasi Dearah							38,797,963,034		97,743,420,868		89,862,158,339		102,817,357,034		120,012,145,188		
	56Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	Urusan Perindustrian	5	10	765,500,000	14	2,711,000,000	18	2,908,000,000	27	4,280,000,000	31	4,495,000,000	31	DISPERINDA G
			Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20	Urusan Perindustrian	0	20	1,438,592,000	22	2,700,000,000	25	3,025,000,000	29	3,635,000,000	34	3,655,000,000	34	DISPERINDA G

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			= Tahu; 21 - 40 = Paham)														
			Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrologian yang memenuhi standar	Urusan Perindustria n	0	10	219,175,000	20	555,000,000	50	615,000,000	80	700,000,000	100	602,000,000	100	DISPERINDA G
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	Urusan Perdagangan n	857,937	860	428,951,000	862	600,000,000	862	850,000,000	863	1,000,000,000	870	1,150,000,000	870	DISPERINDA G
			Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu	Urusan Perdagangan n	11 barang	73	4,570,965,000	83	4,710,000,000	89	5,004,000,000	95	5,247,000,000	100	5,417,000,000	100	DISPERINDA G
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan memanfaatkan	Urusan Perdagangan n	87	0	19,500,000,000	63	30,000,000,000	12	5,500,000,000	0	10,000,000,000	25	12,000,000,000	25	DISPERINDA G
			Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi gudang	Urusan Perdagangan n	0	0	1,500,000,000	20	7,000,000,000	40	11,000,000,000	20	4,000,000,000	20	4,000,000,000	20	DISPERINDA G
			Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang	Urusan Perdagangan n	N.A			1	156,000,000	1	234,000,000	1	254,000,000	1	315,000,000	1	DISPERINDA G
			Persentase peningkatan promosi produk dalam negeri	Urusan Perdagangan n	10	10	182,085,000	10	1,000,000,000	10	1,500,000,000	10	2,200,000,000	10	3,000,000,000	10	DISPERINDA G
		PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase rekomendasi komoditas penyumbang inflasi yang paling tinggi dengan intervensi program/kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	90%	90%		100%		100%		100%		100%			BIRO EKONOMI

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal	Urusan Perhubungan	N.A	10%	375,000,000	20%	1,400,000,000	10%	1,000,000,000					10%	DINAS PERHUBUNGAN
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.51%	93.51 %	7,678,434,316	94.51 %	34,146,277,748	95.51 %	44,560,905,522	96.51 %	56,016,996,075	97.51 %	68,618,695,682	97.51%	DINAS PUPR
		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase kesesuaian perencanaan pengendalian Inflasi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	10%	25%	71,006,167	30%	74,556,475	35%	78,284,299	40%	82,198,514	40%	86,308,439	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	persentase rekomendasi kajian tentang pengendalian inflasi yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	10%	25%	175,542,697	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA
	57 Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai besar	Urusan Pertanian	2,284.80	2,528.54	423,333,000	2,813.28	1,046,477,500	3,113.22	1,097,030,000.00	3,443.52	1,152,530,000.00	3,769.61	1,203,030,000.00	3,769.61	DINAS PERTANIAN
			Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai rawit	Urusan Pertanian	1,916.10	2,257.43	423,333,000	2,651.13	1,046,477,500	3,095.08	1,097,030,000.00	3,606.04	1,152,530,000.00	4,118.19	1,203,030,000.00	4,118.19	DINAS PERTANIAN
			Pertambahan jumlah volume produksi	Urusan Pertanian	65.4	81.72	423,333,000	98.11	1,046,477,500	114.51	1,097,030,000.00	164.76	1,152,530,000.00	199.96	1,203,030,000.00	199.96	DINAS PERTANIAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			komoditas bawang merah														
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kontribusi komuditas ikan dalam menyumbang inflasi	Urusan Kelauatan dan Perikanan		11.11	0	22.22	5,100,000,000	22.22	6,120,000,000	33.33	7,344,000,000	55.56	8,812,800,000	55.56	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen	Urusan Pangan	CV Beras ≤ 1%	CV Beras ≤ 5%	622,712,854	CV Beras ≤ 5%	4,301,154,145	CV Beras ≤ 5%	4,002,545,185	CV Beras ≤ 5%	4,410,572,445	CV Beras ≤ 5%	4,041,251,067	CV Beras ≤ 5%	DINAS PANGAN
	CV Cabe≤ 17,47 %				CV Cabe≤ 35%	CV Cabe≤ 35%		CV Cabe≤ 35%		CV Cabe≤ 35%							
	CV Daging Ayam 8,61 %				CV Daging Ayam 10%	CV Daging Ayam 10%		CV Daging Ayam 10%		CV Daging Ayam 10%							
Sasaran : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk			1 Laju pertumbuhan penduduk			2.09	1,774,092,322	2.09	4,301,154,145	2.08	4,002,545,185	2.08	4,410,572,445	2.08	4,041,251,067		
Program Pengendalian 1 jumlah dan laju pertumbuhan penduduk							1,774,092,322		4,301,154,145		4,002,545,185		4,410,572,445		4,041,251,067		
	58 Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	PROGRAM PENGADMINISTRA SIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI	Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai KTP	Urusan Administrasi Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	N.A	N.A	71,006,000	N.A	410,000,000	N.A	440,000,000	N.A	470,000,000	N.A	500,000,000	N.A	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDAL AN PENDUDUK KB
			Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah meninggal yang memiliki akte kematian	Urusan Administrasi Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	N.A	N.A	0	N.A	270,000,000	N.A	295,000,000	N.A	320,000,000	N.A	345,000,000	N.A	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDAL AN PENDUDUK KB
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	Persentase unmeet need	Urusan Pengendalia n Penduduk dan	8	7.65	0	7.48	415,000,000	7.39	431,000,000	7.22	199,000,000	7.13	0	7.13	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDAL AN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		KELUARGA BERENCANA		Keluarga Berencana													PENDUDUK KB
			presentase KB MKJP	Urusan Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana	7.5	8.3	1,336,036,000	8.9	2,935,000,000	9.7	2,536,000,000	10.5	3,098,000,000	11.3	2,846,000,000	11.3	DINAS PPA DUKCAPIL, PENGENDALI AN PENDUDUK KB
		PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan pengendalian jumlah penduduk yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	76,257,625	30%	121,154,145	35%	127,211,852	40%	133,572,445	40%	140,251,067	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	persentase rekomendasi kajian tentang kependudukan yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Penelitian dan pengemban gan)	10%	25%	175,542,697	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA
		PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas Ibu Hamil	Urusan Kesehatan			115,250,000										DINKES
Misi 2 : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;							88,591,071,328		147,824,850,000		206,622,182,500		246,817,467,625		202,424,456,206		
Tujuan : Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah			Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi			7.58	88,591,071,328	8	147,824,850,000	7.87	206,622,182,500	7.97	246,817,467,625	8	202,424,456,206		
Sasaran : Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah			Terbangunnya 1 Daerah irigasi (ha)			1,084	10,300,000,000	1,135	20,300,000,000	1,187	22,250,000,000	1,24	24,395,000,000	1,294	26,754,500,000		
Program Pemenuhan infrastruktur pertanian							10,300,000,000		20,300,000,000		22,250,000,000		24,395,000,000		26,754,500,000		
	59	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.80%	39.32 %	9,500,000,000	55%	19,500,000,000	65%	21,450,000,000.00	75%	23,595,000,000	85%	25,954,500,000	85%	DINAS PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	pertanian yang modern																
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700,000,000	30	800,000,000	50	800,000,000	75	800,000,000	100	800,000,000	25	800,000,000	25	DINAS PUPR
			2 Ketersediaan air baku (m3)			N.A	0	N.A	4,000,000,000	90	4,400,000,000	145	4,840,000,000	175	3,300,000,000		
1 Program Pemenuhan infrastruktur air baku							0		4,000,000,000		4,400,000,000		4,840,000,000		3,300,000,000		
	60 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan volume air baku	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	-	10%	4,000,000,000.00	20%	4,400,000,000.00	30%	4,840,000,000.00	40%	3,300,000,000.00	40%	DINAS PUPR
Sasaran : Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat							15,327,806,802		49,744,200,000		64,200,000,000		71,709,176,000		48,400,000,000		
			1 Persentase akses jalan lingkungan yang memadai			14%	6,057,761,802	34%	33,744,200,000	54%	44,600,000,000	86%	50,349,176,000	100%	33,200,000,000		
1 Program Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat							6,057,761,802		33,744,200,000		44,600,000,000		50,349,176,000		33,200,000,000		
	61 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	N.A	12%	5,602,011,802	33%	9,600,000,000	56%	10,400,000,000	88%	14,869,176,000	100%	5,600,000,000	80%	DINAS PRKP
			Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	N.A	7%	455,750,000	26%	144,200,000	63%	1,800,000,000	86%	440,000,000	100%	1,800,000,000	100%	DINAS PRKP

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out- come)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1 Persentase kawasan permukiman yang tertata			16%	0	38%	12,000,000,000	56%	15,200,000,000	89%	16,520,000,000	100%	11,900,000,000		
1 Program Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat							0		12,000,000,000		15,200,000,000		16,520,000,000		11,900,000,000		
	62 Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	N.A		0	25%	0	50%	2,000,000,000	75%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	DINAS PRKP
			2 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi			N.A	9,270,045,000	N.A	4,000,000,000	90	4,400,000,000	145	4,840,000,000	175	3,300,000,000		
2 Program Peningkatan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat							9,270,045,000		4,000,000,000		4,400,000,000		4,840,000,000		3,300,000,000		
	63 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARA AN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	Urusan Komunikasi dan Informatika	23%	51%	9,270,045,000	66%	4,000,000,000	86%	4,400,000,000	100%	4,840,000,000	100%	3,300,000,000	100%	KOMINFO
Sasaran : Meningkatnya konektivitas antar wilayah			1 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut			0.17	750,000,000	0.18	2,150,000,000	0.19	3,450,000,000	0.20	5,140,000,000	0.21	0		
1 Program pengembangan konektivitas perhubungan laut							750,000,000		2,150,000,000		3,450,000,000		5,140,000,000		0		
	64 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/derma ga yang layak	Urusan Perhubunga n	N.A	15%	750,000,000	17%	2,150,000,000	23%	3,450,000,000	30%	5,140,000,000		0	95%	DINAS PERHUBUNGAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	pelabuhan																
			2 Persentase armada pengangkutan			0.33	16,660,264,526	0.34	800,000,000	0.35	21,600,000,000	0.36	35,000,000,000	0.37	3,600,000,000		
1 Program pengembangan konektivitas perhubungan darat							16,660,264,526		800,000,000		21,600,000,000		35,000,000,000		3,600,000,000		
	65 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi	Urusan Perhubunga n	N.A					2%	600,000,000	10%	35,000,000,000	3%	3,600,000,000	15%	DINAS PERHUBUNG AN
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARA AN	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroprasional	Urusan Perhubunga n	N.A	40%	16,463,166,400	10%	800,000,000	50	21,000,000,000		0		0	100%	DISHUB
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan infrastruktur dan Konektivitas antar wilayah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	21,555,429	30%	22,633,200	35%	23,764,860	40%	24,953,103	40%	26,200,758	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	persentase rekomendasi kajian infrastruktur dan konektifitas yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Penelitian dan pengemban gan)	10%	25%	175,542,697	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA
			3 Persentase jalan kondisi mantap			93.50	45,553,000,000	94.50	70,830,650,000	95.50	90,722,182,500	96	105,733,291,625	96.50	120,369,956,206		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program 1 Pembangunan jalan dan jembatan							45,553,000,000		70,830,650,000		90,722,182,500		105,733,291,625		120,369,956,206		
	66 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase jalan provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A		30,553,000,000		50,830,650,000		65,222,182,500		75,733,291,625		85,369,956,206		DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A		15,000,000,000		20,000,000,000		25,500,000,000		30,000,000,000		35,000,000,000		DINAS PUPR
Misi 3 : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;							103,815,757,429		178,738,303,410		192,880,215,228		206,123,005,244		217,533,123,105		
Tujuan : Meningkatnya Pendidikan Masyarakat			Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki- laki, rata-rata lama sekolah perempuan)			8,76; L:8,96 ; P: 7,98	103,815,757,429	8,83; L:8,98 ; P:7,99	178,738,303,410	8,89; L:8,99 ; P:8,00	192,880,215,228	8,92; L:9,00 ; P:8,05	206,123,005,244	9; L:9,00 ; P:8,10	217,533,123,105		
Sasaran : Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat			Angka harapan lama sekolah (Angka harapan lama sekolah, Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)			11,84; L:12,0 8; P:12,2 1	103,815,757,429	11,89; L: 12,37; P:12,4 6	178,738,303,410	11,94; L:12,5 1; P:12,6 3	192,880,215,228	12,00; L:12,6 9; P:12,7 9	206,123,005,244	12,00; L:12,8 1; P:12,9 3	217,533,123,105		
Program 1 Peningkatkan partisipasi sekolah masyarakat							16,700,000,000		86,079,905,882		92,939,529,412		98,575,623,529		104,873,341,176		
	67 peningkatan akses pelayanan pendidikan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	APK SMA	Urusan Pendidikan	33.13%	35.29 %	7,000,000,000	38.88 %	37,000,000,000	40.63 %	39,500,000,000	43.43 %	42,000,000,000	43.94 %	45,000,000,000	43.94%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN	APK SMK	Urusan Pendidikan	31.44%	34.98 %	6,000,000,000	38.38 %	35,479,905,882	40.63 %	38,739,529,412	44.32 %	40,675,623,529.00	48.62 %	42,523,341,176	48.62%	DINAS PENDIDIKAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN															
		PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	APK SLB	Urusan Pendidikan			3,700,000,000		13,600,000,000		14,700,000,000		15,900,000,000		17,350,000,000		DINAS PENDIDIKAN
Program Peningkatkan 2 Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat							87,115,757,429		92,658,397,528		99,940,685,816		107,547,381,715		112,659,781,929		
	68 peningkatan mutu layanan pendidikan.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	Urusan Pendidikan	92,48%	95%	1,727,664,667	97%	7,500,000,000	100%	9,000,000,000	100%	10,200,000,000	100%	11,100,000,000	100%	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	Urusan Pendidikan	34.82%	36%	1,727,664,667	40%		45%		50%		60%		60%	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase guru dengan nilai rata- rata uji kompetensi diatas 50	Urusan Pendidikan	82.16%	85%	1,727,664,667	90%		95%		100%		100%		100%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase SMA terakreditasi A	Urusan Pendidikan	33,33%	37.88 %	9,500,000,000	42.42 %		50%		56.06 %		60.61 %		60.61%	DINAS PENDIDIKAN
			Rata-rata nilai UN SMA	Urusan Pendidikan	6.2	6.3	3,000,000,000	6.5		6.8		7		7.3		7.3	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK terakreditasi A	Urusan Pendidikan	31.48%	33.93 %	2,232,178,077	38.60 %		44.83 %		51.72 %		60.34 %		60.34%	DINAS PENDIDIKAN
			Rata-rata nilai UN	Urusan	6.2	6.4	3,483,710,000	6.5		6.7		6.8		7		7	DINAS

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			SMK	Pendidikan													PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase SLB terakreditasi A	Urusan Pendidikan	77.78	100%	1,500,000,000	100%		100%		100%		100%		100%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	Urusan Pemuda dan olahraga	N.A	5.08%	5,474,531,075	5.08%	6,208,984,183	5.08%	6,829,982,601	5.08%	7,512,870,861	5.08%	8,264,157,947	5.08%	DISKEPORA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	Urusan Pemuda dan olahraga	N.A	5.08%	150,000,000	5.08%	165,000,000	5.08%	181,500,000	5.08%	199,650,000	5.08%	219,615,000	5.08%	DISKEPORA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pemuda Berprestasi	Urusan Pemuda dan olahraga	N.A	22.87 %	3,421,427,000	22.87 %	4,099,069,700	22.87 %	4,508,976,670	22.87 %	4,959,874,337	22.87 %	5,455,861,771	22.87%	DISKEPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi;	Urusan Perpustakaa n	N.A		360,000,000		3,155,000,000		3,527,000,000		3,903,000,000		10,468,000,000		DKPUS
			Pertambahan pengelola perpustakaaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar	Urusan Perpustakaa n	N.A		356,438,800		5,337,177,300		3,832,392,500		4,223,662,125		13,448,707,590		DKPUS
		PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	N.A	8.33%	0	16.67 %	0	16.67 %	0	25.00 %	0	25.00 %	0	25.00%	DISKEPORA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi	Urusan Kepemudaa n dan	N.A	6.41%	100,000,000	6.41%	110,000,000	6.41%	121,000,000	6.41%	133,100,000	6.41%	146,410,000	6.41%	DISKEPORA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	dan berdedikasi yang dibantu	Olahraga													
			Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	N.A												DISKEPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	Urusan Perhubunga n	N.A			5%	12,000,000,000	7%	14,500,000,000	10%	16,000,000,000			23%	DINAS PERHUBUNG AN
			Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		N.A			4%	1,800,000,000	6%	2,400,000,000	6%	2,500,000,000	6	2,600,000,000	22%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	10%	15%	50,000,000	25%	60,000,000	35%	70,000,000	45%	80,000,000	55%	90,000,000	55%	DISKOMINFO
		PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARA AN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	40%	1,676,920,000	80%	1,844,612,000	90%	2,029,073,200	100%	2,231,980,520	100%	2,455,178,572	100%	DISKOMINFO
		PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasika n	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	75	1,476,830,000	80	3,017,010,000	80	3,167,010,000	80	3,317,010,000	85	3,467,010,000	85	BIRO KESRA
			Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A			30 sekola h	434,090,000	30 sekola h	484,090,000	35 sekola h	534,090,000	40 sekola h	584,090,000	40 sekolah	BIRO KESRA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	Urusan Pendidikan	100%	100%	44,434,572,000	100%	46,656,300,200	100%	48,989,115,660	100%	51,428,571,427	100%	54,010,499,982	100%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pembangunan pendidikan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	76,257,625	30%	121,154,145	35%	127,211,852	40%	133,572,445	40%	140,251,067	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang pendidikan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Penelitian dan pengemban gan)	10%	25%	175,542,697	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA
	69 Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAAN PENDIDIKAN KEJURUAAN	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	Urusan Pendidikan	31.48%	33.93 %	2,232,178,077	38.60 %		44.83 %		51.72 %		60.34 %		60.34%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	Urusan Pendidikan	100%	100%	2,232,178,077	100%		100%		100%		100%		100%	DINAS PENDIDIKAN
3 Program Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral							0		0		0		0		0		
	70 Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	APK sekolah kegamaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah			0		0		0		0		0		BIRO KESRA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	bermoral			an													
Misi 4 : Meningkatkan kesehatan masyarakat;							80,374,622,088		107,711,798,599		153,488,028,534		160,538,112,608		167,182,049,273		
Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)			69,98; L: 68,24; P:72,0 0	80,374,622,088	70,16; L:68,3 7; P:72,1 2	107,711,798,599	70,23; L:67,8 9; P: 71,70	153,488,028,534	70,37; L:67,8 6; P:71,7 0	160,538,112,608	70,48; L:68,0 5; P:71,7 8	167,182,049,273		
Sasaran : Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat			Angka 1 Kesehatan Masyarakat			71.6	80,374,622,088	77.58	107,711,798,599	82.97	153,488,028,534	85.92	160,538,112,608	89.98	167,182,049,273		
Program 1 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat							78,983,882,088		107,711,798,599		153,488,028,534		160,538,112,608		167,182,049,273		
	71 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS (Presentase rumah tangga yang berperilaku hidup Bersih dan Sehat (PHBS))	Urusan Kesehatan	N.A	70	1,854,302,504	80	2,373,000,000	90	2,610,000,000	90	2,871,000,000	90	3,158,000,000	90	DINKES
			Angka kematian ibu per kelahiran hidup	Urusan Kesehatan	N.A	23	1,435,172,761	22	1,837,000,000	21	2,020,700,000	20	2,222,770,000	19	2,445,047,000	19	DINKES
			Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Urusan Kesehatan	N.A	7	1,117,376,527	7	1,430,000,000	7	1,573,000,000	7	1,730,300,000	7	1,903,330,000	7	DINKES
			Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	Urusan Kesehatan	N.A	79	1,289,077,330	82	1,650,000,000	84	1,815,000,000	87	1,996,500,000	90	2,196,150,000	90	DINKES
			Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	Urusan Kesehatan	N.A	63	211,185,630	65	417,780,000	70	4,595,880,000	75	5,055,468,000	80	5,561,014,800	80	DINKES
		PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase Puskesmas yang menyelenggara n upaya kesehatan jiwa	Urusan Kesehatan	N.A	23	620,946,398	33	330,000,000	43	363,000,000	53	399,300,000	63	439,230,000	63	DINKES

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Persentase perempuan usia 30 s.d 50 tahun yang dideteksi dini kaner serviks dan payudara	Urusan Kesehatan	N.A	18	128,907,733	23	165,000,000	28	181,500,000	33	199,650,000	38	219,615,000	38	DINKES
			Persentase menurunnya penyakit tidak menular lainnya	Urusan Kesehatan	N.A	33	257,815,466	32	330,000,000	31	363,000,000	30	399,300,000	29	439,230,000	29	DINKES
			Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes Rate minimal 85%)	Urusan Kesehatan	N.A	71	257,815,466	86	330,000,000	86	363,000,000	86	399,300,000	100	439,230,000	100	DINKES
			Prevalensi HIV pada penduduk resiko	Urusan Kesehatan	N.A	10	644,796,480	10	825,000,000	10	908,000,000	10	999,000,000	10	1,098,900,000	10	DINKES
			Persentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria	Urusan Kesehatan	N.A	86	257,815,466	86	330,000,000	100	363,000,000	100	399,300,000	100	439,230,000	100	DINKES
			persentase penanganan penyakit menular lainnya	Urusan Kesehatan	N.A	100	859,384,887	100	1,100,000,000	100	1,210,000,000	100	1,331,000,000	100	1,464,100,000	100	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, PEMUDA DAN PARIWISATA	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS	Urusan Penunjang administrasi	N.A	28 sekola h	384,090,000	30 sekola h	434,090,000	30 sekola h	484,090,000	35 sekola h	534,090,000	40 sekola h	584,090,000	40 sekolah	BIRO KESRA
		PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	N.A	4%	1,473,000,000	9%	1,090,000,000	31%	7,840,000,000	42%	3,840,000,000	51%	3,500,000,000		DINAS PRKP
			Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	35%		0	50%	550,000,000	70%	550,000,000	85%	550,000,000	95%	550,000,000		DINAS PRKP

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Persentase sarana air limbah yang layak	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			0			22%	5,500,000,000	26%	8,000,000,000	24%	7,800,000,000		DINAS PRKP
			Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	83%		0	85%	900,000,000	87%	900,000,000	90%	900,000,000	95%	900,000,000		DINAS PRKP
			Persentase drainase dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	N.A		0			21%	13,000,000,000	22%	14,000,000,000	17%	12,750,000,000		DINAS PRKP
			Persentase drainase dalam kondisi baik di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	N.A	12%	1,035,500,000	30%	1,425,000,000	65%	14,107,500,000	87%	14,107,500,000	100%	14,107,500,000		DINAS PRKP
			Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan Strategis Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	N.A		0			60%	640,000,000	70%	640,000,000	80%	640,000,000		DINAS PRKP
			Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	27%		0	40%	640,000,000	60%	640,000,000	70%	640,000,000	80%	640,000,000		DINAS PRKP
		PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	75	719,672,000	75	1,019,672,000	75	1,169,672,000	80	1,319,672,000	80	1,469,672,000	80%	BIRO KESRA
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi tentang kesehatan masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	15%	50,000,000	25%	60,000,000	35%	70,000,000	45%	80,000,000	55%	90,000,000	55%	KOMINFO
		PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92.50	Urusan Pangan	89.2	89	1,089,715,000	89.7	1,950,000,000	90.5	2,200,000,000	91.5	6,425,000,000	92.5	6,930,007,328	92.5	DINAS PANGAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		KEAMANAN PANGAN															
			persentase pangan yang aman dikonsumsi	Urusan Pangan	78	80	1,320,000,000	83	1,920,000,000	86	2,000,000,000	89	2,100,000,000	92	2,150,000,000	92	DINAS PANGAN
		PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	Urusan Pangan	78	89.5	1,773,600,000	90.5	2,080,000,000	91	2,050,000,000	93	2,200,000,000	96.32	2,750,000,000	96.32	DINAS PANGAN
			Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	Urusan Pangan	N.A	1	540,000,000	1.1	875,000,000	1.1	945,000,000	1.1	965,000,000	1.1	1,085,000,000	1.1	DINAS PANGAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase jumlah industri yang memiliki standar kesehatan industri.	Urusan Perindustria n	0	15	886,801,000	15	1,600,000,000	15	1,775,000,000	15	1,950,000,000	15	1,600,000,000	15	DISPERINDA G
			Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	Urusan Perindustria n	1.5	2.96	676,035,000	4.68	893,638,500	6.71	1,072,366,200	9.02	1,265,839,440	11.61	1,495,007,328	11.61	DISPERINDA G
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS HYGIENIS PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	Urusan Tenaga kerja	N.A	2.73	245,023,309	2.73	220,500,000	2.73	228,600,000	3.2	298,100,000	3.2	298,100,000	3.2	UPTD HYPERKES
		PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan mendukung pembangunan kesehatan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	76,257,625	30%	121,154,145	35%	127,211,852	40%	133,572,445	40%	140,251,067	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang kesehatan yang digunakan sebagai rekomendasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Penelitian dan	10%	25%	175,542,697	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			kebijakan	pengemban gan)													
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase peserta yang megikuti olahraga rekreasi dan tradisional	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	N.A	0.00%	351,036,567	0.00%	386,140,224	0.00%	424,754,246	0.00%	467,229,671	0.00%	513,952,638	0.00%	DISKEPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas	Urusan Perhubunga n	N.A		990,866,000		393,660,000		393,660,000		393,660,000		393,660,000		DISHUB
	72 peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 PKM yang tersertifikasi akreditasi	Urusan Kesehatan	N.A	35.94	1,718,769,773	59.38	2,200,000,000	73.44	2,420,000,000	73.44	2,662,000,000	73.44	2,928,200,000	73.44	DINKES
			Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	Urusan Kesehatan	N.A	64.29	1,718,769,773	71.43	2,200,000,000	71.43	2,420,000,000	71.43	2,662,000,000	71.43	2,928,200,000	71.43	DINKES
			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	Urusan Kesehatan	N.A	60	515,630,932	75	660,000,000	85	726,000,000	95	798,600,000	100	878,460,000	100	DINKES
		PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	Urusan Kesehatan	N.A	9	780,789,200.00	14		17		19		19		19	UPTD BALAI LABORATORI UM KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Presentase Ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit	Urusan Kesehatan	62	70%	5,654,490,000	80%	13,000,000,000	85%	11,993,000,000	90%	12,000,000,000	95%	12,770,000,000	95%	RSUP
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN	LOS (Length of Stay)	Urusan Kesehatan	3 hari	6-9 hari	7,672,373,000	6-9 hari	2,000,000,000	6-9 hari	2,000,000,000	6-9 hari	2,000,000,000	6-9 hari	2,000,000,000	6-9 hari	RSUP
		PROGRAM PENINGKATAN	Persentase sarana dan	Urusan Kesehatan	N.A	75%	14,000,000,000	80%	7,938,665,600	85%	8,539,715,440	90%	10,044,672,000	95%	10,648,372,000	95%	RSUP

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM	prasarana yang tersedia di RSUP														
		PROGRAM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUP	Persentase dana BLUD RSUP yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat	Urusan Kesehatan	N.A	100%	3,000,000,000	100%	3,500,000,000	100%	4,000,000,000	100%	4,500,000,000	100%	5,000,000,000	100%	RSUP
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Prosentase Penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan pelayanan kesehatan	Urusan Kesehatan	85	90		90	4,438,665,600	95	4,539,715,440	95	5,544,672,000	95	5,648,372,000	92.5	RSJ
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	Urusan Kesehatan	75	90	200,000,000	95	1,197,809,000	100	1,208,000,000	100	1,236,000,000	100	1,308,000,000	100	RSJ
			Persentase ketersediaan pelayanan sesuai standar	Urusan Kesehatan	70	75	173,518,283	80		85	181,050,000	90		95	59,000,000	82.5	RSJ
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ	Urusan Kesehatan	80	90	9,747,098,000	95	25,383,000,000	100	23,897,302,375	100	19,666,109,934	100	20,656,909,106	100	RSJ
			Persentase Obat dan Perbekalan Kesehatan	Urusan Kesehatan	90	95	1,513,391,717	95	2,518,700,000	100	2,519,000,000	100	2,520,000,000	100	2,521,000,000	100	RSJ
		PROGRAM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJ	Persentase dana BLUD RSJ yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat	Urusan Kesehatan	70	75	7,000,000,000	80	7,500,000,000	85	8,000,000,000	90	8,500,000,000	95	9,000,000,000	85	RSJ
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses	Urusan Komunikasi dan Informatika		15%	50,000,000	25%	60,000,000	35%	70,000,000	45%	80,000,000	55%	90,000,000	55%	DISKOMINFO

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			masyarakat															
	73	Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Jumlah tenaga/SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Urusan Kesehatan	N.A	2,076	1,784,437,091	2,284	4,028,000,000	2,512	4,746,000,000	2,763	5,464,000,000	3,039	6,182,000,000	DINKES	
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Urusan Kesehatan	N.A	90	1,281,527,634	94	1,640,100,000	96	1,804,110,000	98	1,984,521,000	100	2,182,973,100	100	DINKES
				Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	Urusan Kesehatan	N.A	90	285,797,897	91	365,200,000	92	401,720,000	93	441,892,000	94	486,081,200	94	DINKES
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang memiliki akreditasi A	Urusan Pendidikan	0	100%	582,776,471	100%	627,511,765	100%	682,558,824	100%	715,547,059	100%	747,082,353	100%	DINDIK
				Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Urusan Pendidikan	0	0	582,776,471	0	627,511,765	100%	682,588,824	100%	715,547,059	100%	747,082,353	100%	DINDIK
2		Program Pengendalian Penyalahgunaan Napza					1,390,740,000		1,269,000,000		1,499,600,000		1,438,260,000		1,536,486,000			
	74	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	Persentase Puskesmas/Rumah sakit yang melayani Institusi Pelayanan Wajib Lapor (IPWL) Napza	Urusan Kesehatan	N.A	25	152,500,000									DINKES	
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi	Urusan Kesehatan	50	42	800,000,000	42		42		42		42		42	RSJ

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi	Urusan Kesehatan	50	55	275,000,000	60		65	150,000,000	70		75		62.5	RSJ	
		PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATA N	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza	Urusan Ketentrama n, Ketertiban Umum dan Perlindunga n Masyarakat	150	200	63,240,000	500	919,000,000	700	999,600,000	900	1,088,260,000	1100	1,186,486,000	1100	KESBANGPO L	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase korban napza	Urusan Sosial	N.A	14.89	100,000,000	21.28	350,000,000	21.28	350,000,000	21.28	350,000,000	21.28	350,000,000	100	DINAS SOSIAL	
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi							345,112,422,052		422,188,478,374		439,249,195,099		473,206,021,017		508,998,942,679			
Tujuan : Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas			Indeks Reformasi Birokrasi			68.08	336,837,990,255	73.39	405,721,894,874	73.41	421,876,373,099	73.43	455,065,269,017	73.50	489,681,856,179			
Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel			Opini Audit BPK 1 atas Laporan Keuangan			WTP	4,659,425,189	WTP	5,676,272,550	WTP	6,270,499,805	WTP	6,400,549,786	WTP	7,392,904,764			
Program Peningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah							4,659,425,189		5,676,272,550		6,270,499,805		6,400,549,786		7,392,904,764			
	75	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAA N	prosentase bendahara perangkat daerah yang berkompeten	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	100%	100%	460,245,000.00	100%	753,793,700.00	100%	829,173,070.00	100%	912,090,377.00	100%	1,003,299,415	100%	BAKUDA
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AKUTANSI DAN PELAPORAN	persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	81.58%	100%	1,483,172,189	100%	1,520,000,000	100%	1,860,000,000	100%	1,720,000,000	100%	2,380,000,000	100%	BAKUDA
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA ASET DAERAH	Nilai aset daerah yang dapat diyakini kewajarannya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	4,002,359,107,306	4,633,238,287,093	2,293,208,000	4,929,403,053,587	2,905,898,850	5,244,499,204,715	3,058,588,735	5,579,736,858,451	3,216,947,609	5,936,403,495,221	3,426,442,369	5,936,403,495,221	BAKUDA
			Peningkatan persentase	Fungsi Penunjang	0.31%	0.33%	372,800,000	0.34%	396,580,000	0.36%	422,738,000	0.38%	451,511,800	0.40%	483,162,980	0.40%	BAKUDA	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			kontribusi kemanfaatan aset daerah terhadap PAD	Urusan Pemerintah an													
		PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	Persentase debitur yang membayar tunggakan kredit usaha peningkatan ekonomi masyarakat yang disetorkan ke Kas daerah	Urusan Sosial	N.A	12.38	50,000,000	22	100,000,000	19.79	100,000,000	17.8	100,000,000	16.03	100,000,000	100	DINAS SOSIAL
			2 Tingkat kapabilitas APIP			3	4,933,338,000	3	14,031,186,000	3	8,664,294,000	4	9,163,054,000	4	9,745,975,000		
Program 1 Peningkatan tata kelola pengawasan							4,933,338,000		14,031,186,000		8,664,294,000		9,163,054,000		9,745,975,000		
	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel 76	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAN APARATUR	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan pada komponen proses IRB	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	4.5	6	283,650,000	7	1,199,000,000	8	1,353,000,000	9	1,473,000,000	10	1,611,000,000	12	INSPEKTORA T
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	88.83	90	3,565,938,000	95	4,641,436,000	90	4,867,457,000	95	5,107,030,000	95	5,399,300,000	95	INSPEKTORA T
			Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	91.63	93	383,750,000	94	582,000,000	95	611,100,000	96	642,000,000	98	674,000,000	98	INSPEKTORA T
			Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	100	100	300,000,000	100	6,541,250,000	100	687,112,000	100	721,618,000	100	757,799,000	100	INSPEKTORA T
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN.	Tingkat capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah	1	2	250,000,000	3	907,500,000	3	973,625,000	3	1,034,406,000	3	1,108,876,000	3	INSPEKTORA T

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA	Intern Pemerintah (SPIP)	an													
			Peningkatan capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	2	3	150,000,000	3	160,000,000	3	172,000,000	3	185,000,000	3	195,000,000	3	INSPEKTORA T
			3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat			76	89,291,456,222	82	111,013,811,581	85	122,016,824,588	88	132,842,445,406	92	145,830,313,261		
Program Peningkatkan 1 manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja							16,087,996,022		21,098,105,161		22,885,073,951		23,928,519,705		26,221,994,997		
	77 Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Persentase Jumlah pegawai yang menyampaikan LHKPN	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	95.08	96	250,000,000	97	325,000,000	99	355,000,000	99.5	390,000,000	100	475,000,000	100	BIRO ORGANISASI
			Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	61.89	63	557,807,713	65	4,785,000,000	67	4,325,000,000	70	4,660,000,023	75	5,000,000,000	75	BIRO ORGANISASI
		PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA- PPAS)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	1,771,602,000	30%	1,349,984,020	35%	1,417,483,221	40%	1,488,357,382	40%	1,562,775,251	45%	BAPPEDA
			Persentase kesesuaian antara dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	1,694,961,700	30%	449,994,673	35%	472,393,307	40%	496,119,127	40%	520,925,084	45%	BAPPEDA
			Tingkat kesesuaian jadwal penetapan APBD	Fungsi Penunjang Urusan	10%	25%	514,794,500	30%	149,998,224	35%	157,498,136	40%	165,373,042	40%	173,641,695	45%	BAPPEDA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			dan Perubahan APBD	Pemerintah an (Perencanaan)													
		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Kesesuaian antar Renja PD mitra kerja bidang perekonomian dan sumberdaya alam dengan RKPD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	10%	25%	50,000,000	30%	52,500,000	35%	55,125,000	40%	57,881,250	40%	60,775,313	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase Kesesuaian antar Renja PD mitra kerja bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan RKPD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	10%	25%	50,000,000	30%	52,500,000	35%	55,125,000	40%	57,881,250	40%	60,775,313	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase Kesesuaian antar RenjaPD mitra kerja bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan RKPD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	10%	25%	50,000,000	30%	52,500,000	35%	55,125,000	40%	57,881,250	40%	60,775,313	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	persentase rekomendasi kajian yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengemban gan)	10%	25%	50,000,000	30%	52,500,000	35%	55,125,000	40%	57,881,250	40%	60,775,313	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	Urusan Pemberday aan Perempuan dan Perlindunga n Anak	3.46	3.52	326,525,000	3.55	565,000,000	3.58	596,500,000	3.61	631,150,000	3.64	669,265,000	3.64	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDAL AN PENDUDUK KB
		PROGRAM PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan dan iadwal penetapan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	3	3	4,723,612,500	3	4,860,192,500	3	5,506,211,750	3	5,700,332,925	3	6,049,866,218	3	BAKUDA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			APBD dan Perubahan APBD (Ket: 3 = sesuai, 2 = kurang sesuai, 1 = tidak sesuai)														
			Prosentase kesesuaian antara RAPBD dengan dokumen KUA-PPAS	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	99.78	100%	2,100,175,000.00	100%	2,310,192,500.00	100%	2,541,211,750.00	100%	2,795,332,925.00	100%	3,074,866,218	100	BAKUDA
		PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	75%	92	1,261,534,022	95	1,799,461,606	97	2,068,130,847	99	2,373,350,474	99	2,720,603,045	99	BIRO PEMBANGUNAN
		PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD	Prosentase PD Provinsi dan Kab/Kota yang realisasi fisiknya 100% pelaksanaan sumber dana APBD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	75%	80%	507,718,281	85%	979,978,194	95%	1,052,875,694	99%	854,207,819	99	909,489,763	99	BIRO PEMBANGUNAN
		PROGRAM PERENCANAAN SETDA	Nilai Lakip Setda Provinsi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	75%	628,312,894	80%	428,313,000	85	842,559,950	90	566,443,943	95%	651,410,534	95%	BIRO PEMBANGUNAN
		PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBN	Prosentase PD Provinsi dan Kab/Kota yang realisasi fisiknya 100 % pelaksanaan sumber dana APBN	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	75%	595,099,623	80%	979,978,194	85	1,052,875,694	90	854,207,819	95	909,489,763	95	BIRO PEMBANGUNAN
	78 Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah di ling pemprov Babel	Urusan Persandian	Cukup	Baik	63,905,485	Baik	68,405,485	Baik	72,905,485	Baik	77,405,485	Baik	81,905,485	Baik	DISKOMINFO

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			sesuai standar persandian														
			Persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan	Urusan Statistik	N.A	100 data	891,947,304	200 data	1,836,606,765	300 data	2,203,928,117	400 data	2,644,713,741	500 data	3,179,655,689	500 data	DISKOMINFO
2 Program peningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang- undangan							69,877,360,200		78,414,128,420		86,480,014,837		94,997,016,321		104,299,717,953		
	79 Peningkatan Penataan peraturan perundang- undangan	PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	Persentase Produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	100%	80%	2,456,122,000	85%	3,420,000,000	90%	3,710,000,000	95%	3,970,000,000	100%	4,215,000,000	100%	BIRO HUKUM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH	Persentase Produk hukum daerah yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	100%	80%	1,132,898,000	85%	1,680,000,000	90%	1,830,000,000	95%	1,970,000,000	100%	2,135,000,000	100%	BIRO HUKUM
			Persentase jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan bantuan Hukum	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	100%	80%	100,000,000	85%	150,000,000	90%	200,000,000	95%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	BIRO HUKUM
		PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM	Persentase produk hukum daerah yang dapat di akses oleh masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	100%	80%	841,220,500	85%	1,282,296,750	90%	1,670,000,000	95%	1,830,000,000	100%	2,000,000,000	100%	BIRO HUKUM
		PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG- UNDANGAN	Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	80	65,347,119,700	80	71,881,831,670	80	79,070,014,837	80	86,977,016,321	80	95,674,717,953	100	SETWAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3 Program Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa							3,326,100,000		11,501,578,000		12,651,735,800		13,916,909,380		15,308,600,311		
	80 Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN PENGADAAN	Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT yang dapat di akses masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	0	90%	570,880,000	92%	1,446,989,500	94%	1,591,688,450	96%	1,750,857,295	98%	1,925,943,025	98%	BIRO LAYANAN PENGADAAN
		PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP yang berhasil dilelangkan sesuai peraturan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	1	92%	936,785,000	94%	5,034,568,000	96%	5,538,024,800	98%	6,091,827,280	98%	6,701,010,000	98%	BIRO LAYANAN PENGADAAN
		PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Persentase Penggunaan e- Procurement terhadap belanja pengadaan yang dapat diakses masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	40%	42%	1,818,435,000	44%	5,020,020,500	46%	5,522,022,550	48%	6,074,224,805	50%	6,681,647,286	50%	BIRO LAYANAN PENGADAAN
Sasaran : Birokrasi yang efektif dan efisien			1 Nilai rata-rata delapan area perubahan			30	27,972,847,157	35	36,354,488,900	40	41,041,585,584	45	45,374,945,459	50	50,806,255,650		
1 Program Peningkatan pencapaian reformasi birokrasi							27,972,847,157		36,354,488,900		41,041,585,584		45,374,945,459		50,806,255,650		
	81 Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	PROGRAM PENINGKATAN PUBLIKASI, PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN INFORMASI	Persentase kesesuaian antar informasi yang dikelola dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	100	100	1,631,163,700	100	1,975,838,255	100	2,272,213,993	100	2,613,046,093	100	3,005,003,007	100	BIRO HUMAS
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN, DOKUMENTASI,	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dengan arah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	100	100	2,927,911,600	100	3,422,743,340	100	3,936,154,841	100	4,526,578,067	100	5,298,498,912	100	BIRO HUMAS

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PUBLIKASI MEDIA DAN IT	kebijakan pembangunan pemerintah daerah														
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PROTOKOLER	Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	100	261,434,000	100	535,354,305	100	585,657,450	100	708,006,069	100	814,206,978	100	BIRO HUMAS
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI, INFORMASI DAN PELAYANAN SERTA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Persentase kesesuaian antara Promosi dan Informasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	100	10,394,117,000	100	8,240,000,000	100	9,750,000,000	100	10,595,000,000	100	12,260,000,000	100	BADAN PENGHUBUN G PROVINSI
			Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah di Jakarta yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	100	1,750,000,000	100	2,060,000,000	100	2,370,000,000	100	2,680,000,000	100	2,990,000,000	100	BADAN PENGHUBUN G PROVINSI
			Persentase kesesuaian antara Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	100	1,543,873,000	100	2,204,590,000	100	2,420,000,000	100	2,640,000,000	100	2,860,000,000	100	BADAN PENGHUBUN G PROVINSI
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAHTANGG AAN, KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	95%	2,959,690,000	95%	7,785,811,000	95%	8,564,392,100	95%	9,420,831,310	95%	10,362,914,441	95%	SETWAN
			Persentase	Fungsi	N.A	75%	4,838,320,000	76%	4,530,152,000	77%	4,983,167,200	78%	5,481,483,920	80%	6,029,632,312	80%	SETWAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			jumlah sarana prasarana lembaga DPRD	Penunjang Urusan Pemerintah an													
	82 Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SERTA ANALISIS JABATAN	Persentase jumlah Organisasi perangkat daerah yang sesuai antar beban kerja organisasi dengan ukuran kelembagaannya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	63%	121,700,000	75%	795,000,000	78%	1,100,000,000	85%	995,000,000	91%	1,420,000,000	91%	BIRO ORGANISASI
			Persentase Jumlah Pejabat Struktural ASN yang memiliki kinerja yang baik	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	44%	275,850,000	46%	800,000,000	47%	890,000,000	50%	1,000,000,000	66%	1,123,000,000	66%	BIRO ORGANISASI
			Persentase Jumlah ASN yang sesuai antara beban kerja dengan kompetensi dan jabatannya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	77%	485,903,560	80%	1,250,000,000	72%	1,230,000,000	86%	1,620,000,000	82%	1,393,000,000	82%	BIRO ORGANISASI
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan kepuasan masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	B	B	193,567,300	B	1,695,000,000	B	1,840,000,000	B	1,945,000,000	B	2,030,000,000	B	BIRO ORGANISASI
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	70	183,004,500	75	1,060,000,000	80	1,100,000,000	85	1,150,000,000	90	1,220,000,000	90	BIRO ORGANISASI
		PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pembangunan Reformasi Birokrasi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	230,769,800	30%	193,195,506	35%	197,855,282	40%	202,748,046	40%	207,885,448	45%	BAPPEDA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			PD														
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	persentase rekomendasi kajian tentang Reformasi Birokrasi yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Penelitian dan pengemban gan)	10%	25%	175,542,697	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA
			Indeks 2 Profesionalitas ASN			70	15,003,294,500	80	30,484,204,000	85	25,885,746,000	90	27,029,756,000	95	28,613,173,000		
Program peningkatan tata kelola manjemen SDM aparatur pemerintah daerah							15,003,294,500		30,484,204,000		25,885,746,000		27,029,756,000		28,613,173,000		
	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur 83	PERENCANAAN DAN PENGADAAN ASN SERTA PELAYANAN PROMOSI KEPANGKATAN DAN PENSIUN	Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	79%	83%	1,224,850,000	87%	1,286,094,000	92%	1,350,400,000	96%	1,417,918,000	98%	1,488,817,000	98%	BKPSDM
			Persentase pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	90%	91%	173,482,000	92%	200,000,000	93%	210,000,000	95%	230,000,000	98%	240,000,000	98%	BKPSDM
			Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	55%	64%	895,021,000	74%	930,000,000	83%	1,040,000,000	92%	1,170,000,000	98%	1,250,000,000	98%	BKPSDM
		PROGRAM PENINGKATAN PENILAIAN KINERJA, disiplin, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN	Persentase ASN yang menerima penghargaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	5.60%	6.30%	866,275,000	10%	9,929,020,000	11%	3,537,096,000	12%	2,670,326,000	13%	2,110,842,000	13%	BKPSDM
			Persentase kasus pelanggaran disiplin minimal	Fungsi Penunjang Urusan	0,19%	0,17%	1,254,211,000	0,15%	1,270,000,000	0,13%	1,460,500,000	0,11%	1,679,575,000	0,09%	1,931,511,000	0,09%	BKPSDM

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			sedang	Pemerintah an													
			Persentase ASN yang SKP nya dinilai tepat waktu	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	46%	56%	150,000,000	65%	175,000,000	76%	201,250,000	85%	231,437,000	98%	266,153,000	98%	BKPSDM
			Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	72%	78%	657,928,000	84%	703,540,000	90%	852,000,000	96%	1,035,000,000	98%	1,348,000,000	98%	BKPSDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ASN	Persentase Pegawai ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsional	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	4.45%	23%	3,086,996,500	42%	6,954,000,000	60%	7,562,000,000	79%	8,226,000,000	97%	8,921,000,000	97%	BKPSDM
			Persentase Pegawai ASN yang meningkat pendidikan formalnya;	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	31,60%	36,90 %	2,128,510,000	39,90 %	2,858,100,000	41,90 %	3,000,000,000	48%	3,151,000,000	52,80 %	3,300,000,000	52,80%	BKPSDM
			Persentase Pegawai ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	88%	92%	2,405,094,000	96%	3,850,000,000	97%	4,235,000,000	99%	4,658,500,000	100%	5,124,350,000	100%	BKPSDM
			Nilai akreditasi Diklat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	71	71	297,909,000	81	415,000,000	81	437,500,000	81	460,000,000	81	482,500,000	81	BKPSDM
		PROGRAM PENILAIAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI ASN	Persentase Pegawai ASN yang mempunyai Profil Kompetensi sesuai dengan standar penilaian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	11,12%	20,89 %	1,863,018,000	30,67 %	1,913,450,000	40,40 %	2,000,000,000	50,22 %	2,100,000,000	60%	2,150,000,000	60%	BKPSDM
Sasaran : Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas			1 Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)			70	129,904,531,940	78	139,023,421,250	83	147,726,421,962	85	157,834,191,525	90	167,064,117,639		
1 Program Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis							129,904,531,940		139,023,421,250		147,726,421,962		157,834,191,525		167,064,117,639		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
teknologi																	
	84 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	B	5,365,051,940	B	5908511250	B	6474711962	A	7204281525	A	7859807639	A	BAKUDA
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Persentase instansi pelayanan publik Provinsi yang bersertifikat ISO	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	2 unit	993,912,000	3 Unit	430,000,000	3 Unit	460,000,000	4 unit	470,000,000	5 unit	500,000,000	5 unit	BIRO ORGANISAS
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP	Urusan Penanaman Modal	N.A												DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH PANGKALPINANG DAN BANGKA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Urusan Pendidikan	N.A	76.61 %	37,593,500,000	79.29 %	38,868,000,000	81.97 %	40,998,600,000	84.64 %	44,368,600,000	90%	47,391,800,000	90%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BANGKA BARAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat	Urusan Pendidikan	N.A	76.61 %	15,901,800,000	79.29 %	16,815,200,000	81.97 %	18,114,800,000	84.64 %	19,214,400,000	90%	20,185,000,000	90%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BANGKA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan	Urusan Pendidikan	N.A	76.61 %	35,924,000,000	79.29 %	39,479,000,000	81.97 %	41,795,200,000	84.64 %	44,293,000,000	90%	46,026,800,000	90%	DINAS PENDIDIKAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		TENGAH DAN BANGKA SELATAN	SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan														
		PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	Urusan Pendidikan	N.A	76.61 %	29,501,200,000	79.29 %	31,271,000,000	81.97 %	33,131,400,000	84.64 %	35,032,200,000	90%	37,349,000,000	90%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PLUT KUMKM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM	Urusan Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah	N.A												DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Nilai Tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi	Urusan Kesehatan	100%	Persia pan Akredit asi Paripu ma (25%)	4,000,000,000	Persia pan Akredit asi Paripu ma (50%)	6,000,000,000	Persia pan Akredit asi Paripu ma (75%)	6,500,000,000	Akredit asi Paripu ma (100%)	7,000,000,000	Akredit asi Paripu ma (100%)	7,500,000,000	Akreditasi Paripurna (100%)	RSUP
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit	Urusan Kesehatan	N.A	75%	224,568,000	80%	251,710,000	85%	251,710,000	87%	251,710,000	90%	251,710,000	90%	RSUP
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Teknis Medik Kejiwaan	Urusan Kesehatan	78	80	50,500,000	85		90		95		95		87.5	RSJ
			Persentase layananan	Urusan Kesehatan	60	80	350,000,000	85		85		90		100		85	RSJ

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			kesehatan yang terintegrasi pelayanan kesehatan jiwa yang berfungsi aktif														
		PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORUIM KESEHATAN	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan labkes	Urusan Kesehatan	N.A												UPTD DINKES
			2 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)			1	65,073,097,247	5	69,138,510,593	10	70,271,001,160	15	76,420,326,841	20	80,229,116,865		
1 Program Peningkatkan pelayanan pemerintah yang efektif dan efisien berbasis teknologi							65,073,097,247		69,138,510,593		70,271,001,160		76,420,326,841		80,229,116,865		
	85 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN PENGADAAN	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	80	349,269,000	80	533,841,000	80	422,615,490	80	464,877,039	80	511,364,742	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
		PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	90%	80	2,215,500,000	80	3,540,240,000	80	3,894,264,000	80	4,283,690,400	80	4,712,059,440	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
		PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	80	1,325,141,000	80	2,116,136,000	80	2,327,749,600	80	2,560,524,560	80	2,816,577,016	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Presentase jumlah administrasi kewilayahan yang terselesaikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A		5,288,389,257		705,824,000		741,410,000		778,370,000		806,300,000		BIRO PEMERINTAH AN
			Persentase luas Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang bersertifikat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A		120,000,000		126,000,000		132,300,000		138,915,000		145,860,750		BIRO PEMERINTAH AN
			Persentase jumlah kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A		125,351,157		131,618,715		138,199,651		145,109,633		152,365,115		BIRO PEMERINTAH AN
		PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Presentase jumlah kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang diimplementasika n	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A		1,822,867,238		1,791,905,000		1,884,880,000		1,697,433,500		2,337,122,000		BIRO PEMERINTAH AN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH	Persentase jumlah kerjasama pemerintah daerah/swasta/luar negeri yang diimplementasika n	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	67	1,316,621,390	75	1,546,177,000	83	1,720,343,000	92	1,658,520,000	92	1,844,871,000	92	BIRO PEMERINTAH AN
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	Urusan Kearsipan	N.A	20	944,276,000	20	1,909,137,300	20	1,863,706,300	20	2,176,847,935	20	2,135,317,415	100	DKPUS
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP	Pertambahan jumlah arsip yang dikelola sesuai standar (Dinamis dan Statis)	Urusan Kearsipan	N.A		1,054,439,400		1,911,250,000		2,000,312,500		2,092,078,125		2,181,682,032		DKPUS
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ;	Urusan Perpustakaa n	N.A		655,700,000		4,122,440,000		3,689,368,000		4,777,416,901		6,236,180,247		DKPUS
			Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan	Urusan Perpustakaa n	N.A	200	675,000,000	350	247,930,000	400	274,212,500	500	286,888,625	550	677,860,557	2000	DKPUS

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			pustaka														
			Pertambahan pengunjung perpustakaan	Urusan Perpustakaa n	N.A	100	241,934,100	11,5	1,689,755,000	12,5	1,419,577,750	13,65	1,904,114,138	14,87	2,409,702,345	62,52	DKPUS
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Persentase perangkat daerah yang mengimplementas ikan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Birokrasi	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	20%	590,015,497	30%	619,516,272	40%	650,492,086	50%	683,016,690	60%	717,167,525	60%	DISKOMINFO
		PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARA AN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang aman	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	20%	550,000,000	40%	180,000,000	60%	189,000,000	80%	198,450,000	100%	208,372,500	100%	DISKOMINFO
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A			25%	150,000,000	50%	150,000,000	75%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	DINAS PUPR
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNKASI PUBLIK	persentase kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipulikasi	Urusan Komunikasi dan Informatika	20%	40%	8,476,940,000	60%	1,843,054,500.00	80%	1,843,054,500.00	100%	1,843,054,500.00	100%	1,843,054,500.00	100%	KOMINFO
			Persentase sarana komunikasi yang digunakan dalam publikasi	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A		6,800,000,000	20%	800,000,000	20%	1,116,666,667	20%	1,211,111,111	20%	1,272,222,222		DISKOMINFO
		PROGRAM PENGADMINISTRA SIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	Persentase Jumlah data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat	Urusan Administrasi Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	0		0	100	540,000,000	100	590,000,000	100	665,000,000	100	715,000,000	100	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALI AN PENDUDUK KB
			Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan NIK Data base kependudukan dan KTP dalam	Urusan Administrasi Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	3	14.28	355,030,000	14.28	1,140,000,000	14028	1,195,000,000	14.28	1,270,000,000	14.28	1,330,000,000	14.28	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALI AN PENDUDUK KB

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			meningkatkan pelayananan ke masyarakat														
		PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikasi profesi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54%	62%	215,000,000.00	71%	250,000,000.00	79%	300,000,000.00	88%	350,000,000.00	100%	475,000,000.00	100%	DINAS PUPR
			Persentase jumlah kelembagaan jasa konstruksi yang berkompetensi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	20%	950,000,000.00	40%	1,000,000,000.00	60%	1,050,000,000.00	80%	1,100,000,000.00	100%	1,150,000,000.00	120%	DINAS PUPR
			Persentase Jumlah layanan informasi jasa konstruksi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60%	65%	110,000,000.00	70%	137,500,000.00	80%	171,875,000.00	90%	214,843,750.00	100%	268,554,687.50	100%	DINAS PUPR
86	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10%	16%	1,838,213,509	34%	2,077,702,338	49%	1,985,315,591	79%	1,930,017,278	100%	1,365,157,669	100%	DPMD
			Persentase PKK aktif	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	N.A		1,802,500,000										DPMD
			Persentase Posyandu aktif	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	N.A	100 Pokjanal Posyandu	488,722,941	100 Pokjanal Posyandu	186,925,585	100 Pokjanal Posyandu	147,203,898	100 Pokjanal Posyandu	115,923,070	100 Pokjanal Posyandu	91,289,417	100 Pokjanal Posyandu	DPMD
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	Persentase kawasan perdesaan yang terbangun	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	N.A	20%	1,307,901,157	40%	1,373,296,215	60%	1,441,961,026	80%	1,514,059,077	100%	1,589,762,031	100%	DPMD
		PROGRAM PEMBINAAN	Persentase aparatur desa dan	Urusan Pemberday	N.A	26%	1,261,547,718	42%	863,000,000	58%	906,150,000	81%	951,457,500	100%	999,030,375	100%	DPMD

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PEMERINTAH DESA	BPD yang meningkat kompetensinya	aan Masyarakat dan Desa													
			Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina	Urusan Pemberday aan Masyarakat dan Desa	N.A	6 Desa, 6 Kelura han	562,879,950	21 Desa/ Kel	961,427,668	21 Desa/ Kel	1,009,499,051	21 Desa/ Kel	1,059,974,004	21 Desa/ Kel	1,112,972,704	21 Desa/ Kel	DPMD
		PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase desa di kawasan transmigrasi yang diberdayakan	Urusan Transmigras i	N.A		110,299,333										DISNAKER
87	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	Urusan Sosial	N.A	23.94	1,490,000,000	19.01	1,400,000,000	19.01	1,400,000,000	19.01	1,400,000,000	19.01	1,400,000,000	100	DINSOS
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	Urusan Sosial	N.A	15.14	868,538,000	18.28	1,325,000,000	19	1,175,000,000	23.12	3,325,000,000	24.19	1,425,000,000	100	UPTD PANTI SOSIAL
		PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARA AN PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan pelayanan Panti Sosial	Urusan Sosial	N.A	4.26	1,431,240,000	80.62	2,120,000,000	6.08	1,450,000,000	4.48	1,275,000,000	4.56	1,440,000,000	100	UPTD PANTI SOSIAL
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olah raga khusus lansia	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	N.A	0.19%	75,000,000	0.19%	82,500,000	0.19%	90,750,000	0.19%	99,825,000	0.19%	109,807,500	0.19%	DISKEPORA

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		RAGA															
			Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	N.A	4.02%	259,000,000	4.02%	284,900,000	4.02%	313,390,000	4.02%	344,729,000	4.02%	379,201,900	4.02%	DISKEPORA
			Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang memiliki standar Nasional	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	N.A	2.67%	120,000,000	2.67%	132,000,000	2.67%	145,200,000	2.67%	159,720,000	2.67%	175,692,000	2.67%	DISKEPORA
		PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase lansia yang dilayani sesuai standar kesehatan	Urusan Kesehatan	N.A												DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	Persentase lansia yang berkompetensi keagamaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	75	50,000,000	80	50,000,000	80	50,000,000	85	50,000,000	85	50,000,000	85	BIRO KESRA
			Prosentase jumlah masyarakat yang kompeten di bidang keagamaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	N.A	75	10,745,068,000	80	11,145,068,000	80	11,545,068,000	85	11,945,068,000	85	12,345,068,000	85	BIRO KESRA
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Persentase masyarakat yang direhabilitasi sosial yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	Urusan Kesehatan	65	80	800,000,000	85		90		95		100		87.5	RSJ
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	Urusan Tenaga Kerja	25%	30%	1,125,000,000										DISNAKER
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	Urusan Tenaga Kerja	N.A			0.28	160,000,000	0.28	170,000,000	0.28	180,000,000	0.28	190,000,000	0.28	DISNAKER
			Persentase Exs korban Napza	Urusan Tenaga	N.A			10.64	180,000,000	10.64	190,000,000	10.64	200,000,000	10.64	200,000,000	10.64	DISNAKER

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	Kerja													
			Persentase wanita Tunasosial yang memilik kompetensi ketenagakerjaan	Urusan Tenaga Kerja	N.A			8.62	190,000,000	8.62	200,000,000	8.62	210,000,000	8.62	210,000,000	8.62	DISNAKER
			Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	Urusan Tenaga Kerja	N.A			0.78	170,000,000	0.78	180,000,000	0.78	190,000,000	0.78	200,000,000	0.78	DISNAKER
	88 Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	Urusan Sosial	N.A	8.64	1,180,536,550	22.84	1,500,000,000	22.84	1,500,000,000	22.84	1,500,000,000	22.84	1,500,000,000	100	DINSOS
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	Urusan Sosial	N.A	17.7	1,271,141,450	17	1,464,800,000	19.78	1,148,000,000	21.27	1,387,000,000	24.4	1,622,500,000	100	DINSOS
			Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	Urusan Sosial	N.A	15.87	275,000,000	15.63	300,000,000	16.23	350,000,000	22.84	425,000,000	29.45	500,000,000	100	DINSOS
	89 Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN	Menurunkan Rasio Perempuan Korban	Urusan Pemberdayaan	42.97	40.47	248,521,000	37.97	1,709,055,500	35.47	1,366,975,000	32.97	1,157,534,300	30.47	1,039,787,700	30.47	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDAL

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	anak	PEREMPUAN DAN ANAK	Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	Perempuan dan Perlindungan Anak													AN PENDUDUK KB
			Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.48	0.44	919,734,000	0.43	949,510,500	0.42	1,144,461,550	0.41	843,907,705	0.4	1,048,298,476	0.4	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melayani kekerasan terhadap perempuan dan anak	Urusan Kesehatan	N.A												DINKES
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Urusan Sosial	N.A	16.67	100,000,000	20.67	250,000,000	20.67	250,000,000	20.67	250,000,000	30 org	250,000,000	100	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diakses oleh masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	5%	15%	50,000,000	25%	9,630,000,000	35%	10,410,000,000	45%	10,890,000,000	55%	11,270,000,000	55%	DISKOMINFO
	90 Menjamin hak anak dalam pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Kab/Kota Layak Anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	N.A	28,57	661,539,000	42,85	690,000,000	57,14	758,000,000	85.71	833,850,000	100	757,915,000	100	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		PROGRAM PENGADMINISTRASI	Persentase anak yang memiliki akte	Urusan Administrasi	N.A	N.A		N.A	270,000,000	N.A	295,000,000	N.A	320,000,000	N.A	345,000,000	N.A	DINAS PPA, DUKCAPIL,

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		SIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	kelahiran dalam mendukung hak anak untuk mendapat hak identitas	Kependuduk an dan Pencatatan Sipil													PENGENDALI AN PENDUDUK KB
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Urusan Sosial	N.A	20.25	175,000,000	18.99	210,000,000	18.99	210,000,000	2025	270,000,000	21.52	280,000,000	100	DINAS SOSIAL
		PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan	Urusan Kesehatan	14.40%	14.35 %	1,674,240,600	14.30 %	2,431,000,000	14.25 %	2,674,000,000	14.20 %	2,942,000,000	14.15 %	3,236,000,000	14.15%	DINAS KESEHATAN
Tujuan : Terwujudnya pembangunan demokrasi			Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi			83.20	8,274,431,797	83.35	16,466,583,500	83.50	17,372,822,000	83.65	18,140,752,000	83.75	19,317,086,500		
Sasaran : Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi			1 Skor aspek kebebasan sipil			87.75	7,256,015,000	87.76	13,764,583,500	87.79	14,386,522,000	87.80	15,054,372,000	87.82	15,933,568,500		
1 Program Peningkatan kebebasan sipil Masyarakat							7,256,015,000		13,764,583,500		14,386,522,000		15,054,372,000		15,933,568,500		
	91 Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	PROGRAM BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	Urusan Ketentrama n, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	0	1,802,207,600	-	3,022,000,000	-	3,215,000,000	-	3,418,000,000	-	3,325,000,000	0	KESBANGPO L
			Jumlah kasus Konflik Sara	Urusan Ketentrama n, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3	3	428,016,100	2	810,000,000	1	891,000,000	0	979,000,000	0	1,077,000,000	0	KESBANGPO L
		PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	Urusan Ketentrama n, Ketertiban Umum dan	17	12	1,158,060,600	9	3,010,000,000	7	3,540,000,000	5	4,160,000,000	4	4,900,000,000	4	KESBANGPO L

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Perlindunga n Masyarakat													
		PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATA N	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	Urusan Ketentrama n, Ketertiban Umum dan Perlindunga n Masyarakat	0	25	305,000,000	35	1,764,000,000	45	1,801,500,000	55	2,009,350,000	65	2,150,985,000	65	KESBANGPO L
			Persentase Jumlah sanggar/paguyub an yang melestarikan seni budaya dalm mendukung ketahanan budaya	Urusan Ketentrama n, Ketertiban Umum dan Perlindunga n Masyarakat	0	30	56,671,000	40	231,000,000	50	252,000,000	60	276,000,000	70	303,000,000	70	KESBANGPO L
	92 Penyelenggaraan keterampilan umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	Urusan Ketentrama n, Ketertiban Umum dan Perlindunga n Masyarakat	N.A	100	2,280,225,000	100	2,549,297,500	100	2,549,297,500	100	2,549,297,500	100	2,549,297,500	100	SATPOL PP
		PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kanrantibmas	Urusan Ketentrama n, Ketertiban Umum dan Perlindunga n Masyarakat	10.29%	1.51%	134,438,500	1.51%	200,000,000	1.51%	134,438,500	1.51%	134,438,500	1.51%	200,000,000	30	SATPOL PP
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL SATPOL PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kanrantibmas	Urusan Ketentrama n, Ketertiban Umum dan Perlindunga n Masyarakat	46.59%	2.27%	511,013,700	26.62 %	1,357,903,500	18.50 %	1,182,903,500	16.23 %	707,903,500	5.52%	607,903,500	100	SATPOL PP
		PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Prosentase penegakan/penind akan pelanggar Perda	Urusan Ketentrama n, Ketertiban Umum dan Perlindunga	83.78%	100	580,382,500	100	820,382,500	100	820,382,500	100	820,382,500	100	820,382,500	100	SATPOL PP

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
				n Masyarakat														
			2	Skor aspek hak-hak politik		81.72	522,874,100	81.76	1,993,000,000	81.79	2,207,300,000	81.8	2,232,380,000	81.85	2,449,518,000			
1	Program Peningkatan partisipasi politik masyarakat						522,874,100		1,993,000,000		2,207,300,000		2,232,380,000		2,449,518,000			
	93	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.73	26.75	71,006,000	27.77	473,000,000	28.79	517,300,000	29.81	384,780,000	30.83	423,258,000	30.83	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALI AN PENDUDUK KB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	N.A	0	-	30	75,000,000	30	82,500,000	30	90,750,000	30	99,825,000	30	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALI AN PENDUDUK KB
				Persentase masyarakat yang memiliki kompentensi berkaitan dengan Politik Daerah	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	7	451,868,100	7	1,445,000,000	7	1,607,500,000	7	1,756,850,000	7	1,926,435,000	7	KESBANGPOL
			3	Skor aspek lembaga demokrasi		80.3	495,542,697	80.33	709,000,000	80.36	779,000,000	80.5	854,000,000	8.,54	934,000,000			
1	Program pengembangan lembaga demokrasi						495,542,697		709,000,000		779,000,000		854,000,000		934,000,000			
	94	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI	Tingkat Kinerja Lembaga Demokrasi	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	45	220,000,000	50	709,000,000	60	779,000,000	70	854,000,000	80	934,000,000	7	KESBANGPOL
		PROGRAM PENELITIAN DAN	persentase rekomendasi	Fungsi Penunjang	10%	25%	175,542,697	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PENGEMBANGAN	kajian tentang demokrasi yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Urusan Pemerintah an (Penelitian dan pengemban gan)													
		PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pembangunan berdemokrasi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	100,000,000	30%	93,195,506	35%	97,855,282	40%	102,748,046	40%	107,885,448	45%	BAPPEDA
Misi 6 : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;							107,421,543,267		121,725,741,574		148,871,951,429		169,117,675,710		157,221,756,019		
Tujuan : Meningkatnya tata kelola kebencanaan			Indeks Resiko Bencana (IRB)			159	59,662,907,576	156	99,343,577,229	153	111,721,886,834	150	115,435,831,835	147	111,347,364,300		
Sasaran: Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana			1 Indeks kapasitas bencana daerah			0.15	59,662,907,576	0.2	99,343,577,229	0.25	111,721,886,834	0.3	115,435,831,835	0.35	111,347,364,300		
Program peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana							32,847,461,600		55,510,049,220		54,199,158,942		58,166,912,966		62,594,066,946		
	95 Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGA N BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Urusan Sosial		72	2,280,774,300	74	3,774,252,000	76	3,935,464,000	78	4,038,987,830	80	4,144,937,221	76	BPBD
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Urusan Sosial	100	20	1,050,000,000	20	1,085,000,000	20	1,121,750,000	20	1,160,337,500	20	1,200,854,375	100	DINSOS
		PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan	Urusan Pangan	0.9												DINAS PANGAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A			15%	50,000,000	25%	60,000,000	35%	70,000,000	45%	80,000,000	45%	KOMINFO
		PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	Urusan Kesehatan	70%	80%	1,987,176,600	80%	1,650,000,000	90%	1,815,000,000	90%	1,997,000,000	100%	2,196,000,000	100%	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.05%	4.24%	379,005,500	4.24%	450,000,000	4.24%	400,268,000	4.24%	400,268,000	4.24%	450,000,000		SATPOL PP
		PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGA N BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	Urusan Sosial	80	80	3,600,000,000	80	4,565,000,000	85	4,565,000,000	85	4,565,000,000	90	4,565,000,000	84	BPBD
		PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi	Urusan Kesehatan	8%	10%	575,125,000	15%	1,300,000,000	20%	1,350,000,000	25%	1,375,000,000	30%	1,400,000,000	30%	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	Urusan Kesehatan	100	100%	8,400,000,000	100%	14,400,000,000	100%	15,840,000,000	100%	17,424,000,000	100%	19,166,400,000		RSUP
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	-	25%	1,000,000,000	50.00 %	1,100,000,000.00	75.00 %	1,210,000,000.00	100.00 %	1,331,000,000.00	125.00%	PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			dengan baik untuk menahan tanah														
			Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan befungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.60%	16.80 %	5,400,000,000	26.80 %	13,400,000,000	36.80 %	14,740,000,000	46.80 %	16,214,000,000	56.80 %	17,835,400,000	66.80%	PUPR
		PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT	Persentase rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	154 unit	49%	4,902,260,000	51%	5,077,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	PRKP
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.66%	0.76%	2,785,270,200	0.86%	3,063,797,220.00	0.96%	3,370,176,942.00	1%	3,707,194,636.20	1.10%	4,077,914,099.82	1.10%	PUPR
			Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.02%	0.07%	600,000,000	0.12%	660,000,000.00	0.17%	726,000,000.00	0.22%	798,600,000.00	0.27%	878,460,000.00	0.27%	PUPR
		PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGA N BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Urusan Sosial	75	75	887,850,000	75	4,685,000,000	80	4,695,500,000	80	4,706,525,000	80	4,718,101,250	78	BPBD
		PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	Urusan Kesehatan	100%	100%		100%	350,000,000	100%	480,000,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	Urusan Kesehatan	50	75		80		85		90		95		82.5	RSJ

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pengembangan 2 kawasan berbasis penanggulangan bencana							26,815,445,976.00		43,833,528,009.00		57,522,727,892.18		57,268,918,869.10		48,753,297,353.81		
	96 Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17%	19.20 %	2,456,467,772	41.40 %	3,000,000,000.00	52.50 %	3,300,000,000.00	63.60 %	3,630,000,000.00				DINAS PUPR
			Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30%	35.00 %	4,482,292,958	40.00 %	15,930,522,254	45.00 %	17,523,574,479.18	50.00 %	19,275,931,927.10	55.00 %	21,203,525,119.81		DINAS PUPR
			panjang penahan tanah akibat erosi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29%	39.00 %	2,750,000,000	49.00 %	5,462,500,000.00	64.00 %	8,193,750,000.00	79.00 %	8,193,750,000.00				DINAS PUPR
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase DAS kritis yang di kelola	Urusan Kehutanan	N.A	7	300,000,000	7	530,750,000	7	530,750,000	7	530,750,000	7	530,750,000	7	DINAS KEHUTANAA N
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA DISHUT	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	Urusan Kehutanan	N.A	100%	2,200,000,000	100%	2,250,000,000	100%	2,700,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,300,000,000		DINAS KEHUTANAA N
	97 Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Panjang Talud penahan banjir kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0				100%	5,000,000,000					100%	PUPR
			Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0		30%	1,000,000,000	70%	1,100,000,000	100%	1,210,000,000			70%	PUPR
		PROGRAM PERUMAHAN	Persentase relokasi kawasan	Urusan Perumahan	100	-	0			0.27	2,400,000,000	0.33	3,450,000,000	0.4	4,440,000,000	100%	PRKP

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		RAKYAT	hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Rakyat dan Kawasan Permukiman													
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.59	95%	8,591,960,316	96%	9,021,558,332	97%	9,472,636,248	98%	9,946,268,061	99%	10,443,581,464	100%	PUPR
			Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80%	81%	6,034,724,930	82%	6,638,197,423	83%	7,302,017,165	84%	8,032,218,881	85%	8,835,440,770	86%	PUPR
Tujuan : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			59.76	47,758,635,691	60.96	22,382,164,345	62.18	37,150,064,595	63.42	53,681,843,875	64.69	45,874,391,719		
Sasaran : Peningkatan Kualitas Lingkungan			1 Indeks Air			58.55	859,868,000	57.25	1,338,902,000	56.3	1,146,804,000	55.8	1,270,897,000	55.6	1,413,637,000		
Program 1 Peningkatan kualitas air							859,868,000		1,338,902,000		1,146,804,000		1,270,897,000		1,413,637,000		
	98 Pengendalian kualitas air	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENAAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase BOD, COD dan TSS	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	2%	540,341,000	2%	1,019,375,000	2%	827,277,000	2%	951,370,000	2%	1,094,110,000	2%	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)	Urusan Kehutanan	N.A	100%	319,527,000	100%	319,527,000	100%	319,527,000	100%	319,527,000	100%	319,527,000	100%	DINAS KEHUTANAA N
Program 1 Peningkatan kualitas Udara			2 Indeks Udara			90	611,506,000	89.9	1,448,750,000	89.8	698,375,000	89.75	698,375,000	89.6	728,132,000		
							611,506,000		1,448,750,000		698,375,000		698,375,000		728,132,000		
	99 pengendalian kualitas udara	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 yang melebihi Nilai Ambang	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	2%	75,000,000	2%	86,250,000	2%	99,187,500	2%	99,187,500	2%	114,066,000	2%	DLH

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		HIDUP	Batas														
			Persentase penurunan Konsentrasi NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	2%	75,000,000	2%	862,500,000	2%	99,187,500	2%	99,187,500	2%	114,066,000	2%	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	Persentase penurunan Kawasan Hutan yang terbakar	Urusan Kehutanan	N.A	100%	461,506,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	DINAS KEHUTANAA N
			3 Indeks Tutupan Lahan			34.75	5,744,071,000	34.9	6,183,088,000	35.1	6,359,713,000	35.6	7,310,733,000	36.1	6,802,852,000		
1 Program peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan							5,744,071,000		6,183,088,000		6,359,713,000		7,310,733,000		6,802,852,000		
	100 Peningkatan tutupan lahan	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah kebijakan berkaitan dengan tutupan lahan yang diimplementasika n	Urusan Lingkungan Hidup	N.A			1 Dok	250,000,000	1 Dok	250,000,000	4 Dok	1,000,000,000	1 Dok	250,000,000	1 Dok	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan Perundang- Undangan Bidang Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	58%	60%	400,000,000	62%	877,500,000	65%	1,000,125,000	67%	1,151,145,000	70%	1,323,264,000	70%	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)	Urusan Kehutanan	9.092,5 Hektar	1%	2,079,313,000	1%	1,729,588,000	1%	1,729,588,000	1%	1,729,588,000	1%	1,729,588,000	4.4% (9.492,5 Hektar)	DINAS KEHUTANAA N
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	Urusan Kehutanan	19.289 Hektar	2%	1,724,500,000	2%	1,726,000,000	2%	1,730,000,000	2%	1,730,000,000	2%	1,750,000,000	10.37% (21.289 Hektar)	DINAS KEHUTANAA N

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	Urusan Kehutanan	0	20%	1,540,258,000	20%	1,600,000,000	20%	1,650,000,000	20%	1,700,000,000	20%	1,750,000,000	100%	DINAS KEHUTANAA N
			Indeks Gas 4 Rumah Kaca (GRK)			4,245. 79	40,543,190,691	4,203. 34	13,411,424,345	4161.3	28,945,172,595	4,119. 69	44,401,838,875	4,078. 49	36,929,770,719		
1 Program pengendalian terhadap lingkungan Hidup							40,543,190,691		13,411,424,345		28,945,172,595		44,401,838,875		36,929,770,719		
	101 Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasika n	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	100%	348,600,000	100%	2,118,116,000	100%	4,223,350,000	100%	1,486,835,000	100%	560,250,000	100%	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase perusahaan yang mengimplementas ikan kajian lingkungan hidup	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	10%	225,000,000.00	18%	262,212,000.00	25%	301,545,000.00	31%	346,780,000.00	36%	398,850,000	36%	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	0%	681,782,407	0%	665,000,000	5%	2,000,000,000	10%	3,000,000,000	15%	4,500,000,000	15%	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	persentase penanganan tindak pidana kehutanan	Urusan Kehutanan	N.A		2,350,000,000		2,350,000,000		2,350,000,000		2,350,000,000		2,350,000,000		DINAS KEHUTANAA N
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	100%	2,226,846,850	100%	390,000,000.00	100%	441,500,000.00	100%	499,975,000.00	100%	566,471,250.00	100%	UPTB LABORATORI UM LINGKUNGAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	N.A	15%	900,396,000	13%	2,250,000,000	12%	2,250,000,000	10%	2,500,000,000	9%	3,000,000,000	9%	DINAS ESDM
			Nilai jaminan reklamasi	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	200 miliar	10 Miliar	103,945,000	10 Miliar	350,000,000	10 Miliar	350,000,000	10 Miliar	350,000,000	10 Miliar	350,000,000	10 Miliar	DINAS ESDM
			Persentase luas lahan yang tidak terganggu di areal ULP	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	6%	25%	900,396,000	43%		62%		81%		100%		100%	DINAS ESDM
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	N.A	18.18 %	1,667,400,000	40.91 %	200,000,000	63.64 %	200,000,000	81.82 %	200,000,000	6.86%	200,000,000	6.86%	DINAS ESDM
			Persentase pemenuhan Air Tanah dilokasi yang rawan air	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	N.A	1%	1,700,000,000			2%	1,300,000,000			2%	1,400,000,000	2%	DINAS ESDM
			Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	10 Obyek	10 Obyek	387,612,000	10 Obyek	150,000,000	10 Obyek	175,000,000	10 Obyek	200,000,000	10 Obyek	225,000,000	10 Obyek	DINAS ESDM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYAN TEKNIK TATA KELOLA DISHUT	Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola	Urusan Kehutanan	N.A		582,042,000		582,042,000		582,042,000		582,042,000		582,042,000		DINAS KEHUTANAA N
		PROGRAM TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Rasio jumlah perusahaan dengan jumlah Dokumen kajian lingkungan hidup yang diimplementasikan	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	17 Dok	434,825,000	15 Dok	368,116,000	15 Dok	423,350,000	15 Dok	486,835,000	15 Dok	560,250,000	15 Dok	DLH
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	urusan perhubungan	N.A		950,000,000	0.7%	1,500,000,000	1.2%	3,200,000,000	1.5%	3,340,000,000	1.7%	4,000,000,000	5.1%	DISHUB

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/out ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		DARAT															
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARA AN	Prosentase Angkutan Umum bandara udara yang layak jalan	urusan perhubunga n	N.A	20%	1,148,660,000	20.0%	478,660,000	20.0%	488,660,000	20.0%	498,660,000	20.0%	508,660,000	100.0%	DISHUB
		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung sektor lingkungan hidup yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan Renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	56,804,900	30%	59,645,145	35%	62,627,402	40%	65,758,772	40%	69,046,711	45%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Penelitian dan pengemban gan)	10%	25%	175,542,697	30%	150,000,000	35%	173,333,333	40%	190,000,000	40%	210,000,000	45%	BAPPEDA
	102 Pengembangan TPA Regional	PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada TPA Regional	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	0	681,782,408	-	665,000,000	0.05	2,000,000,000	0.1	3,000,000,000	0.15	4,500,000,000	0.15	DLH
		PROGRAM KECIPTA KARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di KPengembangan TPA Regional	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	N.A		0		300,000,000	25%	2,300,000,000	25%	4,300,000,000	50%	5,300,000,000	80%	PRKP
			Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan	N.A		0		300,000,000	25%	2,300,000,000	25%	4,300,000,000	50%	5,300,000,000	80%	PRKP

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outc ome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD yang Bertanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			di Pengembangan TPA Regional	Pemukiman													
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	800,000,000	25%	8,880,000,000	26%	1,768,000,000	26%	PUPR
			Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di TPA Regional	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	0%	0	0%	0	1%	500,000,000	20%	5,050,000,000	21%	555,000,000	21%	PUPR
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan TPA Regional yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an (Perencana an)	10%	25%	21,555,429	30%	22,633,200	35%	23,764,860	40%	24,953,103	40%	26,200,758	40%	BAPPEDA
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional	Urusan Pertanahan	N.A	80	25,000,000,000									80%	PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SDA	Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0%		5%	250,000,000	50%	2,500,000,000	100%	2,750,000,000.00			80%	PUPR
JUMLAH TOTAL							1,135,826,992,297		2,601,639,663,717		2,570,678,109,052		2,882,127,482,347		2,494,415,429,788		



PULAU KETAWAI - BANGKA TENGAH

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022**

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan memperhatikan pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik akan mewujudkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2012–2017 diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan yang berlaku; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan asas pemerataan pembangunan; dan (4) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang taat. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Memantapkan atau menata kembali Kelembagaan dan Sistem Operasional yang berkenaan dengan pendapatan daerah.

2. Melakukan peninjauan kembali terhadap perda terkait dengan retribusi dan pajak daerah, guna mengoptimalkan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi serta *cost effectiveness*.
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.
5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
7. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah, terutama optimalisasi retribusi
8. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan asset dan keuangan daerah.
9. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
10. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
11. Meningkatkan koordinasi dengan pusat sebagai upaya untuk menambah dana perimbangan keuangan daerah (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dengan mempertimbangkan karakteristik daerah kepulauan dan dana yang dikucurkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang masih baru dimekarkan.
12. Mencari alternatif pendanaan atau pinjaman luar Negeri dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta efektivitasnya dalam pembiayaan proyek-proyek yang produktif.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 5 jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya oleh Kabupaten/Kota.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga Tahun 2017 mendatang, prioritas kebijakan pendapatan daerah akan diarahkan melalui:

1. Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan serta implementasinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
2. Melakukan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
3. Melakukan kajian penerapan insentif pajak yang tepat untuk mendorong pengusaha untuk berinvestasi pada sektor-sektor strategis daerah.
4. Menjalankan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan sumber penerimaan lain, melalui pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (*Public Private Partnership*) dan swasta maupun *corporate social responsibility (CSR)*. Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi:
 - a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi dan kepastian berusaha di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lainnya dengan perjanjian yang disepakati.
 - c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat dan pengusaha lokal.
 - d. Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
 - e. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
 - f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

7.1.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Strategi belanja daerah Tahun 2012-2017 diarahkan untuk mendukung:

- a. Pencapaian pembangunan nasional 2015-2019 dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional (NAWACITA);
- b. *Dedicated program* Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui keseimbangan pembangunan desa-kota dan SATAM EMAS;
- c. Peningkatan sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Untuk itu, kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2012-2017 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, ekonomis, efisien dan efektif, yaitu:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung *dedicated program* Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.
2. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pelaksanaan urusan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
6. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDas 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan.

9. Penurunan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.
10. Dalam mendukung pengembangan aktivitas pembangunan ekonomi di perdesaan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
11. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 30%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
12. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
13. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
14. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - e. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
 - f. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa yang digunakan untuk

melaksanakan fungsi provinsi yang bersifat khusus dari Provinsi. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu mendukung keseimbangan pembangunan desa dan kota.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Selain itu juga terdapat peluang bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
3. Penyertaan modal disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016 sebagaimana ditampilkan pada Tabel VII.1.

Tabel VII.1
Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Belanja Tidak Langsung	764.754.923.151,24	808.318.501.177,15	855.780.981.423,84	1.080.851.837.395,72	1.210.045.497.804,63	12,46
1	Belanja Pegawai	216.271.987.558,98	246.900.473.917,87	274.339.635.936,42	312.375.890.443,08	396.188.739.549,20	16,49
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	197.922.560.259,16	220.160.775.826,00	167.022.782.500,00	257.790.335.224,00	403.743.237.430,00	24,52
5	Belanja Bantuan Sosial	669.500.000,00	2.661.950.000,00	745.500.000,00	666.700.000,00	717.060.000,00	55,65
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	212.792.435.968,20	177.381.055.670,28	212.859.716.663,42	303.413.474.847,19	156.076.110.183,43	-0,66
7	Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	137.098.439.365,00	161.262.245.763,00	200.796.461.884,00	206.510.260.515,00	251.916.010.142,00	16,74
8	Belanja Tidak Terduga	-	-	16.884.440,00	95.176.366,45	1.404.340.500,00	459,80
B	Belanja Langsung	567.283.796.419,73	801.347.935.283,16	240.305.877.055,36	789.106.648.899,98	860.475.761.617,69	52,17
1	Belanja Pegawai	49.903.757.399,42	79.233.302.203,68	70.712.733.013,01	81.446.272.543,00	99.603.780.686,93	21,37
2	Belanja Barang dan Jasa	226.599.150.786,94	319.348.056.189,02	364.039.655.088,00	743.942.522.699,00	531.095.000.241,86	32,67
3	Belanja Modal	290.780.888.233,37	402.766.576.890,46	305.553.488.954,35	233.717.853.657,98	229.776.980.688,90	-2,71
C	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	-68,75

No	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	-68,75
4	Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A+B+C)	1.342.038.719.570,97	1.612.166.436.460,31	1.096.086.858.479,20	1.874.957.846.295,70	2.070.521.259.422,32	17,40

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

7.1.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Jika memperhatikan kinerja pendapatan daerah pada 2012-2016, pendapatan daerah akan diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun kondisi perekonomian Bangka Belitung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memaksimalkan strategi dan kebijakan pendapatan daerah yang telah diuraikan diatas dalam meningkatkan Pertumbuhan dan realisasi PAD. Hal ini dapat dipahami karena disparitas PAD memiliki kecenderungan yang tinggi akibat kepastiannya masih rendah. Selama ini pendapatan daerah masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor yang bersifat *closed list* dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan (terbatas oleh ketersediaan ruang dan sarana prasarana infrastruktur), sehingga rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Jika memperhatikan proyeksi perekonomian nasional yang akan mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7%-8,0% pada periode 2015-2019 dengan asumsi perekonomian global tidak akan mengalami penurunan dalam periode 2010, stabilitas sektor keuangan dunia sudah pulih, serta harga komoditas pangan dan energi menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak tajam, maka pendapatan daerah pada tahun 2012 – 2016 diperkirakan akan dapat memberikan kontribusi terhadap belanja daerah rata-rata sebesar 84,62-89,90 persen.

Tabel VII.2
Prediksi Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah
Provinsi Kep Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD %
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	2.355.579.069.316,16	557.198.594.109,57	23,65
2019	2.716.665.913.570,00	877.111.940.920,58	32,29
2020	3.112.499.209.248,50	1.140.245.523.173,35	36,63
2021	3.605.624.169.710,93	1.482.319.180.125,36	41,11
2022	4.224.030.378.196,47	1.927.014.934.162,97	45,62

Sumber :BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Prediksi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2012-2017 diasumsikan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 7,20 persen. Sedangkan untuk pajak daerah diprediksi akan mengalami kenaikan secara bertahap rata-rata sebesar 6,59 persen pertahun, dengan asumsi kondisi perekonomian stabil. Demikian juga dengan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, dengan asumsi tumbuh rata-rata sebesar 29,57 persen.

Tabel VII.3
Prediksi PAD dan Retribusi Daerah
Provinsi Kep Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Retribusi Daerah	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	678.913.155.746,16	15.448.205.014,87	2,28
2019	1.000.000.000.000,00	15.448.205.014,87	1,54
2020	1.300.000.000.000,00	16.529.579.365,91	1,27
2021	1.690.000.000.000,00	21.488.453.175,68	1,27
2022	2.197.000.000.000,00	27.934.989.128,39	1,27

Sumber : BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Dalam era otonomi daerah, proporsi belanja daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Diperkirakan dalam periode 2018–2022, kebutuhan belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar 9–15 persen. Hal ini disebabkan harapan masyarakat Bangka Belitung terhadap keseimbangan pembangunan antara desa dan kota serta mendukung pencapaian pembangunan nasional 2015-2019 dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional (NAWACITA). Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan Visi dan Misi Pembangunan yang merupakan *dedicated program* sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat Bangka Belitung. Untuk itu, maka proporsi belanja langsung dan tidak langsung dalam periode 2018-2022 diupayakan sebesar 60-65 persen dan 35-40 persen.

Tabel VII.4
Proyeksi Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH BELANJA
(1)	(2)
2018	2.802.744.020.939,51
2019	3.113.442.917.590,61
2020	3.605.624.169.710,92
2021	4.224.030.378.196,47
2022	5.004.013.147.106,29

Sumber : BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Kondisi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun Tahun 2013-2017 sebesar 92-95 persen dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan sisanya untuk melakukan investasi.

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu yang sama pada Tahun 2018-2022, gambarannya seperti terlihat pada Tabel VII.5.

Tabel VII.5
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Lalu (SILPA) pada APBD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi
(1)	(2)
2018	86.078.107.369,51
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
Jumlah	86.078.107.369,51

Sumber : BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

7.1.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Jika memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada, maka merupakan modal pemerintah daerah untuk membiayai:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah serta melaksanakan amanat pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat PD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
- c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan ASN, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Adapun kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel VII.6 berikut:

Tabel VII.6
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Proyeksi				
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pendapatan	2.716.665.913.570,00	3.531.665.687.641,00	4.591.165.393.933,30	5.968.515.012.113,29	7.759.069.515.747,28
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	100.000.000.000,00	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (defisit)	49.752.685.847,82	64.678.491.602,17	84.082.039.082,82	109.306.650.807,66	49.752.685.847,82
	Total penerimaan	2.766.418.599.417,82	3.596.344.179.243,17	4.675.247.433.016,12	6.177.821.662.920,95	7.901.168.161.797,04
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	710.6534.094.090.45	749.186.798.794,82	783.496.138.734,67	822.670.945.671,40	863.804.492.954,97
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.055.764.505.327,37	2.847.157.380.448,35	3.981.751.294.281,45	5.355,150717.249,55	7.037.363.668.842,07

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang terus bertambah hingga Tahun 2022, demikian juga dengan proyeksi jumlah pengeluaran terus meningkat, maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu pengetatan dalam memilah program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya.
2. Perlunya peningkatan keperan sertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui skenario kemitraan pemerintah dan sektor swasta (*public private partnership*) maupun potensi *corporate social responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar diberbagai lapangan usaha di Kepulauan Bangka Belitung;
3. Reorganisasi struktur organisasi pemerintah daerah yang semakin relevan dengan posisi dan kedudukan pemerintahan provinsi yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada skala regional dan lintas kabupaten/kota. Dengan reorganisasi ini, akan diperlukan besaran organisasi yang lebih efisien serta gugus penugasan yang makin ahli dengan penguatan jabatan fungsional di berbagai lini.

Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana diuraikan pada Tabel VII.7.

Tabel VII.7
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Proyeksi				
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.055.764.505.327,37	2.847.157.380.448,35	3.981.751.294.281,45	5.355,150717.249,55	7.037.363.668.842,07
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	1.235.312.313.465,00	1.605.906.007.504,50	2.087.677.809.755,85	2.713.981.152.682,60	3.528.175.498.487,39
II.b	Pembentukan dana cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	Dikurangi:					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	1.252.312.313.465,00	1.625.906.007.504,50	2.107.677.809.755,85	2.733.981.152.682,60	3.548.175.498.487,39
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	13.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	0,00				
III.a	Belanja Tidak Langsung	1.714.542.858.740,49	1.921.610.010.554,77	2.017.440.511.082,51	2.118.062.536.636,64	2.223.715.663.468,47
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)	1.714.542.858.740,49	1.921.610.010.554,77	2.017.440.511.082,51	2.118.062.536.636,64	2.223.715.663.468,47

Sumber : *Proyeksi dan Perhitungan Bakuda, 2016*

Selanjutnya Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022, digambarkan seperti terlihat pada Tabel VII.8.

Tabel VII.8
Proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Proyeksi APBD					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.355.579.069.316,16	2.716.665.913.570,00	3.112.499.209.248,50	3.605.624.169.710,93	4.224.030.378.196,47	5.004.013.147.106,29
1.1	Pendapatan asli daerah	678.913.155.746,16	1.000.000.000.000,00	1.300.000.000.000,00	.690.000.000.000,00	2.197.000.000.000,00	2.856.100.000.000,00
1.1.1	Pajak daerah	557.198.594.109,57	877.111.940.902,58	1.140.245.523.173,35	1.482.319.180.125,36	1.927.014.934.162,97	2.505.119.414.411,86
1.1.2	Retribusi daerah	15.448.205.014,87	15.448.205.014,87	16.529.579.365,91	21.488.453.175,68	27.934.989.128,39	36.315.485.866,90
1.1.3	Hasil pengelolaan kekeyaaan daerah yang dipisahkan	8.500.000.000,00	8.592.123.109,79	11.169.760.042,73	14.520.688.055,55	18.876.894.472,21	24.539.962.813,87
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	97.766.356.621,72	97.766.356.621,72	127.096.263.608,24	165.225.142.690,71	214.792.685.497,92	279.230.491.147,29
1.2	Dana Perimbangan	1.666.665.913.570,00	1.666.665.913.570,00	1.749.999.209.248,50	1.837.499.169.710,93	1.929.374.128.196,47	2.025.842.834.606,29
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	175.828.126.000,00	175.828.126.000,00	184.619.532.300,00	193.850.508.915,00	203.543.034.360,75	213.720.186.078,79
1.2.2	Dana alokasi umum	1.035.119.230.570,00	1.035.119.230.570,00	1.086.875.192.098,50	1.141.218.951.703,43	1.198.279.899.288,60	1.258.193.894.253,03
1.2.3	Dana alokasi khusus	455.718.557.000,00	455.718.557.000,00	478.504.484.850,00	502.429.709.092,50	527.551.194.547,13	553.928.754.274,48
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	10.000.000.000,00	50.000.000.000,00	62.500.000.000,00	78.125.000.000,00	97.656.250.000,00	122.070.312.500,00
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Sumbangan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.355.579.069.316,16	2.716.665.913.570,00	3.112.499.209.248,50	3.605.624.169.710,93	4.224.030.378.196,47	5.004.013.147.106,29
2	BELANJA DAERAH	2.802.744.020.939,51	3.113.442.917.590,61	3.605.624.169.710,92	4.224.030.378.196,47	5.004.013.147.106,29	21.415.978.088.487,90
2.1.1	Belanja pegawai	710.654.094.090,45	746.186.798.794,97	764.841.468.764,85	803.083.542.203,09	815.129.795.336,14	4.550.549.793.279,94
2.1.2	Belanja bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Proyeksi APBD					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1.4	Belanja hibah	339.437.684.969,00	356.409.569.217,45	365.319.808.447,89	370.799.605.574,61	374.507.601.630,35	2.117.914.169.839,29
2.1.5	Belanja bantuan sosial	943.000.000,00	990.150.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.876.150.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	339.248.884.243,07	356.211.328.455,22	400.737.744.512,12	440.811.518.963,33	462.852.094.911,50	2.344.593.549.072,89
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	172.148.044.172,00	180.755.446.380,60	189.793.218.699,63	199.282.879.634,61	209.247.023.616,34	1.067.982.035.027,18
2.1.8	Belanja tidak terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	30.297.043.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.235.312.313.465,00	1.467.889.624.742,37	1.878.931.929.286,44	2.404.052.831.820,83	3.136.276.631.611,96	11.298.765.348.268,60
2.2.1	Belanja pegawai	148.234.645.800,00	151.940.511.945,00	155.739.024.743,63	159.632.500.362,22	163.623.312.871,27	927.404.641.522,11
2.2.2	Belanja barang dan jasa	579.449.189.781,00	586.982.029.248,15	594.612.795.628,38	602.342.761.971,55	610.173.217.877,18	3.553.009.184.287,26
2.2.3	Belanja modal	507.628.477.884,00	685.901.150.212,04	829.293.559.033,51	971.526.986.985,19	1.150.923.023.834,45	4.593.891.379.710,19
	Jumlah belanja	2.802.744.020.939,51	3.112.499.209.248,50	3.605.624.169.710,92	4.224.030.378.196,47	5.004.013.147.106,29	21.415.034.380.145,80
	Surplus/(defisit)	(86.078.107.369,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	(86.078.107.369,51)
	Penerrimaan Pembiayaan	119.078.107.369,51	32.000.000.000,00	45.000.000.000,00	41.000.000.000,00	44.000.000.000,00	596.622.492.997,47
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	86.078.107.369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	119.078.107.369,51	32.000.000.000,00	45.000.000.000,00	41.000.000.000,00	44.000.000.000,00	596.622.492.997,47
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Proyeksi APBD					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembentukan Dana cadangan	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	119.078.107.369,51	32.000.000.000,00	45.000.000.000,00	41.000.000.000,00	44.000.000.000,00	596.622.492.997,47
	Penyertaan modal (Investasi) daerah	0,00	13.000.000.000,00	25.000.000.000,00	21.000.000.000,00	24.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	33.000.000.000	32.000.000.000,00	45.000.000.000,00	41.000.000.000,00	44.000.000.000,00	200.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	86.078.369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Kebijakan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung tahun anggaran 2017-2022 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, ekonomis, efisien dan efektif, yaitu:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung *dedicated program* Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung program prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
3. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pelaksanaan urusan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
4. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
7. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, peningkatan akses terhadap pendidikan serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
9. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
10. Pengembangan sektor pariwisata terutama pada daerah-daerah tujuan wisata, pemberdayaan masyarakat di daerah tujuan wisata, budaya dan olah raga dalam mendukung pengembangan pariwisata serta pemenuhan sarana prasarana keolah ragaan dalam mendukung pariwisata.

11. Penurunan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.
12. Dalam mendukung pengembangan aktivitas pembangunan ekonomi di perdesaan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
13. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 30%, pengendalian bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
14. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
15. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
16. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - e. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
 - f. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa yang digunakan untuk

melaksanakan fungsi provinsi yang bersifat khusus dari Provinsi. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu mendukung keseimbangan pembangunan desa dan kota. Secara khusus belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan melalui Program Gerakan Pembangunan Memajukan Desa (GERBANG MASA)

Dalam melaksanakan program Perangkat Daerah kita senantiasa mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian maka program yang disusun memberi keyakinan akan dapat dibiayai sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya gambaran kerangka pendanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel VII.9.

Tabel VII.9
Tabel Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2018-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi				
		2018	2019	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kapasitas Riil Keuangan					
	BELANJA					
	Belanja Tidak Langsung	1.567.431.707.475,00	1.645.553.292.848,00	1.726.692.240.424,00	1.819.977.546.376,00	1.867.736.515.494,00
	Belanja Pegawai	710.654.094.090,45	746.186.798.794,97	764.841.468.764,85	803.083.542.203,09	815.129.795.336,14
	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
	Belanja Hibah	339.437.684.969,00	356.409.569.217,45	365.319.808.447,89	370.799.605.574,61	374.507.601.630,35
	Belanja Bantuan Sosial	943.000.000,00	990.150.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Belanja Bagi Hasil	339.248.884.243,07	356.211.328.455,22	400.737.744.512,12	440.811.518.963,33	462.852.094.911,50
	Belanja Bantuan Keuangan	172.148.044.172,00	180.755.446.380,60	189.793.218.699,63	199.282.879.634,61	209.247.023.616,34
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Belanja Langsung	1.235.312.313.465,00	1.424.823.691.405,00	1.579.645.379.406,00	1.733.502.249.319,00	1.924.719.554.583,00
	Belanja Pegawai	148.234.645.800,00	151.940.511.945,00	155.739.024.743,63	159.632.500.362,22	163.623.312.871,27
	Belanja Modal	579.449.189.781,00	586.982.029.248,15	594.612.795.628,38	602.342.761.971,55	610.173.217.877,18
	Belanja Barang dan Jasa	507.628.477.884,00	685.901.150.212,04	829.293.559.033,51	971.526.986.985,19	1.150.923.023.834,45

7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas

Indikasi rencana program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berisi program prioritas untuk perencanaan strategis yaitu untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah serta program prioritas untuk perencanaan operasional yaitu untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Sebagaimana telah dirumuskan pada Bab VI, indikasi rencana program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 terdiri dari 45 program pembangunan daerah yang dirumpunkan kedalam 24 Urusan Wajib, 6 Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan program prioritas dibutuhkan sejumlah dana sehingga disusunlah pagu indikatif yang penghitungannya berdasarkan pendekatan prioritas program. Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun juga oleh sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, pagu indikatif yang dicantumkan dalam Tabel VII.1 hanya bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaanselengkapnya disajikan padaTabel VII.10.

Tabel VII.10
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN WAJIB																
TERKAIT PELAYANAN DASAR																
PENDIDIKAN																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		65.13	70	31,809,520,000	81	26,935,000,000	82	28,925,000,000	83	30,165,000,000	84	30,665,000,000	85	148,499,520,000	Dinas Pendidikan
	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan
Program Peningkatan dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	Urusan Pendidikan	100	100	2,924,400,000	100	2,982,000,000	100	3,040,800,000	100	3,100,800,000	100	3,162,000,000	100	15,210,000,000	Dinas Pendidikan
	APK SMA	Urusan Pendidikan	0.3313	0.3529	7,000,000,000	0.3888	37,000,000,000	0.4063	39,500,000,000	0.4343	42,000,000,000	0.4394	45,000,000,000	0.4394	170,500,000,000	Dinas Pendidikan
	Persentase SMA terakreditasi A	Urusan Pendidikan	33,33%	0.3788	9,500,000,000	0.4242	0	0.5	0	0.5606	0	0.6061	0	0.6061	9,500,000,000	Dinas Pendidikan
	APK SMA Perempuan														0	Dinas Pendidikan
	APK SMA Laki-Laki														0	Dinas Pendidikan
	Rata-rata nilai UN SMA	Urusan Pendidikan	6.2	6.3	3,000,000,000	6.5	0	6.8	0	7	0	7.3	0	7.3	3,000,000,000	Dinas Pendidikan
Program Peningkatanan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus-	APK SLB	Urusan Pendidikan	0	0	3,700,000,000	0	13,600,000,000	0	14,700,000,000	0	15,900,000,000	0	17,350,000,000	0	65,250,000,000	Dinas Pendidikan
	Persentase SLBterakreditasi A	Urusan Pendidikan	77.78	1	1,500,000,000	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1,500,000,000	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan-	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian, perkebunan dan perternakan yang	Urusan Pendidikan	50	100	582,776,471	100	627,511,765	100	682,558,824	100	715,547,059	100	747,082,353	100	3,355,476,472	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	memiliki akreditasi A															
	Persentase SMK Pertanian dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Urusan Pendidikan	0	0	582,776,471	50	627,511,765	50	682,558,824	100	715,547,059	100	747,082,353	100	3,355,476,472	Dinas Pendidikan
	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian perikanan yang memiliki akreditasi A	Urusan Pendidikan	50	50	582,776,471	100	627,511,765	100	682,558,824	100	715,547,059	100	747,082,353	100	3,355,476,472	Dinas Pendidikan
	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Urusan Pendidikan	50	50	582,776,471	100	627,511,765	100	682,558,824	100	715,547,059	100	747,082,353	100	3,355,476,472	Dinas Pendidikan
	Persentase SMK pariwisata Terkreditasi A	Urusan Pendidikan	66.67	100	582,776,471	100	627,511,765	100	682,558,824	100	715,547,059	100	747,082,353	100	3,355,476,472	Dinas Pendidikan
	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Urusan Pendidikan	0	33.33	582,776,471	33.33	627,511,765	66.66	682,558,824	66.66	715,547,059	100	747,082,353	100	3,355,476,472	Dinas Pendidikan
	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	Urusan Pendidikan	100	100	2,128,800,000	100	2,170,800,000	100	2,214,000,000	100	2,257,200,000	100	2,301,600,000	100	11,072,400,000	Dinas Pendidikan
	APK SMK	Urusan Pendidikan	0.3144	0.350	6,000,000,000	0.384	35,479,905,882	0.406	38,739,529,412	0.443	40,675,623,529	0.486	42,523,341,176	0.486	163,418,399,999	Dinas Pendidikan
	APK SMK Laki-laki		0	36.17		39.27		41.15		44.4		48.19		48.19	-	Dinas Pendidikan
	APK SMK Perempuan		29.23	33.72		37.44		40.09		44.23		49.07		49.07	-	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase SMK terakreditasi A	Urusan Pendidikan	0.3148	0.34	2,232,178,077	0.4	0	0.4	0	0.52	0	0.60	0	0.60	2,232,178,077	Dinas Pendidikan
	Rata-rata nilai UN SMK	Urusan Pendidikan	6.2	6.4	3,483,710,000	6.5	0	6.7	0	6.8	0	7	0	7	3,483,710,000	Dinas Pendidikan
	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	Urusan Pendidikan	0.3148	0.3393	2,232,178,077	0.386	0	0.4483	0	0.5172	0	0.6034	0	0.6034	2,232,178,077	Dinas Pendidikan
	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	Urusan Pendidikan	1	1	2,232,178,077	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2,232,178,077	Dinas Pendidikan
	Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang memiliki akreditasi A	Urusan Pendidikan	0	1	582,776,471	1	627,511,765	1	682,558,824	1	715,547,059	1	747,082,353	1	3,355,476,472	Dinas Pendidikan
	Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatanyang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Urusan Pendidikan	0	0	582,776,471	0	627,511,765	1	682,588,824	1	715,547,059	1	747,082,353	1	3,355,506,472	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan-	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	Urusan Pendidikan	92,48%	95%	1,727,664,667	97%	7,500,000,000	1	9,000,000,000	1	10,200,000,000	1	11,100,000,000	1	39,527,664,667	Dinas Pendidikan
	PersentaseGuru Bersertifikat Pendidik	Urusan Pendidikan	0.3482	0.36	1,727,664,667	0.4	0	0.45	0	0.5	0	0.6	0	0.6	1,727,664,667	Dinas Pendidikan
	Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	Urusan Pendidikan	0.8216	0.85	1,727,664,667	0.9	0	0.95	0	1	0	1	0	1	1,727,664,667	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	Urusan Pendidikan	1	1	44,434,572,000	1	46,656,300,200	1	48,989,115,660	1	51,428,571,427	1	54,010,499,982	1	245,519,059,269	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayahBelitung dan Belitung Timur	Urusan Pendidikan	N.A	0.7661	29,501,200,000	0.7929	31,271,000,000	0.8197	33,131,400,000	0.8464	35,032,200,000	0.9	37,349,000,000	0.9	166,284,800,000	Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLBdi wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Urusan Pendidikan	N.A	0.7661	37,593,500,000	0.7929	38,868,000,000	0.8197	40,998,600,000	0.8464	44,368,600,000	0.9	47,391,800,000	0.9	209,220,500,000	Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Nilai IndeksKepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayahBangka Tengah dan Bangka Selatan	Urusan Pendidikan	N.A	0.7661	35,924,000,000	0.7929	39,479,000,000	0.8197	41,795,200,000	0.8464	44,293,000,000	0.9	46,026,800,000	0.9	207,518,000,000	Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayahBangka Barat	Urusan Pendidikan	N.A	0.7661	15,901,800,000	0.7929	16,815,200,000	0.8197	18,114,800,000	0.8464	19,214,400,000	0.9	20,185,000,000	0.9	90,231,200,000	Dinas Pendidikan
Kesehatan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		N.A	70	6,019,537,377	75	6,517,494,246	80	6,843,368,958	85	7,185,537,407	90	7,544,814,277	90	34,110,752,265	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		67.98	76		82		85		88		92		92		Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan	Persentase kepesertaan JKN	Urusan Kesehatan	78	78	17,725,148,408	92	20,127,800,000	100	22,140,580,000	100	24,354,638,000	100	26,790,101,800	100	111,138,268,208	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 PKM yang tersertifikasi akreditasi	Urusan Kesehatan	N.A	35.94	1,718,769,773	59.38	2,200,000,000	73.44	2,420,000,000	73.44	2,662,000,000	73.44	2,928,200,000	73.44	11,928,969,773	Dinas Kesehatan
	Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	Urusan Kesehatan	N.A	64.29	1,718,769,773	71.43	2,200,000,000	71.43	2,420,000,000	71.43	2,662,000,000	71.43	2,928,200,000	71.43	11,928,969,773	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	Urusan Kesehatan	N.A	60	515,630,932	75	660,000,000	85	726,000,000	95	798,600,000	100	878,460,000	100	3,578,690,932	Dinas Kesehatan
Program Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	Urusan Kesehatan	N.A	63	211,185,630	65	417,780,000	70	4,595,880,000	75	5,055,468,000	80	5,561,014,800	80	15,841,328,430	Dinas Kesehatan
	Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	Urusan Kesehatan	N.A	79	1,289,077,330	82	1,650,000,000	84	1,815,000,000	87	1,996,500,000	90	2,196,150,000	90	8,946,727,330	Dinas Kesehatan
	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Urusan Kesehatan	N.A	7	1,117,376,527	7	1,430,000,000	7	1,573,000,000	7	1,730,300,000	7	1,903,330,000	7	7,754,006,527	Dinas Kesehatan
	Angka kematian ibu per kelahiran hidup	Urusan Kesehatan	N.A	23	1,435,172,761	22	1,837,000,000	21	2,020,700,000	20	2,222,770,000	19	2,445,047,000	19	9,960,689,761	Dinas Kesehatan
	Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS/ Presentase	Urusan Kesehatan	N.A	70	1,854,302,504	80	2,373,000,000	90	2,610,000,000	90	2,871,000,000	90	3,158,000,000	90	12,866,302,504	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	rumah tangga yang berperilaku hidup Bersih dan Sehat (PHBS))															
	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	Urusan Kesehatan	0	0	225,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000,000	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas Ibu Hamil	Urusan Kesehatan	0	0	115,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,250,000	Dinas Kesehatan
	Persentase lansia yang dilayani sesuai standar kesehatan	Urusan Kesehatan	N.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas yang melayani kekerasan terhadap perempuan dan anak	Urusan Kesehatan	N.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan	Urusan Kesehatan	0.144	0.1435	1,674,240,600	0.143	2,431,000,000	0.1425	2,674,000,000	0.142	2,942,000,000	0.1415	3,236,000,000	0.1415	12957240600	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Urusan Kesehatan	N.A	23	620,946,398	33	330,000,000	43	363,000,000	53	399,300,000	63	439,230,000	63	2152476398	Dinas Kesehatan
	Persentase perempuan usia 30 s.d 50 tahun yang dideteksi dini kanker	Urusan Kesehatan	N.A	18	128,907,733	23	165,000,000	28	181,500,000	33	199,650,000	38	219,615,000	38	894,672,733	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	serviks dan payudara															
	Persentase menurunnya penyakit tidak menular lainnya	Urusan Kesehatan	N.A	33	257,815,466	32	330,000,000	31	363,000,000	30	399,300,000	29	439,230,000	29	1,789,345,466	Dinas Kesehatan
	Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes Rate minimal 85%)	Urusan Kesehatan	N.A	71	257,815,466	86	330,000,000	86	363,000,000	86	399,300,000	100	439,230,000	100	1,789,345,466	Dinas Kesehatan
	Prevalensi HIV pada penduduk resiko	Urusan Kesehatan	N.A	10	644,796,480	10	825,000,000	10	908,000,000	10	999,000,000	10	1,098,900,000	10	4,475,696,480	Dinas Kesehatan
	Persentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria	Urusan Kesehatan	N.A	86	257,815,466	86	330,000,000	100	363,000,000	100	399,300,000	100	439,230,000	100	1,789,345,466	Dinas Kesehatan
	persentase penanganan penyakit menular lainnya	Urusan Kesehatan	N.A	100	859,384,887	100	1,100,000,000	100	1,210,000,000	100	1,331,000,000	100	1,464,100,000	100	5,964,484,887	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas/Rumah sakit yang melayani Institusi Pelayanan Wajib Lapor (IPWL) Napza	Urusan Kesehatan	N.A	25	152,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,500,000	Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	Urusan Kesehatan	0.7	0.8	1,987,176,600	0.8	1,650,000,000	0.9	1,815,000,000	0.9	1,997,000,000	1	2,196,000,000	1	9,645,176,600	Dinas Kesehatan
	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat	Urusan Kesehatan	0.08	0.1	575,125,000	0.15	1,300,000,000	0.2	1,350,000,000	0.25	1,375,000,000	0.3	1,400,000,000	0.3	1,331,000,000	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi															
	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	Urusan Kesehatan	1.00	1.00	0	1.00	350,000,000	1.00	480,000,000	1.00	500,000,000	1.00	550,000,000	1.00	17,835,400,000	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah tenaga/SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Urusan Kesehatan	N.A	2076	1,784,437,091	2284	4,028,000,000	2512	4,746,000,000	2763	5,464,000,000	3039	6,182,000,000	0	22,204,437,091	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Urusan Kesehatan	N.A	90	1,281,527,634	94	1,640,100,000	96	1,804,110,000	98	1,984,521,000	100	2,182,973,100	100	8,893,231,734	Dinas Kesehatan
	Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	Urusan Kesehatan	N.A	90	285,797,897	91	365,200,000	92	401,720,000	93	441,892,000	94	486,081,200	94	1,980,691,097	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Kesehatan	Urusan Kesehatan	0.8	1	500,000,000	1	550,000,000	1	600,000,000	1	650,000,000	1	700,000,000	1	3,000,000,000	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	Urusan Kesehatan	N.A	9	780,789,200.00	14	0	17	0	19	0	19	0	19	780,789,200	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		85	85	10,045,514,500	85	12,685,653,000	85	17,025,361,000	90	17,745,194,000	90	18,687,902,000	90	76,189,624,500	RSUP
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		60.1	76		82		85		88		92		92		RSUP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Peningkatan Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis	Presentase Ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit	Urusan Kesehatan	62	0.7	5,654,490,000	0.8	13,000,000,000	0.85	11,993,000,000	0.9	12,000,000,000	0.95	12,770,000,000	0.95	55,417,490,000	RSUP
	Nilai Tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi	Urusan Kesehatan	1	Persiapan Akreditasi Paripurna (25%)	4,000,000,000	Persiapan Akreditasi Paripurna (50%)	6,000,000,000	Persiapan Akreditasi Paripurna (75%)	6,500,000,000	Akreditasi Paripurna (100%)	7,000,000,000	Akreditasi Paripurna (100%)	7,500,000,000	Akreditasi Paripurna (100%)	31,000,000,000	RSUP
	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	Urusan Kesehatan	100	1	8,400,000,000	1	14,400,000,000	1	15,840,000,000	1	17,424,000,000	1	19,166,400,000	0	75,230,400,000	RSUP
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan	LOS (Length of Stay)	Urusan Kesehatan	3 hari	6-9 hari	7,672,373,000	6-9 hari	2,000,000,000	6-9 hari	2,000,000,000	6-9 hari	2,000,000,000	6-9 hari	2,000,000,000	6-9 hari	15,672,373,000	RSUP
Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP	Urusan Kesehatan	N.A	0.75	14,000,000,000	0.8	7,938,665,600	0.85	8,539,715,440	0.9	10,044,672,000	0.95	10,648,372,000	0.95	51,171,425,040	RSUP
	Nilai IndeksKepuasan Masyarakat Terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit	Urusan Kesehatan	N.A	0.75	224,568,000	0.8	251,710,000	0.85	251,710,000	0.87	251,710,000	0.9	251,710,000	0.9	1,231,408,000	RSUP
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP	Persentase dana BLUD RSUP yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat	Urusan Kesehatan	N.A	1	3,000,000,000	1	3,500,000,000	1	4,000,000,000	1	4,500,000,000	1	5,000,000,000	1	20,000,000,000	RSUP
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		80	80	12,419,019,000	85	26,454,226,400	90	36,227,496,140	95	33,471,582,300	100	35,664,566,780	100	144,236,890,620	RSJ
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		70.16	76		82		85		88		92		92		RSJ

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza	Prosentase Penduduk yang mengalami gangguan jiwa danmendapatkan pelayanan kesehatan	Urusan Kesehatan	85	90	0	90	4,438,665,600	95	4,539,715,440	95	5,544,672,000	95	5,648,372,000	92.5	20,171,425,040	RSJ
	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi	Urusan Kesehatan	50	42	800,000,000	42	0	42	0	42	0	42	0	42	800,000,000	RSJ
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Teknis Medik Kejiwaan	Urusan Kesehatan	78	80	50,500,000	85	0	90	0	95	0	95	0	87.5	50,500,000	RSJ
	Persentase layanan kesehatanyang terintegrasi pelayanan kesehatan jiwa yang berfungsi aktif	Urusan Kesehatan	60	80	350,000,000	85	0	85	0	90	0	100	0	85	350,000,000	RSJ
	Persentase masyarakat yang direhabilitasi sosial yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	Urusan Kesehatan	65	80	800,000,000	85	0	90	0	95	0	100	0	87.5	800,000,000	RSJ
	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	Urusan Kesehatan	50	75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	82.5	-	RSJ
Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza	Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	Urusan Kesehatan	75	90	200,000,000	95	1,197,809,000	100	1,208,000,000	100	1,236,000,000	100	1,308,000,000	100	5,149,809,000	RSJ
	Persentase ketersediaan	Urusan Kesehatan	70	75	173,518,283	80	0	85	181,050,000	90	0	95	59,000,000	82.5	413,568,283	RSJ

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pelayanan sesuai standar															
	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi	Urusan Kesehatan	50	55	275,000,000	60	0	65	150,000,000	70	0	75	0	62.5	425,000,000	RSJ
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ	Urusan Kesehatan	80	90	9,747,098,000	95	25,383,000,000	100	23,897,302,375	100	19,666,109,934	100	20,656,909,106	100	99,350,419,415	RSJ
	Persentase Obat dan Perbekalan Kesehatan	Urusan Kesehatan	90	95	1,513,391,717	95	2,518,700,000	100	2,519,000,000	100	2,520,000,000	100	2,521,000,000	100	11,592,091,717	RSJ
Program Badan Layanan Umum Daerah RSJ	Persentase dana BLUD RSJ yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat	Urusan Kesehatan	70	75	7,000,000,000	80	7,500,000,000	85	8,000,000,000	90	8,500,000,000	95	9,000,000,000	85	40,000,000,000	RSJ
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan		100	100	5,537,943,254	100	6,204,295,000	100	6,364,295,000	100	6,504,295,000	100	6,644,295,000	100	31,255,123,254	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		61.79	76		82		85		88		92		92		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Kebinamargaan	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.935	0.945	9,173,480,000	0.955	17,757,836,800	0.965	19,533,620,480	0.975	21,486,982,528	0.985	23,635,680,781	0.995	91,587,600,589	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan	0.87	0.88	5,125,000,000	0.89	332,739,256	0.9	366,013,181	0.91	5,402,614,499	0.92	942,875,949	0.93	12,169,242,885	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Strategis KTM Batu Betumpang	Ruang														
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.9095	0.9195	11,264,460,644	0.9295	20,522,005,508	0.9395	22,574,206,059	0.9495	24,831,626,665	0.9595	27,314,789,332	0.9695	106,507,088,208	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.83	0.84	0	0.85	16,449,300,928	0.86	18,094,231,021	0.87	19,903,654,123	0.88	21,894,019,535	0.89	76,341,205,607	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	850,000,000	0.25	8,935,000,000	0.26	1,828,500,000	0.27	11,613,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	450,000,000	0.2	5,045,000,000	0.21	549,500,000	0.22	6,044,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	650,000,000	0.25	8,715,000,000	0.26	1,586,500,000	0.27	10,951,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	400,000,000	0.2	5,040,000,000	0.21	544,000,000	0.22	5,984,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.9585	0.9685	2,215,258,000	0.9785	2,436,783,800	0.98	2,680,462,180	0.99	10,948,508,398	0.995	4,043,359,238	0.995	22,324,371,616	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.93	0.94	235,490,927	0.95	259,040,020	0.96	284,944,022	0.97	5,313,438,424	0.98	844,782,267	0.99	6,937,695,660	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.9251	0.9351	29,581,883,353	0.9451	175,539,390,280	0.9551	193,093,329,308	0.9651	212,402,662,239	0.9751	233,642,928,463	0.9851	844,260,193,643	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.84	0.85	13,400,784,644	0.86	34,540,863,108	0.87	37,994,949,419	0.88	46,794,444,361	0.89	46,473,888,797	0.9	179,204,930,329	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis ASDP Manggar dan Ketapang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	900,000,000	0.25	8,990,000,000	0.26	1,889,000,000	0.27	11,779,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik diKawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	550,000,000	0.2	5,055,000,000	0.21	560,500,000	0.22	6,165,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dankawasan lintas timur Pulau Bangka	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.93	0.94	10,128,018,000	0.95	11,140,819,800	0.96	12,254,901,780	0.97	13,480,391,958	0.98	14,828,431,154	0.99	61,832,562,692	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dankawasan lintas timur Pulau Bangka	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.87	0.88	2,381,290,232	0.89	5,119,419,256	0.9	5,631,361,181	0.91	11,194,497,299	0.92	7,313,947,029	0.93	31,640,514,997	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	900,000,000	0.25	8,990,000,000	0.26	1,889,000,000	0.27	11,779,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	550,000,000	0.2	5,055,000,000	0.21	560,500,000	0.22	6,165,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Kota Tua Mentok	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	650,000,000	0.25	8,715,000,000	0.26	1,586,500,000	0.27	10,951,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik	Urusan Pekerjaan Umum dan	0	0	0	0	-	0.01	470,000,000	0.2	5,047,000,000	0.21	551,700,000	0.22	6,068,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	di Kawasan Kota Tua Mentok	Penataan Ruang														Tata Ruang
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.02	750,000,000	0.01	1,000,000,000	0.25	3,000,000,000	0.26	4,750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.02	300,000,000	0.01	500,000,000	0.2	3,000,000,000	0.21	3,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantapdi Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.02	750,000,000	0.02	850,000,000	0.01	1,000,000,000	0.25	3,000,000,000	0.26	5,600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baikdi Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.02	350,000,000	0.02	500,000,000	0.01	500,000,000	0.2	3,000,000,000	0.21	4,350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.02	750,000,000	0.01	1,000,000,000	0.25	3,000,000,000	0.26	4,750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.02	300,000,000	0.01	500,000,000	0.2	3,000,000,000	0.21	3,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektifitasPulau	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.8925	0.9025	5,379,938,000	0.9125	5,917,931,800	0.9225	6,509,724,980	0.9325	7,160,697,478	0.9425	7,876,767,226	0.9525	32,845,059,484	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Bangka dengan Pulau Sumatera															
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektifitasPulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.8	0.81	1,095,365,304	0.82	2,204,901,834	0.83	1,425,392,017	0.84	1,567,931,219	0.85	1,724,724,341	0.86	8,018,314,715	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	650,000,000	0.25	8,715,000,000	0.26	1,586,500,000	0.27	10,951,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	470,000,000	0.2	5,047,000,000	0.21	551,700,000	0.22	6,068,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	750,000,000	0.25	8,825,000,000	0.26	1,707,500,000	0.26	11,282,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	550,000,000	0.2	5,055,000,000	0.21	560,500,000	0.21	6,165,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan	0	0	0	0	-	0.01	600,000,000	0.25	8,660,000,000	0.26	1,526,000,000	0.26	10,786,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	industri terpadu air kelik	Ruang														
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan strategis industri terpadu air kelik	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	480,000,000	0.2	5,048,000,000	0.21	552,800,000	0.21	6,080,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.8878	0.8978	4,323,300,000	0.9078	13,870,579,800	0.9178	15257637780	0.9278	16783401558	0.9378	18461741714	0.9478	68,696,660,852	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.85	0.86	5,189,562,171	0.87	11,208,518,388	0.88	12329370227	0.89	13562307250	0.9	14918537975	0.91	57,208,296,011	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	600000000	0.25	8660000000	0.26	1526000000	0.27	10,786,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Presentase panjang jembatan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.01	480,000,000	0.2	5,048,000,000	0.21	552800000	0.22	6,080,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang jalan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.36%	88.36%	13,263,718,000	89.36%	14,590,089,800	90.36%	16,049,098,780	91.36%	25,654,008,658	92.36%	20,219,409,524	93.36%	89,776,324,762	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Panjang jembatan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.36%	0.00%	-	0.00%	-	90.36%	16,049,098,780	0.00%	-	92.36%	20,219,409,524	93.36%	36,268,508,304	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.93	0.94	8,630,639,498	0.95	15,693,703,448	0.96	17,063,073,793	0.97	20,769,381,172	0.98	34,846,319,289	0.99	97003117200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.93	0.94	7,678,434,316	0.95	34,146,277,748	0.96	44,560,905,522	0.97	56,016,996,075	0.98	68,618,695,682	0.98	211,021,309,343	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase jalan provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	0	30,553,000,000	0	50,830,650,000	0	65,222,182,500	0	75,733,291,625	0	85,369,956,206	0	307,709,080,331	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jembatan Provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	0	15,000,000,000	0	20,000,000,000	0	25,500,000,000	0	30,000,000,000	0	35,000,000,000	0	125,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.007	0.008	2,785,270,200	0.009	3,063,797,220	0.010	3,370,176,942	0.010	3,707,194,636	0.011	4,077,914,100	0.011	17,004,353,098	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.0002	0.0007	600,000,000	0.0012	660,000,000	0.002	726,000,000	0.002	798,600,000	0.003	878,460,000	0.003	3,663,060,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.59	0.95	8,591,960,316	0.96	9,021,558,332	0.97	9,472,636,248	0.98	9,946,268,061	0.99	10,443,581,464	1	47,476,004,421	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.8	0.81	6,034,724,930	0.82	6,638,197,423	0.83	7,302,017,165	0.84	8,032,218,881	0.85	8,835,440,770	0.86	36,842,599,169	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	0	0.01	800,000,000	0.25	8,880,000,000	0.26	1,768,000,000	0.26	11,448,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di TPA Regional	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	0	0.01	500,000,000	0.2	5,050,000,000	0.21	555,000,000	0.21	6,105,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
ProgramPenataan Ruang dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Kota Terpadu Mandiri Gantung	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	0.5	1,000,000,000	0.75	500,000,000	1	1,000,000,000	1.00	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian LadaAir Gegas yang di implementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	0	0	ada	750,000,000	0	0	0	0	0	0	ada	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang di implementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	0	0	C	1,500,000,000	75	0	100	1,000,000,000	0	0	1	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang diimplementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	0	0	50	1,500,000,000	75	750,000,000	100	1,000,000,000	0	0	100	3,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga yang diimplemtasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	50	1,500,000,000	75	0	100	1,000,000,000	0	0	0	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase jumlahRegulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ASDP Manggar-Ketapang yang diimplementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	-	50	1,500,000,000	75	750,000,000	100	1,000,000,000	100	3,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Tanjung Gunung dan Lintas Timur Pulau Bangka yang diimplementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	50	1,000,000,000	75	500,000,000	100	1,000,000,000	0	0	0	0	0	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pariwisata Tanjung Kelayang yang diimplementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	50	1,000,000,000	75	500,000,000	100	1,000,000,000	0	0	0	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Kota Tua Mentok yang diimplementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	0	0	0	-	50	1,000,000,000	75	500,000,000	100	1,000,000,000	100	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisian Simpang Rimba yang diimplementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	0	0	0	-	50	750,000,000	75	500,000,000	100	500,000,000	100	1,750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung yang diimplementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	0	0	0.25	500,000,000	0.5	650,000,000	0.75	700,000,000	1	500,000,000	1	2,350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang di implementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	0	0	0	-	0.5	750,000,000	0.75	500,000,000	1	500,000,000	1	1,750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Air Kelik yang diimplementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	0	0	0	-	50	1,500,000,000	75	500,000,000	100	1,000,000,000	100	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP)Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang diimplementasikan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	0.75	500,000,000	1	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	1	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) KIPT Sadai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.5	0.75	500,000,000	1	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0.25	0	1	750,000,000	0	0	0	0	0	0	1	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	10%	200,000,000	20%	220,000,000	25%	242,000,000	30%	266,200,000	35%	292,820,000	35%	1,221,020,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700,000,000	30	800,000,000	50	800,000,000	75	800,000,000	100	800,000,000	25	800,000,000	25	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	0	0	0.25	150,000,000	0.5	150,000,000	0.75	150,000,000	1	150,000,000	1	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional	Urusan Pertanahan	N.A	80	25,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8		
Program Pengembangan Sumber Daya Air	Pertumbuhan panjang bangunan pemecahgelombang atau penahan abrasi di kawasan StrategisIndustri Perikanan Tanjung Binga	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.05	750,000,000	0.35	4,500,000,000	0.7	5,775,000,000	1	4,950,000,000	1	15,975,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase penyediaan volume air baku di kawasan StrategisIndustri Perikanan Tanjung Binga	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.05	250,000,000	0.5	2,500,000,000	1	2,750,000,000	0	0	0	5,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan konektifitasPulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.05	350,000,000	0.35	2,450,000,000	0.7	2,695,000,000	1	2,310,000,000	1	7,805,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentasevolume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektifitasPulau Bangka dengan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.05	250,000,000	0.5	2,500,000,000	1	2,750,000,000	0	0	1	5,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pulau Sumatera															
	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.05	350,000,000	0.35	2,450,000,000	0.7	2,695,000,000	1	2,310,000,000	1	7,805,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.05	250,000,000	0.5	2,500,000,000	1	2,750,000,000	0	0	1	5,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan industri dan Pelabuhan Terpadu(KIPT) Tanjung Ular	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.05	350,000,000	0.35	2,450,000,000	0.7	2,695,000,000	1	2,310,000,000	7,805,000,000	7,805,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan strategis industri terpadu air kelik	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.05	350,000,000	0.35	2,450,000,000	0.7	2,695,000,000	1	2,310,000,000	7,805,000,000	7,805,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase penyediaan volume air baku di kawasan strategis industri terpadu air kelik	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.05	250,000,000	0.5	2,500,000,000	1	2,750,000,000	0	0	5,500,000,000	5,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan Strategis	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan	0	0	0	0.05	350,000,000	0.35	2,450,000,000	0.7	2,695,000,000	1	2,310,000,000	1	7,805,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Industri Sadai	Ruang														
	Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Sadai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.05	250,000,000	0.5	2,500,000,000	1	2,750,000,000	0	0	0	5,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase panjangjaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancardilakukan dengan pendekatan padat karya	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.08	0.1	1,872,543,635	0.12	2,500,000,000	0.14	3,000,000,000	0.16	3,500,000,000	0.18	4,000,000,000	0.18	14,872,543,635	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.238	0.3932	9,500,000,000	0.55	19,500,000,000	0.65	21,450,000,000	0.75	23,595,000,000	0.85	25,954,500,000	0.85	99999500000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pertumbuhan volume air baku	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.1	4,000,000,000	0.2	4,400,000,000	0.3	4,840,000,000	0.4	3,300,000,000	0.4	16540000000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.25	1,000,000,000	0.5	1,100,000,000	0.75	1,210,000,000	1	1,331,000,000	1.25	4,641,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan befungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.036	0.168	5,400,000,000	0.268	13,400,000,000	0.368	14,740,000,000	0	16,214,000,000	0.568	17,835,400,000	0.668	67,589,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan	0.17	0.192	2,456,467,772	0.414	3,000,000,000	0.525	3,300,000,000	0.636	3,630,000,000	0	0	0	12,386,467,772	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Ruang														
	Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.3	0.35	4,482,292,958	0.4	15,930,522,254	0.45	17,523,574,479	0.5	19,275,931,927	0.55	21,203,525,120	0	78,415,846,738	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	panjang penahan tanah akibat erosi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.29	0.39	2,750,000,000	0.49	5,462,500,000	0.64	8,193,750,000	0.79	8,193,750,000	0	0	0	24,600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang Talud penahan banjir kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	0	1	5,000,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.3	1,000,000,000	0.7	1,100,000,000	1	1,210,000,000	0	0	0.7	3,310,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0.05	250,000,000	0.5	2,500,000,000	1	2,750,000,000	0	0	0.8	5,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikasi profesi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.54	0.62	215,000,000	0.71	250,000,000	0.79	300,000,000	0.88	350,000,000	1	475,000,000	1	1,590,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase jumlah kelembagaan jasa konstruksi yang berkompetensi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0.2	950,000,000	0.4	1,000,000,000	0.6	1,050,000,000	0.8	1,100,000,000	1	1,150,000,000	1.2	5,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Jumlah layanan informasi jasa konstruksi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.6	0.65	110,000,000	0.7	137,500,000	0.8	171,875,000	0.9	214,843,750	1	268,554,688	1	902,773,438	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Pengujian Bina Marga	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N.A	10%	150,000,000	20%	165,000,000	25%	181,500,000	30%	199,650,000	35%	219,615,000	35%	915,765,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100	3504280266	100	3,897,648,293	100	4,287,012,822	100	4,715,714,104	100	4,855,607,417	100	21,260,262,902	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		N.A	76		82		85		88		92		92		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Keciptakarya dan Permukiman	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	N.A	0.12	5602011802	0.33	9,600,000,000	0.56	10,400,000,000	0.88	14,869,176,000	1	5,600,000,000	0.8	46,071,187,802	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	N.A	0.07	455,750,000	0.26	144,200,000	0.63	1,800,000,000	0.86	440,000,000	1	1,800,000,000	1	4,639,950,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	N.A	0	-	0.25	-	0.5	2,000,000,000	0.75	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	6,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	N.A	0.04	1,473,000,000	0.09	1,090,000,000	0.31	7,840,000,000	0.42	3,840,000,000	0.51	3,500,000,000	0	17,743,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0.35	0	-	0.5	550,000,000	0.7	550,000,000	0.85	550,000,000	0.95	550,000,000	0	2,200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase sarana air limbah yang layak	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	0	-	0	-	0.22	5,500,000,000	0.26	8,000,000,000	0.24	7,800,000,000	0	21,300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase sarana air limbah yang layakdi kawasan kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0.83	0	-	0.85	900,000,000	0.87	900,000,000	0.9	900,000,000	0.95	900,000,000	0	3,600,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase drainase dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	N.A	0	0	0	0	0.21	13000000000	0.22	14000000000	0.17	12750000000	0	39,750,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase drainase dalam kondisi baik di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	N.A	0.12	1,035,500,000	0.3	1,425,000,000	0.65	14,107,500,000	0.87	14,107,500,000	1	14,107,500,000	0	44,783,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentasesarana pelayanan persampahan di Kawasan Strategis Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	N.A	0	0	0	0	0.6	640,000,000	0.7	640000000	0.8	640000000	0	1,920,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentasesarana pelayanan persampahan di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0.27	0	0	0.4	640,000,000	0.6	640,000,000	0.7	640,000,000	0.8	640,000,000	0	2,560,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbatdi KPengembangan TPA Regional	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	N.A	0	0	0	300,000,000	0.25	2,300,000,000	0.25	4,300,000,000	0.5	5,300,000,000	0.8	12,200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baikdi Pengembangan TPA Regional	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	N.A	0	0	0	300,000,000	0.25	2,300,000,000	0.25	4,300,000,000	0.5	5,300,000,000	0.8	12,200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pembangunan Perumahan Rakyat	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	0.0152	11,759,260,000	0.0255	0	0.0255	42,597,259,188	0.0255	47,736,498,066	0.0255	53,517,087,776	0.0255	155,610,105,030	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	154 unit	49%	4,902,260,000	51%	5,077,000,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	9,979,260,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	-	0	0	0	0.27	2,400,000,000	0.33	3,450,000,000	0.4	4,440,000,000	1	10,290,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		N.A	100	7476306300	100	7,779,049,200	100	8,552,225,200	100	7,903,849,200	100	9,498,173,960	100	41,209,603,860	SATPOL PP
	Predikat nilai SAKIP perangkat daerah		60.79	76		82		85		88		92		92	0	SATPOL PP
Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakanpenyeenggaraan kantrantibmas	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0.4659	0.0227	511,013,700	0.2662	1,357,903,500	0.185	1,182,903,500	0.1623	707,903,500	0.0552	607,903,500	100	4,367,627,700	SATPOL PP
Program Penegakan Perda dan Perkada	Prosentase penegakan/peninda kan pelanggaran Perda	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan	0.8378	100	580,382,500	100	820,382,500	100	820,382,500	100	820,382,500	100	820,382,500	100	3,861,912,500	SATPOL PP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Perlindungan Masyarakat														
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlahlinmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kantrantibmas	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0.1029	0.0151	134,438,500	0.0151	200,000,000	0.0151	134,438,500	0.0151	134,438,500	0.0151	200,000,000	30	803,315,500	SATPOL PP
	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0.0605	0.0424	379,005,500	0.0424	450,000,000	0.0424	400,268,000	0.0424	400,268,000	0.0424	450,000,000	0	2,079,541,500	SATPOL PP
Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase jumlahpelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	N.A	100	2,280,225,000	100	2,549,297,500	100	2,549,297,500	100	2,549,297,500	100	2,549,297,500	100	12,477,415,000	SATPOL PP
Kesbangpol																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		60.03	70	1902992400	81	4,608,828,000	82	5,082,184,800	83	5,605,172,080	84	1,352,292,500	85	18,551,469,780	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100		100		100		100		100		100	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	150	200	63,240,000	500	919,000,000	700	999,600,000	900	1,088,260,000	1100	1,186,486,000	1100	4,256,586,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan	0	25	305,000,000	35	1,764,000,000	45	1,801,500,000	55	2,009,350,000	65	2,150,985,000	65	8,030,835,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pembangunan	Perlindungan Masyarakat														
	Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya dalm mendukung ketahanan budaya	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	30	56,671,000	40	231,000,000	50	252,000,000	60	276,000,000	70	303,000,000	70	1,118,671,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17	12	1,158,060,600	9	3,010,000,000	7	3,540,000,000	5	4,160,000,000	4	4,900,000,000	4	16,768,060,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan Politik dalam Negeri	Persentase masyarakat yang memiliki kompetensi berkaitan dengan Politik Daerah	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	7	451,868,100	7	1,445,000,000	7	1,607,500,000	7	1,756,850,000	7	1,926,435,000	7	7,187,653,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Tingkat Kinerja Lembaga Demokrasi	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	45	220,000,000	50	709,000,000	60	779,000,000	70	854,000,000	80	934,000,000	7	3,496,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	0	1,802,207,600	-	3,022,000,000	-	3,215,000,000	-	3,418,000,000	-	3,325,000,000	0	14,782,207,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Jumlah kasus Konflik Sara	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3	3	428,016,100	2	810,000,000	1	891,000,000	0	979,000,000	0	1,077,000,000	0	4,185,016,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sosial																

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100	4500240000	100	4,870,152,000	100	5,113,659,600	100	5,381,272,312	100	5,650,335,926	100	25,515,659,838	Dinas Sosial
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		46.6	76		82		85		88		92		92		Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase korban nazpza	Urusan Sosial	N.A	14.89	100,000,000	21.28	350,000,000	21.28	350,000,000	21.28	350,000,000	21.28	350,000,000	100	1,500,000,000	Dinas Sosial
	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosialyang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	Urusan Sosial	N.A	23.94	1,490,000,000	19.01	1,400,000,000	19.01	1,400,000,000	19.01	1,400,000,000	19.01	1,400,000,000	100	7,090,000,000	Dinas Sosial
	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Urusan Sosial	N.A	16.67	100,000,000	20.67	250,000,000	20.67	250,000,000	20.67	250,000,000	30 org	250,000,000	100	1,100,000,000	Dinas Sosial
	Persentase anakyang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Urusan Sosial	N.A	20.25	175,000,000	18.99	210,000,000	18.99	210,000,000	2025	270,000,000	21.52	280,000,000	100	1,145,000,000	Dinas Sosial
Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	Urusan Sosial	N.A	19.64	14,116,988,000	19.64	15,131,000,000	19.64	15,131,000,000	20.55	15,832,000,000	20.55	15,832,000,000	100	76,042,988,000	Dinas Sosial
	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	Urusan Sosial	5.4	5.4	1,300,000,000	18.15	3,500,000,000	24.27	4,832,000,000	23.99	4,930,000,000	28.2	6,018,000,000	100	20,580,000,000	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase debitur yang membayar tunggakan kredit usaha peningkatan ekonomi masyarakat yang disetorkan ke Kas daerah	Urusan Sosial	N.A	12.38	50,000,000	22	100,000,000	19.79	100,000,000	17.8	100,000,000	16.03	100,000,000	100	450,000,000	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	Urusan Sosial	N.A	8.64	1,180,536,550	22.84	1,500,000,000	22.84	1,500,000,000	22.84	1,500,000,000	22.84	1,500,000,000	100	7,180,536,550	Dinas Sosial
	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Urusan Sosial	100	20	1,050,000,000	20	1,085,000,000	20	1,121,750,000	20	1,160,337,500	20	1,200,854,375	100	5,617,941,875	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	Urusan Sosial	N.A	17.7	1,271,141,450	17	1,464,800,000	19.78	1,148,000,000	21.27	1,387,000,000	24.4	1,622,500,000	100	6,478,038,000	Dinas Sosial
	Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	Urusan Sosial	N.A	15.87	275,000,000	15.63	300,000,000	16.23	350,000,000	22.84	425,000,000	29.45	500,000,000	100	5,246,240,000	Dinas Sosial
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis	Urusan Sosial	N.A	15.14	868,538,000	18.28	1,325,000,000	19	1,175,000,000	23.12	3,325,000,000	24.19	1,425,000,000	100	9,071,240,000	UPTD Panti Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Panti Sosial															
Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan pelayanan Panti Sosial	Urusan Sosial	N.A	4.26	1,431,240,000	80.62	2,120,000,000	6.08	1,450,000,000	4.48	1,275,000,000	4.56	1,440,000,000	100	15,313,257,160	UPTD Panti Sosial
Penanggulangan Bencana																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		N.A	80	3719375700	85	12,723,939,000	90	4,710,885,950	95	21,001,759,975	100	4,167,995,510	100	46,323,956,135	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		49.4	70		81		82		83		84		85	0	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Urusan Sosial	0	72	2,280,774,300	74	3,774,252,000	76	3,935,464,000	78	4,038,987,830	80	4,144,937,221	76	18,174,415,351	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	Urusan Sosial	80	80	3,600,000,000	80	4,565,000,000	85	4,565,000,000	85	4,565,000,000	90	4,565,000,000	84	21,860,000,000	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Urusan Sosial	75	75	887,850,000	75	4,685,000,000	80	4,695,500,000	80	4,706,525,000	80	4,718,101,250	78	19,692,976,250	Badan Penanggulan n Bencana Daerah
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																
Ketenagakerjaan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		N.A	100	5357104958	100	12,602,892,654	100	8,673,892,654	100	6,059,742,654	100	6,147,742,654	100	38,841,375,574	Dinas Tenaga Kerja
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		54.55	76		82		85		88		92		92	0	Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	Urusan Tenaga Kerja	0.02	0.02	113,426,250	0.02	67,500,000	0.02	52,500,000	0.02	50,000,000	0.02	43,750,000	0.1	327,176,250	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor Perikanaan	Urusan Tenaga Kerja	0.12	0.12	113,426,250	0.12	67,500,000	0.12	52,500,000	0.12	50,000,000	0.12	43,750,000	0.6	327,176,250	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	Urusan Tenaga Kerja	0	0.05	113,426,250	0.05	67,500,000	0.05	52,500,000	0.05	50,000,000	0.05	43,750,000	0.05	327,176,250	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral	Urusan Tenaga Kerja	0	0.05	113,426,250	0.05	67,500,000	0.05	52,500,000	0.05	50,000,000	0.05	43,750,000	0.05	327,176,250	Dinas Tenaga Kerja
Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja pertanian yang bersertifikasi	Urusan Tenaga Kerja	N.A	0	0	17.54	420,000,000	21.3	400,000,000	22.56	400,000,000	23.06	400,000,000	23.06	1,620,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanan bersertifikat kompetensi	Urusan Tenaga Kerja	0.1754	0	0	17.54	300,000,000	21.3	310,000,000	22.56	320,000,000	23.06	330,000,000	23.06	1,260,000,000	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	Urusan Tenaga Kerja	17.54	0	0	17.54	300,000,000	21.3	310,000,000	22.56	320,000,000	23.06	330,000,000	23.06	1,260,000,000	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor sumber daya mineral bersertifikat kompetensi	Urusan Tenaga Kerja	17.54	0	0	17.54	300,000,000	21.3	310,000,000	22.56	320,000,000	23.06	330,000,000	23.06	1,260,000,000	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing	Urusan Tenaga Kerja	500000000	100%	150,000,000	150%	200,000,000	200%	250,000,000	250%	275,000,000	300%	300,000,000	300%	1,175,000,000	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Urusan Tenaga Kerja	8	14.29	366,450,473	17.14	1,935,000,000	20	1,485,000,001	22.86	2,000,000,000	25.71	1,560,000,000	25.71	7,346,450,474	Dinas Tenaga Kerja
	Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensiketenagakerjaan	Urusan Tenaga Kerja	N.A	0	0	0.28	160,000,000	0.28	170,000,000	0.28	180,000,000	0.28	190,000,000	0.28	700,000,000	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase Exs korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	Urusan Tenaga Kerja	N.A	0	0	10.64	180,000,000	10.64	190,000,000	10.64	200,000,000	10.64	200,000,000	10.64	770,000,000	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase wanita Tunasosial yang memilik kompetensi ketenagakerjaan	Urusan Tenaga Kerja	N.A	0	0	8.62	190,000,000	8.62	200,000,000	8.62	210,000,000	8.62	210,000,000	8.62	810,000,000	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	Urusan Tenaga Kerja	N.A	0	0	0.78	170,000,000	0.78	180,000,000	0.78	190,000,000	0.78	200,000,000	0.78	740,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertanian yang berkompetensi	Urusan Tenaga Kerja	0.14	0.14	125,000,000	0.14	250,000,000	0.17	250,000,000	0.17	375,000,000	0.21	375,000,000	40	1,375,000,000	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanan yang berkompetensi	Urusan Tenaga Kerja	0.0011	0.0011	125,000,000	0.0011	250,000,000	0.0015	250,000,000	0.0015	375,000,000	0.0019	375,000,000	40	1,375,000,000	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	Urusan Tenaga Kerja	0	0.11	1,000,000,000	0.15	1,125,000,000	0.15	1,125,000,000	0.19	1,250,000,000	0.71	1,250,000,000	40	5,750,000,000	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase tenaga kerja bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutan	Urusan Tenaga Kerja	0	0.14	125,000,000	0.14	250,000,000	0.17	250,000,000	0.17	375,000,000	0.21	375,000,000	60	1,375,000,000	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	Urusan Tenaga Kerja	0.25	30%	1,125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000,000	Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	Urusan Tenaga Kerja	2	2	99,889,671	2	337,365,000	2	241,642,800	2	287,494,000	2	335,294,000	10	1,301,685,471	Dinas Tenaga Kerja
	persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	Urusan Tenaga Kerja	0.49	1.2	99,889,671	1.2	337,365,000	1.6	241,642,800	1.6	287,494,000	1.6	335,294,000	7.2	1,301,685,471	Dinas Tenaga Kerja

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	Urusan Tenaga Kerja	1.44	1.6	204,864,278	1.6	34,515,000	1.6	41,554,447	1.6	49,634,146	1.6	59,200,000	8	389,767,871	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan dibinasesuai standar pemeriksaan perusahaan	Urusan Tenaga Kerja	0	1.36	99,889,671	4.8	337,365,000	4.8	241,642,800	4.8	287,494,000	4.8	335,294,000	20.56	1,301,685,471	Dinas Tenaga Kerja
	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja	N.A	0	320,008,756	0	400,000,000	0	450,000,000	0	500,000,000	0	545,000,000	0	2,215,008,756	Dinas Tenaga Kerja
	persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja	0.457	0.5	368,121,200	0.65	1,303,540,000	0.75	1,104,452,000	0.8	1,048,063,000	0.9	1,642,986,000	0.9	5,467,162,200	Dinas Tenaga Kerja
	persentase penurunan kecelakaan kerja	Urusan Tenaga Kerja	0.36	0.34	34,448,000	0.32	580,800,000	0.3	337,410,000	0.3	595,000,000	0.3	240,000,000	0.3	1,787,658,000	Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	Urusan Tenaga kerja	N.A	2.73	245,023,309	2.73	220,500,000	2.73	228,600,000	3.2	298,100,000	3.2	298,100,000	3.2	1,290,323,309	Dinas Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100	2064844000	100	2,270,761,200	100	2,498,236,000	100	2,747,861,000	100	3,075,504,930	100	5,823,365,930	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		58.12	76		82		85		88		92		92	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang bekerja	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.29	8.08	608,298,000	7.73	819,280,000	7.52	886,208,000	7.31	989,828,800	7.01	1,040,811,680	6.68	4,344,426,480	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.69	10.68	562,426,000	9.47	343,668,600	8.86	378,035,460	8.25	415,839,003	7.64	457,422,907	7.64	2,157,391,970	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.46	3.52	326,525,000	3.55	565,000,000	3.58	596,500,000	3.61	631,150,000	3.64	669,265,000	3.64	2,788,440,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
																Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
	Persentase jumlah perempuan yang berkompotensi dilembaga politik	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.73	26.75	71,006,000	27.77	473,000,000	28.79	517,300,000	29.81	384,780,000	30.83	423,258,000	30.83	1,869,344,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
	Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	N.A	0	0	30	75,000,000	30	82,500,000	30	90,750,000	30	99,825,000	30	348,075,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42.97	40.47	248,521,000	37.97	1,709,055,500	35.47	1,366,975,000	32.97	1,157,534,300	30.47	1,039,787,700	30.47	5,309,816,026	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.48	0.44	919,734,000	0.43	949,510,500	0.42	1,144,461,550	0.41	843,907,705	0.4	1,048,298,476	0.4	4,905,912,231	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
	Persentase Kab/Kota Layak Anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	N.A	28,57	661,539,000	42,85	690,000,000	57,14	758,000,000	85.71	833,850,000	100	757,915,000	100	3,701,304,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pangan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		0	100	3117400000	100	3,743,000,000	100	8,721,000,000	100	4,220,000,000	100	4,370,000,000	100	8,590,000,000	Dinas Pangan
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		51.59	76		82		85		88		92		92	0	Dinas Pangan
Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	Urusan Pangan	89.2	89	1,089,715,000	89.7	1,950,000,000	90.5	2,200,000,000	91.5	6,425,000,000	92.5	6,930,007,328	92.5	18,594,722,328	Dinas Pangan
	persentase pangan yang aman dikonsumsi	Urusan Pangan	78	80	1,320,000,000	83	1,920,000,000	86	2,000,000,000	89	2,100,000,000	92	2,150,000,000	92	9,490,000,000	Dinas Pangan
Program Ketersediaan dan kerawanan Pangan	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	Urusan Pangan	78	89.5	1,773,600,000	90.5	2,080,000,000	91	2,050,000,000	93	2,200,000,000	96.32	2,750,000,000	96.32	10,853,600,000	Dinas Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	Urusan Pangan	N.A	1	540,000,000	1.1	875,000,000	1.1	945,000,000	1.1	965,000,000	1.1	1,085,000,000	1.1	4,410,000,000	Dinas Pangan
Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, dan Cadangan Pangan	Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen	Urusan Pangan	CV Beras ≤ 1%	CV Beras ≤ 5%	622,712,854	CV Beras ≤ 5%	4,301,154,145	CV Beras ≤ 5%	4,002,545,185	CV Beras ≤ 5%	4,410,572,445	CV Beras ≤ 5%	4,041,251,067	CV Beras ≤ 5%	17,378,235,696	Dinas Pangan
	Persentase Cadangan Pangan	Urusan Pangan	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan
Pertanahan																
ProgramPenataan Ruang dan Pertanahan	Persentase tersedianya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum di kawasan konektivitas pulau bangka dan pulau sumatera	Urusan Pertanahan	0	0	0	0	-	0	0	50	50,000,000,000	100	50,000,000,000	100	100,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Tersedianya Lahan bersertifikat untuk kepentingan di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	Urusan Pertanahan	N.A	0	0	50	25,000,000,000	50	25,000,000,000	0	0	0	0	50,000,000,000	50,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase tersedianya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum di kawasan Industri dan pelabuhan tanjung Berikat	Urusan Pertanahan	N.A	0	0	0	-	0.25	20,000,000,000	0.5	20,000,000,000	1	20,000,000,000	1	60,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Tersediannya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum diKIPT sadai	Urusan Pertanahan	N.A	0	0	0	-	0.25	15,000,000,000	0.5	15,000,000,000	1	15,000,000,000	1	45,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Lingkungan Hidup																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		0	100	2831560000	100	3,142,625,000	100	3,409,750,000	100	3,711,830,000	100	4,017,760,000	100	7,729,590,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		66.22	70		81		82		83		84		85	0	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersediannya Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	Ada	151,857,335	0	-	0	0	0	0	0	0	Ada	151857335	Dinas Lingkungan Hidup
	Tersediannya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kota Terpadu Mandiri Gantung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	0	0	0	-	ada	1,000,000,000	0	0	0	0	Ada	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Tersedinya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	0	0	ada	561,630,000	0	0	0	0	0	0	0	561,630,000	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	0	0	ada	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	1 Dok	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	0	0	0	-	ada	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP - Manggar yang digunakan dalam perencanaan Kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	0	0	0	-	ada	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	0	0	0	-	ada	800,000,000	0	0	0	0	0	800,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	0	0	0	-	Ada	1,000,000,000	0	0	0	0	Ada	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	0	0	0	-	0	0	Ada	850,000,000	0	0	Ada	850,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	0	0	0	-	0	0	0	0	Ada	1,000,000,000	Ada	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Tersedianya Dokumen KLHS kawasan konektifitasPulau Bangka dengan Pulau Sumatera yang digunkan untuk perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik yang digunkan untuk perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	0	0	0	-	ada	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	ada	900,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	900,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	ada	900,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	900,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Urusan Lingkungan Hidup	Tidak ada	0	0	Ada	750,000,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase jumlah kebijakan berkaitan dengan tutupan lahan yang diimplementasikan	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	0	0	1 Dok	250,000,000	1 Dok	250,000,000	4 Dok	1,000,000,000	1 Dok	250,000,000	1 Dok	1,750,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	1	348,600,000	1	2,118,116,000	1	4,223,350,000	1	1,486,835,000	1	560,250,000	1	8,737,151,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Rasio jumlah perusahaandengan jumlah Dokumen kajian lingkungan hidup yang diimplementasikan	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	17 Dok	434,825,000	15 Dok	368,116,000	15 Dok	423,350,000	15 Dok	486,835,000	15 Dok	560,250,000	15 Dok	2,273,376,000	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab lingkungan	Urusan Lingkungan Hidup	1000000000	0.0005	2,020,760,182	0.01	2,323,874,209	0.0115	2,672,455,341	0.02	3,073,323,642	0.025	3,534,322,188	0.025	13,624,735,562	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	1	2,226,846,850	1	390,000,000	1	441,500,000	1	499,975,000	1	566,471,250	1	4,124,793,100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase BOD, COD dan TSS	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	0.02	540,341,000	0.02	1,019,375,000	0.02	827,277,000	0.02	951,370,000	0.02	1,094,110,000	0.02	4,432,473,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	0.02	75,000,000	0.02	86,250,000	0.02	99,187,500	0.02	99,187,500	0.02	114,066,000	0.02	473,691,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penurunan Konsentrasi NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	0.02	75,000,000	0.02	862,500,000	0.02	99,187,500	0.02	99,187,500	0.02	114,066,000	0.02	1,249,941,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	0.58	0.6	400,000,000	0.62	877,500,000	0.65	1,000,125,000	0.67	1,151,145,000	0.7	1,323,264,000	0.7	4,752,034,000	Dinas Lingkungan Hidup
	persentase perusahaan yang mengimplementasik an kajian lingkungan hidup	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	0.1	225,000,000	0.18	262,212,000	0.25	301,545,000	0.31	346,780,000	0.36	398,850,000	0.36	1,534,387,000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	0	681,782,407	0	665,000,000	0.05	2,000,000,000	0.1	3,000,000,000	0.15	4,500,000,000	0.15	10,846,782,407	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada TPA Regional	Urusan Lingkungan Hidup	N.A	0	681,782,408	-	665,000,000	0.05	2,000,000,000	0.1	3,000,000,000	0.15	4,500,000,000	0.15	10,846,782,408	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai KTP	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	N.A	N.A	71,006,000	N.A	410,000,000	N.A	440,000,000	N.A	470,000,000	N.A	500,000,000	N.A	1,891,006,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
	Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah meninggal yang memiliki akte kematian	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	N.A	N.A	0	N.A	270,000,000	N.A	295,000,000	N.A	320,000,000	N.A	345,000,000	N.A	1,230,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
	PersentaseJumlah data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	100	540,000,000	100	590,000,000	100	665,000,000	100	715,000,000	100	2,510,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan NIK Data base kependudukan dan KTP dalam meningkatkan pelayananan ke masyarakat	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	14.28	355,030,000	14.28	1,140,000,000	14028	1,195,000,000	14.28	1,270,000,000	14.28	1,330,000,000	14.28	5,290,030,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran dalam mendukung hak anak untuk mendapat hak identitas	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	N.A	N.A	0	N.A	270,000,000	N.A	295,000,000	N.A	320,000,000	N.A	345,000,000	N.A	1,230,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		100	100	4170237550	100	4,703,734,427	100	4,839,686,899	100	4,982,571,244	100	5,042,116,008	100	23,738,346,128	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		60.83	76		82		85		88		92		92	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase saranaprasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.1	0.16	1,838,213,509	0.34	2,077,702,338	0.49	1,985,315,591	0.79	1,930,017,278	1	1,365,157,669	1	9,196,406,385	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase PKK aktif	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	N.A	0	1,802,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Posyandu aktif	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	N.A	100 Pokjanal Posyan du	488,722,941	100 Pokjanal Posyan du	186,925,585	100 Pokjanal Posyan du	147,203,898	100 Pokjanal Posyan du	115,923,070	100 Pokjanal Posyand u	91,289,417	100 Pokjanal Posyan du	1,030,064,911	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang terbangun	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	N.A	0.2	1,307,901,157	0.4	1,373,296,215	0.6	1,441,961,026	0.8	1,514,059,077	1	1,589,762,031	1	7,226,979,506	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase aparatur desa dan BPD yang meningkat kompetensinya	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	N.A	0.26	1,261,547,718	0.42	863,000,000	0.58	906,150,000	0.81	951,457,500	1	999,030,375	1	4,981,185,593	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	N.A	6 Desa, 6 Kelurahan	562,879,950	21 Desa/ Kel	961,427,668	21 Desa/ Kel	1,009,499,051	21 Desa/ Kel	1,059,974,004	21 Desa/ Kel	1,112,972,704	21 Desa/ Kel	4,706,753,377	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.1	0.26	1,056,112,699.00	0.42	1,843,301,336	0.58	1,935,466,403	0.81	2,032,239,723	1	2,133,851,709	1	9,000,971,870	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	60 Orang	100 Orang	699,412,383	100 Orang	734,383,002	100 Orang	771,102,152	100 Orang	809,657,260	100 Orang	850,140,123	560 Orang	3,864,694,920	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana																
Peningkatan Pengendalian Penduduk dan KB	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.3	10.69	1,265,596,000	10.08	1,735,000,000	9.47	2,183,000,000	8.86	1,989,000,000	8.25	2,111,000,000	8.25	9,283,596,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
																Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
	Persentase unmeet need	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	7.65	0	7.48	415,000,000	7.39	431,000,000	7.22	199,000,000	7.13	0	7.13	1,045,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
	presentase KB MKJP	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.5	8.3	1,336,036,000	8.9	2,935,000,000	9.7	2,536,000,000	10.5	3,098,000,000	11.3	2,846,000,000	11.3	12,751,036,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Perhubungan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100	6421694100	100	7,326,463,625	100	8,883,486,806	100	8,743,211,147	100	10,124,971,704	100	18,868,182,851	Dinas Perhubungan
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		37.51	76		82		85		88		92		92	0	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Perhubungan		0	70		75		80		85		90		90	0	Dinas Perhubungan
Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	Urusan Perhubungan	N.A	0.5	4,205,274,834.00	0.2	1,200,000,000	0.3	2,300,000,000	0.3	0	0	0	1	7,705,274,834	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan sarana parasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian	Urusan Perhubungan	0	0	1,618,005,833.00	0	2,257,581,071	0	2,584,434,898	0	2,813,858,486	0	2,677,621,667	0	11,951,501,955	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjangJalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dankawasan lintas timur Pulau Bangka	Urusan Perhubungan	N.A	0.4	5,517,547,000.00	0.3	3,750,000,000	0.25	3,140,000,000	0	0	0	0	0.95	12,407,547,000	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjangJalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	Urusan Perhubungan	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjangperhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0.25	3,000,000,000	0.3	3,300,000,000	0.35	3,630,000,000	0.4	3,993,000,000	0.4	13,923,000,000	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kelayang															
	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjangperhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok	Urusan Perhubungan	N.A	0.15	1,618,005,833.00	0.2	2,257,581,071	0.3	2,584,434,898	0.35	2,813,858,486	0.4	2,677,621,667	0.4	11,951,501,955	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjangperhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0.2	525,000,000	0.3	625,000,000	0.35	750,000,000	0.4	850,000,000	0.4	2,750,000,000	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjangperhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0.25	500,000,000	0.3	625,000,000	0.35	750,000,000	0.4	850,000,000	0.4	2,725,000,000	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjangperhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0.2	525,000,000	0.3	625,000,000	0.35	750,000,000	0.4	850,000,000	0.4	2,750,000,000	Dinas Perhubungan
	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Darat menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0.25	3,000,000,000	0.25	3,100,000,000	0	0	0.5	4,500,000,000	0.25	10,600,000,000	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Berikat															
	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0	0	0.02	600,000,000	0.1	35,000,000,000	0.03	3,600,000,000	0.15	39,200,000,000	Dinas Perhubungan
	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0.05	12,000,000,000	0.07	14,500,000,000	0.1	16,000,000,000	0	0	0.23	42,500,000,000	Dinas Perhubungan
	Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas	Urusan Perhubungan	N.A	0	990,866,000	0	393,660,000	0	393,660,000	0	393,660,000	0	393,660,000	0	2,565,506,000	Dinas Perhubungan
	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	urusan perhubungan	N.A	0	950,000,000	0.007	1,500,000,000	0.012	3,200,000,000	0.015	3,340,000,000	0.017	4,000,000,000	0.051	12,990,000,000	Dinas Perhubungan
Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	Urusan Perhubungan	N.A	0.12	363,544,000.00	0.15	399,898,000	0.18	439,888,000	0.25	483,877,000	0.3	532,264,000	1	2,219,471,000	Dinas Perhubungan
	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0.3	2,200,000,000	0	0	0.3	2,400,000,000	0	0	0.6	4,600,000,000	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0.3	2,250,000,000	0	0	0.3	2,350,000,000	0	0	0.6	4,600,000,000	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	etalase perikanan Selat Nasik															
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0	-	0.3	2,450,000,000	0.3	2,500,000,000	0	0	0.6	4,950,000,000	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0	-	0.25	3,000,000,000	0.25	2,500,000,000	0	0	0.5	5,500,000,000	Dinas Perhubungan
	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata	Urusan Perhubungan	N.A	0.2	750,000,000.00	0.3	2,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0.5	2,950,000,000	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0	-	0.3	2,550,000,000	0	0	0	0	0.3	2,550,000,000	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhansarana parasarana penunjang Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0	-	0	0	0.3	2,600,000,000	0.3	2,900,000,000	0.6	5,500,000,000	Dinas Perhubungan
	Presentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan konektifitasPulau Bangka dengan	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0	-	0	0	0.3	2,500,000,000	0.3	2,700,000,000	0.6	5,200,000,000	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pulau Sumatera															
	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Urusan Perhubungan	N.A	0.3	750,000,000.00	0.3	2,225,000,000	0.4	2,825,000,000	0	0	0	0	1	5,800,000,000	Dinas Perhubungan
	Prosentasesarana dan prasanaperhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu(KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan	Urusan Perhubungan	N.A	0.1	743,718,500.00	0.3	2,250,000,000	0.3	2,300,000,000	0	0	0	0	0.7	5,293,718,500	Dinas Perhubungan
	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis IndustriTerpadu Air Kelik	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0.1	375,000,000	0.2	750,000,000	0.2	900,000,000	0	0	0.5	2,025,000,000	Dinas Perhubungan
	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0.2	1,800,000,000	0.2	2,000,000,000	0	0	0.3	3,000,000,000	0.2	6,800,000,000	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Prosentase peningkatan sarana dan prasanaperhubunga n laut Kawasan Strategis Industri Sadai	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0	-	0	0	0	0	0.5	2,350,000,000	0.5	2,350,000,000	Dinas Perhubungan
	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0	-	0.3	2,250,000,000	0	0	0.3	2,350,000,000	0.6	4,600,000,000	Dinas Perhubungan
	Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal	Urusan Perhubungan	N.A	0.1	375,000,000	0.2	1,400,000,000	0.1	1,000,000,000	0	0	0	0	0.1	2,775,000,000	Dinas Perhubungan
	Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak	Urusan Perhubungan	N.A	0.15	750,000,000	0.17	2,150,000,000	0.23	3,450,000,000	0.3	5,140,000,000	0	0	0.95	11,490,000,000	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan	Prosentase pertambahanpendap atan dari pengolahan perhubungan udara	Urusan Perhubungan	N.A	0	0	0.2	35,240,000,000	0.25	35,000,000,000	0.1	800,000,000	0	-	0.65	71,040,000,000	Dinas Perhubungan
	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroperasi	Urusan Perhubungan	N.A	0.4	16,463,166,400	0.1	800,000,000	50	21,000,000,000	0	0	0	0	1	38,263,166,400	Dinas Perhubungan
	Prosentase Angkutan Umum bandara udara yang layak jalan	urusan perhubungan	N.A	0.2	1,148,660,000	0.2	478,660,000	0.2	488,660,000	0.2	498,660,000	0.2	508,660,000	1	3,123,300,000	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika																

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100	2993251161	100	3,232,464,769	100	3,394,113,006	100	3,563,813,655	100	7,082,700,221	100	20,266,342,812	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		39.53	76		82		85		88		92		92	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian yang dapat diakses masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	0.15	50,000,000.00	0.25	60,000,000	0.35	70,000,000	0.45	80,000,000	0.55	90,000,000	0.55	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	0.15	50,000,000.00	0.25	60,000,000	0.35	70,000,000	0.45	80,000,000	0.55	90,000,000	0.55	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	0.15	50,000,000	0.25	60,000,000	0.35	70,000,000	0.45	80,000,000	0.55	90,000,000	0.55	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	0.1	0.15	50,000,000	0.25	60,000,000	0.35	70,000,000	0.45	80,000,000	0.55	90,000,000	0.55	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	0.1	0.15	50,000,000	0.25	60,000,000	0.35	70,000,000	0.45	80,000,000	0.55	90,000,000	0.55	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase informasi tentang kesehatan masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	0.15	50,000,000	0.25	60,000,000	0.35	70,000,000	0.45	80,000,000	0.55	90,000,000	0.55	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	0	0.15	50,000,000	0.25	60,000,000	0.35	70,000,000	0.45	80,000,000	0.55	90,000,000	0.55	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	persentase kesesuaian antara Kuantitas Berita denganInformasi yang dipublikasi	Urusan Komunikasi dan Informatika	0.2	0.4	8,476,940,000	0.6	1,843,054,500	0.8	1,843,054,500	1	1,843,054,500	1	1,843,054,500	1	15,849,158,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase sarana komunikasi yang digunakan dalam publikasi	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	0	6,800,000,000	0.2	800,000,000	0.2	1,116,666,667	0.2	1,211,111,111	0.2	1,272,222,222	0	11,200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	0.05	0.15	50,000,000	0.25	9,630,000,000	0.35	10,410,000,000	0.45	10,890,000,000	0.55	11,270,000,000	0.55	42,250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	0	0	0.15	50,000,000	0.25	60,000,000	0.35	70,000,000	0.45	80,000,000	0.45	260,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	Urusan Komunikasi dan Informatika	0.23	0.51	9,270,045,000	0.66	4,000,000,000	0.86	4,400,000,000	1	4,840,000,000	1	3,300,000,000	1	25,810,045,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	0.4	1,676,920,000	0.8	1,844,612,000	0.9	2,029,073,200	1	2,231,980,520	1	2,455,178,572	1	10,237,764,292	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang aman	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	0.2	550,000,000	0.4	180,000,000	0.6	189,000,000	0.8	198,450,000	1	208,372,500	1	1,325,822,500	Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Birokrasi	Urusan Komunikasi dan Informatika	N.A	0.2	590,015,497	0.3	619,516,272	0.4	650,492,086	0.5	683,016,690	0.6	717,167,525	0.6	13,479,072,584	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100	3178888369	100	3,500,000,000	100	3,900,000,000	100	4,400,000,000	100	5,000,000,000	100	19,978,888,369	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		51.02	76		82		85		88		92		92	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.05	0.05	377,740,804.00	0.05	210,000,000	0.05	218,000,000	0.05	222,800,000	0.05	244,000,000	0.25	1,272,540,804	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	persentase koperasi sektor pertanian berkualitas sesuai standar	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.02	0.02	51,068,377.00	0.02	12,080,250	0.02	14,544,056	0.02	17,371,951	0.02	20,720,000	0.1	115,784,634	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase jumlah koperasi bidang Kelautan dan Perikanan yang berkualitas sesuai standar	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.036	0.036	377,740,804.00	0.036	632,250,000	0.036	900,000,000	0.036	730,350,000	0.036	1,008,000,000	0.04	3,648,340,804	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor kelautan dan perikanan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.05	0.05	47,690,000.00	0.05	86,200,000	0.05	98,400,000	0.05	104,000,000	0.05	109,600,000	0.05	445,890,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis minapolitan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.01	0.01	0	0.01	34,000,000	0.01	42,000,000	0.01	28,000,000	0.01	48,000,000	0.01	152,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Lepar Pongok	dan Menengah														
	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis etalase perikanan selat nasik	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.01	0.01	0	0.01	34,000,000	0.01	42,000,000	0.01	28,000,000	0.01	48,000,000	0.01	152,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.01	0.01	0	0.01	34,000,000	0.01	42,000,000	0.01	28,000,000	0.01	48,000,000	0.01	152,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.01	0.01	0	0.01	34,000,000	0.01	42,000,000	0.01	28,000,000	0.01	48,000,000	0.01	152,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase koperasi aktif di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N.A	0	0	0.01	50,000,000	0.02	65,000,000	0.02	70,000,000	0.02	75,000,000	0.02	260,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.027	0.027	377,740,804.00	0.027	105,000,000	0.027	109,000,000	0.027	111,400,000	0.027	122,000,000	0.027	825,140,804	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.01	0.01	-	0.01	34,000,000	0.01	42,000,000	0.01	28,000,000	0.01	48,000,000	0.01	152,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.4	0.613	1,006,950,000.00	0.77	900,000,000	0.4348	900,000,000	0.4348	900,000,000	0.4348	900,000,000	0.4348	4,606,950,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanianyang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	80	80	156,000,000.00	90	76,500,000	100	120,000,000	90	81,000,000	100	95,000,000	450	528,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dunia usaha dalam daerah															
	Peningkatan produk Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70	550	2,260,500,000.00	550	2,475,000,000	550	2,475,000,000	550	2,475,000,000	550	2,475,000,000	550	12,160,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor kelauatan dan perikananyang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	160	160	134,000,000.00	160	173,500,000	150	134,000,000	160	169,000,000	150	155,000,000	780	765,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0.0006	142,500,000	0.0006	650,980,000	0.0006	967,352,120	0.0006	859,742,000	0.0006	961,950,000	0.0006	3,582,524,120	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	75	205	2,042,550,000	250	750,000,000	250	650,000,000	250	500,000,000	250	650,000,000	1205	4,592,550,000	
	Persentase wirausaha	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.15	0.15	15,530,000,000	0.15	18,200,000,000	0.15	11,055,600,000	0.15	550,000,000	0.15	800,000,000	0.15	46,135,600,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N.A	0.03	377,357,723.00	0.03	814,650,000	0.03	956,998,000	0.03	1,049,602,400	0.03	1,007,059,200	0.03	4,205,667,323	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	persentase peningkatan volume usaha koperasi sapi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N.A	0.01	98,000,000.00	0.01	271,550,000	0.01	410,142,000	0.01	449,829,600	0.02	671,372,800	0.02	1,900,894,400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	persentase peningkatan volume usaha sektor kelautan dan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.05	0.05	490,000,000.00	0.05	1,364,300,000	0.05	1,367,140,000	0.05	1,499,432,000	0.05	1,678,432,000	0.05	6,399,304,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	perikanan															
	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N.A	0.01	98,000,000.00	0.01	199,500,000	0.02	457,320,000	0.02	546,856,000	0.02	570,000,000	0.02	1,871,676,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	PersentaseSDM Koperasi sektor pertanian terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N.A	1.38%	52,810,000.00	0.0309	244,500,000	0.0468	409,500,000	0.0344	269,100,000	0.0468	456,106,000	0.0468	1,432,016,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N.A	0	575,085,436.00	0.0034	946,880,000	0.0036	1,105,545,280	0.0034	878,198,000	0.0037	1,125,300,000	0.0037	4,631,008,716	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PersentaseSDM Koperasi sektor perikanan terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.01	0.01	52,810,000.00	0.03	244,500,000	0.03	227,500,000	0.03	269,100,000	0.05	456,106,000	0.05	1,250,016,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0	575,085,437.00	0	650,980,000	0	725,514,090	0	649,036,000	0	853,050,000	0	3,453,665,527	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PersentaseSDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.0069	0.0069	52,810,000.00	0.0206	163,000,000	0.0151	136,500,000	0.0275	179,400,000	0.022	79,818,550	0.022	611,528,550	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.0006	0.0006	575,085,437.00	0.0025	650,980,000	0.0032	967,352,120	0.0032	859,742,000	0.0032	961,950,000	0.0032	4,015,109,557	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PersentaseSDM Koperasi sektor sumber daya mineral terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.0069	0.0069	52,810,000.00	0.0206	163,000,000	0.0151	136,500,000	0.0275	179,400,000	0.022	79,818,550	0.022	611,528,550	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase SDM Usaha Kecil sektor sumber daya mineral terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N.A	0.0006	575,085,436.00	0.0018	443,850,000	0.0013	345,482,900	0.0018	415,260,000	0.0014	363,000,000	0	2,142,678,336	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	Pertumbuhan produk parekras	Urusan Koperasi, Usaha Kecil	0.1	0.1	832,791,485.00	0.1	620,000,000	0.1	670,000,000	0.1	720,000,000	0.1	800,000,000	0.1	3,642,791,485	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		dan Menengah														
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM	Urusan Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah	N.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penanaman Modal																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100	5564681693	100	2,720,000,000	100	2925000000	100	3220000000	100	3365000000	100	17794681693	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		60.28	76		82		85		88		92		92	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian	Urusan Penanaman Modal	N.A	3	537,369,500.00	0	-	0	0	3	2,510,000,000	0	0	3	3,047,369,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pertambahan Jumlah UKM pertaniaanyang bermitra dengan investor	Urusan Penanaman Modal	N.A	1	166,704,500.00	1	525,000,000	1	342,500,000	2	352,000,000	2	260,833,333	2	1,647,037,833	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor perikanan dan kelautan yang	Urusan Penanaman Modal	N.A	0	0	5	2,255,000,000	0	0	0	0	0	0	5	2,255,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	digunakan untuk promosi investasi di sektor perikanan dan Kelautan															Pintu
	Pertambahan Jumlah UKM Sektor kelautan dan perikanan yang bermitra dengan investor	Urusan Penanaman Modal	N.A	1	166,704,500.00	1	525,000,000	1	342,500,000	1	352,000,000	2	260,833,333	2	1,647,037,833	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata	Urusan Penanaman Modal	N.A	0	0	0	-	0	0	0	0	4	2,040,000,000	4	2,040,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	Urusan Penanaman Modal	N.A	0	0	1	525,000,000	1	342,500,000	1	352,000,000	1	260,833,333	1	1,480,333,333	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pertambahan Jumlah profil investasi sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi disektor sumber daya mineral	Urusan Penanaman Modal	N.A	0	0	0	-	3	1,795,000,000	0	0	0	0	0	1,795,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pertambahan Jumlah UKM yang bermitra dengan investor sumber daya mineral	Urusan Penanaman Modal	N.A	0	0	0	-	1	342,500,000	1	352,000,000	0.381	260,833,333	0	955,333,333	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	PertambahanJumlah investor Sektor Pertanian	Urusan Penanaman Modal	N.A	2	880,921,250.00	3	232,375,050	3	243,750,000	4	257,500,100	4	271,250,000	16	1,924,671,350	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pertambahan Jumlah Investor sektor kelautan dan perikanan	Urusan Penanaman Modal	N.A	1	880,921,250.00	2	232,375,050	2	243,750,000	4	257,500,100	4	271,250,000	4	1,885,796,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	Urusan Penanaman Modal	N.A	2	880,921,250.00	3	232,375,050	3	243,750,000	4	257,500,100	4	271,250,000	16	1,885,796,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pertambahan jumlah investor sumber daya mineral	Urusan Penanaman Modal	N.A	2	880,921,250.00	3	232,375,050	3	243,750,000	4	257,500,100	4	271,250,000	16	1,885,796,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan PenanamanModal dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan sektor pertanian yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	Urusan Penanaman Modal	N.A	0.0043	57,692,452.00	0.0044	263,750,000	0.0045	298,750,000	0.0046	342,500,000	0.0047	346,750,000	0.0047	1,309,442,452	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Presentase perusahaan sektor kelautan dan perikanan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	Urusan Penanaman Modal	N.A	0.0043	57,692,452.00	0.0044	263,750,000	0.0045	298,750,000	0.0046	342,500,000	0.0047	346,750,000	0.0047	1,309,442,452	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	Urusan Penanaman Modal	N.A	0.0043	57,692,452.00	0.0044	263,750,000	0.0045	298,750,000	0.0046	342,500,000	0.0047	346,750,000	0.0047	1,309,442,452	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Presentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	Urusan Penanaman Modal	N.A	0.0043	57,692,452.00	0.0044	263,750,000	0.0045	298,750,000	0.0046	342,500,000	0.0047	346,750,000	0.0047	1,309,442,452	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Presentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral	Urusan Penanaman Modal	0.75	0.78	1,314,464,000.00	0.79	2,165,000,000	0.82	2,525,000,000	0.84	2,240,000,000	0.86	2,305,000,000	0.86	10,549,464,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP	Urusan Penanaman Modal	N.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan dan Olahraga																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		0	75	3751358661	80	3,938,926,594	85	4199001945	90	4477039467	95	1387651250	85	17753977917	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga		57.01	76		82		85		88		92		92	0	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	N.A	0.2	415,000,000.00	0.0667	456,500,000	0.0625	502150000	0.0588	552365000	0.1111	607601500	0.1111	2533616500	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Persentase pemuda yang bekerja	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	N.A	0.102	300,770,106	0.102	330,847,117	0.102	363,931,828	0.102	400,325,011	0.102	440,357,512	0.102	1836231574	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Persentase Pemuda Berprestasi	Urusan Pemuda dan olahraga	N.A	0.2287	3,421,427,000	0.2287	4,099,069,700	0.2287	4,508,976,670	0.2287	4,959,874,337	0.2287	5,455,861,771	0.2287	22445209478	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	N.A	0.0641	100,000,000	0.0641	110,000,000	0.0641	121,000,000	0.0641	133,100,000	0.0641	146,410,000	0.0641	610510000	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	N.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	N.A	0.02	500,000,000.00	0.04	550,000,000	0.06	605000000	0.06	665500000	0.08	732050000	0.08	3052550000	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Persentase Atletpelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	Urusan Pemuda dan olahraga	N.A	0.05	5,474,531,075	0.05	6,208,984,183	0.05	6,829,982,601	0.05	7,512,870,861	0.05	8,264,157,947	0.05	34290526667	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	Urusan Pemuda dan olahraga	N.A	0.05	150,000,000	0.05	165,000,000	0.05	181,500,000	0.05	199,650,000	0.05	219,615,000	0.05	915765000	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Persentase peserta yang megikuti olahraga rekreasi dan tradisional	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	N.A	0	351,036,567	0	386,140,224	0	424,754,246	0	467,229,671	0	513,952,638	0	2143113346	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olah raga khusus lansia	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	N.A	0.0019	75,000,000	0.0019	82,500,000	0.0019	90,750,000	0.0019	99,825,000	0.0019	109,807,500	0.0019	457882500	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	N.A	0.0402	259,000,000	0.0402	284,900,000	0.0402	313,390,000	0.0402	344,729,000	0.0402	379,201,900	0.0402	1581220900	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang memiliki standar Nasional	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	N.A	0.0267	120,000,000	0.0267	132,000,000	0.0267	145,200,000	0.0267	159,720,000	0.0267	175,692,000	0.0267	732612000	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	N.A	0.0833	3,007,917,057.00	0.1667	753,250,000,000	0.1667	409100000000	0.25	387000000000	0.25	15250000000	0.25	1567607917057	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dan nasional															
	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	N.A	0.0833	0	0.1667	0	0.1667	0	0.25	0	0.25	0	0.25	0	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Statistik																
Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	Persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan	Urusan Statistik	N.A	100 data	891,947,304	200 data	1,836,606,765	300 data	2,203,928,117	400 data	2,644,713,741	500 data	3,179,655,689	500 data	10756851616	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persandian																
Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	Kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah di ling pemprov Babel sesuai standar persandian	Urusan Persandian	Cukup	Baik	63,905,485	Baik	68,405,485	Baik	72,905,485	Baik	77,405,485	Baik	81,905,485	Baik	364527425	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kebudayaan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100	4,922,191,000.00	100	5,296,593,450	100	5700394000	100	6139439000	100	6615837500	100	12755276500	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		31.69	76		82		85		88		92		92	0	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pelestarian Budaya	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan,	Urusan Kebudayaan	N.A	N.A	8,483,966,000.00	0	12,524,381,100	0	12735571000	0	14007100400	0	13979105000	0	61730123500	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dimanfaatkan dan dibina															
Perpustakaan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	75	7894499800	75	83,617,454,169	75	87795326878	75	92182093221	75	96788197883	75	188,970,291,104	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		53.61	76		82		85		88		92		92	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ;	Urusan Perpustakaan	N.A	0	655,700,000	0	4,122,440,000	0	3,689,368,000	0	4,777,416,901	0	6,236,180,247	0	19481105148	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka	Urusan Perpustakaan	N.A	200	675,000,000	350	247,930,000	400	274,212,500	500	286,888,625	550	677,860,557	2000	2161891682	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Pertambahan pengunjung perpustakaan	Urusan Perpustakaan	N.A	100000	241,934,100	11500	1,689,755,000	12500	1,419,577,750	13650	1,904,114,138	14870	2,409,702,345	62520	7665083333	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	presentase perpustakaan terakreditasi;	Urusan Perpustakaan	N.A	0	360,000,000	0	3,155,000,000	0	3,527,000,000	0	3,903,000,000	0	10,468,000,000	0	21413000000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Pertambahan pengelola perpustakaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar	Urusan Perpustakaan	N.A	0	356,438,800	0	5,337,177,300	0	3,832,392,500	0	4,223,662,125	0	13,448,707,590	0	27198378315	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kearsipan																
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Pertambahan jumlah arsip yang dikelola sesuai standar (Dinamis dan Statis)	Urusan Kearsipan	N.A	0	1,054,439,400	0	1,911,250,000	0	2,000,312,500	0	2,092,078,125	0	2,181,682,032	0	9239762057	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Peningkatan pembinaan dan pengawasan arsip	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	Urusan Kearsipan	N.A	20	944,276,000	20	1,909,137,300	20	1,863,706,300	20	2,176,847,935	20	2,135,317,415	100	4312165350	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PILIHAN																
Kelautan dan Perikanan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100	4352010000	100	12,577,218,460	100	8117479383	100	8421142710	100	8917200520	100	42385051073	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		60.11	76		82		85		88		92		92	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	Urusan Kelautan dan Perikanan	550,000	815,077	200,000,000	820,077	2,100,000,000	825077	2,220,000,000	830,077	2,629,000,000.00	835,077	3,114,800,000	835,077	10263800000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Urusan Kelautan dan Perikanan	0	1.60	5,100,000,000	2.13	8,856,000,000	2.13	10,517,200,000	2.13	12,688,400,000	2.66	17,643,200,000	10.63829787	54804800000	
	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya pada kawasan konektifitasPulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Urusan Kelautan dan Perikanan	0	0.6	650,000,000	0.65	456,000,000	0.75	498,000,000	0.8	553,200,000	0.85	611,040,000	0.85	2768240000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Urusan Kelautan dan Perikanan	181000	211300	6,039,100,000	215300	23,345,000,000	219300	278700000000	223300	345350000000	227300	348600000000	227300	126,649,100,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	0	0	19500	610,000,000	22500	12200000000	26500	12200000000	31000	18300000000	31000	48800000000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	0	0	33000	610,000,000	35000	12200000000	37000	12200000000	39000	18300000000	39000	48800000000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Perikanaan Selat Nasik															
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	0	0	10,000	457,500,000	13,125	915,000,000	14,250	915,000,000	15,750	1,372,500,000	53,125	3660000000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	0	0	5,000	152,500,000	4,375	305,000,000	4,750	305,000,000	5,250	457,500,000	19,375	1220000000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	0	0	2,750	610,000,000	3000	1220000000	3250	1220000000	3550	1830000000	3550	4880000000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pertambahan pendapatan asli daerah darilayanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)	Urusan Kelautan dan Perikanan	0	368 juta	1,941,740,000.00	420 juta	2,200,000,000.00	441 juta	2,400,000,000.00	463 juta	2,600,000,000.00	468.00	2,600,000,000.00	2,192.00	11741740000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	6.79%	182,230,000	6.8%	500,000,000	6.8%	600,000,000	6.9%	700,000,000	6.9%	800,000,000	6.9%	2782230000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase kontribusi komoditas ikan dalam menyumbang inflasi	Urusan Kelautan dan Perikanan	0	11.11	-	22.22	5,100,000,000	22.22	6,120,000,000	33.33	7,344,000,000	55.56	8,812,800,000	55.56		Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Urusan Kelautan dan Perikanan	17,080	11,620	559,168,000.00	12,120	980,000,000	12,620	1,585,000,000	13,120	1,550,000,000	13,620	2300000000	13620	6974168000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Angka Konsumsmi Ikan (Kg/Org/Tahun)	Urusan Kelautan dan Perikanan	49	53	734,620,000.00	54	1,446,000,000	55	1,485,000,000	56	1,500,000,000	57	1,545,000,000	57	6710620000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Volume Produksi Olahan (ton)	Urusan Kelautan dan Perikanan	24,000	20,610	1,857,605,000.00	21,110	175,000,000	21,610	180,000,000	22,110	185,000,000	22,610	190,000,000	22,610	2587605000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	75	0	220	73,000,000	270	113000000	330	133000000	420	163000000	420	482000000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis etalase perikanan selat nasik	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	10	0	121	73,000,000	163	113000000	225	133000000	307	163000000	307	482000000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat (Ton)	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	10	0	120	300,000,000	160	310000000	220	320000000	300	325000000	300	1255000000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	1.1%	49,940,000.00	1.1%	3,054,000,000.00	1.2%	3,474,000,000.00	1.2%	3,744,000,000.00	1.2%	4,044,000,000.00	0.012	14365940000	Dinas Kelautan dan Perikanan
ProgramPeningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	65.00%	1,216,773,000	70%	2,550,000,000	75%	2,860,000,000	80%	3,090,000,000	85%	3,600,000,000	85%	13316773000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	8.75	276,672,000	9.63	885,000,000	10.59	1,140,000,000	11.65	1,245,000,000	12.81	1,250,000,000	53.41	4796672000	UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak
	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	Urusan Kelautan dan Perikanan	150 juta	25 juta	863,730,400	26,25 juta	1,850,000,000	28,88 juta	1,900,000,000	31,76 juta	192,500,000	34,94 juta	105,000,000	146,83 juta	4911230400	UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	0.05	223,906,000	0.06	540,000,000	0.07	600,000,000	0.08	645,000,000	0.09	690,000,000	0.34	2698906000	UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa
	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	Urusan Kelautan dan Perikanan	150 juta	75 juta	789,380,000	165 juta	1,200,000,000	173,25 juta	1,300,000,000	187,11 juta	1,350,000,000	205,82 juta	1,400,000,000	881,18 juta	6039380000	UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Urusan Kelautan dan Perikanan	N.A	0.3	69,227,100.00	0.33	215,500,000	0.36	246,000,000	0.40	260,000,000	0.44	274,000,000	1.83	1064727100	UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Sentral (BBIS) Pemali
Pariwisata																
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	Urusan Pariwisata	0	5	8866985000	7	11,207,306,000	9	11903841000	11	12646920000	13	13369388000	9	57994440000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentase objek wisata yang dikelola	Urusan Pariwisata	N.A	0.32	2128785200	0.32	1,010,218,120	0.33	1027653800	0.33	1117131400	0.36	1132988100	0.36	6416776620	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	persentase sarana dan prasarana Pariwisata di kawasanpariwisata Tanjung Gunung yang terbangun dan dikelola	Urusan Pariwisata	N.A	0.32	2128785200	0.32	1,010,218,120	0.33	1027653800	0.33	1117131400	0.36	1132988100	0.36	6416776620	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Persentase sarana dan prasaranapariwisata di kawasanLintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan dikelola	Urusan Pariwisata	N.A	0.32	2128785200	0.32	1,010,218,120	0.33	1027653800	0.33	1117131400	0.36	1132988100	0.36	6416776620	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasanEkonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang	Urusan Pariwisata	N.A	0.32	2128785200	0.32	1,010,218,120	0.33	1027653800	0.33	1117131400	0.36	1132988100	0.36	6416776620	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasanKota Tua Muntok	Urusan Pariwisata	N.A	0.32	2128785200	0.32	1,010,218,120	0.33	1027653800	0.33	1117131400	0.36	1132988100	0.36	6416776620	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan gunung Permisian Simpang Rimba	Urusan Pariwisata	N.A	0	0	0.25	1,250,000,000	0.3	1500000000	0.3	1650000000	0.35	1000000000	0.35	5400000000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Urusan Pariwisata	N.A	0	0	0.25	1,000,000,000	0.3	1350000000	0.3	1500000000	0.35	1500000000	0.35	5350000000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Urusan Pariwisata	N.A	0	0	0.25	1,250,000,000	0.3	1500000000	0.3	1650000000	0.35	1000000000	0.35	5400000000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	Urusan Pariwisata	N.A	N.A	688840167	0	3,912,278,833	0	4261935500	0	4331092833	0	5057107667	0	18251255000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	Urusan Pariwisata	N.A	N.A	688840167	0	3,912,278,833	0	4261935500	0	4331092833	0	5057107667	0	18251255000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Pertumbuhan kelembagaan pariwisata	Urusan Pariwisata	N.A	N.A	688840167	0	3,912,278,833	0	4261935500	0	4331092833	0	5057107667	0	18251255000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Rasio Penyelenggaraan event penunjang	Urusan Pariwisata	N.A	N.A	2174557000	0	2,394,317,000	0	2514033000	0	2639734000	0	2771462000	0	12494103000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	kepariwisataan dengan priode waktu satu tahun															
Pertanian																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	80	7308350000	90	7,743,400,000	100	7893400000	100	8093400000	100	15350000000	100	46388550000	Dinas Pertanian
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		60.22	76		82		85		88		92		92	0	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pertambahan Jumlah populasi ternak besar sapi	Urusan Pertanian	11545	13090	3150000000	14399	3,590,000,000	15838	4085000000	17422	4530000000	19164	4805000000	19164	20160000000	Dinas Pertanian
	Pertambahan Jumlah populasi ternak ayam	Urusan Pertanian	11500000	12075000	2000000000	12678800	3,590,000,000	13312700	4085000000	13978320	4530000000	14677240	4805000000	14677240	19010000000	Dinas Pertanian
	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	Urusan Pertanian	4	8	8500000000	14	3,590,000,000	20	4085000000	26	4530000000	32	4805000000	32	17860000000	Dinas Pertanian
	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi	Urusan Pertanian	2	1	8000000000	-	3,590,000,000	1	4085000000	-	4530000000	-	4805000000	3	17810000000	Dinas Pertanian
	Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor Peternakan	Urusan Pertanian	92.86	93.86	850,000,000	94.86	3,590,000,000	95.86	4,085,000,000	96.86	4,530,000,000	97.86	4,805,000,000	97.86	17860000000	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	Persentase penurunan areal tanam yang terserang OPT	Urusan Pertanian	5	5	5300000000	5	530,000,000	5	5300000000	5	5300000000	5	1000000000	5	3120000000	UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Persentase peningkatan produksi dan produktifitas komoditi strategis tanaman pangan padi	Urusan Pertanian	38393	40313	2000000000	43135	1,046,477,500	47017	1097030000	52188	1152530000	60017	1203030000	60017	4853618500	Dinas Pertanian
	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	Urusan Pertanian	N.A	30	197998500	40	1,046,477,500	50	1097030000	60	1152530000	70	1203030000	70	4697066000	Dinas Pertanian
	Tersedianya Kawasan budiaya komoditas padi di KTM Batu Betumpang	Urusan Pertanian	N.A	0	0	1	348,843,333	0	0	0	0	0	0	1	348843333	Dinas Pertanian
	Tersedianya Kawasan budiya komoditas cabai di KTM Batu Betumpang	Urusan Pertanian	N.A	0	0	1	348,843,333	0	0	0	0	0	0	1	348843333	Dinas Pertanian
	Tersedianya Kawasan budiaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	Urusan Pertanian	N.A	0	0	1	348,843,333	0	0	0	0	0	0	1	348843333	Dinas Pertanian
	Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Batu Betumpang	Urusan Pertanian	N.A	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi di kawasan kota terpadu mandiri Gantung	Urusan Pertanianaan	N.A	0	0	1	348,843,333	0	0	0	0	0	0	1	348843333	Dinas Pertanian
	Tersedianya Kawasan Budidaya komoditas cabai di	Urusan Pertanianaan	N.A	0	0	1	348,843,333	0	0	0	0	0	0	1	348843333	Dinas Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kawasan kota Terpadu mandiri Gantung															
	Tersedianya Kawasan Budidaya bawang merah di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gantung	Urusan Pertanian	N.A	0	0	1	348,843,333	0	0	0	0	0	0	1	348843333	Dinas Pertanian
	Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Gantung	Urusan Pertanian	N.A	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi	Urusan Pertanian	N.A	0	0	1	348,843,333	0	0	0	0	0	0	1	348843333	Dinas Pertanian
	Tersedianya Kawasan budidaya komoditi cabai	Urusan Pertanian	N.A	0	0	1	348,843,333	0	0	0	0	0	0	1	348843333	Dinas Pertanian
	Tersedianya Kawasan budidaya bawang merah	Urusan Pertanian	N.A	0	0	1	348,843,333	0	0	0	0	0	0	1	348843333	Dinas Pertanian
	NTP subsektor Tanaman Pangan	Urusan Pertanian	93.08	94.08	473,238,750	95.08	1,046,477,500	97.08	1,097,030,000	98.08	1,152,530,000	100.08	1,203,030,000	100.08	4972306250	Dinas Pertanian
	Peningkatan Nilai tukar petani (NTP) subsektor tanaman pangan dan hortikultura	Urusan Pertanian	100.35	100.55	473,238,750	100.75	1,046,477,500	100.95	1,097,030,000	101.15	1,152,530,000	101.35	1,203,030,000	101.35	4972306250	Dinas Pertanian
	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai besar	Urusan Pertanian	2284.8	2528.54	423,333,000	2813.28	1,046,477,500	3113.22	1,097,030,000	3443.52	1,152,530,000	3769.61	1,203,030,000	3769.61	4922400500	Dinas Pertanian
	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai rawit	Urusan Pertanian	1916.1	2257.43	423,333,000	2651.13	1,046,477,500	3095.08	1,097,030,000	3606.04	1,152,530,000	4118.19	1,203,030,000	4118.19	4922400500	Dinas Pertanian
	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas bawang merah	Urusan Pertanian	65.4	81.72	423,333,000	98.11	1,046,477,500	114.51	1,097,030,000	164.76	1,152,530,000	199.96	1,203,030,000	199.96	4922400500	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Perkebunan	Peningkatan produksi lada	Urusan Pertanian	39153	41111	2975000000	43577	5,396,000,000	46628	5851000000	49892	6306000000	53883	9821000000	53883	30349000000	Dinas Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	Urusan Pertanian	6	31	400000000	56	5,396,000,000	81	5851000000	106	6306000000	131	9821000000	131	27774000000	Dinas Pertanian
	Tersedianya kawasan Pengembanganbudidaya lada	Urusan Pertanian	3	1	1250000000	1	5,396,000,000	1	5851000000	1	6306000000	1	9821000000	1	28624000000	Dinas Pertanian
	Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor perkebunan	Urusan Pertanian	97	99	780,000,000	101	5,396,000,000	102	5,851,000,000	104	6,306,000,000	106	9,821,000,000	106	28154000000	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	Persentase Pertambahan Jumlah benih lada yang bersertifikat dan berlabel	Urusan Pertanian	375000	525000	146000000	655000	103,000,000	785000	108000000	915000	113000000	1050000	190000000	1050000	660000000	UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
	Persentase Pertambahan Jumlah benih karet yang bersertifikat dan berlabel,	Urusan Pertanian	375000	525000	146000000	655000	103,000,000	785000	108000000	915000	113000000	1050000	190000000	1050000	660000000	UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
	Pertambahan Jumlah benih padi yang bersertifikat dan berlabel	Urusan Pertanian	100	125	196000000	150	206,000,000	175	216000000	200	226000000	250	380000000	250	1224000000	UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
	Pertambahan Jumlah benih hortikultura yang bersertifikat dan berlabel,	Urusan Pertanian	1000	1250	196000000	1500	206,000,000	1750	216000000	2000	226000000	2500	380000000	2500	1224000000	UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
	Persentase varietas unggul lokal yang didaftarkan menjadi unggul Nasional	Urusan Pertanian	2	2	196000000	2	206,000,000	2	216000000	2	226000000	2	380000000	2	1224000000	UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	Pertambahan Ketersediaan bibit lada	Urusan Pertanian	-	25000	1740105000	50000	355,000,000	75000	430000000	100000	405000000	150000	571666667	150000	3501771667	UPTD Balai Benih Pertanian
	Pertambahan	Urusan	200	40000	1740105000	40000	355,000,000	40000	430000000	40000	405000000	150000	571666667	40000	3501771667	UPTD Balai

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Ketersediaan bibit karet	Pertanian														Benih Pertanian
	Pertambahan Ketersediaan benih sumber padi	Urusan Pertanian	-	2	1740105000	4	355,000,000	6	4300000000	6	4050000000	150000	571666667	6	3501771667	UPTD Balai Benih Pertanian
	Pertambahan Ketersediaan bibit ayam	Urusan Pertanian	1000	5000	1740105000	6000	355,000,000	8000	4300000000	11000	4050000000	150000	571666667	15000	3501771667	UPTD Balai Benih Pertanian
	Pertambahan Ketersediaan anakan sapi	Urusan Pertanian	8	15	1740105000	20	355,000,000	25	4300000000	30	4050000000	150000	571666667	35	3501771667	UPTD Balai Benih Pertanian
Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian	Pertambahan KebijakanPerlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang di implementasikan	Urusan Pertanian	N.A	1	2500000000	2	300,000,000	1	3500000000	1	4000000000	1	4500000000	6	17500000000	Dinas Pertanian
	Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian	Urusan Pertanian	17	14	4060265000	15	7,475,000,000	15	7950000000	15	7500000000	16	7550000000	75	34535265000	Dinas Pertanian
	Persentase Pertambahan Kelompok tani yang melakukanpemberd ayaan disektor pertanian	Urusan Pertanian	10	10	2330132500	10	3,887,500,000	10	4150000000	10	3950000000	10	4000000000	50	18317632500	Dinas Pertanian
	Persentase Kelembagaan pertanian aktif	Urusan Pertanian	10	10	2330132500	10	3,887,500,000	10	4150000000	10	3950000000	10	4000000000	50	18317632500	Dinas Pertanian
Kehutanan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase Pelayanan Dinas Kehutanan		0	100	7916225000	100	7,575,000,000	100	5225000000	100	5625000000	100	5575000000	100	31916225000	Dinas Kehutanan
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		44.88	76		82		85		88		92		92		Dinas Kehutanan
Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)	Urusan Kehutanan	N.A	1	319,527,000	1	319,527,000	1	319,527,000	1	319,527,000	1	319,527,000	1	1597635000	Dinas Kehutanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase penurunan Kawasan Hutan yang terbakar	Urusan Kehutanan	N.A	1	461,506,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	2461506000	Dinas Kehutanan
	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)	Urusan Kehutanan	9.092,5 Hektar	0.0088	2,079,313,000	0.0088	1,729,588,000	0.0088	1,729,588,000	0.0088	1,729,588,000	0.0088	1,729,588,000	4.4% (9.492,5 Hektar)	8997665000	Dinas Kehutanan
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	Urusan Kehutanan	N.A	1	2,200,000,000	1	2,250,000,000	1	2,700,000,000	1	3,000,000,000	1	3,300,000,000	0	13450000000	Dinas Kehutanan
	Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola	Urusan Kehutanan	N.A	0	582,042,000	0	582,042,000	0	582,042,000	0	582,042,000	0	582,042,000	0	2910210000	Dinas Kehutanan
Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Hutan	Persentase izin usaha hasil hutan kayu (%)	Urusan Pertanian	1	1	284,024,350	1	300,000,000	1	330,000,000	1	340,000,000	1	350,000,000	1	1604024350	Dinas Kehutanan
	Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan (%)	Urusan Pertanian	1	1	0	1	1,600,000,000	1	1,650,000,000	1	1,700,000,000	1	1,750,000,000	1	6700000000	Dinas Kehutanan
	Presentase luas areal kawasan hutan yang dikelola didi Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	Urusan Kehutanaan	0	0	250000000	0	250,000,000	0	300000000	0	300000000	0	300000000	0	1400000000	Dinas Kehutanan
	Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	Urusan Kehutanan	0	0.2	1,540,258,000	0.2	1,600,000,000	0.2	1,650,000,000	0.2	1,700,000,000	0.2	1,750,000,000	1	8240258000	Dinas Kehutanan
Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase DAS kritis yang di kelola	Urusan Kehutanan	N.A	7	300,000,000	7	530,750,000	7	530,750,000	7	530,750,000	7	530,750,000	7	2423000000	Dinas Kehutanan
	Persentase luas kawasanPerhutanan Sosial (%)	Urusan Kehutanan	19.289 Hektar	0.0207	1,724,500,000	0.0207	1,726,000,000	0.0207	1,730,000,000	0.0207	1,730,000,000	0.0207	1,750,000,000	10.37% (21.289 Hektar)	8660500000	Dinas Kehutanan
	persentase penanganan tindak pidana kehutanan	Urusan Kehutanan	N.A	0	2,350,000,000	0	2,350,000,000	0	2,350,000,000	0	2,350,000,000	0	2,350,000,000	0	11750000000	Dinas Kehutanan
Energi dan Sumber Daya Mineral																

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100	6510330000	100	13,174,000,000	100	132800000000	100	142500000000	100	152200000000	100	62434330000	Dinas Energi dan Sumber Daya Minera
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		60.05	76		82		85		88		92		92	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program PengembanganPertamban gan Mineral Logam	Persentase Perusahaan pertambangan logam yang menerapkan good mining practices	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	0.45	0.5	350,000,000	0.6	550,000,000	0.65	6500000000	0.7	7000000000	0.8	7500000000	0.8	30000000000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pertambahan Jumlah DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam) Mineral Logam	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	77,7 Miliar	70 Miliar	103,700,000	80 Miliar	250,000,000	80 Miliar	2500000000	80 Miliar	2750000000	80 Miliar	3000000000	390 Miliar	1178700000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	N.A	0.15	900,396,000	0.13	2,250,000,000	0.12	2,250,000,000	0.1	2,500,000,000	0.09	3,000,000,000	0.09	10900396000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Nilai jaminan reklamasi	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	200 miliar	10 Miliar	103,945,000	10 Miliar	350,000,000	10 Miliar	350,000,000	10 Miliar	350,000,000	10 Miliar	350,000,000	10 Miliar	1503945000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase luas lahan yang tidak terganggu di areal ULP	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	0.06	0.25	900,396,000	0.43	0	0.62	0	0.81	0	1	0	1	900396000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Persentase penggunaan EBT	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	0.0681	0.0682	12,118,110,000	0.0683	15,000,000,000	0.0684	15,000,000,000	0.0685	15,000,000,000	0.0686	15,000,000,000	0.0686	72118110000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai standar	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	0.4	0.5	150,000,000	0.6	250,000,000	0.65	250,000,000	0.7	250,000,000	0.8	250,000,000	0.8	11500000000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase perusahaan di bidang ketenagalistrikan yang sesuai standar	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	0.4	0.5	150,000,000	0.6	200,000,000	0.65	250,000,000	0.7	300,000,000	0.8	300,000,000	0.8	12000000000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	yang diinginkan															
	Pertambahan Jumlah lifting MIGAS Babel	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	480 Ribu Barel	460 Ribu Barel	125,850,000	440 Ribu Barel	300,000,000	420 Ribu Barel	350,000,000	400 Ribu Barel	350,000,000	400 Ribu Barel	350,000,000	2,12 juta Barel	1475850000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	N.A	0.16	150,000,000	0.33	500,000,000	0.49	500000000	0.65	550,000,000	0.81	600,000,000	0.81	2300000000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase pertumbuhan pendapatan Daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	4 Miliar	1,5 Miliar	0	1,7 Miliar	200,000,000	1,9 Miliar	200,000,000	2 Miliar	200,000,000	2 Miliar	200,000,000	9,1 Miliar	800000000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	N.A	0.1818	1,667,400,000	0.4091	200,000,000	0.6364	200,000,000	0.8182	200,000,000	0.0686	200,000,000	0.0686	2467400000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase pemenuhan Air Tanah dilokasi yang rawan air	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	N.A	0.01	1,700,000,000	0	0	0.02	1,300,000,000	0	0	0.02	1,400,000,000	0.02	4400000000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	10 Obyek	10 Obyek	387,612,000	10 Obyek	150,000,000	10 Obyek	175,000,000	10 Obyek	200,000,000	10 Obyek	225,000,000	10 Obyek	1137612000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase Perusahaan pertambangan non logam yang menerapkan good mining practices	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	0.45	0.5	223,820,000	0.65	450,000,000	0.7	450000000	0.75	500000000	0.8	550000000	0.8	2173820000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		57.21	76	4051968000	82	3,384,065,650	85	3463831275	88	3576961806	92	3722021200	92	18198847931	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100		100		100		100		100		100	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor(ton)	Urusan Perdagangan	857937	860000	428,951,000	862000	600,000,000	862000	850,000,000	863000	1,000,000,000	870000	1,150,000,000	870000	4028951000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentasejumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu	Urusan Perdagangan	11 barang	73	4,570,965,000	83	4,710,000,000	89	5,004,000,000	95	5,247,000,000	100	5,417,000,000	100	24948965000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan dimanfaatkan	Urusan Perdagangan	87	0	19,500,000,000	63	30,000,000,000	12	5,500,000,000	0	10,000,000,000	25	12,000,000,000	25	77000000000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	Urusan Perdagangan	0	0.1	339,742,500	0.1	660,320,000	0.1	750,352,000	0.1	821,387,000	0.1	910,525,000	0	3482326500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkanresi gudang	Urusan Perdagangan	0	0	1,500,000,000	20	7,000,000,000	40	11,000,000,000	20	4,000,000,000	20	4,000,000,000	20	27500000000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang	Urusan Perdagangan	N.A	0	0	1	156,000,000	1	234,000,000	1	254,000,000	1	315,000,000	1	959000000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan promosi produk dalam negeri	Urusan Perdagangan	10	10	182,085,000	10	1,000,000,000	10	1,500,000,000	10	2,200,000,000	10	3,000,000,000	10	7882085000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian																

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengembara Wilayah dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Urusan Perindustrian	N.A	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik	Urusan Perindustrian	N.A	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Urusan Perindustrian	N.A	0	541699333	1	550,000,000	1	606666667	1	766666667	1	850000000	0	3315032667	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai	Urusan Perindustrian	N.A	0	541699333	1	550,000,000	1	606666667	1	766666667	1	850000000	0	3315032667	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanaan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Urusan Perindustrian	N.A	0	541699333	1	550,000,000	1	606666667	1	766666667	1	850000000	0	3315032667	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Pertumbuhan Jumlah Industri yang berproduksi	Urusan Perindustrian	N.A	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas dan Akses Industri	Pertumbuhan JumlahIndustri pada sektor pertanian	Urusan Perindustrian	1149	1474	0	1499	495,000,000	1524	200000000	1549	210000000	1547	220000000	1547	1125000000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian	Urusan Perindustrian	9.98	0.1013	0	0.1028	150,000,000	0.1044	200000000	0.1058	200000000	0.1073	0	0.1073	550000000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanaan	Urusan Perindustrian	0.0067	0.0068	0	0.007	280,000,000	0.0071	170000000	0.0072	180000000	0.0074	190000000	0.0074	820000000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	Urusan Perindustrian	0.00301	0.00308	282513500	0.00319	429,016,200	0.00333	518819440	0.00353	562583328	0.00381	411099994	0.00381	2204032462	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan sumber daya mineral;	Urusan Perindustrian	0.0103	0.0104	0	0.0104	-	0.0104	150000000	0.0104	0	0.0103	0	0.0103	150000000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	pertumbuhan industri turunaan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan	Urusan Perindustrian	3	4	0	4	260,000,000	5	0	5	300000000	5	0	5	560000000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	Urusan Perindustrian	0.0503	0.051	3,308,181,750	0.0517	4,951,778,000	0.0524	5,406,876,450	0.0531	5,903,681,733	0.0538	6,071,749,571	0.0538	25642267504	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase jumlah industri yang memiliki standar kesehatan industri.	Urusan Perindustrian	0	15	886,801,000	15	1,600,000,000	15	1,775,000,000	15	1,950,000,000	15	1,600,000,000	15	7811801000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	Urusan Perindustrian	1.5	2.96	676,035,000	4.68	893,638,500	6.71	1,072,366,200	9.02	1,265,839,440	11.61	1,495,007,328	11.61	5402886468	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	Urusan Perindustrian	5	10	765,500,000	14	2,711,000,000	18	2,908,000,000	27	4,280,000,000	31	4,495,000,000	31	15159500000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	Urusan Perindustrian	0	20	1,438,592,000	22	2,700,000,000	25	3,025,000,000	29	3,635,000,000	34	3,655,000,000	34	14453592000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase jumlah StandarisasiLab. Kemetrolagian yang memenuhi standar	Urusan Perindustrian	0	10	219,175,000	20	555,000,000	50	615,000,000	80	700,000,000	100	602,000,000	100	2691175000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujian	Urusan Perindustrian	2	3	1069362000	2	3,526,429,000	2	2239907000	1	2164907000	1	2264907000	1	11265512000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase produk sumber daya mineral yang disertifikasi	Urusan Perindustrian	0.67	0.68	0	0.7	280,000,000	0.71	1700000000	0.72	1800000000	0.74	1900000000	0	8200000000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Transmigrasi																
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang	Urusan Transmigrasi	N.A	0	220,598,665	0	-	0	0	0	0	0	0	0	220598665	Dinas Tenaga Kerja
	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Gantung	Urusan Transmigrasi	N.A	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase desa di kawasan transmigrasi yang diberdayakan	Urusan Transmigrasi	N.A	0	110,299,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110299333	Dinas Tenaga Kerja
FUNGSI PENUNJANG URUSAN																
Perencanaan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Skoring (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		70.07	76	7,949,060,000	82	7,116,546,000	85	7312876000	88	7510434000	92	6137500000	92	36026416000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100		100		100		100		100		100	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	1,771,602,000	0.3	1,349,984,020	0.35	1,417,483,221	0.4	1,488,357,382	0.4	1,562,775,251	0.45	7590201874	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian antara dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	1,694,961,700	0.3	449,994,673	0.35	472,393,307	0.4	496,119,127	0.4	520,925,084	0.45	3634393891	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Tingkat kesesuaian jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	514,794,500	0.3	149,998,224	0.35	157,498,136	0.4	165,373,042	0.4	173,641,695	0.45	1161305597	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung peningkatan produksi pertanian yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	1,006,804,900	0.3	1,059,645,145	0.35	1,062,627,402	0.4	1,065,758,772	0.4	1,069,046,711	0.45	5,263,882,930	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung sektor Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	56,804,900	0.3	59,645,145	0.35	62,627,402	0.4	65,758,772	0.4	69,046,711	0.45	313,882,930	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	71,006,166	0.3	74,556,475	0.35	78,284,299	0.4	82,198,514	0.4	86,308,439	0.45	392,353,893	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pariwisata yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD															Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan sumber daya mineral yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	56,804,900	0.3	59,645,145	0.35	62,627,402	0.4	65,758,772	0.4	69,046,711	0.45	313,882,930	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang bendukung pengembangan kemandirian energi yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	56,804,900	0.3	59,645,145	0.35	62,627,402	0.4	65,758,772	0.4	69,046,711	0.45	313,882,930	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan penanggulangan pengangguran yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1		71,006,167	0.3	74,556,475	0.35	78,284,299	0.4	82,198,514	0.4	86,308,439	0.45	392,353,894	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan pengendalian Inflasi yang terintegrasi denaan dokumen	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	71,006,167.00	0.3	74,556,475.00	0.35	78,284,299.00	0.4	82,198,514.00	0.4	86,308,439.00	0.45	392,353,894	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	perencanaan Renstra dan Renja PD															
	Persentase Kesesuaian antar Renja PD mitra kerja bidang perekonomian dan sumberdaya alamdengan RKPd	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	50,000,000.00	0.3	52,500,000.00	0.35	55,125,000.00	0.4	57,881,250.00	0.4	60,775,313.00	0.45	276,281,563	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung sektor lingkungan hidupyang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan Renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	56,804,900.00	0.3	59,645,145.00	0.35	62,627,402.00	0.4	65,758,772.00	0.4	69,046,711.00	0.45	313,882,930	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan Kawasan KTM Batu Betumpang yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	21,555,429	0.3	22,633,200	0.35	23,764,860	0.4	24,953,103	0.4	26,200,758	0.45	119,107,350	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase Kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan Kawasan KTM Gantung yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	21,555,429	0.3	22,633,200	0.35	23,764,860	0.4	24,953,103	0.4	26,200,758	0.45	119,107,350	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Renstra dan renja PD															
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar pongok yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	21,555,429	0.3	22,633,200	0.35	23,764,860	0.4	24,953,103	0.4	26,200,758	0.4	119,107,350	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan Kawasan Strategis Perikanaan selat nasik yang terintegrasi dalamdokumen Perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	21,555,429	0.3	22,633,200	0.35	23,764,860	0.4	24,953,103	0.4	26,200,758	0.4	119,107,350	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	21,555,429	0.3	22,633,200	0.35	23,764,860	0.4	24,953,103	0.4	26,200,758	0.45	119,107,350	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase kesesuaian perencanaan mendukung pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	138,757,624	0.3	93,195,506	0.35	97,855,282	0.4	102,748,046	0.4	107,885,448	0.45	540,441,906	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan Kawasan Strategis ASDP Manggar-Ketapang yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	N.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan Tanjung Gunung dan Lintas Timur Pulau Bangka yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	138,757,624	0.3	93,195,506	0.35	97,855,282	0.4	102,748,046	0.4	107,885,448	0.4	540,441,906	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung PengembanganKaw	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	21,555,429	0.3	22,633,200	0.35	23,764,860	0.4	24,953,103	0.4	26,200,758	0.45	119,107,350	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	asan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD															Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung PengembanganKawasan Kota Tua Mentok yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	21,555,429	0.3	22,633,200	0.35	23,764,860	0.4	24,953,103	0.4	26,200,758	0.45	119,107,350	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan kawasan konektivitas pulau bangka dan pulau sumatera yang terintegrasi dalam Dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	138,757,624	0.3	93,195,506	0.35	97,855,282	0.4	102,748,046	0.4	107,885,448	0.4	540,441,906	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	138,757,624	0.3	93,195,506	0.35	97,855,282	0.4	102,748,046	0.4	107,885,448	0.45	540,441,906	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pulau kecil yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD															
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu(KIPT) Tanjung Ular yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	21,555,429	0.3	22,633,200	0.35	23,764,860	0.4	24,953,103	0.4	26,200,758	0.45	119,107,350	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung PengembanganKawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK) yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	21,555,429	0.3	22,633,200	0.35	23,764,860	0.4	24,953,103	0.4	26,200,758	0.4	119,107,350	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung PengembanganKawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat yang terintegrasi dalam Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	21,555,429	0.3	22,633,200	0.35	23,764,860	0.4	24,953,103	0.4	26,200,758	0.4	119,107,350	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung PengembanganKaw asan Strategis Industri Sadai yang terintegrasi dalam dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	21,555,429	0.3	22,633,200	0.35	23,764,860	0.4	24,953,103	0.4	26,200,758	0.45	119,107,350	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung PengembanganKaw asaan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	21,555,429	0.3	22,633,200	0.35	23,764,860	0.4	24,953,103	0.4	26,200,758	0.4	119,107,350	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung Pengembangan infrastruktur danKonektivitas antar wilayah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	21,555,429	0.3	22,633,200	0.35	23,764,860	0.4	24,953,103	0.4	26,200,758	0.45	119,107,350	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase Kesesuaian antar Renja PD mitra kerja bidanginfrastruktur dan pengembangan wilayah dengan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	50,000,000	0.3	52,500,000	0.35	55,125,000	0.4	57,881,250	0.4	60,775,313	0.45	276,281,563	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	RKPD															
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan TPA Regional yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	21,555,429	0.3	22,633,200	0.35	23,764,860	0.4	24,953,103	0.4	26,200,758	0.4	119,107,350	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Persentase kesesuaian perencanaan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	376,257,625	0.3	421,154,145	0.35	427,211,852	0.4	433,572,445	0.4	440,251,067	0.45	2,098,447,134	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan pengendalian jumlah penduduk yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	76,257,625	0.3	121,154,145	0.35	127,211,852	0.4	133,572,445	0.4	140,251,067	0.45	598,447,134	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pembangunan pendidikan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	76,257,625	0.3	121,154,145	0.35	127,211,852	0.4	133,572,445	0.4	140,251,067	0.45	598,447,134	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase kesesuaian perencanaan mendukung pembangunan kesehatan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	76,257,625.00	0.3	121,154,145.00	0.35	127,211,852.00	0.4	133,572,445.00	0.4	140,251,067.00	0.45	598,447,134	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase Kesesuaian antar RenjaPD mitra kerja bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan RKPD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	50,000,000	0.3	52,500,000	0.35	55,125,000	0.4	57,881,250	0.4	60,775,313	0.45	276,281,563	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pembangunan Reformasi Birokrasi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	230,769,800	0.3	193,195,506	0.35	197,855,282	0.4	202,748,046	0.4	207,885,448	0.45	1,032,454,082	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pembangunan berdemokrasi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	0.1	0.25	100,000,000	0.3	93,195,506	0.35	97,855,282	0.4	102,748,046	0.4	107,885,448	0.45	501,684,282	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Keuangan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100	18270267996	100	17,952,638,519	100	18468082326	100	20452503587	100	20630595525	100	95774087953	Badan Keuangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		53.92	76		82		85		88		92		92	0	Badan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.2605	0.2376	2808900000	0.2419	2,506,533,250	0.2462	3.11446388	0.2505	2701151322	0.2548	3226198630	0.2548	11242783205	Badan Keuangan Daerah
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	B	5,365,051,940	B	5,908,511,250	B	6,474,711,962	A	7,204,281,525	A	7,859,807,639	A	32812364316	Badan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain Lain Yang Sah	Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.7395	0.7624	1317000000	0.7581	1,511,430,825	0.7538	1642050038	0.7495	1486275041	0.7452	1932354545	0.7452	7889110449	Badan Keuangan Daerah
Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan dan jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD (Ket: 3 = sesuai, 2 = kurang sesuai, 1 = tidak sesuai)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	3	3	4,723,612,500	3	4,860,192,500	3	5,506,211,750	3	5,700,332,925	3	6,049,866,218	3	26840215893	Badan Keuangan Daerah
	Prosentase kesesuaian antara RAPBD dengan dokumen KUA-PPAS	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	99.78	1	2,100,175,000	1	2,310,192,500	1	2,541,211,750	1	2,795,332,925	1	3,074,866,218	100	12821778393	Badan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi	prosentase bendahara perangkat daerah yang berkompeten	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	1	460,245,000	1	753,793,700	1	829,173,070	1	912,090,377	1	1,003,299,415	1	3958601562	Badan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan	persentase laporan keuangan PD yang	Fungsi Penunjang	0.8158	1	1,483,172,189	1	1,520,000,000	1	1,860,000,000	1	1,720,000,000	1	2,380,000,000	1	8963172189	Badan Keuangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaporan	sesuai dengan SAP	Urusan Pemerintahan														Daerah
Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	Nilai aset daerah yang dapat diyakini kewajarannya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	4,002,359,107,306	4,633,238,287,093	2,293,208,000	4,929,403,053,587	2,905,898,850	5,244,499,204,715	3,058,588,735	5,579,736,858,451	3,216,947,609	5,936,403,495,221	3,426,442,369	5,936,403,495,221	14901085563	Badan Keuangan Daerah
	Peningkatan persentase kontribusi kemanfaatan aset daerah terhadap PAD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.0031	0.0033	372,800,000	0.0034	396,580,000	0.0036	422,738,000	0.0038	451,511,800	0.004	483,162,980	0.004	2126792780	Badan Keuangan Daerah
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan		90	90	13209966000	92	13,355,000,000	95	13505000000	97	13655000000	100	16238286105	100	69963252105	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		CC	CC		B		B		BB		BB		BB	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Program Perencanaan dan Pengadaan ASN serta Pelayanan promosi Kepangkatan dan Pensiun	Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.79	0.83	1,224,850,000	0.87	1,286,094,000	0.92	1,350,400,000	0.96	1,417,918,000	0.98	1,488,817,000	0.98	6,768,079,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.9	0.91	173,482,000	0.92	200,000,000	0.93	210,000,000	0.95	230,000,000	0.98	240,000,000	0.98	1053482000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.55	0.64	895,021,000	0.74	930,000,000	0.83	1,040,000,000	0.92	1,170,000,000	0.98	1,250,000,000	0.98	5285021000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Persentase kontribusi penyelenggaraan diklat terhadap PAD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0,10%	0,10%	1.600.000.000	0,16%	2.400.000.000	0,19%	3.100.000.000	0,19%	4.000.000.000	0,19%	5.200.000.000	0,19%	16300000000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase Pegawai ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsional	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.0445	0.23	3,086,996,500	0.42	6,954,000,000	0.6	7,562,000,000	0.79	8,226,000,000	0.97	8,921,000,000	0.97	34749996500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase Pegawai ASN yang meningkat pendidikan formalnya;	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	31,60%	36,90%	2,128,510,000	39,90%	2,858,100,000	41,90%	3,000,000,000	0.48	3,151,000,000	52,80%	3,300,000,000	52,80%	14437610000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase Pegawai ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.88	0.92	2,405,094,000	0.96	3,850,000,000	0.97	4,235,000,000	0.99	4,658,500,000	1	5,124,350,000	1	20272944000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Nilai akreditasi Diklat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	71	71	297,909,000	81	415,000,000	81	437,500,000	81	460,000,000	81	482,500,000	81	2092909000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang menerima penghargaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.056	0.063	866,275,000	0.1	9,929,020,000	0.11	3,537,096,000	0.12	2,670,326,000	0.13	2,110,842,000	0.13	19113559000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase kasus pelanggaran disiplin minimal sedang	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0,19%	0,17%	1,254,211,000	0,15%	1,270,000,000	0,13%	1,460,500,000	0,11%	1,679,575,000	0,09%	1,931,511,000	0,09%	7595797000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase ASN yang SKP nya dinilai tepat waktu	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.46	0.56	150,000,000	0.65	175,000,000	0.76	201,250,000	0.85	231,437,000	0.98	266,153,000	0.98	1023840000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.72	0.78	657,928,000	0.84	703,540,000	0.9	852,000,000	0.96	1,035,000,000	0.98	1,348,000,000	0.98	4596468000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Program Penilaian dan Pemetaan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai ASN yang mempunyai Profil Kompetensi sesuai dengan standar penilaian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	11,12%	20,89%	1,863,018,000.00	30,67%	1,913,450,000.00	40,40%	2,000,000,000.00	50,22%	2,100,000,000.00	0.6	2,150,000,000.00	0.6	10026468000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Penelitian dan Pengembangan																
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang digunakan sebagai rekomendasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,542,697	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,876,030.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	kebijakan															
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang kelautan dan perikanan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,540,655	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,873,988.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase hasil penelitian dan pengembanganPari wisata yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,542,697	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,876,030.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sumber daya mineral yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,542,697	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,876,029.67	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang kemandirian energi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,542,697	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,876,030.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	persentase rekomendasi kajian tentangpenanggulan gan pengangguranyang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,542,697	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,876,030.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	persentase rekomendasi kajian tentangpenanggulan gan kemiskinanyang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,542,697	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,876,030.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	persentase rekomendasi kajian tentangpengendalia n inflasiyang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,542,697	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,876,030.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	persentase rekomendasi kajian tentangkependuduk anyang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,542,697	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,876,030.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	persentase rekomendasi kajian infrastruktur dan konektifitasyang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,542,697	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,876,030.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang pendidikan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,542,697	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,876,030.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang kesehatan yang digunakan sebagai rekomendasi kebiijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,542,697	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,876,030.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	persentase rekomendasi kajian yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	50,000,000	0.3	52,500,000	0.35	55,125,000	0.4	57,881,250	0.4	60,775,313	0.45	276,281,563.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	persentase rekomendasi kajian tentang Reformasi Birokrasi yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,542,697	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,876,030.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	persentase rekomendasi kajian tentang demokrasi yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,542,697	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,876,030.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan pengembangan)	0.1	0.25	175,542,697	0.3	150,000,000	0.35	173,333,333	0.4	190,000,000	0.4	210,000,000	0.45	898,876,030.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100	11255639000	100	11,865,266,000	100	12779596000	100	13299596000	100	13799596000	100	62999693000	Sekretariat DPRD
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		60.15	76		82		85		88		92		92		Sekretariat DPRD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	80	65,347,119,700	80	71,881,831,670	80	79,070,014,837	80	86,977,016,321	80	95,674,717,953	100	398950700481	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler Dewan	Persentasekesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	0.95	2,959,690,000	0.95	7,785,811,000	0.95	8,564,392,100	0.95	9,420,831,310	0.95	10,362,914,441	0.95	39093638851	Sekretariat DPRD
	Persentase jumlah saranaprasarana lembaga DPRD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	0.75	4,838,320,000	0.76	4,530,152,000	0.77	4,983,167,200	0.78	5,481,483,920	0.8	6,029,632,312	0.8	25862755432	Sekretariat DPRD
Inspektorat																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		100	100	2902348030	100	10,391,720,000	100	10911256000	100	11637018000	100	3773000000	100	39615342030	Inspektorat
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		N.A	70		81		82		83		84		85		Inspektorat
Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan pada komponen proses IRB	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	4.5	6	283,650,000	7	1,199,000,000	8	1,353,000,000	9	1,473,000,000	10	1,611,000,000	12	5919650000	Inspektorat
Program Pengawasan dan PembinaanPegelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	88.83	90	3,565,938,000	95	4,641,436,000	90	4,867,457,000	95	5,107,030,000	95	5,399,300,000	95	23581161000	Inspektorat
	Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	91.63	93	383,750,000	94	582,000,000	95	611,100,000	96	642,000,000	98	674,000,000	98	2892850000	Inspektorat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	300,000,000	100	6,541,250,000	100	687,112,000	100	721,618,000	100	757,799,000	100	9007779000	Inspektorat
Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Tingkat capaianLevel Maturitas Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	2	250,000,000	3	907,500,000	3	973,625,000	3	1,034,406,000	3	1,108,876,000	3	4274407000	Inspektorat
	Peningkatan capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2	3	150,000,000	3	160,000,000	3	172,000,000	3	185,000,000	3	195,000,000	3	862000000	Inspektorat
SekretariatDaerah																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100	54962038000	100	58,310,139,900	100	61,225,646,895	100	64,275,429,240	100	69,350,733,017	100	308,123,987,052	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		57.76	76		82		85		88		92		92		Sekretariat Daerah (Biro Umum)
Program Perencanaan Setda	Nilai Lakip Setda Provinsi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	0.75	628,312,894	0.8	428,313,000	85	842,559,950	90	566,443,943	0.95	651,410,534	0.95	3117040321	Sekretraiat Daerah (Biro Pembangunan)
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.75	92	1,261,534,022	95	1,799,461,606	97	2,068,130,847	99	2,373,350,474	99	2,720,603,045	99	10223079994	Sekretraiat Daerah (Biro Pembangunan)
Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	Prosentase PD Provinsi dan Kab/Kota yang realisasi fisiknya 100% pelaksanaan sumber dana APBD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.75	0.80	507,718,281	0.85	979,978,194	0.95	1,052,875,694	0.99	854,207,819	99	909,489,763	99	4304269751	Sekretraiat Daerah (Biro Pembangunan)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	Prosentase PD Provinsi dan Kab/Kota yang realisasi fisiknya 100 %pelaksanaan sumber dana APBN	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	0.75	595,099,623	0.8	979,978,194	85	1,052,875,694	90	854,207,819	95	909,489,763	95	4391651093	Sekretraiat Daerah (Biro Pembangunan)
Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	APK sekolah kegamaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretraiat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
	Persentase lansia yang berkompetensi keagamaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	75	50,000,000	80	50,000,000	80	50,000,000	85	50,000,000	85	50,000,000	85	250000000	Sekretraiat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
	Prosentase jumlah masyarakat yang kompeten di bidang keagamaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	75	10,745,068,000	80	11,145,068,000	80	11,545,068,000	85	11,945,068,000	85	12,345,068,000	85	57725340000	Sekretraiat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	75	1,476,830,000	80	3,017,010,000	80	3,167,010,000	80	3,317,010,000	85	3,467,010,000	85	14444870000	Sekretraiat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
	Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	0	0	30 sekolah	434,090,000	30 sekolah	484,090,000	35 sekolah	534,090,000	40 sekolah	584,090,000	40 sekolah	2036360000	Sekretraiat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS	Urusan Penunjang administrasi	N.A	28 sekolah	384,090,000	30 sekolah	434,090,000	30 sekolah	484,090,000	35 sekolah	534,090,000	40 sekolah	584,090,000	40 sekolah	2420450000	Sekretraiat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	75	719,672,000	75	1,019,672,000	75	1,169,672,000	80	1,319,672,000	80	1,469,672,000	0.8	5698360000	Sekretraiat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
Program Peningkatan Pelayanan Protokol	Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah yang layani	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	100	261,434,000	100	535,354,305	100	585,657,450	100	708,006,069	100	814,206,978	100	2904658802	Sekretraiat Daerah (Biro Humas dan Protokol)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dengan arah kebijakan pembangunan daerah															
Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	Persentasekesesuai an antar informasi yang dipublikasikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	2,927,911,600	100	3,422,743,340	100	3,936,154,841	100	4,526,578,067	100	5,298,498,912	100	20111886760	Sekretariat Daerah (Biro Humas dan Protokol)
Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	Persentasekesesuai an antar informasi yang dikelola dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	1,631,163,700	100	1,975,838,255	100	2,272,213,993	100	2,613,046,093	100	3,005,003,007	100	11497265048	Sekretariat Daerah (Biro Humas dan Protokol)
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentasejumlah Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.9	0.9	961515000	72	1,316,000,000	75	1356000000	75	1405015000	80	1560030000	80	6598560000	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
	Persentase rekomendasi komoditas penyumbang inflasi yang paling tinggi dengan intervensi program/kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.9	0.9	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	70	291,089,700	72	829,500,000	73	870,975,000	74	914,523,750	75	960,249,938	75	3866338388	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pertambahan kebijakan sumber daya alam yang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	75	70	369,610,000	75	930,000,000	75	984,125,000	75	1072456250	80	1130079063	80	4486270313	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
	ProsentaseJumlah Kebijakan pembangunan	Fungsi Penunjang Urusan	73	70	1,575,349,600	72	829,500,000	73	870,975,000	74	914523750	75	960249938	75	5150598288	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan	Pemerintahan														
	Prosentase JumlahKebijakan Sumber daya energiyang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	NA	NA	0	0.8	-	0.8	0	0.8	0	0.8	0	0	0	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	Persentase jumlah Organisasi perangkat daerah yang sesuai antar beban kerja organisasi dengan ukuran kelembagaannya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	0.63	121,700,000	0.75	795,000,000	0.78	1,100,000,000	0.85	995,000,000	0.91	1,420,000,000	0.91	4431700000	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
	Persentase Jumlah Pejabat Struktural ASNyang memiliki kinerja yang baik	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	0.44	275,850,000	0.46	800,000,000	0.47	890,000,000	0.5	1,000,000,000	0.66	1,123,000,000	0.66	4088850000	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
	PersentaseJumlah ASN yang sesuai antara beban kerja dengan kompetensi dan jabatannya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	0.77	485,903,560	0.8	1,250,000,000	0.72	1,230,000,000	0.86	1,620,000,000	0.82	1,393,000,000	0.82	5978903560	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	B	B	193,567,300	B	1,695,000,000	B	1,840,000,000	B	1,945,000,000	B	2,030,000,000	B	7703567300	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
	Persentase instansi pelayanan publik Provinsi yang bersertifikat ISO	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	2 unit	993,912,000	3 Unit	430,000,000	3 Unit	460,000,000	4 unit	470,000,000	5 unit	500,000,000	5 unit	2853912000	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Pemerintah daerah	Persentase Jumlah pegawaiyang menyampaikan LHKPN	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	95.08	96	250,000,000	97	325,000,000	99	355,000,000	99.5	390,000,000	100	475,000,000	100	1795000000	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
	Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	61.89	63	557,807,713	65	4,785,000,000	67	4,325,000,000	70	4,660,000,023	75	5,000,000,000	75	19327807736	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	70	183,004,500	75	1,060,000,000	80	1,100,000,000	85	1,150,000,000	90	1,220,000,000	90	4713004500	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Persentesdata dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT yang dapat di akses masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	0.9	570,880,000	0.92	1,446,989,500	0.94	1,591,688,450	0.96	1,750,857,295	0.98	1,925,943,025	0.98	7286358270	Sekretraiat Daerah (Biro Layanan Pengadaan)
	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	80	349,269,000	80	533,841,000	80	422,615,490	80	464,877,039	80	511,364,742	80	2281967271	Sekretraiat Daerah (Biro Layanan Pengadaan)
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP yang berhasil dilelangkan sesuai peraturan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0.92	936,785,000	0.94	5,034,568,000	0.96	5,538,024,800	0.98	6,091,827,280	0.98	6,701,010,000	0.98	24302215080	Sekretraiat Daerah (Biro Layanan Pengadaan)
	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.9	80	2,215,500,000	80	3,540,240,000	80	3,894,264,000	80	4,283,690,400	80	4,712,059,440	80	18645753840	Sekretraiat Daerah (Biro Layanan Pengadaan)
Program Peningkatan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Penggunaan e-Procurement terhadap belanjapengadaan yang dapat diakses masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0.4	0.42	1,818,435,000	0.44	5,020,020,500	0.46	5,522,022,550	0.48	6,074,224,805	0.5	6,681,647,286	0.5	25116350141	Sekretraiat Daerah (Biro Layanan Pengadaan)
	Nilai Indekskepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	80	1,325,141,000	80	2,116,136,000	80	2,327,749,600	80	2,560,524,560	80	2,816,577,016	80	11146128176	Sekretraiat Daerah (Biro Layanan Pengadaan)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pengadaan secara elektronik															
Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	PersentaseProduk hukum daerah yang tidak tumpang tindih	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0.8	2,456,122,000	0.85	3,420,000,000	0.9	3,710,000,000	0.95	3,970,000,000	1	4,215,000,000	1	17771122000	Sekretraiat Daerah (Biro Hukum)
Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang dapat di akses oleh masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0.8	841,220,500	0.85	1,282,296,750	0.9	1,670,000,000	0.95	1,830,000,000	1	2,000,000,000	1	7623517250	Sekretraiat Daerah (Biro Hukum)
Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintahan Daerah	Persentase Produk hukum daerah yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0.8	1,132,898,000	0.85	1,680,000,000	0.9	1,830,000,000	0.95	1,970,000,000	1	2,135,000,000	1	8747898000	Sekretraiat Daerah (Biro Hukum)
	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan bantuan Hukum	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0.8	100,000,000	0.85	150,000,000	0.9	200,000,000	0.95	250,000,000	1	275,000,000	1	975000000	Sekretraiat Daerah (Biro Hukum)
Program Pengembangan Otonomi Daerah	Presentase jumlah kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	0	1,822,867,238	0	1,791,905,000	0	1,884,880,000	0	1,697,433,500	0	2,337,122,000	0	9534207738	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)
Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Presentase jumlahadministrasi kewilayahan yang terselesaikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	0	5,288,389,257	0	705,824,000	0	741,410,000	0	778,370,000	0	806,300,000	0	8320293257	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)
	Persentase luas Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang bersertifikat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	0	120,000,000	0	126,000,000	0	132,300,000	0	138,915,000	0	145,860,750	0	663075750	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)
	Persentase jumlah kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	0	125,351,157	0	131,618,715	0	138,199,651	0	145,109,633	0	152,365,115	0	692644270.3	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung-jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Persentase jumlah kerjasama pemerintah daerah/swasta/luar negeri yang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	67	1,316,621,390	75	1,546,177,000	83	1,720,343,000	92	1,658,520,000	92	1,844,871,000	92	8086532390	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		0	100	96,257,345,000	100	6,595,500,000	100	7,192,550,000	100	7,841,410,000	100	7,697,051,000	100	125,583,856,000	Badan Penghubung Provinsi
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		N.A	76		82		85		88		92		92	0	Badan Penghubung Provinsi
Program Peningkatan Promosi, Informasi dan Pelayanan Serta Hubungan Antar Lembaga	Persentase kesesuaian antaraPromosi dan Informasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	100	10,394,117,000	100	8,240,000,000	100	9,750,000,000	100	10,595,000,000	100	12,260,000,000	100	51239117000	Badan Penghubung Provinsi
	Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah di Jakarta yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	100	1,750,000,000	100	2,060,000,000	100	2,370,000,000	100	2,680,000,000	100	2,990,000,000	100	11850000000	Badan Penghubung Provinsi
	Persentase kesesuaian antara Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N.A	100	1,543,873,000	100	2,204,590,000	100	2,420,000,000	100	2,640,000,000	100	2,860,000,000	100	11668463000	Badan Penghubung Provinsi
TOTAL					1,504,483,891,912		2,990,041,922,580		2,997,838,340,057		3,298,935,930,199		2,934,604,371,487		13,466,670,320,307	



PESANGGRAHAN MENUMBING
BANGKA BARAT



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penetapan indikator dan asumsi pembangunan daerah tahun 2017-2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dan visi misi kepala daerah terpilih periode 2017-2022. Selain itu, kondisi awal juga menjadi pertimbangan dalam upaya untuk menentukan target kinerja serta memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2022. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut dapat di lihat pada tabel VIII.1, tabel VIII.2 dan tabel VIII.3.

Tabel VIII.1
Target Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2017-2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	Kondisi Awal RPJMD	TARGET					Kondisi akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB	4,11	5,20	5,30	5,40	5,50	5,60	5,60
2	Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	Pengeluaran pemerintah perkapita,(dalam ribuan)	1.864	1.890	1.940	1.980	2.020	2.060	2.060
		Pendapatan perkapita,(dalam ribuan)	46.457	50.732	53.015	55.401	57.894	60.499	60.499
3	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi	6,86	7,58	7,77	7,87	7,97	8,00	8,00
4	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	7,62	8,76	8,83	8,89	8,92	9,00	9,00
			L=8,02	L = 8,96	L= 8,98	L = 8,99	L = 9,00	L= 9,00	L= 9,00
			P=7,18	P=7,98	P = 7,99	P = 8,0	P = 8,05	P = 8,10	P = 8,10
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	69,92	69,98	70,16	70,23	70,37	70,48	70,48
			L=68,17	L = 68,24	L = 68,37	L = 68,40	L = 68,50	L = 68,60	L = 68,60
			P=71,96	P = 72,00	P = 72,12	P = 72,23	P = 72,30	P = 72,45	P = 72,45
6	Mewujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	63,15	68,08	73,39	73,41	73,43	73,50	73,50
7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	83,10	83,20	83,35	83,50	83,65	83,75	83,75
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	162	159	156	153	150	147	147
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,59	59,76	60,96	62,18	63,42	64,69	64,69

Tabel VIII.2
Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2017-2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	TARGET					Kondisi akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	1 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,58	4,95	5.15	5.36	5.57	5,80	5,80
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	2 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	3,58	3,92	4.10	4.29	4.48	4.69	4.69
3	Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	3 jumlah kunjungan wisatawan domestik	330.322	389.009	400.000	419.594	448.937	477.181	477.181
		4 Jumlah Wisatawan Mancanegara	3.723	5.159	5.250	5.637	6.355	6.946	6.946
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	5 Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,48	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.54
5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	6 Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	2,57	2.67	2.73	2.78	2.84	2.89	2.89
6	Terwujudnya kemandirian energi	7 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan	13,58	17.34	19.59	22.14	25.02	28.27	28.27
7	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	8 Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah	5,2	5.6	5.65	5.70	5.75	5.80	5.80
8	Menurunnya angka Pengangguran	9 Persentase Angka Pengangguran	2,6	5.7	5.6	5.5	5.3	5.3	5.3
9	Menurunnya angka kemiskinan	10 Persentase Angka Kemiskinan	5,04	4.17	4.15	4.10	4.05	4.0	4.0
10	Menurunnya angka Inflasi	11 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6,75	6.42	6.31	6.24	6.17	6.02	6.02
11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	12 Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,11	2.09	2,09	2,08	2,08	2,08	2,08
12	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	13 Terbangunnya Daerah irigasi (ha)	N.A	1.084	1.135	1.187	1.240	1.294	1.294
		14 Ketersediaan air baku (m3)	N.A	N.A	N,A	90.000	145.000	175.000	175.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	TARGET					Kondisi akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	15 Persentase akses jalan lingkungan yang memadai	N.A	14%	34%	54%	86%	100%	100%
		16 Persentase kawasan permukiman yang tertata	N.A	16%	38%	56%	89%	100%	100%
		17 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	N.A						
14	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	18 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	0.17%	0.17%	0.18%	0.19%	0.20%	0.21%	2.495
		19 Persentase armada pengangkutan	N.A	0.33%	0.34%	0.35%	0.36%	0.37%	4.875
		20 Persentase jalan kondisi mantap	92,2	93.50	94.50	95.50	96	96.50	96.50
15	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	21 Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11,71 L=11,72 P=11,87	11.84 L=12,08 P=12,21	11.89 L=12,37 P=12,46	11.94 L=12,51 P=12,63	12.00 L=12,69 P=12,79	12.00 L=12,81 P=12,93	12.00 L=12,81 P=12,93
15	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	22 Angka Kesehatan Masyarakat	76,94	71,6	77,58	82,97	85,92	89,98	89,98
16	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	23 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		24 Tingkat kapabilitas APIP	2	3	3	3	4	4	4
		25 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	63	76	82	85	88	92	92
		26 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat	N.A	2,75	2,78	2,8	2,85	2,9	2,9
17	Birokrasi yang efektif dan efisien	27 Nilai rata-rata delapan area perubahan	N.A	30	35	40	45	50	50
		28 Indeks Profesionalitas ASN	67	70	80	85	90	95	95
18	Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	29 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	N.A	1	5	10	15	20	20

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	TARGET					Kondisi akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		30 Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	N.A	70	78	83	85	90	90
19	Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	31 Skor aspek kebebasan sipil	87,65	87,75	87,76	87,79	87,80	87,82	87,82
		32 Skor aspek hak-hak politik	81,69	81,72	81,76	81,79	81,80	81,85	81,85
		33 Skor aspek lembaga demokrasi	80,20	80,30	80,33	80,36	80,50	80,54	80,54
20	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	34 Indeks kapasitas bencana daerah	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,35
21	Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup	35 Indeks kualitas air sungai	64,56	65,85	67,80	67,16	68,51	69,88	69,88
		36 Indeks kualitas udara	82,81	85,30	87,86	90,49	93,21	96,01	96,01
		37 Indeks tutupan lahan	37,51	37,88	38,26	38,64	39,03	39,81	39,81
		38 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	N.A	7.745,58	7.280,85	6.843,99	6.433,35	6.047,35	6.047,35

Tabel VIII.3
Indikator Kinerja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
A.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Pertumbuhan PDRB						
1.1.1	(ADHK)	4,11	5,20	5,30	5,40	5,50	5,60
1.2	Laju inflasi						
1.2.1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6,75	6,42	6,31	6,24	6,17	6,02
1.2.2	Kota Pangkalpinang	7,78	7,70	7,65	7,60	7,56	7,50
1.2.3	Tanjungpandan	4,92	4,75	4,63	4,51	4,39	4,27
1.3.	PDRB per kapita	46.457	50.732	53.015	55.401	57.894	60.499
1.4.	Indeks Gini	0,288	0,278	0,269	0,259	0,250	0,24
1.5.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,251	0,248	0,245	0,242	0,239	0,236
1.6.	Kemiskinan						
1.6.1	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,04	4,17	4,15	4,10	4,05	4,0
1.6.2	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	71.070	72.561	72.452	72.352	72.214	72.000
1.6.3	Garis Kemiskinan (Rp)	564.391	590.229	634.336	680.456	720.222	770.543
1.6.4	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,75	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64
1.6.5	Indeks keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
1.6.7	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	2,67	2,87	2,86	2,85	2,85	2,84
1.6.8	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	7,57	7,73	7,72	7,72	7,71	7,71
1.7	Angka Kriminalitas yang tertangani	40,25	42,50	44,35	47,15	50,23	54,65
B.	Fokus Kesejahteraan Masyarakat						
1	Pendidikan						
1.1.	Angka melek huruf	97,69	97,72	97,75	97,78	97,81	97,84
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	7,76	8,76	8,83	8,89	8,92	9,00
1.3.	Angka partisipasi kasar	93,05	94,36	95,67	96,98	98,29	99,60
1.3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	33,13	35,29	38,88	40,63	43,43	43,94
1.3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK/MA	31,44	34,98	38,38	40,63	44,32	48,62
1.4.	Harapan Lama Sekolah	11,84	11,84	11,89	11,94	12	12
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni	77,78	79,98	82,18	84,38	86,58	88,79
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM))	57,02	57,20	57,45	57,70	57,90	58,00

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SMA/SMK/MA/Paket C						
2.	Kesehatan						
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	7,56	7,73	7,9	8,07	8,24	8,41
2.1.1	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	7,22	7,200	7,180	7,160	7,140	7,120
2.1.2	Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup)	7	7	7	7	7	7
2.2.	Angka usia harapan hidup	69,92	69,98	70,16	70,23	70,36	70,48
2.3	Prevalensi Kurang Gizi anak balita	14	14	14	14	14	14
2.4	Kematian ibu (per 100.000 orang)	23	23	22	21	20	19
3.	Pertanahan						
3.1.	Jumlah Database Pertanahan yang <i>up to date</i>						
4.	Ketenagakerjaan						
4.1	Rasio penduduk yang bekerja	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99
C.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga						
1.	Kebudayaan						
1.1.	Jumlah grup kesenian	2,50	2,69	2,89	3,08	3,27	3,47
1.2.	Jumlah gedung	0,0073	0,0075	0,0077	0,0079	0,0081	0,0083
2.	Pemuda dan Olahraga						
2.1.	Jumlah klub olahraga	1.578	1.771	1.965	2.158	2.352	2.545
2.2.	Jumlah gedung olahraga	10	11	12	14	14	14
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM						
A.	Fokus Layanan Urusan Wajib						
1.	Pendidikan						
1.1.	Angka melek huruf	97,63	98,42	98,42	98,97	99,31	99,60
1.1.1.	Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 +	97,66	98,79	98,79	99,00	99,47	99,92
	SMA/MA/SMK						
1.1.2.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/MA/SMK	48.655	58.288,56	58.288,56	62.483,15	66.026,74	70.908,16
1.1.3.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	73,531	76,60	76,60	78,14	79,67	81,21
1.1.4.	APS SMA/MA/SMK (%)	66,17	77,34	77,34	81,93	85,68	91,31
1.2.	Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah						

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SMA/MA/SMK						
1.2.1.	Jumlah gedung sekolah	139	141,00	141,00	142,00	143,00	144,00
1.2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	73.531	76.597,18	76.597,18	78.137,94	79.674,37	81.210,04
1.2.3.	Rasio	18,9	19,03	19,03	17,95	18,18	17,81
1.3.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar						
	SMA/MA/SMK						
1.3.1.	Jumlah guru	3.059	3.400,00	3.400,00	3.550,00	3.600,00	3.786,34
1.3.2.	Jumlah murid	51.014	56.457	63.536	66.754	72.021	76.179
1.3.3.	Rasio	16,68	16,61	18,69	18,80	20,01	20,12
2.	Kesehatan						
2.1.	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah	8	8	8	8	9	10
2.2.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	8	8	8	8	9	10
2.3.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	1	1	1	2	2	3
2.4.	Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap air bersih	77,6	79,00	79,00	80,00	81,86	82,45
2.5.	Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun	0,18	0,17	0,17	0,16	0,15	0,14
2.6.	Perkembangan Prevelensi HIV	0	12,00	12,00	11,00	10,00	9,00
2.7.	Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	55,53	45,00	45,00	40,00	35,00	30,00
2.8.	Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun	62	63	63	64	64	65
3.	Pekerjaan Umum						
3.1.	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	12.57	14.57	14.57	15.57	16.57	17.57
3.2.	Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.3.	Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	20	20	20	20	25	30
3.4.	Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	3	4	4	4	4	4
3.5.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.6.	Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	92,00	93,00	93,00	93,50	94,00	94,50
4.	Perumahan						
4.1.	Persentase cakupan perbaikan perumahan akibat bencana (%)	80	83	83	84	84	85
4.2.	Jumlah pelanggan air minum	20.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
4.3.	Rumah tangga pengguna listrik	339.046	339.746	339.746	339.846	339.846	339.946
5.	Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat						
5.1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	1.229	1.414,78	1.414,78	1.501,15	1.604,90	1.697,07
6.	Jumlah penduduk	1.372.813	1.430.063,44	1.430.063,44	1.458.809,45	1.487.498,94	1.516.164,69
6.1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk	8,95	9,96	9,96	10,42	11,00	11,50
6.2.	Jumlah Siskamling	988	1.384,22	1.384,22	1.570,85	1.788,10	1.984,93
6.3.	Jumlah Desa	309	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
6.4.	Rasio Jumlah siskamling	3,2	4,49	4,49	5,09	5,80	6,44
7.	Sosial						
7.1.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	4.369	4.800	4.800	4.900	5.000	5.500
7.2.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	49.579	47.000	47.000	45.000	43.000	40.000
8.	Ketenagakerjaan						
8.1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,90	70,12	70,12	70,35	70,50	70,65
8.2.	Tingkat Pengangguran	3,7	3,6	3,5	3,4	3,2	3,1
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
9.1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,00	58,50	58,50	59,00	59,50	60,00
9.2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,47	90,15	90,15	91,15	91,99	92,37
9.3.	Jumlah KDRT	70,00	50,00	50,00	54,00	49,00	40,00
9.4.	Jumlah Rumah Tangga	353.846,00	333.860,00	333.860,00	331.490,50	321.497,50	316.648,25
9.5.	Persentase Capaian Provinsi Layak Anak	N.A	28,57	42,85	57,14	85,71	100
9.6.	Rasio KDRT	0,00020	0,00017	0,00017	0,00016	0,00015	0,00013
10.	Ketahanan Pangan						

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.1.	Regulasi ketahanan pangan	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
11.	Pertanahan						
11.1.	Luas Lahan (m2) Berdasarkan Sertifikat	75.759.684,00	82.414.325,76	82.414.325,76	81.359.224,46	86.865.983,99	88.350.464,00
11.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	38,40	37,65	37,65	42,78	53,22	53,03
12.	Lingkungan Hidup						
12.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,59	59,76	60,96	62,18	63,42	64,69
12.2.	Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap air bersih	77,60	80,00	80,00	81,00	83,00	85,00
13.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
13.1	Persentase Kepemilikan KTP	100	100	100	100	100	100
13.2.	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	531,22	657,32	657,32	719,12	784,25	847,16
13.3.	Persentase penyajian database kependudukan skala provinsi	100	100	100	100	100	100
13.4.	Jumlah pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh OPD Provinsi	5 OPD	10 OPD	15 OPD	20 OPD	25 OPD	30 OPD
14.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
14.1.	Kelompok LPM	3.787,00	5.151,00	5.151,00	5.885,25	6.567,25	7.244,63
14.2.	Kelompok PKK	9.330,00	12.879,50	12.879,50	14.774,25	16.549,00	18.297,88
15.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
15.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,11	2,11	2,11	1,90	1,90	1,50
15.2.	Jumlah akseptor KB	168.956,00	302.432,50	302.432,50	332.529,25	399.267,50	447.160,88
15.3.	Jumlah pasangan usia subur	278.062,50	294.389,25	294.389,25	295.248,50	303.411,88	310.236,88
15.4.	Rasio akseptor KB	60,22	106,92	106,92	117,51	140,86	157,48
15.5.	Persentase Grand design Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	N.A	20	40	60	80	100
15.6.	Jumlah keluarga pra sejahtera	20.491,00	31.053,00	31.053,00	34.069,75	39.350,75	43.244,88
15.7.	Jumlah keluarga sejahtera I	189.349,50	348.448,75	348.448,75	387.896,50	467.446,13	526.736,13

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15.8.	Jumlah keluarga sejahtera I +	144.005,50	- 45.641,75	- 45.641,75	- 90.475,75	- 185.299,38	- 253.332,75
15.9.	Jumlah keluarga	353.846,00	333.860,00	333.860,00	331.490,50	321.497,50	316.648,25
16.	Perhubungan						
16.1.	Terminal Bus/Angkot/Angdes	12,00	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00
16.2.	Pelabuhan Udara	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
16.3.	Pelabuhan Laut (Pelabuhan pengumpan, Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Khusus)	74,00	85,56	85,56	90,96	97,36	103,09
16.4.	Jumlah ijin trayek	27,00	27,89	27,89	28,41	28,73	29,18
17.	Komunikasi dan Informatika						
17.1.	Web site milik pemerintah daerah	8	9	9	10	10	12
17.2.	Pameran/expo	1	1	1	1	1	1
18.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
18.1.	Jumlah Koperasi Aktif	842,00	879,00	879,00	901,50	920,00	942,25
18.2.	Jumlah Koperasi	1.166,00	1.263,50	1.263,50	1.321,25	1.370,00	1.421,38
18.3.	Persentase Koperasi Aktif	73,62	75,64	75,64	76,65	77,66	78,67
18.4.	Jumlah UKM	293.985,00	296.691,89	296.691,89	298.016,07	299.418,28	300.768,48
19.	Penanaman Modal						
19.1.	Jumlah Investor	74,00	97,56	97,56	115,63	116,91	129,39
19.2.	Nilai Investasi (Trillin Rp)	1.156,00	437,78	437,78	168,81	- 340,54	- 689,64
20.	Kepemudaan dan Olahraga						
20.1.	Jumlah Organisasi Pemuda	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
20.2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	12,00	8,89	8,89	7,41	5,73	4,18
20.3.	Klub/Organisasi Olahraga	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
21.	Statistik						
21.1.	Buku daerah dalam angka	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
21.2.	Buku PDRB prov/kabupaten/kota	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
22.	Kebudayaan						
22.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	2	2
22.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	2	2
22.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang	26	26	26	26	26	26

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dilestarikan						
22.4.	Cakupan pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya	5	7	7	8	9	10
23.	Perpustakaan						
23.1.	Jumlah Pengunjung	3.660	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900
23.2.	Perpustakaan Milik Pemda	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
23.3.	Perpustakaan Non Pemda	1.348	1.361	1.361	1.369	1.376	1.382
24.	Kearsipan						
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	55	58	58	59	60	61
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	16	18	18	19	20	21
	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
25.	Kelautan dan Perikanan						
25.1.	Potensi perikanan Tangkap	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00
25.2.	Potensi perikanan budidaya	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00
25.3.	Produksi perikanan tangkap	204.822,13	206.723,66	206.723,66	207.431,89	208.786,87	209.710,69
25.4.	Produksi perikanan budidaya	998,53	- 1.883,83	- 1.883,83	- 3.536,83	- 4.624,97	- 6.089,69
26.	Pariwisata						
26.1.	Jumlah Wisatawan DalamNegeri	330.322,50	389.009,75	389.009,75	419.594,00	448.937,63	477.181,38
26.2.	Jumlah Wisatawan Luar Negeri	3.723,00	5.159,00	5.159,00	5.637,25	6.355,25	6.946,63
27.	Pertanian						
27.1.	Distribusi Persentase PDRB Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	13,09	14,08	14,08	14,55	15,07	15,56
27.2.	Distribusi Persentase PDRB Tanaman Pangan	0,50	0,48	0,48	0,48	0,47	0,46
27.3.	Distribusi Persentase PDRB Tanaman Hortikultura	2,05	2,09	2,09	2,11	2,13	2,15
27.4.	Distribusi Persentase PDRB Tanaman Perkebunan	9,36	10,30	10,30	10,75	11,24	11,70
27.5.	Distribusi Persentase PDRB Peternakan	0,96	0,99	0,99	1,00	1,01	1,02
27.6.	Distribusi Persentase PDRB Jasa Pertanian dan Perburuan	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26
28.	Kehutanan						
28.1.	Luas Hutan Produksi	432.883,28	432.883,51	432.883,51	432.883,57	432.883,68	432.883,65

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28.2.	Luas Hutan Lindung	185.540,60	181.098,69	181.098,69	179.993,09	177.772,13	176.108,60
28.3.	Luas Hutan Konservasi	35.444,34	35.430,41	35.430,41	35.421,06	35.414,09	35.407,03
28.4.	Luas Hutan Produksi Konversi	692,89	693,03	693,03	693,18	693,25	693,40
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral						
29.1.	Potensi bahan galian Pasir Kwarsa	1.482.301 ton	1.482.301 ton	1.482.301 ton	1.482.301 ton	1.482.301 ton	1.482.301 ton
29.2.	Potensi bahan galian Pasir Bangunan	666.188,06 ton	666.188,06 ton	666.188,06 ton	666.188,06 ton	666.188,06 ton	666.188,06 ton
29.3.	Potensi bahan galian Kaolin	205.487,50 ton	205.487,50 ton	205.487,50 ton	205.487,50 ton	205.487,50 ton	205.487,50 ton
29.4.	Potensi bahan galian Granit	55.508,29 m5	55.508,29 m7	55.508,29 m7	55.508,29 m8	55.508,29 m9	55.508,29 m10
29.5.	Potensi bahan galian Diabas	89.551,12 m5	89.551,12 m7	89.551,12 m7	89.551,12 m8	89.551,12 m9	89.551,12 m10
30.	Perdagangan						
30.1.	Ekspor (us Dollar)	1.290,70	990,70	990,70	799,10	718,43	563,81
30.2.	Timah	963,80	594,60	594,60	380,80	244,87	57,02
30.3.	Non Timah	326,80	395,89	395,89	418,04	473,24	506,41
30.4.	Impor (us Dollar)	132,00	215,22	215,22	250,09	302,94	343,80
B.	Migas	41,40	62,38	62,38	72,95	83,30	93,80
1.	Non Migas	90,61	153,67	153,67	178,43	221,23	252,01
1.1.	Perindustrian						
1.1.1	Jumlah Industri Kecil	14.197,50	17.388,25	17.388,25	19.224,50	20.819,88	22.548,88
1.1.2	Laju pertumbuhan	0,18	0,10	0,10	0,10	0,06	0,07
1.1.3	Industri Menengah	14.321,00	17.523,50	17.523,50	19.366,25	20.967,50	22.704,88
1.1.4	Laju pertumbuhan	0,18	0,10	0,10	0,10	0,06	0,07
1.2.	Transmigrasi						
1.2.1.	Jumlah Kawasan transmigrasi	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.2.	jumlah KTM	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1.1.	Total Pengeluaran RT	17.872.676,50	19.074.083,25	19.074.083,25	19.678.546,25	20.279.249,63	20.881.867,75
1.2.	Jumlah RT	356.828,50	371.801,25	371.801,25	379.194,50	386.680,88	394.117,88
1.3.	Rasio	50,16	51,55	51,55	52,28	52,97	53,69
1.4.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	117,41	116,55	116,55	112,65	112,21	111,46
1.5.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	110,54	104,53	104,53	98,65	95,64	92,61
1.6.	Rasio	1,05	1,09	1,09	1,11	1,12	1,14
1.7.	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	9.658.091,50	10.215.993,25	10.215.993,25	10.536.819,00	10.815.769,88	11.120.097,63
1.8.	Total pengeluaran	17.872.678,00	19.074.085,00	19.074.085,00	19.678.548,25	20.279.251,75	20.881.870,13
1.9.	Rasio	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
1.10.	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	8.966,00	7.183,00	7.183,00	5.400,00	4.508,50	2.725,50
1.11.	Jumlah seluruh PMA/PMDN	40,50	40,75	40,75	41,00	41,13	41,38
1.12.	Rasio daya serap tenaga kerja	217,85	170,12	170,12	122,40	98,54	50,81
IV	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur						
1.	Panjang Jalan	899,33	899,33	899,33	899,33	899,33	899,33
2.	Jumlah Kendaraan	405.491,00	410.955,50	410.955,50	415.015,75	417.748,00	422.163,13
3.	Rasio	0,002250	0,002225	0,002225	0,002200	0,002187	0,002162
4.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	4,09	2,70	2,70	2,88	2,18	1,84
5.	Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bus	28,00	29,00	29,00	30,00	30,50	31,50
6.	Ketaatan terhadap RTRW	100,00	125,00	125,00	131,25	143,75	153,13
7.	Persentase Penduduk berakses airminum	71,11	82,65	82,65	99,33	105,09	114,97
8.	Rasio daya tersambung pada rumah tangga	79,98	91,92	91,92	94,39	100,35	104,60
9.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	98,06	104,68	104,68	108,27	111,58	117,65
10.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,70	0,74	0,74	0,76	0,78	0,80

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.	Panjang jalan dilalui roda 4	0,95	0,94	0,94	0,96	0,96	0,97
V	Fokus Iklim Berinvestasi						
1.	Tindak Pidana Pencurian/perampokan	642,00	480,00	480,00	470,00	430,00	420,00
2.	Tindak Pidana Penganiayaan	66	40,00	40,00	30,00	25,00	20,00
3.	Tindak Pidana Pembunuhan	15 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	15 hari kerja	15 hari kerja	14 hari kerja
4.	Tindak Pidana Kesusilaan	4	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
5.	Tindak Pidana Psikotropika						
6.	Tindak Pidana Perjudian	90	60,00	60,00	50,00	40,00	30,00
7.	Tindak Pidana Pemerkosaan	62,16	40,00	40,00	30,00	25,00	20,00
8.	Tindak Pidana Angka kriminalitas yang tertangani	1,60	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
9.	Jenis Demonstrasi Bidang politik	12,00	1	1	1	1	1
10.	Jenis Demonstrasi Bidang Ekonomi	16,00	7	7	7	7	7
11.	Jenis Demonstrasi Kasus pemogokan kerja	-	1	1	1	1	1
12.	Jenis Demonstrasi Jumlah unjuk rasa	17,00	9	9	9	9	9
13.	Indeks Demokrasi Indonesia	75,29	77,03	77,03	79,40	80,27	81,44
14.	Pajak Kendaraan Bermotor	253.258,12	310.129,25	310.129,25	356.268,42	384.703,98	430.579,03
15.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	179.826,73	177.829,74	177.829,74	201.462,22	200.463,72	222.442,82
16.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	247.169,31	302.071,88	302.071,88	349.470,82	376.922,11	421.543,92
17.	Pajak Air Permukaan	6.698,35	8.597,34	8.597,34	9.890,27	10.839,77	12.151,81
18.	Pajak Rokok	73.943,73	118.236,23	118.236,23	141.664,04	163.810,28	184.126,37
VI.	Fokus Sumber Daya manusia						
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	81.986,50	81.339,75	81.339,75	88.512,50	88.189,13	88.891,13
2.	Jumlah penduduk	1.395.669,50	1.450.408,75	1.450.408,75	1.476.259,50	1.503.629,13	1.529.501,63
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	588,82	562,60	562,60	605,66	592,54	587,30
4.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	392.254,50	407.494,75	407.494,75	414.610,75	422.230,88	429.353,75
5.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	53.144,00	55.499,00	55.499,00	56.769,00	57.946,50	59.217,00
6.	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2)	445.398,50	462.993,75	462.993,75	471.379,75	480.177,38	488.570,75
7.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	956.079,50	996.127,75	996.127,75	1.016.496,75	1.036.520,88	1.056.904,25
8.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	46,57	46,44	46,44	46,31	46,24	46,11

Tabel VIII.4
Sasaran Pokok Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2022

SASARAN POKOK	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016/2017	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Kesejahteraan Rakyat	1. Kemiskinan (%)						
	Kepulauan Bangka Belitung	5,04	4,17	4,15	4,1	4,05	4,05
	Pangkalpinang	5,02/5,02	4,9	4,7	4,4	4,2	4,2
	Bangka	5,61/5,43	5,21	5,05	4,9	4,77	4,25
	Bangka Tengah	5,64/ 4,84	4,63	4,41	4,2	4	3,8
	Bangka Barat	2,74/3,05	3	2,95	2,9	2,85	2,85
	Bangka Selatan	3,24	2,99	2,74	2,49	2,5	2,24
	Belitung	7,85	7,35	7,1	6,85	6,6	6,35
	Belitung Timur	7,33	7,03	6,73	6,43	6,13	6,13
	2. Pengangguran (%)						
	Kepulauan Bangka Belitung	3,7	3,6	3,5	3,4	3,2	3,1
	Pangkalpinang	10,64/10,64	9,33	8,67	8,47	8,37	8,27
	Bangka	7,90/ 7,27	6,6	5,94	5,43	4,83	4,42
	Bangka Tengah	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3
	Bangka Barat						
	Bangka Selatan	2,4	2,3	2,25	2,2	2	1,96
	Belitung	4,57	4,42	4,31	4,17	4,05	3,93
	Belitung Timur	2,5	2,3	2	1,8	1,5	1,5
Meningkatnya ekonomi daerah	3. Pertumbuhan PDRB (%)						
	Kepulauan Bangka Belitung	4,11	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
	Pangkalpinang	5,17/5,17	5,2	5,23	5,26	5,29	5,32
	Bangka	4,62/ 4,70	4,78	4,86	4,94	5,12	5,36
	Bangka Tengah	2,97	2,9	4,4	4,58	4,78	4,98

SASARAN POKOK	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2016/2017	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bangka Barat	5,92/5,85	5,8	5,75	5,7	5,65	5,6
	Bangka Selatan	4,6	5	6	6,5	7,5	7,94
	Belitung	4,81	4,93	5,05	5,16	5,27	5,38
	Belitung Timur	5,1	5-5,25	5,25- 5,5	5,5- 5,75	5,75- 6,0	6,0- 6,14
	4. Inflasi (%)						
	Kepulauan Bangka Belitung	6,75	6,42	6,31	6,24	6,17	6,02
	Pangkalpinang	7,78	7,7	7,65	7,6	7,56	7,5
	Tanjung Pandan	4,92	4,75	4,63	4,51	4,39	4,27
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						
	Kepulauan Bangka Belitung	69,55	70,09	70,33	70,57	70,81	71,05
	Pangkalpinang	76,61/76,959	77,059	77,159	77,259	77,359	77,459
	Bangka	70,43/70,77	71,13	71,48	71,83	72,18	72,53
	Bangka Tengah	68,76	68,98	69,22	69,46	69,73	70,00
	Bangka Barat	67,60/68,94	69,75	70,55	71,32	72,23	72,3
	Bangka Selatan	64,57	64,82	65,12	65,39	65,74	66,05
	Belitung	70,81	71,05	71,29	71,53	71,77	72,01
	Belitung Timur	69,85	70,09	70,33	70,57	70,81	71,05



BAB IX

PENUTUP



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022**

BAB IX

PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Penyusunan dokumen RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 mengacu pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan Rancangan RPJMD Tahun 2022-2027. Bilamana RPJMD Tahun 2022-2027 belum ditetapkan, maka target indikator kinerja program dan pagu indikatif Tahun 2022 dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur periode Tahun 2022-2027 dengan tujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Implementasi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 diperlukan komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten berdasarkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam melaksanakan pembangunan agar mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022 ini dengan sebaik-baiknya;
2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Tahun 2017-2022 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, yang selanjutnya sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022;
4. Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2017-2022 dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Perangkat Daerah dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
5. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung wajib untuk mempublikasikan RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD. Dengan demikian, masing-masing anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi/reses ke daerah pemilihannya, sejalan dengan kerangka kebijakan dan program dalam RPJMD;
6. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota wajib mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;

7. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban melakukan pembinaan, konsultasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
8. Untuk menjaga sinergisitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten/Kota maka Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban memberikan pembinaan, konsultasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota; dan
9. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta evaluasi hasil terhadap dokumen RPJMD 2017-2022.

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan dibuat sebagai landasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh pelaku pembangunan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini merupakan arah dan target kinerja pembangunan yang akan dicapai lima tahun mendatang. Dokumen ini disusun mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RTRWP) Tahun 2014 – 2034.

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mengingat RPJMD Tahun 2017-2022 akan berakhir pada tahun 2022, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan tahun 2023, RPJMD Tahun 2017-2022 tetap digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Program APBD Tahun 2023.

Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah: ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

Untuk pencapaian visi tersebut, dilaksanakan melalui 6 (enam) misi, yaitu

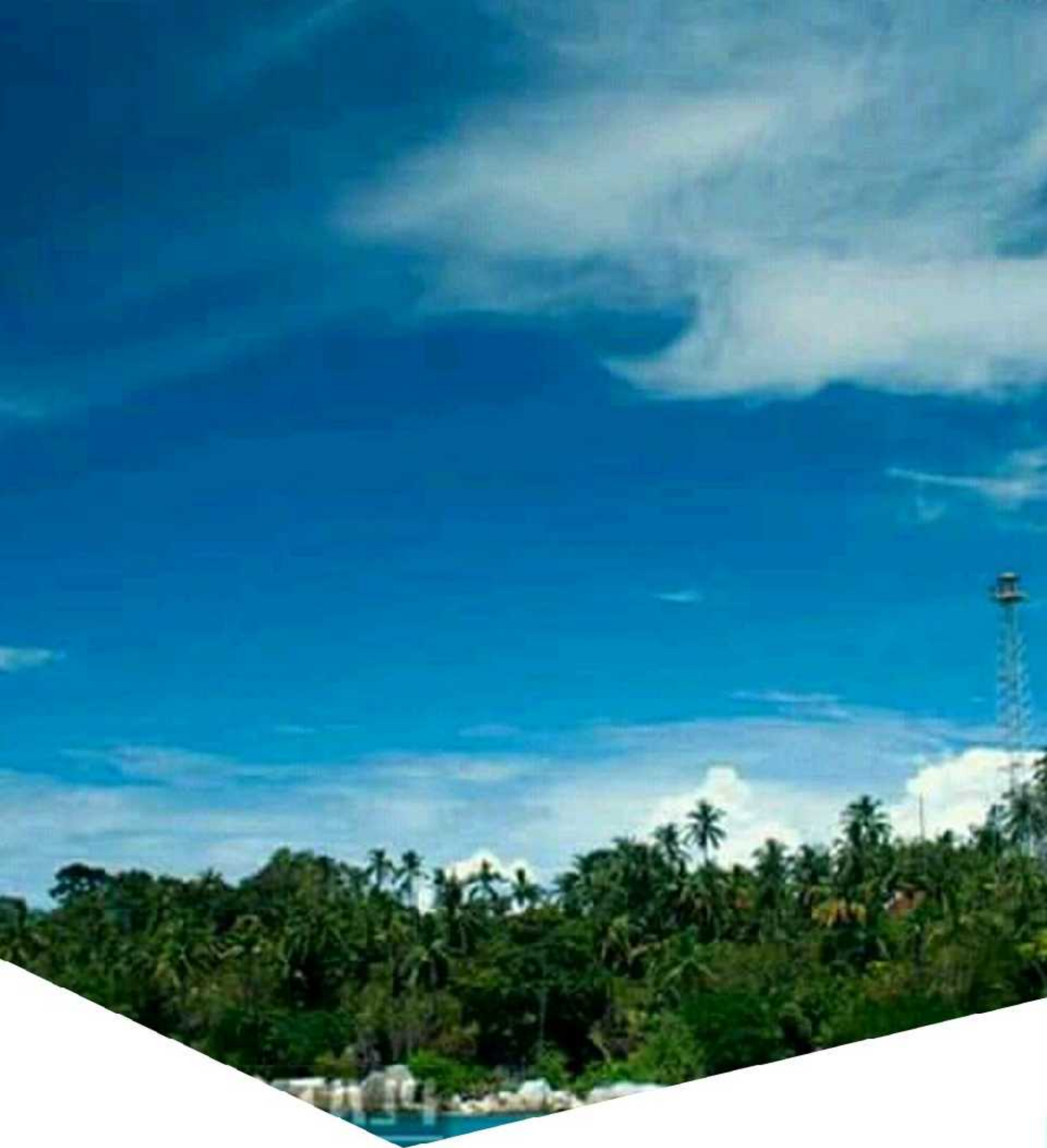
1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu Tahun 2017-2022.

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335
PANGKALPINANG 33149